Lembaga Manajemen Aset Negara

Laporan Tahunan 2022

Optimalisasi APBN 2022 untuk Ketahanan dan Akselerasi Ekonomi Nasional

Annual Report 2022

Optimizing the 2022 State Budget for National Economic Resilience and Acceleration

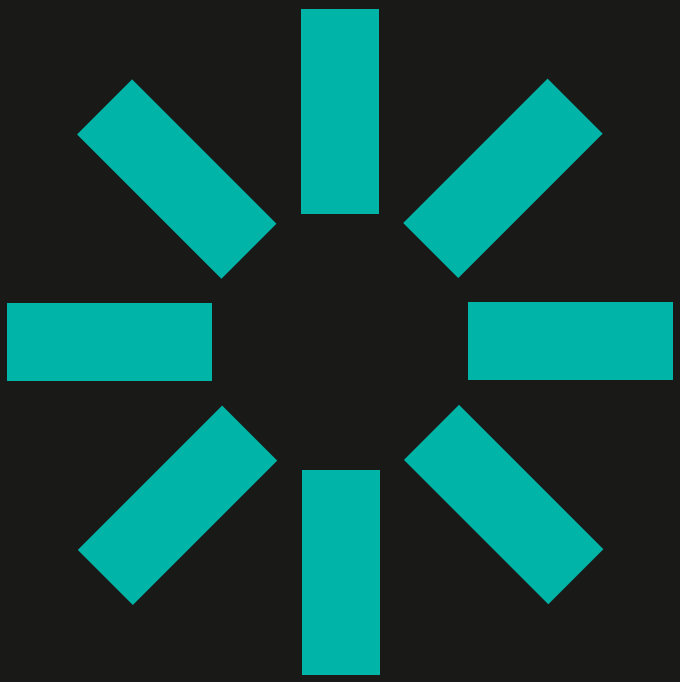

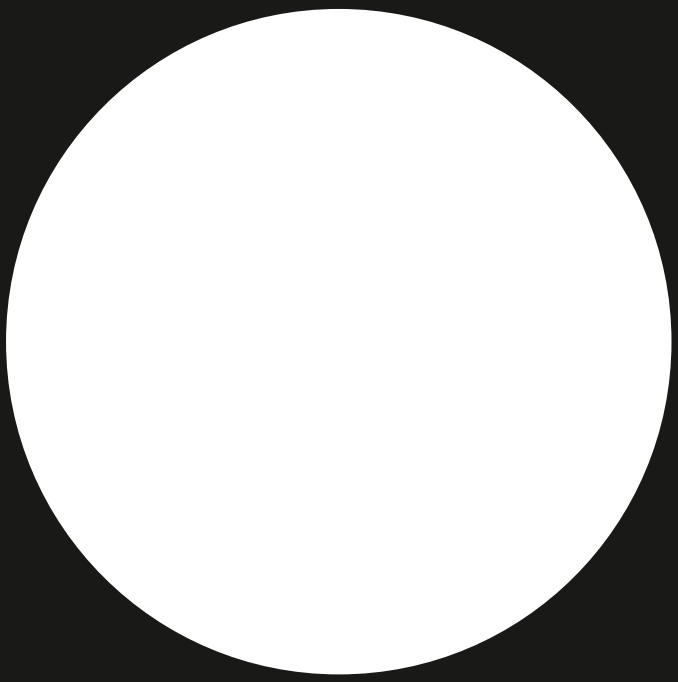

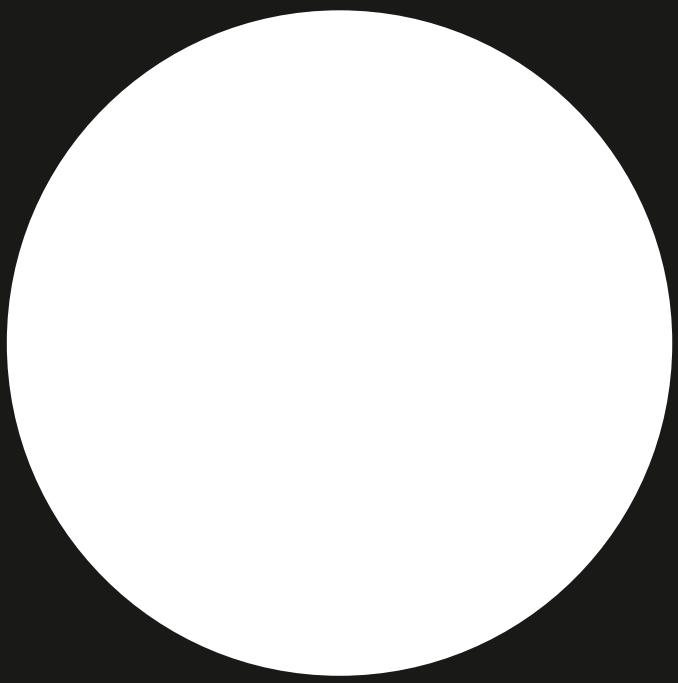

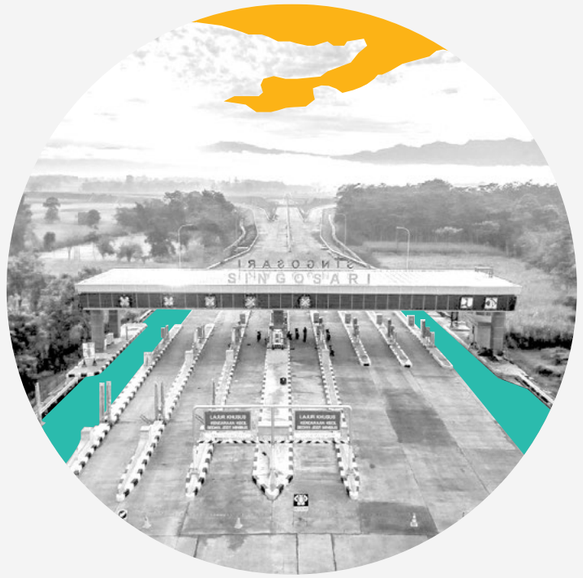

Sanggahan dan Batasan Tanggung Jawab
Disclaimer

Laporan Tahunan ini memuat pernyataan kondisi keuangan, hasil operasi, kebijakan, proyeksi, rencana, strategi, serta tujuan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), yang digolongkan sebagai pernyataan ke depan dalam pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku, kecuali hal-hal yang bersifat historis.

Pernyataan-pernyataan tersebut memiliki prospek risiko, ketidakpastian, serta dapat mengakibatkan perkembangan aktual secara material berbeda dari yang dilaporkan. Pernyataan-pernyataan prospektif dalam Laporan Tahunan ini dibuat berdasarkan berbagai asumsi mengenai kondisi terkini dan kondisi mendatang serta lingkungan bisnis di mana LMAN menjalankan kegiatan usaha. LMAN tidak menjamin bahwa dokumen-dokumen yang telah dipastikan keabsahannya akan membawa hasil-hasil tertentu sesuai harapan.

Laporan Tahunan ini memuat kata "LMAN" dan "Lembaga", yang didefinisikan sebagai Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) yang menjalankan kegiatan usaha utama dalam bidang pelaksanaan optimalisasi aset negara serta pendanaan lahan infrastruktur Proyek Strategis Nasional. Adakalanya kata "kami" digunakan atas dasar kemudahan untuk menyebut Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).

This Annual Report comprises statements of financial condition, operation results, policies, projections, plans, strategies, and objectives of the State Asset Management Agency (referred to as the Indonesian abbreviation LMAN), which are classified as forward-looking statements in the implementation of applicable laws, except for historical matters.

These statements have prospects of risk, uncertainty, and may result in actual developments that are materially different from those reported. Prospective statements in this Annual Report are made based on various assumptions regarding current and future conditions as well as the business environment in which LMAN carries out its business activities. LMAN does not guarantee that documents with confirmed validities will bring certain results as expected.

This Annual Report contains the words "LMAN" and "Institution", defined as the State Asset Management Institution (LMAN) that carries out primary business activities in optimizing state assets and financing infrastructure land for the National Strategic Projects. Sometimes the word "we" is used for convenient reasons to refer to the State Asset Management Agency (LMAN).

Tema
Theme

Pada tahun 2022, optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi fokus utama pemerintah untuk memperkuat ketahanan dan akselerasi ekonomi nasional. Dalam upaya ini, pemerintah telah mengambil beberapa langkah strategis untuk memaksimalkan penggunaan anggaran dan meningkatkan kinerja ekonomi negara.

Langkah pertama adalah dengan mengoptimalkan pengelolaan APBN melalui peningkatan efisiensi dan transparansi dalam proses pengelolaan anggaran. Pemerintah akan memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang digunakan akan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan meningkatkan produktivitas ekonomi nasional. Langkah kedua adalah dengan memberikan prioritas pada sektor-sektor ekonomi yang memiliki potensi besar untuk tumbuh dan berkembang, seperti industri manufaktur, pertanian, pariwisata, dan sektor digital. Pemerintah akan mengalokasikan anggaran yang lebih besar pada sektor-sektor tersebut untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak. Langkah ketiga adalah dengan mendorong investasi dari dalam dan luar negeri untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah akan memberikan insentif yang menarik bagi investor untuk menanamkan modalnya di sektor-sektor yang memiliki potensi besar untuk berkembang.

Dengan langkah-langkah tersebut, pemerintah terbukti dapat memperkuat ketahanan ekonomi nasional dan mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di masa depan. Dengan memaksimalkan penggunaan anggaran dan mengalokasikan sumber daya pada sektor-sektor yang memiliki potensi besar, pemerintah akan mampu menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat posisi Indonesia sebagai kekuatan ekonomi regional dan global.

Oleh karena itu, tema *Annual Report* LMAN Tahun 2022 adalah "Optimalisasi APBN 2022 untuk Ketahanan dan Akselerasi Ekonomi Nasional".

In 2022, optimizing the State Budget becomes the government's key focus to strengthen resilience and accelerate the national economy. In this effort, the government has taken several strategic steps to maximize the use of the budget and improve the country's economic performance.

The first step is to optimize the management of the State Budget by increasing efficiency and transparency in the budget management process. The government will ensure that every rupiah of the budget used will provide maximum benefits for the society and increase the productivity of the national economy. The second step is to give priority to economic sectors that have great potential for growth and development, such as the manufacturing industry, agriculture, tourism, and the digital sector. The government will allocate a larger budget in these sectors to support sustainable economic growth and create more jobs. The third step is to encourage investment from within and outside the country to strengthen national economic growth. The government will provide attractive incentives for investors to invest in sectors that have great potential for growth.

With these steps, the government is proven to be able to strengthen the resilience of the national economy and accelerate sustainable economic growth in the future. By maximizing the use of the budget and allocating resources to sectors that have great potential, the government will be able to create more jobs, improve people's welfare, and strengthen Indonesia's position as a regional and global economic power.

Therefore, the theme of the 2022 LMAN Annual Report is "Optimizing the 2022 State Budget for National Economic Resilience and Acceleration".

Daftar Isi

Table of Content

1 Kilas Kinerja 2022
Performance Highlights 2022

9 **Nilai-Nilai Kementerian Keuangan**
The Values of the Ministry of Finance

10 **Nilai-Nilai LMAN**
LMAN Values

12 **Budaya Kerja LMAN**
LMAN Work Culture

16 **Ikhtisar Keuangan**
Financial Highlights

20 **Ikhtisar Capaian Kinerja LMAN**
Overview of the Performance of LMAN

22 **Peristiwa Penting**
Event Highlights

25 **Penghargaan dan Sertifikasi**
Awards & Certifications

2 Laporan Manajemen
Management Report

27 **Efektivitas Investasi Pemerintah dalam Pengelolaan Aset di LMAN**
Effectiveness of Goverment Investment in the Asset Management by LMAN

32 **Laporan Direktur Utama**
Report From The President Director

39 **Laporan Dewan Pengawas**
Report From The Board of Supervisors

44 **Pertanggungjawaban Laporan Tahunan 2022**
Statement of Responsibility Regarding the 2022 Annual Report

3 Profil Perusahaan
Company Profile

48 **Profil Perusahaan**
Company Profile

49 **Sekilas LMAN**
LMAN at a Glance

52 **Jejak langkah**
Milestones

53 **Rencana Strategis**
Strategic Plans

54 **Visi Misi Perusahaan**
Vision and Mission of the Company

56 **Strategi 3-P LMAN**
3-P Strategy of LMAN

57 **Peta Strategi LMAN**
Map of LMAN's Strategy

58 **Kegiatan Layanan LMAN**
LMAN Services and Activities

59 **Profil Dewan Pengawas**
Profile of the Board of Supervisors

63 **Profil Direksi**
Profile of the Board of Directors

68 **Pejabat Utama LMAN**
LMAN Key Officers

69 **Struktur Organisasi**
Organization Structure

70 **Aset yang Diserahkelolakan ke LMAN**
Assets Transferred to LMAN

79 **Proyek Strategis Nasional yang Pendanaan Lahannya Dilakukan oleh APBN Melalui LMAN**
National Strategic Project with Land Funding Provided by the State Budget through LMAN

4 Tinjauan Pendukung Bisnis
Business Support Overview

82 **Sumber Daya Manusia**
Human Resources

86 **Dewan Pengawas, Direksi, Manajemen LMAN Tahun 2022**
Board of Supervisors, Board of Directors and Management of LMAN 2022

88 **Profil SDM BLU LMAN**
LMAN HR Profile

108 **Pengembangan Teknologi Informasi**
Development of Information Technology

5 **Analisis dan Pembahasan Manajemen**
Management Discussion and Analysis

116 **Tinjauan Ekonomi**
Overview on Economic Condition

119 **Tinjauan Industri Properti**
Property Industry Overview

122 **Tinjauan Pendapatan dan Beban Operational**
Analysis of Operational Revenue and Expenses

126 **Laporan Realisasi Anggaran**
Budget Realization Report

134 **Laporan Neraca**
Balance Report

6 **Tata Kelola Perusahaan**
Good Corporate Governance

140 **Tata Kelola Perusahaan**
Good Corporate Governance

170 **Dewan Pengawas LMAN**
LMAN Supervisory Board

189 **Sistem Pengendalian Internal**
Internal Control System

7 **Pembangunan Berkelanjutan**
Sustainable Development

196 **Pembangunan Berkelanjutan**
Sustainable Development

Nilai-Nilai Kementerian Keuangan
The Values of the Ministry of Finance

1 **Integritas** Integrity	Integritas berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar, serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.	Integrity in thinking, talking, behaving and acting properly and appropriately, as well as upholding ethical codes and moral principles.
2 **Profesionalisme** Professionalism	Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.	Working thoroughly and accurately on the basis of the best competency with full responsibility and high commitment.
3 **Sinergi** Synergy	Membangun dan memastikan hubungan kerja sama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.	Building and ensuring productive internal cooperation as well as harmonious partnerships with stakeholders to produce beneficial and quality works.
4 **Pelayanan** Service	Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman.	Providing services that meet stakeholders' satisfaction and are conducted wholeheartedly, transparently, promptly, accurately, and safely.
5 **Kesempurnaan** Perfection	Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.	Making constant efforts to improve all fields in order to become and provide the best.

LMAN menerapkan nilai-nilai organisasi yang menjadi panduan bagi organisasi dan seluruh pegawai dalam berinteraksi dengan sesama karyawan di lingkungan lembaga, dengan mitra, dan dengan seluruh pemangku kepentingan lembaga. Nilai-nilai LMAN terdiri dari Holistik, Integritas, Sinergi Mencapai Kontribusi, Profesionalitas, Kehati-hatian, Layanan Prima, dan Determinasi. Budaya kerja LMAN adalah Energi Positif, Perbaikan Berkelanjutan, Kerja Tuntas, dan Saling Menghormati. Nilai-nilai dan budaya kerja LMAN sebagaimana disebutkan di atas disingkat menjadi HI-SPEED EMPIRE.

LMAN implements organizational values that serve as a guide for the organization and all employees in their interaction with colleagues in the institution, with partners, and with all stakeholders. The values of LMAN are Holistic, Integrity, Synergy for Contribution, Professionalism, Prudence, Excellent Service, and Determination. LMAN's work culture comprises Positive Energy, Continuous Improvement, Thorough Performance, and Mutual Respect. The organizational values and work culture mentioned above can be abbreviated into HI-SPEED EMPIRE.

Masing-masing nilai tersebut memiliki makna sebagai berikut:

Each of these values has the following meanings:

1

Holistik
Holistic

Seluruh Sumber Daya Manusia (SDM) LMAN melakukan pendekatan yang menyeluruh, mengupayakan yang terbaik, dan mencari ide yang inovatif untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dan tantangan.

All human resources at LMAN take a comprehensive approach, strive for the best, and seek innovative ideas to solve various problems and challenges.

2

Integritas
Integrity

Seluruh SDM LMAN berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak dengan baik dan benar, serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral, bahkan pada saat tidak ada orang yang melihat.

All human resources at LMAN think, talk, behave and act properly and appropriately, as well as uphold ethical codes and moral principles, even when no one is watching.

3

Sinergi Mencapai Kontribusi
Synergy for Contribution

Seluruh SDM LMAN membangun dan memastikan kerja tim internal yang produktif serta hubungan kemitraan/ sinergi yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menghasilkan kontribusi kepada negara yang bermanfaat dan berkualitas. Dalam menjaga semangat bersinergi, setiap individu menghormati adanya perbedaan dan memperlakukan setiap orang dengan penuh hormat dan dengan cara yang elegan dan penuh etika dalam mengupayakan mencapai tujuan bersama.

All human resources at LMAN build and ensure productive internal teamwork and harmonious partnership/synergy with stakeholders to produce meaningful and quality contributions to the country. In maintaining the spirit of synergy, every individual respects differences and treats everyone with respect and with elegant and ethical manner in striving to achieve common goals.

4

Profesionalitas
Professionalism

Seluruh SDM LMAN bekerja secara akuntabel dan penuh tanggung jawab atas dasar komitmen dan kompetensi terbaik, berupaya menjaga tingkat kualitas, kecepatan, dan akurasi terbaik dalam menyelesaikan berbagai tugas secara tuntas.

All human resources at LMAN work with accountability and full responsibility on the basis of the best commitment and competence, striving to maintain the highest level of quality, speed, and accuracy in completing various tasks thoroughly.

5

Kehati-hatian
Prudence

Seluruh SDM LMAN mengawal setiap inisiatif dan keputusan yang akan diambil dengan pertimbangan kehati-hatian dengan mengutamakan yang terbaik bagi keuangan negara, menghindari risiko manfaat yang hilang, serta menjunjung tinggi kepatuhan dan ketaatan terhadap hukum.

All human resources at LMAN oversee every initiative and decision that are to be taken with careful consideration by prioritizing the best for state finances, avoiding opportunity loss, and upholding obedience and compliance with the law.

6

Layanan Prima
Excellent Service

Seluruh SDM LMAN memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, ikhlas/tulus, transparan, cepat, akurat, dan aman.

All human resources at LMAN provide services that meet the stakeholders' satisfaction and are carried out wholeheartedly, sincerely, transparently, promptly, accurately, and safely.

7

Determinasi
Determination

Seluruh SDM LMAN memberikan ide yang dapat diterjemahkan dalam langkah-langkah nyata dan melakukan pengawalan dalam pelaksanaan sehingga dapat diwujudkan dengan hasil nyata. Setiap individu harus memiliki keteguhan, semangat kerja, dan daya juang untuk mencapai hasil terbaik dalam menjalankan mandat.

All human resources at LMAN provide ideas that can be translated into concrete actions and oversee the implementation so that they can be materialized with actual results. Every individual must have determination, work enthusiasm, and resilience to achieve the best results in carrying out the mandate.

Budaya Kerja LMAN
LMAN Work Culture

Energi Positif
Positive Energy

Seluruh SDM LMAN berkonsentrasi pada energi positif di dalam setiap individu, dengan pikiran, perilaku, dan ucapan yang positif, semangat kerja tinggi, prasangka baik untuk menghasilkan ide-ide terbaik, semangat kerja yang ikhlas dan berdedikasi bagi LMAN, menerjemahkan hambatan menjadi tantangan, dan dapat menjaga kebertahanan, daya juang tinggi, dan semangat pantang mundur dalam mencapai tujuan organisasi.

All human resources at LMAN focus on the positive energy within every individual, with positive thoughts, behavior, and talk, high work spirit, good prejudice to produce the best ideas, sincere work spirit and dedication for LMAN, transforming obstacles into challenge, and maintaining resilience, high tenacity, and persistence in achieving organizational goals.

Perbaikan Berkelanjutan
Continuous Improvement

Seluruh SDM LMAN memiliki keinginan meningkatkan kinerja terus-menerus, menghasilkan kinerja dan kualitas layanan yang lebih baik, perbaikan dan pembelajaran berkelanjutan, keinginan untuk terus belajar, mengembangkan, dan meningkatkan keterampilan, pengetahuan, kemampuan dan kompetensi agar dapat terus belajar, mengembangkan, dan meningkatkan keterampilan, pengetahuan, kemampuan, dan kompetensi agar dapat terus adaptif terhadap berbagai peluang dan tantangan baru yang dihadapi organisasi, tidak mudah puas dengan yang sudah dipelajari, semangat pantang menyerah serta terus berusaha yang terbaik.

All human resources at LMAN have the urge to continuously improve performance, produce better performance and service quality, continuous improvement and learning, motivation to keep on learning, developing and improving skills, knowledge, capacities and competencies so they can continue to learn, develop, and improve their skills, knowledge, abilities, and competencies in order to be constantly adaptive to various new opportunities and challenges faced by the organization, not easily contented with what has been learned, relentless and keep on striving for the best.

Kerja Tuntas
Mission Accomplished

Seluruh SDM LMAN memiliki rasa memiliki terhadap organisasi, melaksanakannya dengan sungguh-sungguh dan dengan upaya terbaik sampai tugas tersebut tuntas, membuahkan hasil yang telah direncanakan atau lebih baik dengan cara yang optimal dan ditempuh melalui kerja keras dan kerja cerdas.

All human resources at LMAN have a sense of ownership of the organization, conduct it seriously and with their best efforts until the task is completed, resulting in what has been planned or better outcome in an optimal way and pursued through hard work and smart work.

Saling Menghormati
Respect One Another

Seluruh SDM LMAN bekerja dengan baik dan memberikan layanan terbaik, dan setiap individu bekerja sama dengan sepenuh hati dan tulus ikhlas, saling menghargai perbedaan latar belakang pekerjaan, pendidikan, suku, agama, dan ras, serta menghormati satu sama lain tanpa kecuali, berlaku adil, menginspirasi, dan memberi jalan agar setiap individu memberikan potensi terbaik bagi lembaga.

All human resources at LMAN work well and provide the best service, and every individual collaborate wholeheartedly and sincerely, value each other's differences in work, educational, ethnic, religious and racial backgrounds, and respect one another without exception, act fairly, inspire, and provide a way for every individual to contribute their best potential to the organization.

Kilas Kinerja 2022

2022 Performance Highlights

Ikhtisar Keuangan
Financial Highlight

Realisasi Anggaran
Budget Realization

Keterangan Description	REF	2022 Anggaran Budget (Rp)	2022 Realisasi Realization (Rp)	2022 Realisasi Realization (%)	2021 Realisasi Realization (Rp)	2021 Realisasi Realization (%)	Kenaikan/(Penurunan) Realisasi Increase/(Decrease) in Realization Rp	 %
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH STATE REVENUE & GRANTS								
Pendapatan dari Pengelolaan BMN pada Pengelola Barang Revenue from Property Management	*D.1*	**475.503.000.000**	**806.867.501.232**	**169,69%**	**740.742.197.548**	**100,45%**	**66.125.303.684**	**8,93%**
Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU Revenue From Deposit In Bank	*D.1*	**1.241.609.000.000**	**1.298.930.830.111**	**104,62%**	**1.222.547.240.545**	**111,06%**	**76.383.589.566**	**6,25%**
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya Revenues from Disposal of Other Assets	*D.1*	**-**	**6.960.000.000**	**0,00%**	**146.654.999**	**0,00%**	**6.813.345.001**	**4645,83%**
Pendapatan dari Pemindahtanganan Peralatan dan Mesin Revenue from the Transfer of Equipment and Machinery		**-**	**32.555.555**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**32.555.555**	**100,00%**
Pendapatan BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya Income from Other Provider of Goods and Services	*D.1*	**600.000.000**	**1.684.974.362**	**280, 83%**	**865.501.546**	**176,63%**	**819.472.816**	**94,68%**
Komisi, Potongan, dan/atau Bentuk Lain Sebagai Akibat dari Pengadaan Barang/Jasa oleh BLU Commission, Deduction, and/or Other Forms of Results of Goods/ Services Procurement by BLU	*D.1*	**-**	**90.491.597**	**0,00%**	**15.683.170**	**0,00%**	**74.808.427**	**477,00%**
Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu Refund of Expenditure of Previous Fiscal Year	*D.1*	**-**	**934.500**	**0,00%**	**16.401.959**	**0,00%**	**(15.467.459)**	**-94,30%**
Pendapatan Lain-lain BLU Misc. Revenue from the Public Service Agency	*D.1*	**-**	**174.572.527**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**174.572.527**	**100,00%**
Total Pendapatan LRA (A) Total Income of the Financial Report		**1.717.712.000.000**	**2.114.741.859.884**	**123,11%**	**1.964.333.679.767**	**106,83%**	**150.408.180.117**	**7,66%**
BELANJA OPERATING EXPENDITURE								
Belanja Barang Goods Expenditure	*D.2 ; D.3*	**126.593.670.000**	**123.680.808.788**	**97,70%**	**109.279.356.860**	**94,29%**	**14.401.451.928**	**13,18%**
Belanja Modal Capital Expenditure	*D.2 ; D.4*	**6.921.530.000**	**5.766.317.343**	**83,31%**	**5.360.247.616**	**78,03%**	**406.069.727**	**7,58%**
Total Belanja (B) Total Expenditure		**133.515.200.000**	**129.447.126.131**	**96,95%**	**114.639.604.476**	**93,38%**	**14.807.521.655**	**12,92%**
Surplus/(Defisit) LRA (C=A-B) Surplus/(Deficit) LRA		**1.584.196.800.000**	**1.985.294.733.753**	**125,32%**	**1.849.694.075.291**	**107,80%**	**135.600.658.462**	**7,33%**
Penerimaan Pembiayaan Financing Revenue								
Total Penerimaan Pembiayaan (D) Total Financing Revenue		**-**	**-**	**0,00%**			**-**	**0,00%**
Pengeluaran Pembiayaan Financing Expenditure								
Total Pengeluaran Pembiayaan (E) Total Financing Expenditure		**-**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**
Pembiayaan NETO (F=D-E) Net Financing		**-**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**
Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/(SiKPA) Surplus/Deficit of Budget Financing	*D.4*	**1.584.196.800.000**	**1.985.294.733.753**	**125,32%**	**1.849.694.075.291**	**107,80%**	**135.600.658.462**	**7,33%**

Neraca
Balance

Uraian Description	REF	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) Increase /Decrease Rp	 %
ASET / ASSET					
ASET LANCAR / CURRENT ASSETS					
Kas Lainnya dan Setara Kas Other Cash and Cash Equivalents	*F.2.a.1*	4.507.074.801	3.653.608.818	853.465.983	23,36%
Kas pada Badan Layanan Umum Cash in Public Service Agencies	*F.2.a.2*	1.253.058.128.796	971.491.377.133	281.566.751.663	28,98%
Investasi Jangka Pendek BLU Short-Term Investments in Public Service Agencies	*F.2.a.3*	12.989.662.159.695	11.292.926.733.164	1.696.735.426.531	15,02%
Pendapatan yang Masih Harus Diterima Unearned Revenue	*F.2.a.4*	80.514.180.074	47.384.143.724	33.130.036.350	69,92%
Piutang Jangka Pendek Short-Term Receivables					
- Piutang dari Kegiatan Operasional BLU Receivables from Public Service Agencies' Operational Acitivities		114.335.342.322	64.263.409.559	50.071.932.763	77,92%
- (Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dari Kegiatan Operasional BLU) (Allowance for Doubtful Accounts from Public service Agencies' Operational Activities)	*F.2.a.5.a)*	(4.578.121.511)	(321.317.047)	(4.256.804.464)	1324,80%
- Piutang dari Kegiatan Operasional BLU-Bersih Net Receivables from Public Service		109.757.220.811	63.942.092.512	45.815.128.299	71,65%
- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Current Portion of Long-Term Receivables		155.255.842.716	-	155.255.842.716	0,00%
- (Penyisihan Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Tidak Tertagih) (Allowance for Doubtful Current Portion of Long-Term Receivables)	*F.2.a.5.c)*	(1.552.558.427)	-	(1.552.558.427)	0,00%
- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang-Bersih Net Current Portion of Long-Term Receivables	*F.2.a.5.b)*	153.703.284.289	-	153.703.284.289	0,00%
- Piutang Lainnya Other Receivables		-	1.859.450.374	(1.859.450.374)	-100,00%
Piutang Jangka Pendek Bersih Net Short-Term Receivables		263.460.505.100	65.801.542.886	197.658.962.214	300,39%
Persediaan Barang Konsumsi Inventory of Cosumable Goods	*F.2.a.6*	294.632.776	344.500.216	(49.867.440)	-14,48%
Jumlah Aset Lancar Total Current Assets	*F.2.a*	14.591.496.681.242	12.381.601.905.941	2.209.894.775.301	17,85%
ASET TETAP / FIXED ASSET					
Tanah Land		72.677.020.000	72.677.020.000	-	0,00%
Peralatan dan Mesin Machinery and Equipment		24.527.642.302	23.290.755.827	1.236.886.475	5,31%
Gedung dan Bangunan Buildings and Structures		37.173.396.388	37.564.171.388	(390.775.000)	-1,04%
Konstruksi Dalam Pengerjaan Construction in Progress	*F.2.b*	4.283.051.849	304.416.000	3.978.635.849	1306,97%
Aset Tetap Lainnya Other Fixed Assets		66.409.200	66.409.200	-	0,00%
(Akumulasi Penyusutan Aset Tetap) (Accumulated Depreciation of Fixed Assets)		(18.054.849.666)	(13.979.530.522)	(4.075.319.144)	29,15%
Jumlah Aset Tetap Total Fixed Assets	*F.2.b*	120.672.670.073	119.923.241.893	749.428.180	0,62%
PROPERTI INVESTASI / INVESTMENT PROPERTY					
Properti Investasi Investment Property		29.994.023.216.836	-	29.994.023.216.836	0,00%
Properti Investasi Dalam Pengerjaan Investment Property Under Construction	*F.2.c*	5.055.677.245	-	5.055.677.245	0,00%
(Akumulasi Penyusutan Properti Investasi) Accumulated Depreciation of Investment Property)		(18.180.688.477.231)	-	(18.180.688.477.231)	0,00%
Jumlah Properti Investasi Total Investment Property	*F.2.c*	11.818.390.416.850	-	11.818.390.416.850	0,00%

PIUTANG JANGKA PANJANG / LONG-TERM RECEIVABLES					
Piutang Jangka Panjang Long-Term Receivables	*F.2.a.6.c)*	1.242.046.741.732	-	1.242.046.741.732	0,00%
(Penyisihan Piutang Jangka Panjang) (Allowance for Doubtful Long-Term Receivables)		(12.420.467.417)	-	(12.420.467.417)	0,00%
Jumlah Piutang Jangka Panjang Total Long-Term Receivables	*F.2.a.6)*	1.229.626.274.315	-	1.229.626.274.315	0,00%
ASET LAINNYA / OTHER ASSETS					
Aset Tak Berwujud Intangible Assets		1.461.309.700	1.849.950.700	(388.641.000)	-21,01%
(Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud) (Accumulated Amortization of Intangible Assets)	*F.2.d.1)*	(796.647.703)	(431.320.278)	(365.327.425)	84,70%
Dana Perhitungan Fihak Ketiga Third-Party Calculation Funds	*F.2.d.2)*	1.988.696.871	1.184.556.707	804.140.164	67,89%
Dana Kelola Badan Layanan Umum Managed Funds of the Public Service Agency	*F.2.d.3)*	1.286.798.335.585	1.303.854.460.983	(17.056.125.398)	-1,31%
Dana Jangka Panjang Pendanaan Tanah PSN Long-Term Land Financing Funds	*F.2.d.4)*	28.798.237.380.310	16.003.441.298.002	(12.794.796.082.308)	79,95%
Aset Lain-lain Other Assets		798.101.009.842	29.654.806.675.752	(28.856.705.665.910)	-97,31%
(Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain) (Accumulated Depreciation of Other Assets)	*F.2.d.5)*	(416.104.050.241)	(17.253.582.841.962)	16.837.478.791.721	-97,59%
Jumlah Aset Lainnya Total Other Assets	*F.2.d*	30.469.686.034.364	29.711.122.779.904	758.563.254.460	2,55%
				-	0,00%
JUMLAH ASET / TOTAL ASSETS	*F.2*	58.229.872.076.844	42.212.647.927.738	16.017.224.149.106	37,94%
KEWAJIBAN DAN EKUITAS / LIABILITIES AND EQUITY					
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK / SHORT-TERM LIABILITIES					
Utang kepada Pihak Ketiga Debt to Third Parties	*F.2.e.1)*	4.745.924.380	4.338.248.840	407.675.540	9,40%
Pendapatan Diterima di Muka Advance Income Received	*F.2.e.2)*	31.970.377.122	56.122.646.400	(24.152.269.278)	-43,03%
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek Total Short-Term Liabilities	*F.2.e*	36.716.301.502	60.460.895.240	(23.744.593.738)	-39,27%
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG / LONG-TERM LIABILITIES					
Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN Long-Term debt of the Public Service Agency to the State	*F.2.e.3)*	30.298.237.380.317	17.505.300.748.380	12.792.936.631.937	73,08%
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang Total Long-Term Liabilities	*F.2.e*	30.298.237.380.317	17.505.300.748.380	12.792.936.631.937	73,08%
EKUITAS / EQUITY					
Ekuitas Equity	*F.2.f;H*	27.894.918.395.025	24.646.886.284.118	3.248.032.110.907	13,18%
Jumlah Ekuitas Total Equity	*F.2.f;H*	27.894.918.395.025	24.646.886.284.118	3.248.032.110.907	13,18%
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS TOTAL LIABILITIES AND EQUITY	*F.2*	58.229.872.076.844	42.212.647.927.738	16.017.224.149.106	37,94%

Ikhtisar Capaian Kinerja LMAN
Overview of the Performance of LMAN

Nilai Kerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja LMAN tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) LMAN adalah sebesar 113,58%. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif:

Organizational Work Values

Measurement of LMAN performance achievements in 2022 is carried out by comparing targets (plans) with the realization of Key Performance Indicators (KPI) in each perspective. From the results of these performance measurements, the data gained was that the achievement of LMAN's Organizational Performance Index was 113.58%. This value comes from the performance achievements in each perspective:

Perspektif
Perspective

Nilai Kinerja Organisasi s.d. 31 Desember 2022
Organizational Performance Value as per 31 December 2022

19 Total IKU / KPI

18 IKU / KPI | 1 IKU / KPI | 0 IKU / KPI

(25%) Stakeholder

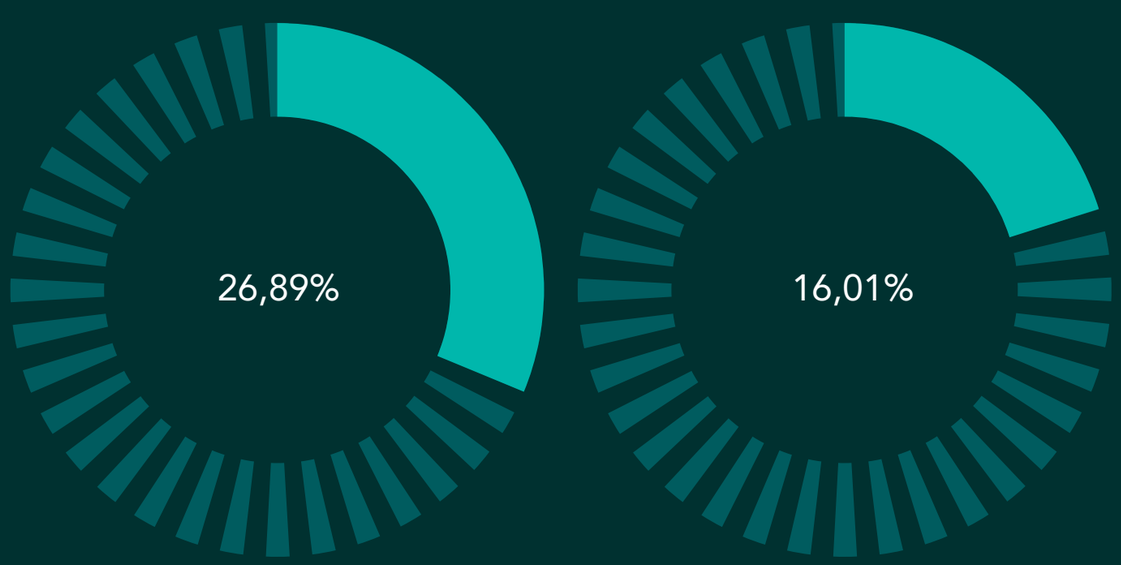

(15%) Customer

(30%) Internal Process

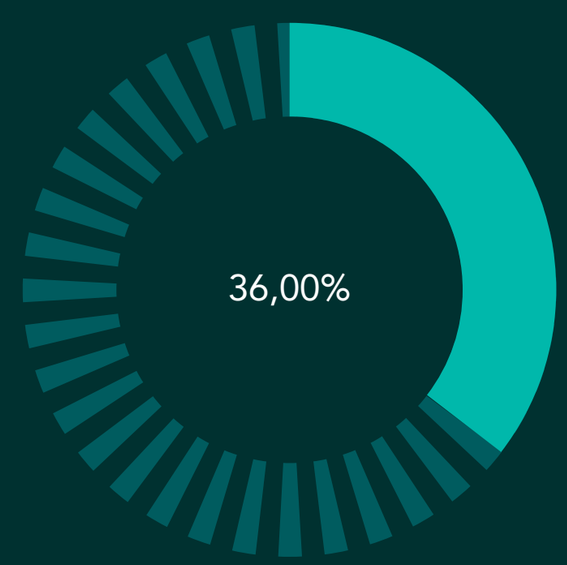

(30%) Learning and Growth

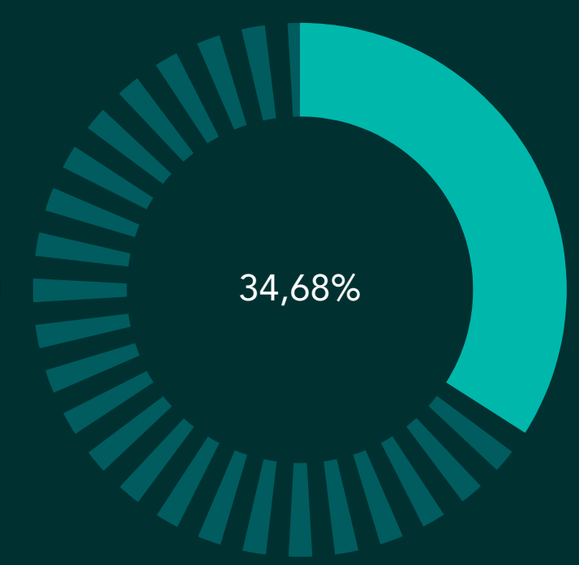

Catatan Status NKO / NKO Status Records
- 100 < X < 120 = memenuhi ekspektasi / meet expectations
- 80 < X < 100 = belum memenuhi ekspektasi / has not met expectations
- X < 80 = tidak memenuhi ekspektasi / does not meet expectations

NKO > 113,58%

Peristiwa Penting
Event Highlight

Road to G20: Infrastruktur untuk Indonesia
Road to G20: Infrastructure for Indonesia

Lembaga Manajemen Aset Negara menginisiasi kegiatan webinar bertajuk "Infrastruktur untuk Indonesia." Kegiatan ini menjadi rangkaian road to G20 dengan mengedepankan isu peran pembangunan infrastruktur dalam menyokong pemulihan ekonomi dan mendukung pembangunan berkelanjutan, selaras dengan salah satu isu strategis yang menjadi tema pembahasan dalam G20.

Pada 2016-2021, sebanyak 128 Proyek Strategis Nasional (PSN) telah diselesaikan dengan nilai investasi mencapai Rp716,4 triliun dan menghadirkan berbagai manfaat, di antaranya adalah pembangunan konektivitas melalui jalan tol, jalur kereta api serta bandar udara, ketersediaan air bersih, sumber energi listrik serta hulu migas dan pariwisata. Dari sisi dukungan APBN, pada 2016-2021 telah dikucurkan pendanaan pengadaan lahan kepada LMAN dari APBN senilai Rp105,62 triliun, dan di APBN Tahun Anggaran 2022, anggaran dana pengadaan lahan tercatat senilai Rp28,84 triliun. Direktur Utama LMAN Basuki Purwadi mengatakan, "Sebagai wujud komitmen LMAN sebagai bagian dari kolaborasi ekosistem pembangunan infrastruktur, LMAN akan terus mendorong dan menjunjung tinggi sinergi bersama dengan seluruh instansi terkait, serta terus berupaya melaksanakan inovasi yang diperlukan agar pendanaan pengadaan lahan dapat terlaksana sesuai tata kelola untuk turut mendorong percepatan pembangunan infrastruktur yang menghadirkan manfaat bagi Indonesia."

The State Asset Management Agency initiated a webinar entitled "Infrastructure for Indonesia." This activity is part of the road to G20 by prioritizing the issue of the role of infrastructure development in supporting economic recovery and supporting sustainable development, in line with one of the strategic issues that became the theme of discussion at the G20.

From 2016 to 2021, 128 National Strategic Projects have been completed with an investment value of Rp716.4 trillion and offered various benefits, including the development of connectivity through toll roads, railways and airports, availability of clean water, sources of electrical energy, as well as upstream oil and gas and tourism. In terms of the State Budget support, from 2016 to 2021, the land acquisition funding worth Rp105.62 trillion has been disbursed to LMAN from the State Budget, and in the Fiscal Year 2022, the budget for land acquisition funds was recorded at Rp 28.84 trillion. The LMAN Main Director Basuki Purwadi said, "As a manifestation of LMAN's commitment as part of the infrastructure development ecosystem collaboration, LMAN will continue to encourage and uphold joint synergies with all relevant agencies, and continue to strive to implement the necessary innovations so that funding for land acquisition can be carried out in accordance with good governance in order to participate in accelerating infrastructure development that bring benefits to Indonesia."

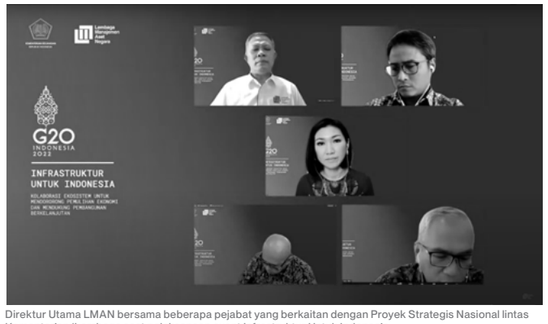

Direktur Utama LMAN bersama beberapa pejabat yang berkaitan dengan Proyek Strategis Nasional lintas Kementerian/Lembaga saat pelaksanaan event Infrastruktur Untuk Indonesia
/ LMAN President Director with several officials from the ministries/agency of the National Strategic Project during the Infrastructure for Indonesia event

Peletakan batu pertama pada asset kelola LMAN, Danadyaksa Slamet Riyadi
/ Laying the first stone for LMAN's managed asset of Danadyaksa Slamet Riyadi

Groundbreaking Aset Danadyaksa Slamet Riyadi
Groundbreaking of the Asset Danadyaksa Slamet Riyadi

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Rionald Silaban melakukan peletakan batu pertama pada aset kelolaan LMAN, Danadyaksa Slamet Riyadi, pada 9 Juni di Jalan Slamet Riyadi, Matraman, Jakarta Timur. Peletakan batu pertama ini sebagai penanda masuknya fase pengembangan dan pembangunan dalam upaya optimalisasi aset kelolaan LMAN.

Director General of State Assets, Rionald Silaban laid the first stone for the assets managed by LMAN, Danadyaksa Slamet Riyadi, on 9 June on Jalan Slamet Riyadi, Matraman, East Jakarta. The laying of this first stone marked the entry into the development and construction phase in an effort to optimize LMAN's managed assets.

Peluncuran Rumah Tutur
Launching of "Rumah Tutur"

Pada 24 Juni 2022, Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) mewujudkan hasil pemanfaatan aset negara untuk mendukung ekosistem pemberdayaan ekonomi kreatif di akhir semester I tahun ini. Aset tersebut merupakan sebuah gedung yang terletak di bilangan Jakarta Selatan, tepatnya di Jalan Panglima Polim Raya No. 20, yang berhasil dikerjasamakan dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, untuk wadah dan ruang bagi komunitas dan para pelaku ekonomi kreatif di Indonesia. Ruang kreasi tersebut dinamakan "Rumah Tutur."

Rumah Tutur merupakan ruang kreatif independen yang memanfaatkan kombinasi antara pengembangan dan komersialisasi, dan diharapkan dapat menciptakan ekosistem kreatif yang diperkuat oleh komunitas dan para pelaku ekonomi kreatif Indonesia. Di dalamnya terdapat berbagai ruang yang dapat digunakan komunitas kreatif untuk mengadakan workshop, pelatihan, pameran seni, videografi dan fotografi, termasuk ruang komersial untuk menjual hasil industri UMKM.

On 24 June 2022, the State Asset Management Agency (LMAN) accomplished the results of utilizing state assets to support the creative economy empowerment ecosystem at the end of semester I this year. The asset is a building located in South Jakarta, precisely at Jalan Panglima Polim Raya No. 20. It was a successful collaboration with the Ministry of Tourism and Creative Economy and became a place and space for communities and creative economy actors in Indonesia. This creative space is named "Rumah Tutur."

Rumah Tutur is an independent creative space that utilizes a combination of development and commercialization, and is expected to create a creative ecosystem that is strengthened by the community and actors in Indonesia's creative economy. Inside, there are various spaces that can be used by creative communities to hold workshops, training, art exhibitions, videography and photography, including a commercial space to sell the industrial products of UMKM.

Rumah Tutur, Panglima Polim

Pemberian penghargaan untuk para pemenang The Asset Manager 2022
/ Awarding the winners of The Asset Manager 2022

Direktur Utama LMAN Basuki Purwadi sedang memberikan sambutan
/ LMAN President Director Basuki Purwadi giving a speech

Kejuaraan *The Asset Manager*
The Asset Manager Championship

LMAN kembali menyelenggarakan kompetisi pengelolaan aset negara bergengsi di Indonesia bertajuk *The Asset Manager* dengan mengangkat tema optimalisasi aset negara guna mendukung penguatan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Final yang juga menjadi malam puncak penghargaan *The Asset Manager* dilaksanakan di Yogyakarta pada 25 Agustus dan dihadiri Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X.

Melalui acara ini, LMAN ingin membentuk sumber daya manusia unggulan yang memiliki semangat, paradigma baru, dan kemampuan eksekusi yang tinggi di bidang optimalisasi aset negara. Selain itu, kompetisi ini juga diharapkan bisa melahirkan berbagai inovasi baru dan tepat guna dalam hal pengelolaan aset negara sehingga mampu memberikan manfaat finansial, ekonomi, dan sosial sebesar-besarnya.

LMAN once more held a prestigious state asset management competition in Indonesia entitled “The Asset Manager” with the theme of optimizing state assets to support the strengthening of the tourism sector and the creative economy. The final, which was also the peak of The Asset Manager award, was held in Yogyakarta on 25 August and attended by the Deputy Minister of Finance Suahasil Nazara and the Governor of the Special Region of Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X.

Through this event, LMAN aspired to form superior human resources who have enthusiasm, a new paradigm, and high execution capabilities in the field of optimizing state assets. In addition, this competition is also expected to birth a variety of new and effective innovations in terms of managing state assets so as to be able to provide the maximum financial, economic, and social benefits.

Penghargaan dan Sertifikasi
Awards and Certification

LMAN Meraih Penghargaan *Public Relations Indonesia Awards*
LMAN Wins Public Relations Indonesia Awards

LMAN kembali berhasil meraih penghargaan *Gold Winner* Program *Public Relations* untuk kategori *Government* PR Lembaga pada ajang kompetisi *Public Relations Indonesia Award* 2022. Pada kesempatan tersebut, LMAN mengusung program PR bertajuk “Mengusung Sinergi, Mengawal #UangKita untuk Akselerasi Pembangunan Negeri”.

Public Relations Indonesia Award merupakan satu-satunya ajang kompetisi bidang kehumasan paling komprehensif di Indonesia yang rutin diselenggarakan setiap tahun dan diikuti oleh sekitar 600 peserta dari berbagai organisasi, baik dari kalangan pemerintah maupun korporasi, termasuk BUMN dan swasta. Penghargaan tersebut merupakan apresiasi sekaligus motivasi untuk LMAN agar bekerja lebih baik lagi dalam melayani masyarakat, khususnya dalam mengemban tugas sebagai lembaga yang melaksanakan optimalisasi aset negara dan pendanaan lahan proyek strategis nasional.

LMAN once again won the Public Relations Program Gold Winner award for the Government PR Institution category at the 2022 Public Relations Indonesia Award competition. On this occasion, LMAN presented a PR program entitled “Carrying Synergy, Guarding #OurMoney for the State Development Acceleration”.

Public Relations Indonesia Award is the only and the most comprehensive public relations competition in Indonesia, which is routinely held every year and is attended by approximately 600 participants from various organizations, including the government and corporations, state-owned enterprises, and the private sector. This award is an appreciation as well as motivation for LMAN to work even better in serving the people, especially in carrying out its duties as an institution that optimizes state assets and land funding for national strategic projects.

Perwakilan LMAN sedang menerima penghargaan Public Relations Indonesia Awards 2022
/ LMAN representatives receiving the Public Relations Indonesia Awards 2022

LMAN Meraih *Silver Winner* dalam SPS *Award*

LMAN Achieved Silver Winner in SPS Award

Lembaga Manajemen Aset Negara kembali mencetak prestasi dengan diraihnya penghargaan *Silver Winner* untuk kategori InHouse Magazine Awards dalam The 13th SPS Award 2022. Penghargaan ini diberikan untuk media komunikasi internal LMAN bertajuk LMANews yang diproduksi dalam bentuk majalah digital dan cetak.

SPS Award merupakan ajang penghargaan yang diselenggarakan oleh Serikat Perusahaan Pers sebagai sebuah apresiasi bagi para penggiat media. Terdapat empat kategori yang dinilai, yakni Indonesia Print Media Award, InHouse Magazine Awards, Indonesian Student Media Awards, dan Indonesia Young Readers Awards. Penilaian dilakukan sepanjang kurang lebih tiga bulan dan melibatkan dewan juri dari berbagai kalangan, termasuk dewan pers, jurnalis, akademisi, dan praktisi komunikasi.

LMAN meraih silver winner dalam SPS award kategori inhouse magazine awards
/ LMAN achieved silver winner in SPS Award for the Inhouse Magazine Awards category

LMAN made another achievement by winning the Silver Winner award for the InHouse Magazine Awards category at The 13th SPS Award 2022. This award was given to LMAN's internal communication media entitled LMANews, which is produced in the form of digital and print magazines.

The SPS Award is an award event organized by Serikat Perusahaan Pers (Press Company Association) as an appreciation for media activists. There are four categories assessed, namely the Indonesia Print Media Award, the InHouse Magazine Awards, the Indonesian Student Media Awards, and the Indonesia Young Readers Awards. The assessment was carried out for approximately three months and involved a jury from various backgrounds, including the press council, journalists, academics, and communications practitioners.

Direktur Utama LMAN Dinobatkan Sebagai Pemimpin Terpopuler di Media Arus Utama

LMAN President Director Named Most Popular Leader in Mainstream Media

Direktur Utama Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Basuki Purwadi memperoleh penghargaan sebagai Pemimpin Terpopuler di Media Arus Utama kategori Kepala Lembaga yang diberikan oleh Serikat Perusahaan Pers (SPS). Perolehan tersebut didasarkan pada hasil pemantauan pemberitaan media yang dilaksanakan SPS selama periode Mei 2021-Mei 2022.

Penghargaan yang disampaikan bertepatan dengan perayaan HUT SPS ke-76 ini, merupakan penghargaan yang diberikan kepada pemimpin yang dinilai berhasil menjalin hubungan baik dengan insan pers/media, ditandai dengan *coverage* pemimpin tersebut di media arus utama. *Coverage* berupa menyebut, menampilkan atau mendiskusikan tentang brand/korporasi dimaksud di medium digital media arus utama dan dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif.

Direktur Utama LMAN meraih penghargaan sebagai Pemimpin Terpopuler di Media Arus Utama kategori Kepala Lembaga yang diberikan oleh Serikat Perusahaan Pers
/ LMAN President Director achieved an award for The Most Populer Leader in Mainstream Media for the Agency Head category, given by Serikat Perusahaan Pers

The President Director of LMAN Basuki Purwadi received an award as the Most Popular Leader in Mainstream Media for the Head of Institution category given by Serikat Perusahaan Pers (Press Company Association). This acquisition was based on the results of monitoring media coverage carried out by Serikat Perusahaan Pers during the period of May 2021-May 2022.

The award, which was presented to coincide with the celebration of the 76th anniversary of Serikat Perusahaan Pers, is an award given to a leader who is considered successful in establishing good relations with members of the press/media, marked by the leader's coverage in the mainstream media. Coverage takes the form of mentioning, displaying, or discussing the intended brand/corporation in mainstream digital media and is carried out with both quantitative and qualitative approaches.

Efektivitas Investasi Pemerintah dalam Pengelolaan Aset di LMAN

Effectiveness of Government Investment in Asset Management by LMAN

LMAN telah melakukan proses optimalisasi aset kelolaan yang bertujuan komersial maupun nonkomersial. Dalam rangka pemanfaatan aset kelolaan, LMAN menerapkan skema manajemen aset. Skema tersebut terdiri dari tujuh langkah yang mencakup rekuisisi, konseptualisasi, pra-pengembangan, pengembangan, optimalisasi, pemantauan, dan evaluasi.

Dalam melaksanakan siklus manajemen aset, terutama dalam fase pra-pengembangan dan pengembangan, terdapat pos-pos biaya yang didapat dari alokasi APBN untuk LMAN melalui pagu anggaran pengungkit aset. Biaya terkait pengungkit aset tersebut dapat diperlakukan sebagai investasi pemerintah pada aset kelolaan LMAN. Tingkat efektivitas investasi harus dapat diukur dengan membandingkan biaya investasi dengan tingkat kembalian yang dihasilkan dari investasi tersebut.

Di antara aset kelolaan LMAN yang telah direnovasi dan direvitalisasi guna mendapatkan kondisi tertinggi dan terbaik adalah Aset Dipati Ukur 33, Aset Panglima Polim 20, dan Aset Kebayoran Lama 173. Ketiga aset tersebut saat ini sudah teroptimalisasi dengan skema KSO (kerja sama operasi), kerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan skema sewa.

Guna mengetahui tingkat efektivitas investasi pemerintah atas dua aset tersebut, LMAN memerlukan sebuah kajian yang dapat menghitung nilai atau tingkat efektivitas tersebut. Untuk itu, perlu dilakukan analisis yang tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan menggunakan metode-metode yang sesuai dengan bidang keilmuan terkait, antara lain *economic input-output*, *economic internal rate of return*, dan sebagainya.

Dari kajian tersebut, LMAN mendapatkan dua hal penting untuk jadi pertimbangan ke depan, yakni:

1. Nilai atau tingkat efektivitas atas investasi dengan membandingkan tingkat investasi dengan tingkat kembalian yang dihasilkan dari investasi tersebut yang ditunjukkan dengan antara lain tingkat pengembalian, nilai pengganda ekonomi, dan lain-lain.
2. Mendapatkan nilai efek berganda baik dari sisi keluaran, tenaga kerja, pendapatan masyarakat, dan efek berganda lain dari hasil kegiatan optimalisasi atas dua aset yang dimaksud.

LMAN has carried out the process of optimizing assets under management for both commercial and non-commercial purposes. To utilize managed assets, LMAN implements an asset management cycle scheme. The scheme consists of seven steps, comprising requisition, conceptualization, pre-development, development, optimization, monitoring, and evaluation.

In conducting asset management cycles, particularly at pre-development and development phases, there are cost items obtained from the state budget allocations for LMAN through asset leverage budget ceilings. Costs related to asset leverage can be treated as government investment in LMAN's managed assets. The investment's level of effectiveness must be measurable by comparing the investment cost with the return rate generated from the investment.

These three assets have been optimized through the Joint Operation (KSO) scheme, cooperation with the Ministry of Tourism and Creative Economy, and lease schemes.

To determine the effectiveness of government investment in these two assets, LMAN requires a study that can calculate the value or the level of effectiveness. For this reason, it is necessary to carry out an appropriate analysis in accordance with applicable regulations using methods appropriate to the relevant scientific fields, including input-output, economic internal rate of return, and so on.

From this study, LMAN gathers two important things to consider in the future, namely:

1. The value or the effectiveness of the investment by comparing the investment level with the return rate generated from the investment as indicated by, among others, the return rate, the economic multiplier value, etc.
2. Obtaining the multiplier effect value from the output, labor, community income, and other multiplier effects from the optimization of the two assets.

Dalam rangka optimalisasi pengelolaan kekayaan negara, beberapa analisis dapat dilakukan. Salah satunya adalah analisis manfaat dan dampak ekonomi sosial yang dapat digunakan dalam mengukur manfaat dan dampak atas pemanfaatan dan/atau pemindahtanganan aset negara bagi pemerintah pusat atau daerah. Manfaat ekonomi dapat didefinisikan sebagai manfaat yang diperoleh secara langsung bagi negara dan masyarakat dari objek analisis yang dapat diukur dalam bentuk uang. Sementara itu, dampak ekonomi adalah pengaruh tidak langsung dari objek analisis terhadap jumlah dan jenis kegiatan ekonomi di suatu wilayah yang berfokus pada indikator makroekonomi dan prakiraan pengaruh proyek pada indikator-indikator tersebut bagi negara dan masyarakat.

Kajian atas pengelolaan aset negara merupakan riset dan evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama efektivitas investasi pemerintah yang secara rutin dilakukan dan pada tahun 2022 memiliki hasil: Aset Dipati Ukur 33 memiliki rating 5 (sangat efektif), Aset Panglima Polim 20 memiliki rating 4 (efektif), dan Aset Kebayoran Lama 174 memiliki rating 5 (sangat efektif). IKU adalah indikator yang digunakan untuk mengetahui efektivitas pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN, LMAN, atau Badan Layanan Umum (BLU) penerima PMN dan dukungan pemerintah. Pengukuran efektivitas investasi dilakukan terhadap dampak sosial dan ekonomi atas program yang dilakukan oleh BUMN, LMAN, atau BLU.

Sejak tahun 2022, LMAN melakukan pengukuran dampak sosial ekonomi terhadap proyek/program yang mendapatkan alokasi investasi pemerintah. Dampak sosial ekonomi merupakan pengaruh terhadap keseluruhan aktivitas ekonomi pada suatu wilayah dari adanya suatu proyek/program. Pengukuran menggunakan metode *input output* yang menghitung nilai tambah sosial dan ekonomi termasuk pendapatan tenaga kerja. Jenis dampak yang akan diukur paling sedikit meliputi: dampak langsung dan dampak tidak langsung.

Pengukuran efektivitas investasi pemerintah dilakukan per proyek/program. Metode yang digunakan adalah penghitungan *economic input* dan *output* (metode IO). Berdasarkan metode tersebut, hasil evaluasi pada periode 2022 adalah sebagai berikut:

To optimize the management of state assets, several analyzes can be carried out. One of which is an analysis of the social economic benefits and impacts that can be used in measuring the benefits and impacts of the usage and/or transfer of the state assets to the central or regional governments. Economic benefits can be defined as the benefits obtained directly for the state and society from the object of analysis, which can be measured in the form of money. Meanwhile, economic impact is the indirect influence of the object of analysis on the amount and type of economic activity in a region that focuses on macroeconomic indicators and project impact forecasts on these indicators for the state and society.

The study of the management of state assets is a research and evaluation of the achievements of the Key Performance Indicators of the effectiveness of government investment which is routinely carried out and in 2022 had the following results: The asset at Dipati Ukur 33 has a rating of 5 (very effective), the asset at Panglima Polim 20 has a rating of 4 (effective), and the asset at Kebayoran Lama 174 has a rating of 5 (very effective). KPI is an indicator used to determine the effectiveness of providing the State Equity Participation (PMN) to BUMN, LMAN, or Public Service Agency (BLU) recipients of PMN and the government support. Measurement of investment effectiveness is carried out on the social and economic impacts of the programs carried out by BUMN, LMAN, or BLU.

Since 2022, LMAN has been measuring the socio-economic impact of projects/programs that receive government investment allocations. Socio-economic impact is the influence on the overall economic activity in an area from the existence of a project/program. The measurement uses the input output method which calculates social and economic added value including labor income. The types of impact that were to be measured include: Direct impact and indirect impact.

Measuring the effectiveness of government investment is carried out per project/program. The method used is the calculation of economic inputs and outputs (IO method). Based on this method, the evaluation results for the 2022 period are as follows:

Aset / Asset	**Total Input** / Total Input	**Total Output** / Total Output	**% IKU**
Panglima Polim 20	Rp20.853.000.000	Rp10.081.000.000	20,69%
Dipati Ukur 33	Rp869.000.000	Rp849.000.000	34,11%
Kebayoran Lama 174	Rp5.065.000.000	Rp10.826.000.000	9,36%

Kajian di atas juga menghasilkan rekomendasi bahwa dalam pengelolaan aset gedung, penentuan penyewa aset didasarkan pada tidak hanya aspek finansial, tetapi juga dampak dan manfaat sosial yang ditimbulkan dari aktivitas penyewa di dalam aset, khususnya yang mendukung ketahanan nasional, seperti pendidikan.

The above study also resulted in a recommendation that in building asset management, the determination of asset tenants should be based on not only the financial aspects, but also the social impacts and benefits arising from the tenants' activities in the asset, particularly those that support national security, such as education.

1. Aset gedung Panglima Polim 20, Jakarta / **Building Asset at Panglima Polim 20, Jakarta**

2. Aset gedung Dipati Ukur 33, Bandung / **Building Asset at Dipati Ukur 33, Bandung**

1

2

Laporan Manajemen

Management Report

2

Para Pemangku Kepentingan
yang kami hormati,

Terlebih dahulu kami panjatkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, karena pada tahun 2022, Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) kembali dapat menjalankan fungsinya dalam optimalisasi aset negara dan pendanaan pengadaan tanah Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan baik sehingga dapat memberi kontribusi optimal dalam mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional.

Melalui Laporan Tahunan ini, izinkan saya menyampaikan laporan kinerja LMAN tahun 2022 sebagai perwujudan dari pertanggungjawaban Direksi dan Manajemen LMAN dalam menjalankan kepengurusan di sepanjang tahun yang dilaporkan.

Direktur Utama - Basuki Purwadi
President Director - Basuki Purwadi

Dear Our Respected Stakeholders,

First of all, we give thanks to God Almighty, because in 2022, the Public Service Agency (BLU) of the State Asset Management Agency (LMAN) has again been able to carry out its functions in optimizing state assets and funding land acquisition for the National Strategic Project (PSN) properly, so that it can make an optimal contribution in supporting efforts to recover the national economy.

Through this Annual Report, allow me to present the 2022 LMAN performance report as a manifestation of the responsibility of the Board of Directors and the Management of LMAN in carrying out management throughout the year reported.

Laporan Kinerja LMAN di Tahun 2022
LMAN Performance Report in 2022

Dapat kami sampaikan di sini bahwa kerja keras LMAN untuk mengoptimalisasi aset negara dan mendukung pendanaan pengadaan lahan pembangunan infrastruktur PSN menunjukkan hasil memuaskan di 2022. Kinerja 2022 difokuskan pada perolehan manfaat, baik finansial, ekonomi, dan sosial. Pemanfaatan aset negara dan juga pendanaan pengadaan lahan PSN harus dipastikan memiliki nilai tambah dengan manfaat terukur guna mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Indikator kinerja diukur dari realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang mencapai Rp2,107 triliun atau 122,69% dari target serta realisasi pendanaan pengadaan lahan pembangunan infrastruktur PSN yang mencapai Rp19,635 triliun atau 89,25% dari target yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Hingga tahun 2022, LMAN mengelola 291 aset properti yang sebagian besar terletak di Jakarta, 2 aset kilang di Bontang dan Lhokseumawe serta 1 aset kawasan berupa kawasan lapangan golf Ciperna, Jawa Barat. Aset kelolaan tersebut berada pada kondisi *free and clear* dan *non-free and non-clear.* Dari jumlah tersebut, 96 aset properti berhasil dioptimalkan.

Di samping perhitungan manfaat finansial berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), LMAN juga telah melakukan kajian manfaat ekonomi dan sosial dari optimalisasi aset. Aset Dipati Ukur 33 Bandung yang digunakan untuk mendukung bisnis *co-working space* serta aset Panglima Polim 20 untuk mendukung pertumbuhan UMKM, merupakan dua aset yang menjadi objek pengukuran manfaat sosial ekonomi di tahun 2022. Pemanfaatan kedua aset dinilai berdampak pada pemberdayaan UMKM dan wirausaha, penciptaan lapangan kerja baru, mendorong kualitas dan kuantitas riset serta peningkatan indeks pembangunan manusia.

Selain mengoptimalkan aset negara yang dikelola, LMAN juga berkomitmen menjadi bagian untuk menggerakkan optimalisasi aset negara secara lebih luas dengan bersinergi bersama pengelola barang milik negara. LMAN membuka peluang kerjasama melalui jasa konsultansi optimalisasi aset negara bagi Kementerian/Lembaga, Badan Layanan Umum (BLU), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Pemerintah Daerah maupun BUMN. Di tahun 2022, telah dilaksanakan 12 jasa konsultansi pemanfaatan aset mitra dan 4 jasa konsultansi skema *arranger.*

Ke depan, optimalisasi aset negara akan diperkuat melalui peningkatan target PNBP, inovasi platform layanan kerjasama optimalisasi aset negara melalui brand AESIA, peningkatan perwujudan optimalisasi aset melalui berbagai manfaat ekonomi sosial, serta perluasan dan penguatan potensi kerjasama melalui skema *arranger*, yang akan membuka peluang bagi investor swasta untuk turut serta berkolaborasi dalam optimalisasi aset negara.

Persentase realisasi pendanaan pengadaan lahan pembangunan PSN di tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 30,75% dibandingkan dengan tahun 2021. Total pendanaan pengadaan lahan yang telah dilaksanakan LMAN di 2022 mencapai Rp19,63 triliun.

We can convey here that LMAN's hard work to optimize state assets and support funding for land procurement for PSN infrastructure development shows satisfactory results in 2022. 2022 performance is focused on obtaining benefits, both financial, economic and social. Utilization of state assets as well as funding for the procurement of PSN land must be ensured to have added value with measurable benefits to support national economic recovery.

Performance indicators are measured by the realization of Non-Tax State Revenue (PNBP) which reached IDR 2.107 trillion or 122.69% of the target and the realization of land acquisition funding for PSN infrastructure development which reached IDR 19.635 trillion or 89.25% of the target set by the Ministry Finance.

Until 2022, LMAN manages 291 property assets, mostly located in Jakarta, 2 refinery assets in Bontang and Lhokseumawe and 1 regional asset in the form of the Ciperna golf course area, West Java. The assets under management are in free and clear and non-free and non-clear conditions. Of these, 96 property assets were successfully optimized.

In addition to calculating the financial benefits in the form of Non-Tax State Revenue (PNBP), LMAN has also conducted a study of the economic and social benefits of asset optimization. Dipati Ukur 33 Bandung assets which are used to support the co-working space business as well as Panglima Polim 20 assets to support MSME growth, are two assets that are the object of measuring socio-economic benefits in 2022. The utilization of these two assets is considered to have an impact on empowering MSMEs and entrepreneurship, creating new job opportunities, encouraging the quality and quantity of research and increasing the human development index.

In addition to optimizing the state assets being managed, LMAN is also committed to being a part of driving the optimization of state assets more broadly by synergizing with managers of state property. LMAN opens opportunities for collaboration through state asset optimization consulting services for Ministries/Agencies, Public Service Agencies (BLU), Regional Public Service Agencies (BLUD), Regional Governments and BUMN. In 2022, 12 consulting services for the use of partner assets and 4 consulting services for arranger schemes have been carried out.

Going forward, the optimization of state assets will be strengthened through increasing the PNBP target, innovation of the cooperation service platform for optimizing state assets through the AESIA brand, increasing the realization of asset optimization through various social-economic benefits, as well as expanding and strengthening the potential for cooperation through the arranger scheme, which will open up opportunities for private sector investors to participate in collaborating in optimizing state assets.

The percentage of realized funding for land acquisition for PSN development in 2022 has decreased by 30.75% compared to 2021. The total funding for land acquisition that has been carried out by LMAN in 2022 reaches Rp19.63 trillion.

Rapat internal lintas divisi rutin dilakukan sebagai sarana koordinasi dan knowledge sharing antar direktorat
/ Internal meetings across divisions are routinely held as a means of coordination and knowledge sharing between directorates

Kebijakan Strategis LMAN
LMAN Strategic Policy

Arah kebijakan dan strategi LMAN periode 2020-2024 disusun dengan kombinasi pendekatan *top-down* (dari level dokumen perencanaan yang paling tinggi dalam hal ini RPJMN didetailkan hingga dokumen perencanaan pada level yang paling rendah dalam hal ini Renstra LMAN) dan pendekatan *bottom-up* (uji relevansi arah kebijakan dan strategi LMAN dengan arah kebijakan pada dokumen perencanaan yang lebih tinggi).

Arah kebijakan strategi LMAN pada tahun 2020-2024 dengan pengelompokan per tujuan dijabarkan di bawah ini. Sebagai catatan, strategi tertentu dapat masuk pada beberapa elaborasi tujuan.

The policy direction and strategy of LMAN for the period 2020-2024 are formulated through a combination of top-down approach (starting from the highest level of planning documents, in this case RPJMN, and detailed down to the lowest level of planning documents, in this case Renstra LMAN) and bottom-up approach (testing the relevance of LMAN's policy direction and strategy with the policy direction in higher-level planning documents).

The policy direction and strategy of LMAN for the years 2020-2024, categorized by objectives, are elaborated below. It should be noted that certain strategies may be included in multiple objective elaborations.

Tujuan /Objective	1	Optimalnya Manfaat Finansial dan Non Finansial dari Pengelolaan Aset Negara Optimal Financial and Non-Financial Benefits of Managing State Assets
Tujuan /Objective	2	Terwujudnya Kontribusi dalam Menggerakkan Optimalisasi Aset Negara melalui Pelaksanaan Peran Konsultasi Strategis Manajemen Aset Realization of Contribution in Driving the Optimization of State Assets through the Implementation of the Asset Management Strategic Consulting Role
Tujuan /Objective	3	Terwujudnya Kontribusi pada Pembangunan Infrastruktur melalui Pendanaan Pengadaan Tanah yang Koordinatif, Akuntabel, dan Fleksibel Realization of Contribution to Infrastructure Development through Coordinative, Accountable and Flexible Land Acquisition Funding
Tujuan /Objective	4	Terwujudnya Nilai Tambah pada Aset Negara melalui Inisiasi Skema Pengelolaan Aset yang Inovatif dan Berkelanjutan Realizing Added Value to State Assets through the Initiation of an Innovative and Sustainable Asset Management Scheme
Tujuan /Objective	5	Optimalnya Modal Organisasi, Modal Insani, dan Modal Teknologi Informasi Optimum Organizational Capital, Human Capital, and Information Technology Capital

Tindakan Direksi untuk Memastikan Implementasi Strategi Lembaga
Actions of the Board of Directors to Ensure the Implementation of the Agency's Strategy

Untuk memastikan penerapan strategi operasional Lembaga dapat berjalan baik, maka Direksi menetapkan kebijakan untuk penerapan pengawasan berjenjang melalui kewenangan masing-masing unit organisasi, terkait penerapan kinerja, serta mengaktifkan pengawasan terhadap Tata Kelola melalui peran SPI.

Dialog kinerja organisasi diterapkan setiap kuartal dengan pelaporan terukur yang menunjukkan perkembangan kinerja kuartal.

Selain itu, Rapat Direksi diselenggarakan setiap bulan dengan melibatkan tim manajemen risiko dan strategi komunikasi, untuk menjadi bagian pengawasan, manajemen isu, serta implementasi strategi komunikasi sebagai bagian dari peran strategis organisasi dan refleksi implementasi akuntabilitas kinerja organisasi yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan secara berkala.

To ensure the implementation of the Institution's operational strategy can run well, the Board of Directors establishes a policy for implementing tiered supervision through the authority of each organizational unit, related to performance implementation, and activating oversight of Governance through the role of SPI.

Organizational performance dialogues are implemented quarterly with measurable reporting showing quarterly performance progress.

In addition, Board of Directors meetings are held every month involving the risk management team and communication strategy, to become part of monitoring, issue management, and implementation of the communication strategy as part of the organization's strategic role and reflection on the implementation of organizational performance accountability which will be submitted to stakeholders on a regular basis.

Kendala yang Dihadapi LMAN di Tahun 2022
Challenges Faced by LMAN in 2022

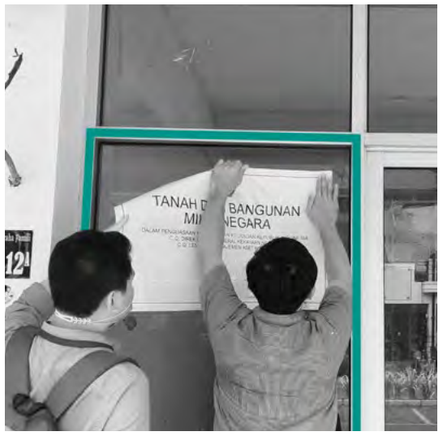

Mengoptimalisasi aset negara berstatus idle merupakan tugas pokok dan fungsi LMAN / Optimizing idle state assets is the main task and function of LMAN

Tidak tercapainya target IKU pengadaan pendanaan lahan yang efektif pada tahun 2022 disebabkan oleh:

The KPI target for procurement of effective land funding has not been achieved in 2022 due to:

1. Terdapat proyek yang terhambat proses pembebasan lahannya dikarenakan permasalahan perpanjangan/revisi penetapan lokasi;
   There are projects whose land acquisition process is hampered due to problems with the extension/revision of location determination;

2. Terdapat proyek yang mengalami perubahan desain, sehingga proses pembebasan lahan juga tertunda;
   There are projects that have undergone design changes, so that the land acquisition process is also delayed;

3. Terdapat proyek yang mengalami pergeseran target penyelesaian sampai dengan tahun 2024.
   There are projects that have shifted the completion target until 2024.

Penerapan *Good Corporate Governance* di LMAN
Implementation of *Good Corporate Governance* at LMAN

Sebagai Lembaga yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan, LMAN dituntut untuk mampu membuktikan komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance dalam melakukan pengelolaan aset negara. Selain itu, Direksi juga meyakini pentingnya penerapan tata kelola yang akuntabel agar dapat memberi manfaat yang optimal, baik bagi Lembaga itu sendiri maupun bagi masyarakat.

Untuk itu, LMAN senantiasa memastikan kebijakan- kebijakan dan inisiatif-inisiatif yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan mengedepankan tertib administrasi, tertib hukum dan tertib fisik. Hal ini berlaku baik dalam menjalankan roda organisasi maupun dalam proses bisnis.

As an Agency under the auspices of the Ministry of Finance, LMAN is required to be able to prove its commitment in realizing good governance in managing state assets. In addition, the Board of Directors also believes in the importance of implementing accountable governance in order to provide optimal benefits, both for the Institution itself and for the community.

For this reason, LMAN always ensures that its policies and initiatives can be accounted for in accordance with applicable laws and regulations, by prioritizing administrative order, legal order and physical order. This applies both in running the organization and in business processes.

Kebijakan SDM di Tahun 2022
HR Policy in 2022

Untuk dapat menunjukkan kinerja yang memuaskan dan memberi kontribusi yang signifikan dalam pengelolaan aset milik negara, maka LMAN perlu didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul di bidang pengelolaan aset. Pada tahun 2022, terdapat penambahan pegawai dari internal Kementerian Keuangan. Penambahan ini dilakukan dengan menerapkan proses rekrutmen internal melalui tahapan seleksi. Rekrutmen didasarkan pada kebutuhan organisasi dan target kinerja yang ingin dicapai. Peningkatan kompetensi SDM dan komunikasi internal diperkuat melalui berbagai inovasi seperti saluran komunikasi HR Clinic, Integrity Clinic, dan Town Hall Meeting.

Sesuai dengan strategi Lembaga, untuk mewujudkan penguatan organisasi, maka langkah pertama yang dilakukan LMAN adalah memastikan bahwa organisasi memiliki perangkat yang dibutuhkan secara memadai, dan untuk itu LMAN melakukan investasi sumber daya manusia yang kredibel dan profesional (human capital).

In order to be able to show satisfactory performance and make a significant contribution in managing state-owned assets, LMAN needs to be supported by Human Resources (HR) who excel in the field of asset management. In 2022, there will be additional employees from the internal Ministry of Finance. This addition was made by implementing an internal recruitment process through the selection stage. Recruitment is based on organizational needs and performance targets to be achieved. HR competency improvement and internal communication were strengthened through various innovations such as the HR Clinic, Integrity Clinic, and Town Hall Meeting communication channels.

In accordance with the Institution's strategy, to realize organizational strengthening, the first step taken by LMAN is to ensure that the organization has the necessary tools adequately, and for this LMAN invests in credible and professional human resources (human capital).

Direktur Utama LMAN mendampingi Menteri Perhubungan dan Direktur Jenderal Kekayaan Negara dalam kunjungan kerja Proyek Strategis Nasional Kereta Api Makassar - Parepare
/ The President Director of LMAN accompanying the Minister of Transportation and the Director General of State Assets during a work visit to the Makassar - Parepare National Railway Strategy Project

Tanggung Jawab Sosial Lembaga dan Pembangunan Berkelanjutan
Institutional Social Responsibility and Sustainable Development

Selama ini, LMAN telah ikut aktif berpartisipasi dalam mengawal akselerasi Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui pendanaan pengadaan tanah. Keberadaan PSN telah terbukti mampu menimbulkan *multiplier effect* (efek berganda) secara sosial dan ekonomi. Sebagai buktinya, di tengah keadaan pandemi, PSN yang telah selesai mampu menciptakan lapangan kerja, baik langsung maupun tidak langsung, bagi sedikitnya 11 juta tenaga kerja.

Multiplier effect merupakan pengaruh yang meluas yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan ekonomi dimana peningkatan pengeluaran nasional mempengaruhi peningkatan pendapatan dan konsumsi. *Multiplier effect* ini memiliki pengaruh yang luas yang ditimbulkan oleh satu kegiatan dan selanjutnya mempengaruhi kegiatan lainnya. Fungsi dari *multiplier effect* yang paling banyak digunakan adalah efek berganda pada investasi, pengeluaran pemerintah, pajak, dan subsidi pemerintah.

So far, LMAN has actively participated in overseeing the acceleration of the National Strategic Project (PSN) through land acquisition funding. The presence of PSN has been proven to be capable of causing a multiplier effect socially and economically. As proof, in the midst of a pandemic, the completed PSN was able to create jobs, both directly and indirectly, for at least 11 million workers.

The multiplier effect is a widespread effect caused by an economic activity where an increase in national spending affects an increase in income and consumption. This multiplier effect has a broad influence caused by one activity and then affects other activities. The most widely used function of the multiplier effect is the multiplier effect on investment, government spending, taxes, and government subsidies.

Dengan adanya investasi, baik dilakukan pemerintah dan/atau kerja sama dengan swasta, akan memberikan dampak pengganda yang sangat besar bagi peningkatan pendapatan dan konsumsi masyarakat sekitar maupun penyerapan tenaga kerja. Investasi pembangunan PSN juga memiliki manfaat signifikan terhadap pertumbuhan wilayah dan perekonomian daerah, serta nilai tambah industri. Pembangunan PSN yang tersebar di berbagai wilayah yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, akan mengurangi kesenjangan pertumbuhan pendapatan per kapita antar daerah dan akan mendukung peningkatan kesejahteraan secara lebih merata. Dalam konteks tersebut, maka perwujudan tanggung jawab sosial LMAN tercermin dalam pemberian manfaat sosial ekonomi bagi masyarakat, serta pada orientasi pemanfaatan aset negara yang juga ditujukan untuk keberlanjutan dan tanggung jawab Lembaga untuk berperan bagi masyarakat. Dalam hal ini, LMAN berperan sebagai enabler factor bagi percepatan pembangunan infrastruktur yang berdampak positif terhadap ekonomi sosial seperti percepatan konektivitas, penekanan biaya produksi, pengembangan pariwisata dan juga peningkatan daya beli masyarakat dari dana hasil ganti rugi yang disalurkan LMAN.

Hal ini pun sejalan dengan tujuan Pembangunan Berkelanjutan, di mana pembangunan infrastruktur menjadi pendukung SDG melalui berbagai manfaat ekonomi sosial ke depan yang diperoleh masyarakat. Aset di jalan Dipati Ukur 33 dan aset di jalan Panglima Polim 20 adalah dua aset kelolaan LMAN yang telah direvitalisasi guna mendapatkan kondisi yang tertinggi dan terbaik. Keduanya sudah teroptimalisasi dengan konsep sewa manajemen dan skema kerja sama operasional.

LMAN telah melakukan kajian untuk menghitung nilai atau tingkat efektivitas investasi Pemerintah dalam optimasi kedua aset tersebut. Hasil kajian tersebut menunjukkan nilai dampak kumulatif sebesar Rp26.792.418.051 per tahun sehingga dapat dinyatakan bahwa aset di Jalan Dipati Ukur 33, aset Panglima Polim 20, dan aset Kebayoran Lama 174 telah dikelola secara efektif dan optimal.

The existence of investment, whether carried out by the government and/or cooperation with the private sector, will provide a very large multiplier effect for increasing the income and consumption of the surrounding community as well as employment. PSN development investment also has significant benefits for regional growth and the regional economy, as well as industrial added value. The development of PSN spread across various regions aimed at increasing the quality and quantity of infrastructure will reduce the gap in per capita income growth between regions and will support a more equitable increase in welfare. In this context, the realization of LMAN's social responsibility is reflected in the provision of socio-economic benefits to the community, as well as in the orientation of the use of state assets which are also aimed at the sustainability and responsibility of the Institution to play a role in society. In this case, LMAN acts as an enabler factor for accelerating infrastructure development which has a positive impact on the social economy such as accelerating connectivity, reducing production costs, developing tourism and also increasing people's purchasing power from compensation funds distributed by LMAN.

This is also in line with the goals of Sustainable Development, in which infrastructure development supports the SDGs through various social and economic benefits that the community will receive in the future. The assets on Jalan Dipati Ukur 33 and the assets on Jalan Panglima Polim 20 are the two assets under management of LMAN that have been revitalized to achieve the highest and best conditions. Both have been optimized with the management lease concept and operational cooperation scheme.

LMAN has conducted a study to calculate the value or level of effectiveness of Government investment in optimizing these two assets. The results of the study show a cumulative impact value of Rp26,792,418,051 per year so that it can be stated that the assets at Jalan Dipati Ukur 33, the asset at Panglima Polim 20, and the asset at Kebayoran Lama 174 have been managed effectively and optimally.

Penutup
Closing

Mewakili Direksi, saya ingin menutup Laporan Tahunan LMAN tahun 2022 ini dengan menyampaikan rasa terima kasih kepada Kementerian Keuangan serta Direktur Jenderal Kekayaan Negara atas arahan dan masukan bagi LMAN.

Kami juga ingin menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh karyawan LMAN atas dedikasi dan kerja keras mereka membawa LMAN mencatat kinerja yang baik di tahun 2022. Kami percaya dengan kerjasama dan semangat tinggi, maka LMAN akan mampu meningkatkan kinerja dan memberi kontribusi yang semakin besar dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional melalui pengelolaan aset negara.

On behalf of the Board of Directors, I would like to close the 2022 LMAN Annual Report by expressing my gratitude to the Ministry of Finance and the Director General of State Assets for the direction and input for LMAN.

We also want to express our high apreciation to all LMAN employees for their dedication and hard work in bringing LMAN to a good performance in 2022. We believe that with cooperation and high enthusiasm, LMAN will be able to improve performance and make an even bigger contribution in supporting the recovery of the national economy through the management of state assets.

Laporan Dewan Pengawas
Report From the Board of Supervisors

Beranjak dari Pandemi Covid-19, masih dalam masa pemulihan ekonomi nasional, Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) tetap berupaya mengoptimalisasi aset Barang Milik Negara (BMN) yang idle dan/atau under-utilized untuk memberikan kontribusi, baik secara keuangan, non-keuangan maupun sosial-ekonomi dimana hal dimaksud sesuai dengan mandat yang diberikan. Di sisi lain, LMAN juga mengemban amanat untuk berperan dalam mendukung pendanaan pengadaan tanah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang saat ini tuntutannya semakin tinggi mengingat seluruh PSN yang didanai harus diselesaikan pembebasan tanahnya sebelum 2024 berakhir.

Dalam memenuhi amanat tersebut, LMAN memiliki beragam tantangan yang memerlukan solusi yang inovatif dan kreatif dimana tentunya perlu didukung dengan kebijakan-kebijakan strategis dan tata kelola yang baik untuk dapat memecahkan berbagai tantangan dimaksud. Namun demikian, masa-masa pemulihan ekonomi saat ini masih belum bisa menunjukkan hasil yang signifikan atas upaya-upaya yang telah dilakukan. Namun demikian, satu persatu tantangan tersebut dapat dijawab oleh LMAN dengan cukup solid, seperti penyelesaian utang piutang transaksi lifting gas WBx-Nr, optimalisasi aset dengan beragam skema pemanfaatan, dan jasa konsultasi yang sudah cukup dikenal oleh pasar. Lebih lanjut, tahun 2022 juga tidak luput dari rekomendasi-rekomendasi autditor dimana hal tersebut memberikan makna pada LMAN bahwa terdapat beberapa aspek yang masih perlu disempurnakan.

Penyempurnaan proses bisnis, penerapan Governance, Risk, and Compliance (GRC) yang melibatkan unsur manajemen risiko, kepatuhan internal, dan satuan pengawas intern, percepatan proses pendanaan PSN yang tetap mengusung kepatuhan, monitoring dan evaluasi atas program kerja serta pengembangan infrastruktur teknologi informasi merupakan beberapa aspek yang perlu segera disempurnakan oleh LMAN mengingat tuntutan akan kesempurnaan semakin tinggi. Oleh karena itu, Direksi bersama Dewan Pengawas telah menetapkan beberapa solusi dan inovasi yang dituangkan dalam kebijakan- kebijakan strategis LMAN guna menyempurnakan proses bisnis LMAN. Kebijakan strategis terkait penyempurnaan di beberapa aspek dimaksud juga mempertimbangkan peran stakeholders lain, fleksibilitas, regulasi yang berlaku, dan prinsip kehati-hatian.

Reputasi LMAN saat ini sudah cukup dikenal oleh pasar, butuh continuous improvement dan inovasi bagi LMAN untuk menjawab tantangan-tantangan yang diberikan oleh mitra, tenant, dan stakeholders agar LMAN tetap menjadi entitas yang dikenal sebagai penyelesai masalah.

Moving on from the Covid-19 Pandemic, still in the period of national economic recovery, the State Asset Management Agency (LMAN) was trying to optimize State Property Assets (BMN) that were idle and/or under-utilized to contribute, whether financially, non-financially, and socio-economically, in which the aforementioned is in accordance with the given mandate. On the other hand, LMAN has a mandate to play a role in supporting the funding of land acquisition for the National Strategic Project (PSN), which currently requires higher demands considering that all PSNs funded must complete their land acquisition before the end of 2024.

In fulfilling this mandate, LMAN has various challenges that require innovative and creative solutions, which of course need to be supported by strategic policies and good governance in order to solve these challenges. However, the current period of economic recovery has yet to show significant results for the efforts that have been made. However, one by one these challenges can be answered by LMAN quite solidly, such as the settlement of WBx-Nr gas lifting transaction debts, the asset optimization with various utilization schemes, and consulting services that are well known by the market. Furthermore, 2022 would also not escape the auditor's recommendations, which provided meaning for LMAN that there are several aspects that still need to be perfected.

Improvement of business processes, implementation of Governance, Risk and Compliance (GRC) which involves elements of risk management, internal compliance and internal control units, acceleration of the PSN funding process that continues to promote compliance, monitoring and evaluation of work programs and development of information technology infrastructure are some of the aspects that need to be refined by LMAN immediately, considering the demand for perfection is getting higher. Therefore, the Board of Directors together with the Supervisory Board have determined several solutions and innovations as outlined in LMAN's strategic policies to improve LMAN's business processes. Strategic policies regarding improvements in several aspects are also considered to take into account the roles of other stakeholders, flexibility, applicable regulations, and the precautionary principles.

Now that LMAN's reputation is well known by the market, it needs continuous improvement and innovation for LMAN to answer the challenges posed by partners, tenants, and stakeholders so that LMAN remains an entity known as a problem solver.

Latar Belakang
Background

Dewan Pengawas LMAN pertama kali dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 669/KMK.01/2018 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara bertugas melakukan pemantauan dan memberi nasihat kepada pejabat pengelola Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara (BLU LMAN) baik dari aspek bisnis maupun non bisnis yang mencakup aspek pengelolaan keuangan, operasional, hukum, dan kepatuhan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Adapun susunan Dewan Pengawas saat ini adalah berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 320/KMK.06/2021 tanggal 02 Agustus 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KMK-669/KMK.01/2018 Tentang Pengangkatan Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara, dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor Nomor 352/KMK.06/2021 tentang Perubahan Kedua Atas KMK Nomor 669/KMK.01/2018 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas pada BLU LMAN, sehingga susunan keanggotaan Dewan Pengawas pada BLU LMAN menjadi 4 (empat) orang.

LMAN Supervisory Board was first formed based on the Decree of the Minister of Finance Number 669/KMK.01/2018 concerning the Appointment of the Supervisory Board at the Public Service Agency of the State Asset Management Agency in charge of monitoring and providing advice to the managing officials of the Public Service Agency of the State Asset Management Agency (BLU LMAN), both from business and non-business aspects, which include aspects of financial management, operations, law, and compliance in accordance with applicable regulations. The current composition of the Supervisory Board is based on the Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 320/KMK.06/2021 dated 02 August 2021 concerning the Amendments to the Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number KMK-669/KMK.01/2018 concerning the Appointment of the Supervisory Board at Public Service Agencies for State Asset Management Agency, and the Decree of the Minister of Finance Number 352/KMK.06/2021 concerning the Second Amendment to KMK Number 669/KMK.01/ 2018 concerning the Appointment of the Supervisory Board at LMAN, so that the membership composition of the Supervisory Board at LMAN becomes 4 (four) people.

1	**Rionald Silaban**	Ketua Merangkap Anggota / President and Member
2	**Robert Gonijaya**	Anggota / Member
3	**Boy Michael Eko Tjahyono**	Anggota / Member
4	**Selo Tarnando Sumosutargio**	Anggota / Member

Selama kurun waktu semester II tahun 2022, aspek pengawasan juga mencakup terhadap program-program kerja LMAN dalam keselarasannya dengan kebijakan-kebijakan strategis Kementerian Keuangan dalam memulihkan kondisi perekonomian paska Pandemi Covid-19.

During the second semester of 2022, the supervision aspect also covered LMAN's work programs in alignment with the Ministry of Finance's strategic policies in restoring economic conditions after the Covid-19 Pandemic.

Maksud dan Tujuan Pengawasan
The Purpose and Aim of Supervision

Dalam pelaksanaan tugasnya dan sesuai dengan PMK 129/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana yang diubah dengan PMK 202/2022, bentuk pengawasan terhadap BLU LMAN rapat rutin antara Dewan Pengawas dan Direksi LMAN yang dilakukan setiap bulannya. Selain sebagaimana yang diamanatkan dalam regulasi, maksud dari pelaksanaan rapat rutin tersebut adalah untuk menggali dan membahas sejumlah topik dan tantangan terkini yang dihadapi oleh LMAN dimana tentunya membutuhkan saran dari Dewan Pengawas LMAN dalam mencari kebijakan-kebijakan publik terbaik terkait tindaklanjut dalam menyelesaikan tantangan-tantangan dimaksud.

In carrying out its duties and in accordance with PMK 129/2020 concerning the Guidelines for the Management of Public Service Bodies as amended by PMK 202/2022, the supervision format of LMAN is through regular meetings between the Supervisory Board and LMAN Directors, which are held every month. In addition to what is mandated in the regulations, the purpose of holding these regular meetings is to explore and discuss a number of current topics and challenges faced by LMAN, which of course requires advice from the LMAN Supervisory Board in seeking the best public policies related to follow-up in resolving these challenges.

Ruang Lingkup Pengawasan
Scope of Supervision

Ruang lingkup pengawasan Dewan Pengawas pada Semester II tahun 2022 menitikberatkan pada penerapan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BLU LMAN Tahun 2022, optimalisasi aset kelolaan di tengah pemulihan ekonomi nasional akibat Pandemi Covid-19, penyempurnaan beragam peraturan di sektor pengelolaan dan penatausahaan aset kelolaan LMAN, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pendanaan tanah Proyek Strategis Nasional (PSN).

The scope of supervision of the Supervisory Board in Semester II 2022 focuses on implementing the 2022 LMAN Business and Budget Plan (RBA), optimizing managed assets amid the national economic recovery due to the Covid-19 Pandemic, improving various regulations in the management and administration sector of LMAN managed assets, and evaluating the planning and funding of land for the National Strategic Project.

Tindak lanjut atas hasil pengawasan sebelumnya
Follow-up on Previous Monitoring Findings

Dewan Pengawas telah memberikan beberapa pendapat/rekomendasi terhadap beberapa tugas dan fungsi LMAN yang strategis pada semester II tahun 2021 yang kiranya perlu ditindaklanjuti oleh Direksi LMAN sebagai upaya perbaikan berkelanjutan yang dilakukan secara terus menerus. Berikut adalah rekomendasi tersebut:

The Supervisory Board provided several opinions/recommendations regarding several strategic tasks and functions of LMAN in the second half of 2021, which the Directors of LMAN need to follow up as an effort to continuously improve. The following are the recommendations:

1. Antisipasi reaksi Mitra/Tenant atas implementasi penetapan LMAN sebagai PKP terhadap perjanjian dengan Mitra/Tenant yang sebelumnya tidak dikenakan PPN.

Anticipating Partners/Tenants' reactions to the implementation of LMAN's designation as a VAT Collector for agreements with Partners/Tenants that were previously not subject to VAT.

2. Tindak lanjut terkait Piutang PT Pertamina Hulu Mahakam (PTPHM) untuk Kontrak WBx dan NR, terkait dengan strategi Total Football dari Kementerian Keuangan, dimana bukan hanya LMAN yang berdiskusi dengan mereka, namun seluruh entitas Kementerian Keuangan yang memiliki stakeholders dengan Kementerian ESDM dan SKK Migas. Termasuk alternatif mengusulkan dilakukan investigasi oleh pihak kepolisian atau pihak yang berwenang.

Follow up on PT Pertamina Hulu Mahakam (PTPHM) Receivables for the WBx and NR Contracts, regarding the Total Football strategy from the Ministry of Finance, in which it was not only LMAN that was discussing with them, but all of the Ministry of Finance entities that own stakeholders with the Ministry of Energy and Mineral Resources and SKK Migas, including the alternative of proposing an investigation by the police or the authorities.

3. Penyajian monitoring dan evaluasi risiko LMAN yang memuat pergerakan yang terjadi dari periode saat ini dan periode yang akan datang. LMAN diminta untuk memiliki semua perangkat yang lengkap meliputi top risk, Indikator risiko utama masing-masing risiko, Loss Event.

Presentation of LMAN risk monitoring and evaluation, which includes movements that occur from the current period and the coming period. LMAN is required to have all complete tools including top risk, main risk indicators for each risk, and Loss Event.

4. Proses revisi PP 19/2021 terkait tindak lanjut skema alternatif pembayaran konsinyasi kepada Pengadilan Negeri dengan pihak yang terkait, dan LMAN perlu antisipasi kemungkinan tanggapan Mahkamah Agung terkait usulan skema dimaksud.

The PP 19/2021 revision process is related to the follow-up of an alternative consignment payment scheme to the District Court with related parties, and LMAN needs to anticipate possible responses from the Supreme Court regarding the proposed scheme.

5. Pendanaan lahan IKN Nusantara menggunakan dana surplus LMAN agar didokumentasikan dengan baik dasar hukum pelaksanaan kegiatan dimaksud. LMAN perlu mempelajari lebih lanjut mengenai detail mekanisme pengadaan tanah IKN dan kaitannya dengan tugas dan fungsi LMAN, serta koordinasi rencana tindak lanjut dengan BPKP dalam survey lapangan, sehingga pada akhirnya bisa mendapatkan cakupan area yang lebih luas.

The land funding for IKN Nusantara uses LMAN surplus funds so that the legal basis for carrying out the intended activities is properly documented. LMAN needs to learn more about the details of the IKN land acquisition mechanism and its relation to LMAN's duties and functions, as well as coordinate follow-up plans with BPKP in field surveys, so that in the end they can get a wider coverage area.

6. Penempatan dana yang lebih kompetitif sebagai alternatif pendapatan treasury, selain deposito.

A more competitive placement of funds as an alternative to treasury income, apart from deposits.

7. Proses balik nama NOP dan penghapusan piutang- piutang PBB yang telah lampau atas aset kelolaan LMAN.

The process of transferring the name of the NOP and writing off past PBB receivables on assets managed by LMAN.

8. Antisipasi estimasi tidak tercapainya target kinerja tahun 2022, misalnya terkait capaian pendapatan treasury dan realisasi pendanaan lahan PSN.

Anticipate estimates of not achieving the 2022 performance target, for example related to the achievement of treasury income and the realization of PSN land funding.

Adapun, secara umum LMAN telah menindaklanjuti beberapa arahan dimaksud, dan diharapkan atas tindak lanjut dimaksud dilakukan evaluasi dan penyempurnaan yang berkelanjutan.

In general, LMAN has followed up on some of the referred directives, and it is hoped that the follow-up will carry out continuous evaluation and improvement.

Kesimpulan dan Rekomendasi
Conclusion and Recommendation

Sampai dengan semester II tahun 2022, LMAN telah berupaya melakukan beberapa inovasi terkait manajemen aset kelolaan, baik terhadap aset kelolaan yang idle maupun yang *underutilized* dengan mengimplementasikan *"asset management cycle"*. Di lain sisi, LMAN juga perlu secara berkelanjutan menyempurnakan proses bisnis yang fleksibel dengan mengikuti tren/perkembangan pasar dan berusaha untuk tidak terlalu birokrasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam mengelola aset

Up to semester II of 2022, LMAN has attempted to make several innovations related to managed asset management, both for idle and underutilized managed assets, by implementing the "asset management cycle". On the other hand, LMAN needs to continually improve flexible business processes by following market trends/developments and trying not to be too bureaucratic in carrying out its duties and functions in managing assets.

Hal yang sama juga dilakukan pada peran LMAN dalam mengedukasi Kementerian/Lembaga dalam halnya pemberian jasa konsultansi terhadap aset kelolaan K/L. Saat ini portofolio jasa konsultansi LMAN terus bertambah sehingga diharapkan kedepannya akan semakin banyak K/L yang *fully aware* dalam mengelola aset kelolaannya secara optimal.

The same thing is conducted for LMAN's role in educating Ministries/Institutions in terms of providing consulting services to the assets managed by K/L. Currently, LMAN's portfolio of consulting services continues to grow, so it is hoped that in the future there will be more Ministries/Institutions that are fully aware of optimally managing their managed assets.

Di sektor pendananaan pengadaan tanah PSN, LMAN dituntut untuk mempercepat proses pendanaan pengadaan tanah PSN dan melakasanakan rekomendasi BPK. Regulasi pendukung yang sudah ditetapkan kiranya dapat membuat LMAN melaksanakan fungsi pendanaan lebih cepat dan tepat. Lebih lanjut, LMAN juga tengah menyiapkan aplikasi digital guna mendukung proses pendanaan tanah PSN.

In the PSN land acquisition funding sector, LMAN is required to accelerate the funding process for PSN land acquisition and implement BPK recommendations. Presumably the supporting regulations that have been established can enable LMAN to carry out its funding function more quickly and precisely. Furthermore, LMAN is preparing a digital application to support PSN's land funding process.

Tantangan yang dihadapi LMAN kali ini adalah berlanjutnya pandemi Covid-19 yang berdampak hampir pada seluruh aspek kehidupan sejak tahun 2020. Dalam hal ini, LMAN berusaha berkontribusi dengan melakukan penyesuaian anggaran dalam upaya penanganan pandemi Covid-19 dan juga kebijakan relaksasi pembayaran bagi mitra LMAN yang dipandang merupakan salah satu keputusan berani dan bijak LMAN dalam mendukung stabilitas ekonomi mitra-mitra LMAN. Diharapkan LMAN dapat mengatasi tantangan dimaksud dengan agilitasnya sebagai BLU dalam pengelolaan asset, sehingga tujuan LMAN dapat tercapai.

The challenge faced by LMAN at the time was the continuation of the Covid-19 pandemic, which has impacted almost all aspects of life since 2020. In this case, LMAN was trying to contribute by making budget adjustments in an effort to deal with the Covid-19 pandemic as well as a payment relaxation policy for LMAN partners, and this was considered as one of LMAN's brave and wise decisions in supporting the economic stability of LMAN's partners. It is hoped that LMAN can overcome the challenges referred to by its agility as BLU in asset management, so that LMAN's goals can be achieved.

Rekomendasi / Recommendation

1. Terdapat risiko-risiko pada tahun 2022 yang dapat diidentifikasi kembali di tahun 2023 dengan melakukan penyempurnaan dengan risiko yang baru atau dengan sudut pandang baru yang mungkin beririsan dengan risiko pada tahun 2022. Perlunya penguatan budaya sadar risiko terhadap seluruh pegawai di LMAN sehingga proses pelaksanaan Manajemen risiko dapat terintegrasi secara menyeluruh dalam setiap kegiatan proses bisnis dan pegambilan keputusan di LMAN.

   There were risks in 2022 which can be re-identified in 2023 by making improvements with new risks or with new perspectives that may intersect with the risks in 2022. It is necessary to strengthen a risk awareness culture for all employees at LMAN so that the implementation process of risk management can be integrated as a whole in every business process and decision-making activity at LMAN.

2. Perlunya penguatan SOP dan prosedur pengendalian dalam pelaksanaaan skema pemanfaatan asset serta pemilihan mitra Kerjasama untuk meminimalisasi adanya risiko dari suatu keputusan bisnis.

   The need to strengthen SOPs and control procedures in implementing asset utilization schemes and selecting cooperation partners to minimize the risk of a business decision.

3. Pengembangan fitur AESIA lebih lanjut dengan memperhatikan aspek user friendly yang lebih mengutamakan kemudahan dalam penggunaan platform dimaksud dan dikelola secara professional sehingga mendapat hasil yang optimal.

   Further development of AESIA by paying attention to user friendly aspects, which prioritizes ease of use of the intended platform and is managed professionally in order to obtain optimal results.

4. Agar LMAN menjaga dan memastikan kapasitas ketersediaan anggarannya dalam pendanaan lahan PSN, khususnya terkait tambahan proyek dan IKN.

   For LMAN to maintain and ensure its budget availability capacity in PSN land funding, especially regarding additional projects and IKN.

5. Antisipasi pemanggilan dari Kepolisian dan Kejaksaan kepada LMAN dengan memastikan pengelolaan data/dokumen/berkas dilakukan dengan baik

   Anticipate summons from the Police and the Prosecutor's Office to LMAN by ensuring proper management of data/documents/files.

6. Strategi efisiensi dan optimalisasi biaya pengamanan Kilang Arun mengingat tren biaya yang meningkat dibandingkan tren PNBP yang menurun

   Efficiency strategy and optimization of the cost of securing the Arun Refinery given the trend of increasing costs compared to the declining trend of PNBP.

7. Monitor dan pastikan penyelesaian pembangunan aset SR sesuai dengan perjanjian dan prosedur yang berlaku

   Monitor and ensure the completion of the construction of SR assets in accordance with applicable agreements and procedures.

8. Melakukan tindak lanjut terkait piutang PT Pertamina Hulu Mahakam (PTPHM) atas Kontrak WBx dan NR.

   Regarding the Receivables of PT Pertamina Hulu Mahakam (PTPHM) for WBx and NR Contracts, further follow-up actions are required.

Penutup
Closing

Laporan kegiatan Dewan Pengawas Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) disusun berdasarkan hasil evaluasi, pemantauan dan kajian atas pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) di Semester II tahun 2022 serta untuk memenuhi amanat yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana yang disempurnakan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK/05/2022 Tahun 2022.

The report on the activities of the Supervisory Board of the State Asset Management Agency (LMAN) was prepared based on the results of evaluation, monitoring, and review of the implementation of the Strategic Plan (Renstra) and Business and Budget Plan (RBA) in Semester II of 2022 and to fulfill the mandate in the Regulation of the Minister of Finance of the Republic Indonesia Number 129/PMK.05/2020 concerning the Guidelines for the Management of Public Service Bodies as refined in the Minister of Finance Regulation Number 202/PMK/05/2022 of 2022.

Adapun materi laporan ini dapat menjadi informasi bagi stakeholders LMAN yang berkepentingan guna memberikan informasi perkembangan dan arahan selanjutnya untuk mencapai visi dan misi LMAN sebagaimana mandat yang diberikan oleh Menteri Keuangan dan program-program kerja yang dicanangkan oleh Direksi LMAN.

The material for this report can serve as information for interested LMAN stakeholders in order to provide developmental information and further directions to achieve LMAN's vision and mission as mandated by the Minister of Finance and work programs proclaimed by LMAN's Directors.

Pertanggungjawaban Laporan Tahunan 2022
Accountability for the 2022 Annual Report

Surat Pernyataan Anggota Dewan Pengawas dan Direksi tentang Pertanggung Jawaban atas Laporan Tahunan LMAN untuk Tahun Buku 2022.

Dewan Pengawas dan Direksi LMAN dengan ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan LMAN 2022 telah dimuat secara akurat dan karenanya bertanggung jawab penuh atas isi Laporan Tahunan ini dan Laporan Keuangan yang menyertainya serta informasi terkait lainnya.

The Statement of the Members of the Supervisory Board and the Board of Directors regarding Accountability for LMAN's Annual Report for the 2022 Fiscal Year.

The Supervisory Board and the Directors of LMAN hereby declare that all information in the 2022 LMAN Annual Report has been published accurately and therefore are fully responsible for the contents of this Annual Report and the accompanying Financial Statements and other related information.

Jakarta, Mei 2023 Jakarta, May 2023

Dewan Pengawas
Supervisory Board

Rionald Silaban
Ketua Dewan Pengawas /
Chairman of the Board of Supervisors

Roberth Gonijaya
Anggota Dewan Pengawas /
Member of the Board of Supervisors

Boy Michael Eko Tjahyono
Anggota Dewan Pengawas /
Member of the Board of Supervisors

Selo Tarnando Sumosutargio
Anggota Dewan Pengawas /
Member of the Board of Supervisors

Direksi
the Board of Directors

Basuki Purwadi
Direktur Utama LMAN /
President Director of LMAN

Sutanto Basuki
Direktur Keuangan dan Dukungan Organisasi LMAN /
Finance and Organization Support Director of LMAN

Qoswara
Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan LMAN /
Procurement and Land Funding Director of LMAN

Tetik Fajar Ruwandari
Direktur Operasional dan Manajemen Risiko LMAN /
Operations and Risk Management Director of LMAN

Candra Giri Artanto
Direktur Pengembangan dan Pendayagunaan LMAN /
Development and Utilization Director of LMAN

Dewan Pengawas dan Direksi LMAN
/ Supervisory Board and Board of Directors

Profil Perusahaan

Company Profile

Profil Perusahaan
Company Profile

Lobi Gedung Dhanadyaksa Hutama
/ Lobby of LMAN Office at Dhanadyaksa Hutama

Nama lembaga Institution name	Lembaga Manajemen Aset Negara State Asset Management Agency
Status Status	Badan Layanan Umum Public Service Agency
Bidang usaha Business field	Melaksanakan optimalisasi aset negara serta pendanaan lahan infrastruktur Proyek Strategis Nasional Conduct optimization of state assets as well as provide funding for the National Strategic Project's land infrastructure
Layanan Services	• Layanan manajemen Management service • Jasa konsultansi Advisory services • Layanan pendanaan lahan Land funding services
Produk/Jasa Product/Service	1 Manajemen properti apartemen, ruko, dan gedung Property management: Apartment, shop, and building 2 Pendanaan lahan Proyek Strategis Nasional The National Strategic Project land funding
Tanggal pendirian Founding date	16 Desember 2015 16 December 2015
Dasar hukum pendirian Legal basis of establishment	PMK No. 219/PMK.01/2015 tanggal 07 Desember 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Manajemen Aset Negara PMK No. 219/PMK.01/2015 on 07 December 2015 regarding the Organization and Work Procedure of the State Asset Management Agency
Kantor pusat Head office	Gedung Dhanadyaksa Hutama Jl. Pangeran Diponegoro No 62A Pegangsaan, Menteng Jakarta Pusat, 10320 Dhanadyaksa Hutama Building Jl. Pangeran Diponegoro No 62A Pegangsaan, Menteng Central Jakarta, 10320 Telp 021-21392822 Email: info.lman@kemenkeu.go.id www.lman.kemenkeu.go.id

Sekilas LMAN
LMAN at a Glance

Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) didirikan pada 16 Desember 2015 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 219/PMK.01/2015 tanggal 07 Desember 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Manajemen Aset Negara.

Pendirian LMAN merupakan usulan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), yang direalisasikan setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan.

The State Asset Management Agency (LMAN in Indonesian) was established on 16 December 2015 based on the Minister of Finance Regulation No. 219/PMK.01/2015 on 07 December 2015 regarding the Organization and Work Procedure of the State Asset Management Agency.

The foundation of LMAN was proposed by the Directorate General of State Assets (DJKN) and executed after obtaining approval from the Minister of Finance.

Secara umum, tugas dan fungsi utama LMAN adalah mendongkrak kinerja instansi induknya, yaitu DJKN, dalam menjalankan tugas mengelola kekayaan negara dan secara tidak langsung juga meningkatkan kinerja Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

In general, the main duties and functions of LMAN is to boost the performance of its primary agency, namely DJKN, in carrying out its duties of managing the state assets as well as indirectly improving the performance of the Ministry of Finance.

Di awal pembentukannya, mandat utama LMAN adalah sebagai operator pengelola barang untuk mengoptimalkan aset negara yang dinilai belum difungsikan secara optimal dan yang tidak dimanfaatkan atau mangkrak. Aset yang belum teroptimalkan tersebut di antaranya adalah:

At the beginning of its formation, LMAN's primary mandate was to serve as the operator of goods management in order to optimize the state assets that were considered underutilized and those that were not used/utilized or idle. The underutilized assets include:

1.

Aset mangkrak pada kementerian/ lembaga yang sudah dan/atau akan diserahkan kepada DJKN selaku pengelola barang.

Idle assets at ministries/ agencies that have been and/ or will be yielded to DJKN as goods manager.

2.

Aset yang akan dipertukarkan akan tetapi masih menunggu persetujuan Menteri Keuangan, misalnya eks aset PT Pertamina.

Assets that will be exchanged but still awaiting approval from the Minister of Finance, such as the former asset of PT Pertamina.

3.

Sebagian eks aset Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

Partial former assets of Partner Contract Contractor.

4.

Aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional.

Former assets of the National Bank Restructuring Agency.

5.

Eks aset Perusahaan Pengelola Aset (PPA).

Former assets of the Asset Management Company.

6.

Aset Hak Tanggungan Bank Indonesia (HTBI).

Bank Indonesia's Mortgage Assets.

Proses Pembangunan Gedung Arsip, Gerai Layanan dan Mess Danadyaksa Slamet Riyadi
/ The process of building Gedung Arsip, Service Outlet and Mess Danadyaksa Slamet Riyadi

Aset Panglima Polim 20 sebelum direnovasi
/ Panglima Polim 20 Asset before renovation

Bangunan Aset Dhanadyaksa Dipati Ukur Bandung
/ Dhanadyaksa Dipati Ukur Asset, Bandung

Dalam melaksanakan optimalisasi aset, terdapat dua jenis tantangan utama yang dihadapi LMAN, yaitu regulatory constraint dan institutional constraint.

In carrying out asset optimization, there are two main challenges faced by LMAN, namely regulatory constraints and institutional constraints.

Dari sisi *regulatory constraint*, koridor hukum pengelolaan kekayaan negara didesain agar sistem pengendalian internal pengelolaan barang milik negara menjadi perisai yang kuat untuk menjaga negara dari kehilangan aset-asetnya. Hal ini menjadi rintangan dalam upaya mengoptimalisasikan aset secara efektif, karena manajemen properti memerlukan ruang gerak yang lebih luas untuk melakukan berbagai terobosan dan fleksibilitas. Sementara itu, tata kelola instansi pemerintah sejak awal telah didesain untuk mengedepankan prinsip kehati-hatian dan menerapkan birokrasi organisasi sesuai peraturan yang berlaku.

From the perspective of regulatory constraint, the legal corridor for state asset management is designed so that the internal control system for the management of state property becomes a strong shield to protect the state from losing its assets. This becomes an obstacle in the efforts to optimize assets effectively, because property management requires wider space for maneuvers to make various breakthroughs and flexibility. Meanwhile, the governance of government agencies is designed from the outset to prioritize the principles of prudence and implement an organizational bureaucracy in accordance with applicable regulations.

Dari sisi *institutional constraint*, tantangan mencakup karakteristik, budaya birokrasi, serta kompetensi sumber daya manusia yang bersifat generalis dan tidak didesain untuk menjadi unit yang responsif, fleksibel, otonom dalam mengelola aset, serta memiliki tenaga ahli spesialis yang bernaluri bisnis. Selain itu, sampai saat ini belum ada unit yang ditugaskan secara khusus untuk mengelola aset mangkrak layaknya sebuah entitas manajemen properti.

From the perspective of institutional constraints, the challenges comprise characteristics, bureaucratic culture, and human resource competencies that are generalist in nature and are not designed to be responsive, flexible, and autonomous units in asset management, as well as having specialist experts with business insight. In addition, up to now there has not been any unit assigned specifically to manage idle assets like a property management entity.

Tugas dan fungsi utama LMAN, yang dapat dikatakan sebagai *"mission impossible"* dari DJKN dan harus dicapai dengan sempurna, adalah tugas mengelola aset negara (berstatus BMN idle) dengan parameter kinerja yang jelas, antara lain parameter tingkat ROA (return on assets) yang sehat - sebuah target yang senantiasa diupayakan pencapaiannya.

The main duties and functions of LMAN, which can be regarded as a "mission impossible" from DJKN that must be accomplished perfectly, comprise the tasks of managing state assets (under the status of idle state property) with clear performance parameters, including healthy return on assets (ROA) level parameters - a target that is constantly attempted to achieve.

Sejak 2016, Perpres No. 102 Tahun 2016 telah diubah menjadi Perpres No. 66 Tahun 2020 tentang Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, LMAN memperoleh tugas tambahan yaitu merencanakan pendanaan dan pendayagunaan landbank serta melakukan pembayaran ganti rugi pengadaan tanah untuk proyek-proyek dalam program-program prioritas/ strategis nasional.

Since 2016, Perpres No. 102 Year 2016 has been replaced by Perpres No. 66 Year 2020 on Funding for Land Acquisition for the Development of Public Interests in the Context of Implementation of National Strategic Projects, LMAN received an additional special task, namely planning the funding and utilization of landbank as well as paying compensation for land acquisition for the projects under the national priority/strategic programs.

Jejak Langkah
Milestones

2015

Pembentukan LMAN (PMK 219/PMK.01/2015 dan KMK 1319/KMK.05/2015)

Formation of LMAN (PMK 219/PMK.01/2015 and KMK 1319/KMK.05/2015)

2016

LMAN sebagai operator pengelola barang mendapatkan mandat pendanaan tanah Proyek Strategis Nasional (PSN) (Perpres 102 Tahun 2016)

LMAN as a goods management operator received a land funding mandate for the National Strategic Project (Perpres 102 Year 2016)

2017

- LMAN selaku operator pengelola barang dan pendanaan tanah
- Proyek Strategis Nasional (PSN) Reorganisasi LMAN (PMK54/ PMK.01/2017)
- Tata cara pendanaan tanah PSN (PMK 21/ PMK.06/2017) 2017
- LMAN as a goods management and land funding operator for
- the National Strategic Project Reorganization of LMAN (PMK54/PMK.01/2017)
- Land financing procedures for the National Strategic Project (PMK 21/ PMK.06/2017) 2017

2018

Terbentuknya:
- Dewan Pengawas
- Komite Manajemen Risiko
- Komite SDM
- Dewan Kode Etik
- Komite IT
- Tim Pengadaan Barang/Jasa"

Formation of:
- Supervisory Board
- Risk Management Committee
- Human Resources Committee
- Code of Ethics Council
- IT Committee
- Procurement of Goods/ Services Team

2019

Terbentuknya Satuan Pengawas Internal

Formation of Internal Supervisory Unit

2020

- Dalam merespon pelemahan ekonomi akibat merebaknya pandemi COVID-19, LMAN mengambil serangkaian kebijakan strategis untuk memastikan keberlanjutan usahanya. Kebijakan tersebut antara lain adalah: melakukan digitalisasi untuk mendukung proses kerja Lembaga, melakukan pemanfaatan aset property dan jasa advisory yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat/mitra di masa pandemic, serta melakukan ekstensi manfaat yang lebih komprehensif.
- Terbit Perpres 66 Tahun 2020, PMK 139 Tahun 2020 (Pendanaan PSN) dan PMK 144 Tahun 2020 (Aset Kelolaan)."

- In responding to the economic slowdown due to the outbreak of the COVID-19 pandemic, LMAN took a series of strategic policies to ensure the sustainability of its business. These policies include: digitizing to support the Institution's work processes, utilizing property assets and advisory services tailored to the needs of the community/partners during a pandemic, as well as extending more comprehensive benefits.
- Perpres 66 Year 2020, PMK 139 Year 2020 (National Strategic Project Funding), and PMK 144 Year 2020 (Managed Assets).

Rencana Strategis
Strategic Plans

Secara umum, LMAN menyusun rencana strategis dengan target-target yang realistis, dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan yang dimiliki lembaga, serta memperhitungkan peluang dan tantangan yang dihadapi.

Optimalisasi atas potensi besar aset negara dapat diwujudkan melalui pendayagunaan aset-aset negara yang belum dimanfaatkan secara optimal oleh mitra maupun melalui pola bangun serah kelola/bangun kelola serah, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Dengan demikian, aset-aset negara yang belum dimanfaatkan optimal tersebut dapat memberi manfaat finansial kepada pemerintah sekaligus menghemat belanja modal pemerintah.

Secara umum, LMAN menyusun rencana strategis dengan target-target yang realistis, dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan yang dimiliki lembaga, serta memperhitungkan peluang dan tantangan yang dihadapi. Rencana ini juga disusun dengan memperhatikan kebijakan pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan dan DJKN sebagai stakeholder utama lembaga. Seluruh elemen penting dalam rencana strategis lembaga - seperti kebijakan pengelolaan aset, kebijakan pendanaan pengadaan tanah Proyek Strategis Nasional, dan kebijakan pengelolaan keuangan yang profesional - telah melalui penelaahan yang mendalam agar dapat menghasilkan rencana yang solid dan dapat diwujudkan.

Optimization of the great potential of the state assets can be realized through the utilization of the state assets that are underutilized by partners and through the management handover pattern/ handover management, cooperation between the government and business entities. Therefore, these underutilized state assets can provide financial benefits to the government as well as save the government's capital spending.

In general, LMAN arranges a strategic plan with realistic targets, taking into account the strengths and weaknesses of the institution, as well as its opportunities and challenges. This plan was also prepared by considering the government policies, especially the Ministry of Finance and DJKN as the main stakeholders of the institution. All important elements in the institution's strategic plan - such as asset management policies, land acquisition funding policies of the National Strategic Project, and professional financial management policies - have gone through in-depth reviews in order to produce a solid and realizable plan.

Pemaparan skema pemanfaatan Aset Tamansari oleh Direktur Pengembangan dan Pendayagunaan
/ Presentation of the Tamansari Asset utilization scheme by the Director of Development and Utilization

Visi dan Misi Perusahaan
Vision and Mission of the Company

Gedung Dhanadyaksa Hutama
/ Dhanadyaksa Hutama Building

Visi

Menjadi pengelola dan penggerak optimalisasi aset negara untuk kepentingan publik.

Vision

To become the manager and driving force for optimizing state assets for public interest.

Misi Mission

- Mengelola aset kelolaan untuk menghasilkan manfaat finansial dan non-finansial bagi negara.
  To manage assets under management to generate financial and non-financial benefits for the nation.
- Menggerakkan optimalisasi aset negara untuk meningkatkan nilai tambah aset.
  To drive optimization of state assets to increase the assets' added values.
- Mendanai pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur strategis nasional.
  To fund land acquisition for the development of the national strategic infrastructure.
- Melaksanakan penugasan khusus pemerintah (fungsi sovereign).
  To carry out governmental special assignments (sovereign function).

Untuk menerapkan keempat misi yang akan dicapai dalam kurun waktu yang telah ditetapkan dan mencerminkan arah strategis organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi, maka perlu ditetapkan tujuan yang kiranya dapat dicapai.

Terkait dengan hal tersebut, terdapat 15 (lima belas) tujuan yang akan dicapai oleh LMAN:

In order to implement the four missions that shall be achieved within a predetermined timeline and reflect the strategic direction of the organization in accordance with its duties and functions, it is necessary to set achievable goals.

In this regard, there are 15 (fifteen) objectives to be achieved by LMAN:

Tujuan Objective

1. Pendanaan pengadaan lahan untuk Proyek Strategis Nasional (PSN).
   Funding for land acquisition for the National Strategic Project.
2. Optimalisasi pengelolaan aset Bendahara Umum Negara (BUN).
   Optimizing the management of the state general treasurer's assets.
3. Pengelolaan dana.
   Fund management.
4. Menjaga rasio Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) pada tingkat yang diinginkan.
   Maintaining the ratio of operating expenses to operating income at the desired level.
5. Pelaksanaan penganggaran yang efektif dan efisien.
   Implementing effective and efficient budgeting.
6. Mengenalkan LMAN kepada pemangku kepentingan.
   Introducing LMAN to stakeholders.
7. Mendapatkan masukan yang positif atas layanan yang diberikan.
   Obtaining positive feedback for the services provided.
8. Strategi komunikasi.
   Communication strategy.
9. Penyelesaian perjanjian/kerja sama.
   Completion of agreements/cooperation.
10. Menyusun business cases.
    Compiling business cases.
11. Mewujudkan aset yang free and clear.
    Manifesting free and clear assets.
12. Meningkatkan kompetensi pegawai secara berkelanjutan.
    Improving employee competence in a sustainable manner.
13. Penyusunan/penyempurnaan keputusan.
    Compilation/completion of decisions.
14. Tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) auditor.
    Following up on the auditor's recommendation from the inspection report.
15. Pengembangan sistem informasi LMAN.
    Developing LMAN information system.

Strategi 3-P LMAN
3-P Strategy of LMAN

Penguatan Organisasi / Organizational Strengthening

Strategi pertama adalah memastikan organisasi memiliki perangkat yang dibutuhkan secara memadai. Penguatan organisasi diutamakan pada investasi sumber daya manusia yang kredibel dan profesional dan pembangunan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal yang kuat. Strategi ini memerlukan beberapa tahun implementasi yang dilakukan secara paralel dengan tugas fungsi Lembaga.

The first strategy is to ensure that the organization has the adequate required equipment. Organizational strengthening is prioritized on investing in credible and professional human capital and the development of strong governance, risk management, and internal control. This strategy requires several years of implementation carried out in parallel with the duties and functions of the Institution.

Pertumbuhan Portofolio / Portfolio Growth

Strategi kedua adalah menjalankan mandat manajemen properti dan jasa konsultasi aset *solution*. Ada tiga hal utama yang perlu dilakukan untuk dapat menumbuhkan portofolio aset kelolaan, yaitu peningkatan status aset menjadi free and clear, peningkatan nilai tambah aset, dan optimalisasi aset.

The second strategy is to carry out property management mandates and asset solution consulting services. There are three key things that need to be conducted to grow the portfolio of managed assets, namely increasing the asset status to be free and clear, increasing the added value of assets, and optimizing assets.

Peningkatan Daya Ungkit Aset / Increased Asset Leverage

Strategi ketiga adalah melakukan investasi berupa akuisisi aset, daur ulang aset, dan berbagai upaya lain untuk menjaga kesinambungan nilai dan jumlah aset kelolaan. Ini dilakukan agar mandat yang dijalankan LMAN tidak hanya menerima dana dan/atau aset kelolaan, namun menghasilkan dana dan/atau aset kelolaan sendiri yang akan memberikan manfaat kesinambungan organisasi dan manfaat bagi negara.

The third strategy is to invest in the form of asset acquisition, asset recycling, and various other efforts to maintain the continuity of value and number of assets under management. This is conducted so that the mandate carried out by LMAN does not only receive funds and/or managed assets, but generates its own managed funds and/or assets which will provide organizational sustainability benefits and benefits for the state.

Jalan Tol Kota Baru
/ Kota Baru Toll Road

Peta Strategi LMAN
Map of LMAN's Strategy

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan, Lembaga Manajemen Aset Negara menetapkan 14 (empat belas) sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai pada periode 2020-2024 sebagai berikut:

In order to support the achievement of objectives, the State Asset Management Agency has set 14 (fourteen) strategic targets which are the desired conditions to be achieved in the 2020-2024 period as follows:

Jalan Tol Solo Ngawi
/ Solo Ngawi Toll Road

1. Berperan dalam pengelolaan aset Barang Milik Negara (BMN) di ibu kota negara lama;
   Playing a role in managing State Property assets in the old state capital;
2. Pertumbuhan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pengelolaan aset properti;
   Growth of Non-Tax State Revenue from managing property assets;
3. Terlaksananya pemanfaatan aset kelolaan untuk manfaat non-finansial;
   Implementation of utilization of assets under management for non-financial benefits;
4. Terlaksananya inisiatif aset *surveillance*;
   Implementation of surveillance asset initiatives;
5. Perluasan penerima jasa konsultasi pada Kementerian/ Lembaga (K/L) dan Badan Layanan Umum (BLU);
   Expansion of recipients of consulting services to Ministries/Institutions and Public Service Agencies;
6. Terlaksananya skema *arranger* pengelolaan aset;
   Implementation of the asset management arranger scheme;
7. Terlaksananya proses bisnis pendanaan pengadaan tanah yang akuntabel namun tetap fleksibel;
   Implementation of land acquisition funding business processes that are accountable but remain flexible;
8. Terlaksananya manajemen dana jangka panjang untuk mendukung pendanaan pengadaan lahan Proyek Strategis Nasional (PSN);
   Implementation of long-term fund management to support funding for land procurement for the National Strategic Project;
9. Terlaksananya inisiatif aset *intelligence*;
   Implementation of asset intelligence initiatives;
10. Terlaksananya rebranding aset kelolaan;
    Implementation of rebranding of assets under management;
11. Tersedianya *database* aset kelolaan yang terintegrasi;
    Availability of an integrated managed asset database;
12. Terciptanya *platform* digital manajemen aset tujuh siklus dan *Integrated Land Funding Management System*;
    Creation of a seven-cycle digital asset management platform and the Integrated Land Funding Management System;
13. Terwujudnya SDM yang optimal adaptif dan technology savvy;
    Realization of human resources that are optimally adaptive and technology savvy;
14. Terwujudnya organisasi LMAN yang *fit-for-purpose* dan efektif.
    Realization of a fit-for-purpose and effective LMAN organization.

Kegiatan Layanan LMAN
LMAN Services and Activities

LMAN adalah Badan Layanan Umum di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), yang didirikan pada 16 Desember 2015.

Selain menjadi pengelola aset negara, kini LMAN juga melakukan perencanaan pendanaan dan pendayagunaan landbank serta pembayaran ganti rugi pengadaan tanah.

Layanan LMAN antara lain:

LMAN is a Public Service Agency under the Directorate General of State Assets of the Ministry of Finance, which was established on 16 December 2015.

In addition to serving as the manager of state assets, LMAN is now also planning the funding and utilization of landbank as well as compensation payment for land acquisition.

LMAN services include:

Manajemen Properti / Property Management

LMAN mengelola aset negara yang potensial agar menghasilkan manfaat finansial (penerimaan negara), dan manfaat non finansial (cost saving). Beberapa aktivitas pemanfaatan aset yang dilakukan meliputi sewa dan kerja sama pemanfaatan, bangun-guna-serah atau bangun-serah-guna, maupun kerja sama pemerintah dan swasta.

LMAN manages potential state assets to generate financial benefits (state revenue) and non-financial benefits (cost savings). Some of the asset utilization activities carried out include leasing and utilization cooperation, build-operate-transfer or build-transfer-operate, as well as government and private cooperation.

Layanan Konsultansi / Consulting Services

LMAN memberikan jasa konsultansi terkait manajemen properti negara untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan pengembangan properti tersebut. Aktivitas advisori meliputi jasa layanan riset, jasa layanan arranger, dan jasa layanan pengelolaan aset.

LMAN offers consultancy services related to state property management to optimize the utilization and development of the property. Advisory activities include research service offerings, arranger service offerings, and asset management service offerings.

Pendanaan Lahan / Land Funding

LMAN melaksanakan fungsi khusus landbank, yaitu pendanaan pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur dalam skema Proyek Strategis Nasional. Aktivitas khusus landbank meliputi pendanaan pengadaan tanah, pengamanan dan pemanfaatan aset, serta pelepasan aset.

LMAN carries out a special landbank function, namely funding land acquisition for infrastructure development under the National Strategic Project scheme. Specific landbank activities include financing land acquisition, securing and utilizing assets, and disposing of assets.

Profil Dewan Pengawas
Profile of the Board of Supervisors

Rionald Silaban

Jabatan / Position
Ketua Dewan Pengawas
/ Chair of Supervisory Board

Usia / Ages
57 Tahun
/ 57 Years Old

Kewarganegaraan / Nationality
Indonesia
/ Indonesian

Domisili / Residence
Jakarta
/ Jakarta

Beliau meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia dan Magister Hukum dari Georgetown University. Pada periode 2014-2016, beliau menjabat sebagai Direktur Eksekutif untuk Southeast Asia Voting Group di World Bank, Director of Constituency di Asian Infrastructure Investment Bank, dan Vice Chairman of United Nations International Fund for Agricultural Development. Kemudian, pada 2016-2018, beliau menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Makro Ekonomi dan Keuangan Internasional di Kementerian Keuangan.

Di tahun 2021, beliau menjabat sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Negara, pimpinan unit eselon I yang membawahi Lembaga Manajemen Aset Negara.

Mr. Silaban holds a Bachelor of Law from Universitas Indonesia and a Master of Law from Georgetown University. From 2014 to 2016, he served as Executive Director for the Southeast Asia Voting Group at the World Bank, Director of Constituency at the Asian Infrastructure Investment Bank, and Vice Chairman of the United Nations International Fund for Agricultural Development. Then, from 2016 to 2018, he served as Expert Staff to the Minister of Finance for Macroeconomics and International Finance at the Ministry of Finance.

In 2021, he served as Director General of State Assets, head of the echelon I unit that oversees the State Asset Management Agency.

Roberth Gonijaya

Jabatan / Position
Anggota Dewan Pengawas
/ Member of Supervisory Board

Usia / Ages
56 Tahun
/ 56 Years Old

Kewarganegaraan / Nationality
Indonesia
/ Indonesian

Domisili / Residence
Bekasi, Jawa Barat
/ Bekasi, West Java

Beliau menyelesaikan pendidikan di Diploma IV di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara pada tahun 1995 dan mendapatkan gelar Magister dari University of Illinois pada tahun 2000.

Sebelum menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas LMAN, beliau pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan pada 2010, serta menjadi Inspektur VII di Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan pada 2014. Saat ini, beliau juga tercatat sebagai Inspektur III di Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan sejak Januari 2020.

Mr. Gonijaya obtained a Diploma IV degree from Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (State College of Accountancy) in 1995 and obtained a Master's degree from the University of Illinois in 2000.

Prior to serving as a member of the LMAN Supervisory Board, he served as Head of the Organizational and Management Section of the Inspectorate General of the Ministry of Finance in 2010, and became Inspector VII at the Inspectorate General of the Ministry of Finance in 2014. Currently, he has also been listed as Inspector III at the Inspectorate General of the Ministry of Finance since January 2020.

Boy Michael Eko Tjahyono

Jabatan / Position
Anggota Dewan Pengawas
/ Member of Supervisory Board

Usia / Ages
55 Tahun
/ 55 Years Old

Kewarganegaraan / Nationality
Indonesia
/ Indonesian

Domisili / Residence
Jakarta
/ Jakarta

Beliau meraih gelar Sarjana dari Institut Pertanian Bogor pada 1992 dan gelar S2 dari Universitas Bina Nusantara pada 2003.

Sebelumnya, beliau pernah menjabat sebagai Anggota Komite Audit di PT Sarana Multi Infrastruktur pada 2016-2017, Risk Services Indonesia Lead – Senior Manager di PT Accenture Indonesia pada 2011- 2015, AVP/Team Leader PT Bank Mandiri (Persero) pada 1998-2011, serta Manajer PT Bank Pembangunan Indonesia pada 1996-1998.

Selain di LMAN, saat ini beliau menjabat sebagai Associate Director di PT PricewaterhouseCoopers Consulting Indonesia sejak 2015.

Mr. Tjahyono earned a Bachelor's degree from Institut Pertanian Bogor (Bogor Agricultural Institute) in 1992 and a Master's degree from Bina Nusantara University in 2003.

Previously, he served as Member of the Audit Committee at PT Sarana Multi Infrastruktur in 2016-2017, Risk Services Indonesia Lead – Senior Manager at PT Accenture Indonesia in 2011-2015, AVP/ Team Leader of PT Bank Mandiri (Persero) in 1998-2011, as well as Manager PT Bank Pembangunan Indonesia in 1996-1998.

In addition to LMAN, he currently serves as Associate Director at PT PricewaterhouseCoopers Consulting Indonesia since 2015.

Selo Tarnando Sumosutargio

Jabatan / Position
Anggota Dewan Pengawas
/ Member of Supervisory Board

Usia / Ages
60 Tahun
/ 60 Years Old

Kewarganegaraan / Nationality
Indonesia
/ Indonesian

Domisili / Residence
Bekasi, Jawa Barat
/ Bekasi, West Java

Beliau meraih gelar Sarjana dari Universitas Sebelas Maret pada 1990.

Sebelumnya, beliau pernah menjabat Kepala Bidang Penilaian Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur (2020), Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor (2018), Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bima (2015), Kepala Bidang Lelang Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah (2013), Kepala Bidang Lelang Kantor Wilayah XII Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Banjarmasin (2012), Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta (2008), Kepala Seksi Administrasi Kekayaan Negara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta (2007), Kepala Seksi Dokumentasi dan Potensi Lelang Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Surakarta (2004), Kepala Seksi Informasi dan Hukum Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Surakarta (2002), Pelaksana Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (1999), Pelaksana Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara Tipe A Denpasar Kantor Wilayah VIIB UP LN Denpasar (1994), dan Pelaksana pada Sekretariat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (1992).

Mr. Sumosutargio obtained a Bachelor's degree from Universitas Sebelas Maret in 1990.

Previously, he served as Head of the Valuation Division for the Regional Office of the East Java Directorate General of State Assets (2020), Head of the Bogor State Assets and Auction Service Office (2018), Head of the Bima State Assets and Auction Service Office (2015), Head of the Auction Division for the Directorate Regional Office General of State Assets of South and Central Kalimantan (2013), Head of the Auction Division for Regional Office XII of the Directorate General of State Assets Banjarmasin (2012), Head of the State Asset Management Section of the Yogyakarta State Assets and Auction Service Office (2008), Head of the State Assets Administration Section of the Wealth Services Office State and Auction Yogyakarta (2007), Head of Documentation and Auction Potential Section of the Surakarta State Receivable and Auction Service Office (2004), Head of Information and Legal Section of the Surakarta State Receivable and Auction Service Office (2002), Executor of the Directorate General of Receivables and State Auctions (1999), Implementing Service Office for Management of State Receivables Type A Denpasar as the Regional Office VIIB UP LN Denpasar (1994), and Executor at the Secretariat of the Agency for State Receivables and Auctions (1992).

Basuki Purwadi

Jabatan / Position
Direktur Utama
/ President Director

Usia / Ages
55 Tahun
/ 55 Years Old

Kewarganegaraan / Nationality
Indonesia
/ Indonesian

Domisili / Residence
Depok, Jawa Barat
/ Depok, West Java

Beliau meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Gadjah Mada dan Magister Ilmu Hukum dari Universitas Indonesia.

Sebelumnya, beliau menjabat Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan Departemen Keuangan (1998-2006), Kepala Divisi Penjaminan Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah (UP3) Kementerian Keuangan (Penugasan) (2002- 2004), Kepala Bagian Kelembagaan Perasuransian Biro Perasuransian, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Kementerian Keuangan (2006- 2013), Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Badan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan (2013- 2015), Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (2015-2017), dan Sekretaris Badan Kebijakan Fiskal Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (2017-2020).

Selain di LMAN, saat ini beliau juga merangkap sebagai Komisaris PT Kereta Api Indonesia (Persero) sejak 2018.

Mr. Purwadi holds a Bachelor of Law degree from Universitas Gadjah Mada and a Master's of Law from Universitas Indonesia.

Previously, he served as Head of General Staffing Subdivision of the Secretariat of the Directorate General, Directorate General of Financial Institutions, Ministry of Finance (1998-2006), Head of the Guarantee Division of the Government Guarantee Implementation Unit (UP3) Ministry of Finance (Assignment) (2002-2004), Head of the Institutional Section Insurance Bureau of Insurance, Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency, Ministry of Finance (2006-2013), Head of Organizational and Personnel Division of the Secretariat of the Directorate General of Debt Management, Ministry of Finance (2013-2015), Head of the Financial Sector Policy Center, Fiscal Policy Agency, Ministry of Finance (2013-2015). 2015-2017), and Secretary of the Fiscal Policy Office of the Fiscal Policy Office of the Ministry of Finance (2017-2020).

In addition to LMAN, currently he also serves as Commissioner of PT Kereta Api Indonesia (Persero) since 2018.

Sutanto Basuki

Jabatan / Position
Direktur Keuangan dan Dukungan Organisasi
/ Director of Finance and Organizational Support

Usia / Ages
48 Tahun
/ 48 Years Old

Kewarganegaraan / Nationality
Indonesia
/ Indonesian

Domisili / Residence
Depok, Jawa Barat
/ Depok, West Java

Beliau meraih Diploma IV dari Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dan gelar Magister dari Universitas Gajah Mada.

Sebelumnya, beliau menjabat Kepala Divisi Perencanaan Lahan, Lembaga Manajemen Aset Negara (2018-2020), Kepala Seksi Standarisasi Penilaian Real Properti II, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (2012-2016), Kepala Seksi Seksi Pelayanan Penilaian, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palembang, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (2008-2012).

Mr. Basuki holds a Diploma IV from the Financial Education and Training Agency, Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, and a Master's degree from Universitas Gadjah Mada.

Previously, he served as Head of the Land Planning Division, State Asset Management Institute (2018-2020), Head of the Standardization of Real Property Valuation II Section, Directorate General of State Assets (2012-2016), Head of the Appraisal Service Section, Office of the State Property Service and Palembang Auction, Directorate General of State Assets (2008-2012).

Tetik Fajar Ruwandari

Jabatan / Position
Direktur Operasional dan Manajemen Risiko
/ Director of Operations and Risk Management

Usia / Ages
47 Tahun
/ 47 Years Old

Kewarganegaraan / Nationality
Indonesia
/ Indonesian

Domisili / Residence
Yogyakarta
/ Yogyakarta

Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada dan Magister Manajemen dari Universitas Negeri Surakarta.

Sebelumnya, beliau menjabat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Singkawang Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (2019-2020), Kepala Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (2017-2019), Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (2013-2017), Kepala Seksi Pembinaan Penilai Pemerintah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (2011-2013), Kepala Seksi Penilaian Properti Khusus Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (2009-2011).

Ms. Ruwandari holds a Bachelor of Economics degree from Gadjah Mada University and a Masters in Management from Surakarta State University.

Previously, he served as Head of the Singkawang State Assets and Auction Services Office, Directorate General of State Assets (2019-2020), Head of the State Asset Management Division, Directorate General of State Assets (2017-2019), Head of the State Asset Management Section, Directorate General of State Assets (2013-2017), Head of Government Appraiser Development Section, Directorate General of State Assets (2011-2013), Head of Special Property Appraisal Section, Directorate General of State Assets (2009-2011).

Qoswara

Jabatan / Position
Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan / Director of Land Procurement and Funding

Usia / Ages
47 Tahun / 47 Years Old

Kewarganegaraan / Nationality
Indonesia / Indonesian

Domisili / Residence
Banten / Banten

Beliau meraih gelar Magister Ekonomika Pembangunan, Manajemen Aset dan Penilaian Properti dari Universitas Gadjah Mada pada 2008.

Sebelum menjabat Direktur LMAN, beliau pernah menjabat Kepala Subdirektorat Barang Milik Negara I Direktorat Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (2016-2018) dan Kepala Bidang Penilaian, Kantor Wilayah Bali dan Nusa Tenggara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (2014-2016).

Mr. Qoswara earned his Master's in Development Economics, Asset Management and Property Valuation, from Universitas Gadjah Mada in 2008.

Prior to serving as Director of LMAN, he served as Head of the Sub-Directorate of State Property I, Directorate of State Property, Directorate General of State Assets (2016-2018) and Head of the Appraisal Division, Bali and Nusa Tenggara Regional Office, Directorate General of State Assets (2014-2016).

Candra Giri Artanto

Jabatan / Position
Direktur Pengembangan dan Pendayagunaan / Director of Development and Utilization

Usia / Ages
45 Tahun / 45 Years Old

Kewarganegaraan / Nationality
Indonesia / Indonesian

Domisili / Residence
Jakarta / Jakarta

Beliau meraih gelar Sarjana Teknik Sipil dan Magister di bidang Manajemen Konstruksi Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Sebelum menjabat Direktur Pengembangan dan Pendayagunaan, beliau adalah Direktur Operasional dan Manajemen Risiko LMAN (2019-2020), Kepala Divisi Konstruksi dan Pemeliharaan LMAN (2018-2019), serta General Manager Casagoya Group, Manajer BUMN Karya, Project Manager PT Puri Arta Prima (Orang Tua Group) (2013-2014), Manajer Properti Mekanis dan Pemeliharaan Prasetiya Mulya Business School (2011-2012), dan Manajer Proyek Senior Teknik Sipil/Infrastruktur PT Thiess Contractor Indonesia (2010-2011).

Mr. Artanto holds a Bachelor's degree in Civil Engineering and a Master's degree in Construction Management from Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Prior to serving as Director of Development and Utilization, he served as Director of Operations and Risk Management of LMAN (2019-2020), Head of Construction and Maintenance Division of LMAN (2018-2019), and General Manager of Casagoya Group, Manager BUMN Karya, Project Manager PT Puri Arta Prima (Orang Tua Group) (2013-2014), Manager of Mechanical Properties and Maintenance of Prasetiya Mulya Business School (2011-2012), and Senior Project Manager of Civil Engineering/ Infrastructure at PT Thiess Contractor Indonesia (2010-2011).

Pejabat Utama LMAN
LMAN Key Officers

M. Ikhwan Hadiprasojo
Kepala Divisi Anggaran Dan Akuntansi

Andhy Hermawan
Kepala Divisi Perbendaharaan

Luhur Nugroho Joko Hartono
Kepala Divisi Dukungan Organisasi dan Teknologi Informasi

Tb. Abdurahman
Kepala Divisi Sumber Daya Manusia, Manajemen Kinerja, dan Kepatuhan Internal

Widyaningrum
Kepala Divisi Hukum dan Perjanjian
Plt. Kepala Divisi Administrasi Tanah dan Litigasi sejak 18 Desember 2022

Jimmy Irawan
Kepala Divisi Perencanaan Lahan

Rini Rismayanti
Kepala Divisi Pendanaan Lahan

Angga Junaimi
Kepala SPI (Satuan Pengawasan Intern)

Candra Giri Artanto
Direktur Pengembangan dan Pendayagunaan

Bramantya Harimurti
Kepala Divisi Riset, Konsultasi, dan Manajemen Risiko

Yitzak Alfredo
Kepala Divisi Konstruksi dan Pemeliharaan
Plt. Kepala Divisi Pengamanan dan Pengendalian sejak 18 April 2022

Dewi Sophiyani Kurniawati
Kepala Divisi Pengembangan Usaha, Komunikasi, Dan Hubungan Kemitraan
Plt. Kepala Divisi Pendayagunaan Properti II sejak 18 Desember 2022

Yanuar Utomo
Kepala Divisi Pendayagunaan Properti I

Goklas Tunggul Partoho
Kepala Divisi Pengamanan dan Pengendalian Aset s.d. April 2022

Mahyarina Kusumawati
Kepala Divisi Administrasi Tanah dan Litigasi s.d. Desember 2022

Yekti Pratiwi
Kepala Divisi Pendayagunaan Properti II s.d. Desember 2022

Struktur Organisasi
Organization Structure

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 54/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Manajemen Aset Negara, struktur organisasi BLU LMAN adalah sebagai berikut:

Based on the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 54/PMK.01/2017 concerning the Organization and Working Procedures of State Asset Management Institutions, the organizational structure of BLU LMAN is as follows:

Basuki Purwadi
Direktur Utama
/ President Director

Angga Junaimi
Satuan Pengawasan Internal
/ Internal Control Unit

Sutanto Basuki
Direktur Keuangan dan Dukungan Organisasi
/ Director of Finance and Organizational Support

- **M. Ikhwan Hadi Prasojo**
  Divisi Anggaran dan Akuntansi
  / Budget and Accounting Division
- **Andhy Hermawan**
  Divisi Perbendaharaan
  / Treasury Division
- **Luhur Nugroho**
  Divisi Dukungan Organisasi dan Teknologi Informasi
  / Organizational Support and Information Technology Division
- **Tb. Abdurrahman**
  Divisi SDM, Manajemen Kerja dan Kepatuhan Internal
  / HR Division, Performance Management and Internal Compliance

Tetik Fajar Ruwandari
Direktur Operasional dan Manajemen Risiko
/ Director of Operations and Risk Management

- **Bramantya Harimurti**
  Divisi Riset Komunikasi dan Manajemen Resiko
  / Research Consulting and Risk Management Division
- -
  Divisi Pengamanan dan Pengendalian Aset
  / Asset Security and Control Division
- **Yitzak Alfredo**
  Divisi Konstruksi dan Pemeliharaan
  / Construction and Maintenance Division
- **Widyaningrum**
  Divisi Hukum dan Perjanjian
  / Legal and Agreement Division

Qoswara
Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan
/ Director of Land Procurement and Funding

- **Jimmy Irawan**
  Divisi Perencanaan Lahan
  / Land Planning Division
- **Rini Rismayanti**
  Divisi Pendanaan Lahan
  / Land Funding Division
- **Mahyarina Kusumawati**
  Divisi Administrasi dan Litigasi
  / Administration and Litigation Division

Candra Giri Artanto
Direktur Pengembangan dan Pendayagunaan
/ Director of Development and Utilization

- **Dewi Sophiyani Kurniawati**
  Divisi Pengembangan Usaha, Komunikasi, dan Hubungan Kemitraan
  / Business Development, Communication and Partnership Relations Division
- **Yanuar Utomo**
  Divisi Pendayagunaan Properti I
  / Property Utilization Division I
- **Yekti Pratiwi**
  Divisi Pendayagunaan Properti II
  / Property Utilization Division II

Aset yang Diserahkelolakan ke LMAN
Assets Transferred to LMAN

Nama Asets / Assets Name	Kota / City	Provinsi /Provice	Alamat Lengkap / Address	Rekuisisi /Recusition
Kepdirjen KN 114 Thn 2016				
Tanah Terogong	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. Tarogong No. 33, Cilandak, Jaksel	2016
Kepdirjen KN 204 Thn 2016				
Ruko Gereja Ayam	Jakarta Pusat	DKI Jakarta	Jalan Gereja Ayam No. 11, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta	2016
Gedung Dhanadyaksa Cikini	Jakarta Pusat	DKI Jakarta	Jalan Cikini Raya No. 91 A-D, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta	2016
Ruko Majapahit Dalam	Jakarta Pusat	DKI Jakarta	Komplek Majapahit Permai, Jalan Majapahit No. 18, 20, 22 Blok B/105, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta	2016
Ruko Caringin	Jakarta Pusat	DKI Jakarta	Jalan Kyai Caringin Blok A No. 6 (Jalan Tarakan Blok A/5B), Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta	2016
Ruko Majapahit Luar	Jakarta Pusat	DKI Jakarta	Komplek Majapahit Permai, Jalan Majapahit No. 18, 20, 22 Blok B No. 04, 05, 06, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta	2016
Ruko Pinangsia Glodok	Jakarta Barat	DKI Jakarta	Jalan Pinangsia, Komplek Pertokoan Plaza Glodok Blok A-15-17, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Mangga Besar, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta	2016
Ruko Kedoya Permai	Jakarta Barat	DKI Jakarta	Komplek Pertokoan Taman Kedoya Permai Blok A No. 3A-B, Kelurahan Kedoya, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta	2016
Ruko Pondok Indah Plaza 1	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Komplek Pertokoan Pondok Indah Plaza 1 Blok UA Persil No. 01, Jalan Metro Pondok Indah, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta	2016
Ruko Pondok Indah Plaza 2	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Komplek Pertokoan Pondok Indah Plaza 2 Blok BA Persil No. 11, Jalan Metro Pondok Indah, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta	2016
Gedung Panglima Polim 20	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. Panglima Polim Raya No. 20 Blok B, III Persil No, 152, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta	2016
Ruko Bintaro 1 (Blok D-50)	Tangerang	Banten	Komplek Pertokoan Bintaro Blok D-50, Kelurahan Pondok Karya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten	2016
Gedung THD A	Semarang	Jawa Tengah	Jalan Agus Salim, Komplek Ruko THD Blok A No. 16-17, Jalan Pekojan, kel. Purwadinatan, Kec. Semarang Tengah, Semarang, Kota Semarang, Jawa Tengah	2016
Ruko THD B	Semarang	Jawa Tengah	Komplek Ruko THD Blok B-17 Jalan H. Agus Salim, Kelurahan Purwodinatan, Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah	2016
Ruko Sugiono Medan	Medan	Sumatera Utara	Jalan Kol. Sugiono, Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Kota Medan, Sumatera Utara	2016
Ruko Gatot Subroto Medan 81	Medan	Sumatera Utara	Jalan Jend. Gatot Subroto No. 81, Kelurahan Petisah	2016
Kepdirjen KN 410 Thn 2016				
Puri Casablanca A.01-05	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. Casablanca Kav. 7, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet	2016
Puri Casablanca A.20-01	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. Casablanca Kav. 7, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet	2016
Puri Casablanca A.20-06	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. Casablanca Kav. 7, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet	2016
Puri Casablanca B.05-06	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. Casablanca Kav. 7, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet	2016
Puri Casablanca B.05-08	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. Casablanca Kav. 7, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet	2016
Puri Casablanca C.07-01	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. Casablanca Kav. 7, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet	2016
Puri Casablanca C.07-05	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. Casablanca Kav. 7, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet	2016
Puri Casablanca C.07-08	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. Casablanca Kav. 7, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet	2016
Puri Casablanca C.20-01	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. Casablanca Kav. 7, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet	2016
Puri Casablanca C.20-09	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. Casablanca Kav. 7, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet	2016
Puri Casablanca C.21-01	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. Casablanca Kav. 7, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet	2016
Puri Casablanca A.21-01	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. Casablanca Kav. 7, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet	2016
Puri Casablanca A.21-06	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. Casablanca Kav. 7, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet	2016
Puri Casablanca B.05-02	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. Casablanca Kav. 7, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet	2016
Puri Casablanca B.06-08	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. Casablanca Kav. 7, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet	2016
Puri Casablanca B.08-08	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. Casablanca Kav. 7, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet	2016
Puri Casablanca B.09-03	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. Casablanca Kav. 7, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet	2016
Puri Casablanca B.17-02	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. Casablanca Kav. 7, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet	2016
Puri Casablanca B.17-05	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. Casablanca Kav. 7, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet	2016
Puri Casablanca B.17-06	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. Casablanca Kav. 7, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet	2016
Puri Casablanca C.06-05	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. Casablanca Kav. 7, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet	2016
Puri Casablanca C.06-08	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. Casablanca Kav. 7, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet	2016
Puri Casablanca C.09-01	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. Casablanca Kav. 7, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet	2016
Puri Casablanca C.16-01	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. Casablanca Kav. 7, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet	2016
Puri Casablanca C.17-08	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. Casablanca Kav. 7, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet	2016
Puri Casablanca C.17-09	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. Casablanca Kav. 7, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet	2016
Puri Casablanca C.18-01	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. Casablanca Kav. 7, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet	2016
Puri Casablanca C.19-01	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. Casablanca Kav. 7, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet	2016
Puri Casablanca C.19-06	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. Casablanca Kav. 7, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet	2016
Puri Casablanca C.29-09	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. Casablanca Kav. 7, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet	2016
Puri Casablanca C.30-09	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. Casablanca Kav. 7, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet	2016
Puri Casablanca A.03-01	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. Casablanca Kav. 7, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet	2016
Puri Casablanca A.29-06	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. Casablanca Kav. 7, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet	2016
Puri Casablanca B.02-05	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. Casablanca Kav. 7, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet	2016
Puri Casablanca B.18-06	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. Casablanca Kav. 7, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet	2016
Puri Casablanca B.18-07	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. Casablanca Kav. 7, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet	2016
Puri Casablanca B.28-06	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. Casablanca Kav. 7, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet	2016
Puri Casablanca B.29-07	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. Casablanca Kav. 7, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet	2016
Puri Casablanca B.30-07	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. Casablanca Kav. 7, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet	2016
Puri Casablanca C.02-05	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. Casablanca Kav. 7, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet	2016
Puri Casablanca C.02-08	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. Casablanca Kav. 7, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet	2016
Puri Casablanca C.09-05	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. Casablanca Kav. 7, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet	2016
Puri Casablanca C.09-09	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. Casablanca Kav. 7, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet	2016
Puri Casablanca C.10-05	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. Casablanca Kav. 7, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet	2016
Puri Casablanca C.12-05	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. Casablanca Kav. 7, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet	2016
Puri Casablanca C.12-08	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. Casablanca Kav. 7, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet	2016
Puri Casablanca C.12-09	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. Casablanca Kav. 7, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet	2016
Puri Casablanca C.27-09	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. Casablanca Kav. 7, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet	2016
Puri Casablanca C.28-09	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. Casablanca Kav. 7, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet	2016
Puri Casablanca A.22-01	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. Casablanca Kav. 7, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet	2016
Puri Casablanca A.22-06	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. Casablanca Kav. 7, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet	2016
Puri Casablanca A.28-06	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. Casablanca Kav. 7, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet	2016
Puri Casablanca A.28-07	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. Casablanca Kav. 7, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet	2016
Puri Casablanca B.20-06	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. Casablanca Kav. 7, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet	2016
Puri Casablanca B.21-06	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. Casablanca Kav. 7, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet	2016
Puri Casablanca B.22-06	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. Casablanca Kav. 7, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet	2016
Puri Casablanca B.22-07	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. Casablanca Kav. 7, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet	2016
Puri Casablanca B.23-06	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. Casablanca Kav. 7, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet	2016
Puri Casablanca B.25-06	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. Casablanca Kav. 7, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet	2016
Puri Casablanca A 23.06	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. Casablanca Kav. 7, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet	2016
Puri Casablanca A 26.06	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. Casablanca Kav. 7, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet	2016
Puri Casablanca A27.06	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. Casablanca Kav. 7, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet	2016
Puri Casablanca A 27.07	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. Casablanca Kav. 7, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet	2016
Puri Casablanca A 28.01	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. Casablanca Kav. 7, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet	2016
Puri Casablanca A 29.01	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. Casablanca Kav. 7, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet	2016
Puri Casablanca A 30.06	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. Casablanca Kav. 7, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet	2016
Puri Casablanca A 30.07	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. Casablanca Kav. 7, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet	2016
Puri Casablanca A 31.06	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. Casablanca Kav. 7, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet	2016
Puri Casablanca A 31.07	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. Casablanca Kav. 7, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet	2016
Puri Casablanca	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. Casablanca Kav. 7, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet	2016
Puri Casablanca	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. Casablanca Kav. 7, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet	2016
Puri Casablanca	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. Casablanca Kav. 7, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet	2016
Puri Casablanca	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. Casablanca Kav. 7, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet	2016
Puri Casablanca	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. Casablanca Kav. 7, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet	2016
Puri Casablanca	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. Casablanca Kav. 7, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet	2016
Puri Casablanca	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. Casablanca Kav. 7, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet	2016
Puri Casablanca	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. Casablanca Kav. 7, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet	2016
Puri Casablanca	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. Casablanca Kav. 7, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet	2016
Puri Casablanca	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. Casablanca Kav. 7, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet	2016
Puri Casablanca	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. Casablanca Kav. 7, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet	2016
Puri Casablanca	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. Casablanca Kav. 7, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet	2016
Puri Casablanca	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. Casablanca Kav. 7, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet	2016
Puri Casablanca	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. Casablanca Kav. 7, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet	2016
Puri Casablanca	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. Casablanca Kav. 7, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet	2016
Puri Casablanca	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. Casablanca Kav. 7, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet	2016
Puri Casablanca	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. Casablanca Kav. 7, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet	2016
Puri Casablanca	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. Casablanca Kav. 7, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet	2016
Puri Casablanca	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. Casablanca Kav. 7, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet	2016
Puri Casablanca	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. Casablanca Kav. 7, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet	2016
Puri Casablanca	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. Casablanca Kav. 7, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet	2016
Puri Casablanca	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. Casablanca Kav. 7, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet	2016
Puri Casablanca	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. Casablanca Kav. 7, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet	2016
Puri Casablanca	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. Casablanca Kav. 7, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet	2016
Puri Casablanca	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. Casablanca Kav. 7, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet	2016
Puri Casablanca	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. Casablanca Kav. 7, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet	2016
Puri Casablanca	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. Casablanca Kav. 7, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet	2016
Puri Casablanca	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. Casablanca Kav. 7, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet	2016

Puri Casablanca	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. Casablanca Kav. 7, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet	2016
Puri Casablanca	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. Casablanca Kav. 7, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet	2016
Puri Casablanca	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. Casablanca Kav. 7, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet	2016
Puri Casablanca	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. Casablanca Kav. 7, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet	2016
Puri Casablanca	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. Casablanca Kav. 7, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet	2016
Puri Casablanca	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. Casablanca Kav. 7, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet	2016
Puri Casablanca	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. Casablanca Kav. 7, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet	2016
Puri Casablanca	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. Casablanca Kav. 7, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet	2016
Puri Casablanca	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. Casablanca Kav. 7, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet	2016
Puri Casablanca	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. Casablanca Kav. 7, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet	2016
Puri Casablanca	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. Casablanca Kav. 7, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet	2016
Puri Casablanca	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. Casablanca Kav. 7, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet	2016
Puri Casablanca	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. Casablanca Kav. 7, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet	2016
Puri Casablanca	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. Casablanca Kav. 7, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet	2016
Puri Casablanca	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. Casablanca Kav. 7, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet	2016
Puri Casablanca	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. Casablanca Kav. 7, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet	2016
Puri Casablanca	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. Casablanca Kav. 7, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet	2016
Puri Casablanca	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. Casablanca Kav. 7, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet	2016
Puri Casablanca	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. Casablanca Kav. 7, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet	2016
Puri Casablanca	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. Casablanca Kav. 7, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet	2016
Puri Casablanca	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. Casablanca Kav. 7, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet	2016

Kepdirjen KN 212 Thn 2017

Gedung Dhanadyaksa Dipati Ukur	Bandung	Jawa Barat	Jalan Dipatiukur 33, Kota Bandung, Jawa Barat	2017

Kepdirjen KN 178 Thn 2017

Rasuna Said	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C No. 19, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta	2017

Kepdirjen KN 164 Thn 2018

Aset Jalan Agus Salim	Jakarta Pusat	DKI Jakarta	Jalan Agus Salim Nomor 108 dan 108A , Kota Jakarta	2018
Aset Jalan Surabaya	Jakarta Pusat	DKI Jakarta	Jalan Surabaya 60 , Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta	2018
Aset Mampang Gatsu (Tendean I)	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jalan Kapten Tendean, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta	2018
Aset Mampang Sonati (Tendean II)	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jalan Kapten Tendean, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta	2018
Aset Mampang Bestindo (Tendean III)	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jalan Kapten Tendean, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta	2018
Aset Mampang Lainnya (Tendean IV)	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jalan Kapten Tendean, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta	2018

Kepdirjen KN 342 Thn 2018

Apt Taman Anggrek I-40-J	Jakarta Barat	DKI Jakarta	Jalan Letjen S. Parman, Kel. Tanjung Duren Selatan, Kec. Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta	2018
Apt Taman Anggrek I-40-K	Jakarta Barat	DKI Jakarta	Jalan Letjen S. Parman, Kel. Tanjung Duren Selatan, Kec. Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta	2018
Apt Tropik 26.07	Jakarta Barat	DKI Jakarta	Jalan S. Parman, Kel. Tanjung Duren Utara, Kec. Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta	2018
Apt Tropik 27.03	Jakarta Barat	DKI Jakarta	Jalan S. Parman, Kel. Tanjung Duren Utara, Kec. Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta	2018
Kondominium Kelapa Gading E-7-1-B	Jakarta Utara	DKI Jakarta	Jalan Terusan Gading Timur Boulevard No. 88, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta	2018
Kondominium Kelapa Gading E-3-1-B	Jakarta Utara	DKI Jakarta	Jalan Terusan Gading Timur Boulevard No. 88, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta	2018
Kondominium Kelapa Gading E-4-6-A	Jakarta Utara	DKI Jakarta	Jalan Terusan Gading Timur Boulevard No. 88, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta	2018
Kondominium Kelapa Gading A-10-02	Jakarta Utara	DKI Jakarta	Jalan Terusan Gading Timur Boulevard No. 88, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta	2018
Kondominium Kelapa Gading B-14-05	Jakarta Utara	DKI Jakarta	Jalan Terusan Gading Timur Boulevard No. 88, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta	2018
Kondominium Kelapa Gading C-02-03	Jakarta Utara	DKI Jakarta	Jalan Terusan Gading Timur Boulevard No. 88, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta	2018
Ruko Gading Indah A2	Jakarta Utara	DKI Jakarta	Jalan Raya Kelapa Gading Indah No. 8 Kav A2-A3, Kel. Kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta	2018
Ruko Gading Indah A3	Jakarta Utara	DKI Jakarta	Jalan Raya Kelapa Gading Indah No. 8 Kav A2-A3, Kel. Kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta	2018

Kepdirjen KN 276 Thn 2019

Aset Lapangan Golf Ciperna	Cirebon	Jawa Barat	Jl. Cilimus, Ciperna Cirebon	2019

Kepdirjen KN 394 Thn 2019

Apartemen Taman Kemang Jaya 1085	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. Kemang Selatan, Bangka, Mampang Prapatan	2019
Apartemen Taman Kemang Jaya 1097	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. Kemang Selatan, Bangka, Mampang Prapatan	2019
Apartemen Taman Kemang Jaya 1101	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. Kemang Selatan, Bangka, Mampang Prapatan	2019
Apartemen Mitra Sunter	Jakarta Utara	DKI Jakarta	Sunter Jaya, Tanjung Priok	2019
Puri Casablanca A.19.02	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. Casablanca Kav. 7, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet	2019
Puri Casablanca A.26.01	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. Casablanca Kav. 7, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet	2019
Puri Casablanca A.28.01	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. Casablanca Kav. 7, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet	2019
Puri Casablanca A.29.01	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. Casablanca Kav. 7, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet	2019
Puri Casablanca A.30.06	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. Casablanca Kav. 7, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet	2019
Puri Casablanca A.30.07	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. Casablanca Kav. 7, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet	2019
Puri Casablanca A.31.06	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. Casablanca Kav. 7, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet	2019
Puri Casablanca A.31.07	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. Casablanca Kav. 7, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet	2019
Puri Casablanca A.35.01	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. Casablanca Kav. 7, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet	2019
Puri Casablanca A.35.06	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. Casablanca Kav. 7, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet	2019
Puri Casablanca A.35.07	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. Casablanca Kav. 7, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet	2019
Puri Casablanca B.21.02	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. Casablanca Kav. 7, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet	2019
Puri Casablanca B.22.02	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. Casablanca Kav. 7, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet	2019
Puri Casablanca B.23.02	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. Casablanca Kav. 7, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet	2019
Puri Casablanca B.29.06	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. Casablanca Kav. 7, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet	2019
Puri Casablanca B.30.06	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. Casablanca Kav. 7, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet	2019
Puri Casablanca B.35.03	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. Casablanca Kav. 7, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet	2019
Puri Casablanca B.35.05	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. Casablanca Kav. 7, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet	2019
Apartemen Hayam Wuruk 2308	Jakarta Barat	DKI Jakarta	Jl. Hayam Wuruk, Maphar, Kec. Taman Sari	2019
Apartemen Hayam Wuruk 1107	Jakarta Barat	DKI Jakarta	Jl. Hayam Wuruk, Maphar, Kec. Taman Sari	2019
Apartemen Hayam Wuruk 1610	Jakarta Barat	DKI Jakarta	Jl. Hayam Wuruk, Maphar, Kec. Taman Sari	2019
Apartemen Puri Kemayoran	Jakarta Pusat	DKI Jakarta	Jl. Landas Pacu Barat No.A6, RT.13/RW.6, Kebon Kosong, Kec. Kemayoran	2019
Apartemen Mitra Bahari	Jakarta Utara	DKI Jakarta	Jl. Pakin No.1, RT.9/RW.1, Penjaringan, Kec. Penjaringan	2019
Apartemen Taman Anggrek 33B	Jakarta Barat	DKI Jakarta	Jl. Letjen S. Parman No.Kav. 21, RT.12/RW.1, Tanjung Duren Sel, Kec. Grogol petamburan	2019
Apartemen Taman Anggrek 34C	Jakarta Barat	DKI Jakarta	Jl. Letjen S. Parman No.Kav. 21, RT.12/RW.1, Tanjung Duren Sel, Kec. Grogol petamburan	2019
Apartemen Taman Anggrek 35D	Jakarta Barat	DKI Jakarta	Jl. Letjen S. Parman No.Kav. 21, RT.12/RW.1, Tanjung Duren Sel, Kec. Grogol petamburan	2019
Apartemen Taman Anggrek 36C	Jakarta Barat	DKI Jakarta	Jl. Letjen S. Parman No.Kav. 21, RT.12/RW.1, Tanjung Duren Sel, Kec. Grogol petamburan	2019
Apartemen Taman Anggrek 37D	Jakarta Barat	DKI Jakarta	Jl. Letjen S. Parman No.Kav. 21, RT.12/RW.1, Tanjung Duren Sel, Kec. Grogol petamburan	2019
Apartemen Taman Rasuna T14-H	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. H. R. Rasuna Said No.2, RT.16/RW.5, Kel. Karet Kuningan, Kec. Setia Budi	2019
Apartemen Taman Rasuna T15.19-H	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. H. R. Rasuna Said No.2, RT.16/RW.5, Kel. Karet Kuningan, Kec. Setia Budi	2019
Apartemen Taman Rasuna T15.21-D	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. H. R. Rasuna Said No.2, RT.16/RW.5, Kel. Karet Kuningan, Kec. Setia Budi	2019
Apartemen Taman Rasuna T15.22-H	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. H. R. Rasuna Said No.2, RT.16/RW.5, Kel. Karet Kuningan, Kec. Setia Budi	2019
Apartemen Taman Rasuna T15.26-D	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. H. R. Rasuna Said No.2, RT.16/RW.5, Kel. Karet Kuningan, Kec. Setia Budi	2019
Apartemen Taman Rasuna T15.1-G	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. H. R. Rasuna Said No.2, RT.16/RW.5, Kel. Karet Kuningan, Kec. Setia Budi	2019
Apartemen Taman Rasuna T9.27-B	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. H. R. Rasuna Said No.2, RT.16/RW.5, Kel. Karet Kuningan, Kec. Setia Budi	2019

Apartemen Taman Rasuna T9.28-C	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. H. R. Rasuna Said No.2, RT.16/RW.5, Kel. Karet Kuningan, Kec. Setia Budi	2019
Apartemen Taman Rasuna T9.29-B	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. H. R. Rasuna Said No.2, RT.16/RW.5, Kel. Karet Kuningan, Kec. Setia Budi	2019
Aset Kali Besar Timur 27	Jakarta Barat	DKI Jakarta	Jl. Kali Besar Timur no. 27, Kel. Pinangsia, Kec. Taman Sari	2019
Aset Kebayoran Lama 174	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. Kebayoran Lama No.174 A2, Kel. Cipulir, Kec. Kebayoran Lama	2019
Aset Kebayoran Lama 47	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. Raya Kebayoran Lama No.47 A RT 002 RW 01, Kel. Cipulir, Kec. Kebayoran Lama	2019
Aset Kalideres	Jakarta Barat	DKI Jakarta	Jl. Peta Selatan RT/RW 08/01, Gang Darul Salam (Jl. Benda Raya) Kalideres	2019
Aset Cilandak	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. Kebon Besar I No.27 RT/RW 06/06, Kel. Gandaria Selatan, Kec. Cilandak	2019
Aset Panglima Polim 55	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. Panglima Polim Raya No. 55, Kel. Melawai, Kec. Kebayoran Baru	2019
Aset Kebayoran Lama 16B	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. Kebayoran Lama No. 16 B, Kec. Kebayoran Lama	2019
Aset Mangga Besar Tangki	Jakarta Barat	DKI Jakarta	Jl. Mangga Besar IX Blok D No. 74, Kel. Tangki, Kec. Taman Sari	2019
Aset Mangga Besar Raya 1	Jakarta Barat	DKI Jakarta	Jl. Mangga Besar Raya No. 38CE, Kel. Taman Sari, Kec. Taman Sari	2019
Aset Mangga Besar Raya 2	Jakarta Barat	DKI Jakarta	Jl. Mangga Besar Raya No. 38CF, Kel. Taman Sari, Kec. Taman Sari	2019
Aset Green Garden	Jakarta Barat	DKI Jakarta	Komplek Green Garden Blok I-9 No.49, Taman Kedoya Barat Indah, Kebon Jeruk	2019
Aset Pasar Glodok	Jakarta Barat	DKI Jakarta	Jl. Pasar Glodok Selatan No. 4, Kel. Glodok, Kec. Taman Sari	2019
Aset Kali Besar Timur 27K	Jakarta Barat	DKI Jakarta	Jl. Kali Besar Timur No.27K, Kel. Pinangsia, Kec. Tamansari	2019
Aset Pasar Cengkareng Blok D-11	Jakarta Barat	DKI Jakarta	GG Cengkareng Blok-D (Pasar Cengkareng Blok D)	2019
Aset Pasar Cengkareng Blok D-12	Jakarta Barat	DKI Jakarta	GG Cengkareng Blok-D (Pasar Cengkareng Blok D)	2019
Aset Pasar Cengkareng Blok D-14	Jakarta Barat	DKI Jakarta	GG Cengkareng Blok-D (Pasar Cengkareng Blok D)	2019
Aset Pasar Cengkareng Blok D-16	Jakarta Barat	DKI Jakarta	GG Cengkareng Blok-D (Pasar Cengkareng Blok D)	2019
Aset Pasar Cengkareng Blok E-4	Jakarta Barat	DKI Jakarta	GG Cengkareng Blok-E (Pasar Cengkareng Blok E)	2019
Aset Pasar Cengkareng Blok E-6	Jakarta Barat	DKI Jakarta	GG Cengkareng Blok-E (Pasar Cengkareng Blok E)	2019
Aset Pasar Cengkareng Blok E-8	Jakarta Barat	DKI Jakarta	GG Cengkareng Blok-E (Pasar Cengkareng Blok E)	2019
Aset Mangga Besar XIII	Jakarta Pusat	DKI Jakarta	Jl. Mangga Besar XIII No. 3 RT/RW 0019/05, Kel. Mangga Dua Selatan, Kec. Sawah Besar	2019
Aset Lautze	Jakarta Pusat	DKI Jakarta	Jl. Lautze No. 44 A, Kel. Kartini, Kec. Sawah Besar	2019
Aset Tanah Kusir	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. RC. Veteran Kav. 11 RT/RW 02/01, Bintaro, Kel. Pesanggrahan	2019
Aset Bintaro 2	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Rukan Bintaro Jaya Sektor I Blok E No.14, Jl. Bintaro Utama, Pondok Pinang, Kebayoran Lama	2019
Aset Fatmawati 40X	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. Fatmawati No. 40X, Cipete Utara, Kec. Kebayoran Baru	2019
Aset Klender	Jakarta Timur	DKI Jakarta	Pertokoan Klender Blok B1 No. 7-8	2019
Aset Kali Besar Timur 23	Jakarta Barat	DKI Jakarta	Jl. Kali Besar Timur No.23, Kel. Pinangsia, Kec. Taman Sari	2019
Aset Kali Besar Timur 24	Jakarta Barat	DKI Jakarta	Jl. Kali Besar Timur No. 24, Kel. Pinangsia, Kec. Taman Sari	2019
Aset Kali Besar Timur 25	Jakarta Barat	DKI Jakarta	Jl. Kali Besar Timur No.25, Kel. Pinangsia, Kec. Taman Sari	2019
Aset Kebayoran Lama 37	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. Kebayoran Lama No.37, Kel. Grogol Selatan, Kec. Kebayoran Lama	2019
Aset Glodok Plaza	Jakarta Barat	DKI Jakarta	Komplek Glodok Plaza Blok F No. 91, 92, 93, 136, 137 Dan 138, Jl. Pinangsia, Kel. Pinangsia, Kec. Taman Sari	2019
Aset Tanah Abang Blok F 1/2	Jakarta Pusat	DKI Jakarta	Jl. KH. Fachrudin Kav 36 Blok F No. 1-2, Kel. Kampung Bali, Kec. Tanah Abang	2019
Aset Rawabuaya 1	Jakarta Barat	DKI Jakarta	Jl. Pulo Mat, RT/RW 10/04, Kel. Rawa Buaya, Kec. Cengkareng	2019
Aset Rawabuaya 2	Jakarta Barat	DKI Jakarta	Jl. Pulo Mat, RT/RW 10/04, Kel. Rawa Buaya, Kec. Cengkareng	2019
Aset Tomang Tol	Jakarta Barat	DKI Jakarta	Jl. Kedoya Raya/Tomang Tol Blok A2 No. 16, RT/RW 09/04, Kel. Kedoya Selatan, Kec. Kebon Jeruk	2019
Aset Jelambar Baru	Jakarta Barat	DKI Jakarta	Jl. Jelambar Baru No.3E, Kel. Jelambar Baru, Kec. Grogol Petamburan	2019
Aset Latumenten	Jakarta Barat	DKI Jakarta	Jl. Latumenten No.19, Blok F No. 16-17, Kel. Grogol, Kec. Grogol Petamburan	2019
Aset Cengkareng Utama	Jakarta Barat	DKI Jakarta	Jl. Utama II No. 3 (Dh.Kamal Raya No. 25), Kel. Cengkareng Barat, Kec. Cengkareng	2019
Aset Pinangsia 105	Jakarta Barat	DKI Jakarta	Jl. Pinangsia Raya No.105, Kel. Pinangsia, Kec. Taman Sari	2019
Aset Arcadia	Jakarta Barat	DKI Jakarta	Komplek Daan Mogot Arcadia Blok E No. 16 (D/H. Komplek Daan Mogot Center Blok E)	2019
Aset Duri Kosambi	Jakarta Barat	DKI Jakarta	Komplek Ruko Jl. Kosambi Baru No 1E-F, Kel. Duri Kosambi, Kec. Cengkareng	2019
Aset Grogol Permai	Jakarta Barat	DKI Jakarta	Grogol Permai A/17	2019
Aset Galur	Jakarta Pusat	DKI Jakarta	Jl. Letjen Soeprapto No. 29 K Rt/Rw 07/02, Kel. Harapan Mulia, Kec. Kemayoran	2019
Aset Roxy	Jakarta Pusat	DKI Jakarta	Jl. KH. Hasyim Ashari Blok D1 No. 9, Kel. Cideng, Kec. Gambir	2019
Aset Tanah Abang Blok F 115	Jakarta Pusat	DKI Jakarta	Jl. Kebon Jati No.18 Blok F No.115 , Kel. Kampung Bali, Kec. Tanah Abang	2019
Aset Tanah Abang Blok F 111A	Jakarta Pusat	DKI Jakarta	Ruko Tanah Abang Blok F No.111 A	2019
Aset Tanah Abang Blok F 111B	Jakarta Pusat	DKI Jakarta	Ruko Tanah Abang Blok F No.111 B	2019
Aset Warung Buncit	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. Warung Buncit Raya No.10 C, Kel. Ragunan, Kec. Pasar Minggu	2019
Aset Blok M	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. Sultan Hasanuddin No. 70, RT/RW 001/01, Kel. Melawai, Kec. Kebayoran Baru	2019
Aset Fatmawati 26A	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. RS. Fatmawati No. 26A, Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak	2019
Aset Fatmawati 26H	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. RS. Fatmawati No. 26H, Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak	2019

Aset Kampung Melayu	Jakarta Timur	DKI Jakarta	Jl. Bali Mester RT.015 RW 01 Kp. Melayu, Kel. Balimester, Kec. Jatinegara (Fakta Jl. Basuki Rachmat Rt 002/02 No.8g)	2019
Aset Kali Malang	Jakarta Timur	DKI Jakarta	Jl. Kali Malang Raya Kav. PTB (Jl. Inspeksi Saluran Kalimalang Blok G 17/2)	2019
Aset Grand Boutique	Jakarta Utara	DKI Jakarta	Pertokoan Grand Boutique Blok C No.52, Jl. Mangga Dua Raya	2019
Aset Pluit	Jakarta Utara	DKI Jakarta	Jl. Pluit Karang Timur Blok B VIII, Kav 18 No.108	2019
Aset Ancol	Jakarta Utara	DKI Jakarta	Jl. RE. Martadinata Ancol No. 1 A, Kel. Ancol, Kec. Penjaringan	2019

Kepdirjen KN 224 Thn 2020

Aset Tanah Abang Bukit	Jakarta Pusat	DKI Jakarta	Komplek Pertokoan Tanah Abang Bukit Blok D-1 No. 2, Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat (Jl. KH. Fachrudin)	2020
Aset Wahid Hasyim	Jakarta Pusat	DKI Jakarta	Jl. Raya Wahid Hasyim No. 174 Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat	2020
Aset JITC Mangga Dua	Jakarta Utara	DKI Jakarta	Rumah Susun JITC Mangga Dua - Lantai 1 Blok IA No. 4, Jl. Raya Mangga Dua, Kelurahan Ancol, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara	2020
Aset Kelapa Gading TB2	Jakarta Utara	DKI Jakarta	Jl. Kelapa Gading Boulevard Raya, Blok TB2 No. 23, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara	2020
Aset Kelapa Gading TN2	Jakarta Utara	DKI Jakarta	Jl. Kelapa Gading Boulevard, Blok TN 2 Kav. 26&25, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara	2020
Aset Duta Harapan Indah Blok B	Jakarta Utara	DKI Jakarta	Komplek Duta Harapan Indah Blok B No. 6 dan No. 7, Jl. Kapuk Muara, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara	2020
Aset Duta Harapan Indah Blok C	Jakarta Utara	DKI Jakarta	Komplek Duta Harapan Indah Blok C No. 6 dan No. 7, Jl. Kapuk Muara, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara	2020
Aset Muara Karang	Jakarta Utara	DKI Jakarta	Jl. Muara Karang Blok CC 5 No. 18, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara	2020
Aset Kampung Gusti	Jakarta Utara	DKI Jakarta	Jl. Kampung Gusti Blok N Kav. No. 59 dan No. 60, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara	2020
Aset Plaza Pacific Kelapa Gading	Jakarta Utara	DKI Jakarta	Komplek Perkantoran Plaza Pasific Blok A-1 Kav. No. 1, 3, 5 dan 7, Jl. Boulevard Barat Kelapa Gading, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara	2020
Aset Pintu Besar Selatan 82E	Jakarta Barat	DKI Jakarta	Jl. Pintu Besar Selatan No. 82-E, Kelurahan Pinangsia, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat	2020
Aset Pintu Besar Selatan 32-84	Jakarta Barat	DKI Jakarta	Jl. Pintu Besar Selatan No. 32 dan 84, RT001/RW05, Kelurahan Pinangsia, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat	2020
Aset Pintu Besar Selatan 86-88	Jakarta Barat	DKI Jakarta	Jl. Pintu Besar Selatan No. 86 dan 88, RT14/RW05, Kelurahan Pinangsia, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat	2020
Aset Gajah Mada	Jakarta Barat	DKI Jakarta	Jl. Gajah Mada No. 149, Kelurahan Keagungan, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat	2020
Aset Ciledug	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Jl. Ciledug Raya No. 100-101, RT04/RW01, Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan	2020
Aset Bintaro 3	Tangerang Selatan	Banten	Komplek Pertokoan Bintaro Jaya Sektor 9, Blok E-1, Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang	2020
Aset Pandeglang	Pandeglang	Banten	Blok Pematang Nangka, Jl. Cipeti, Desa Kertaraharja, Kec. Panimbang (Cigeulis), Pandeglang.	2020
Aset Beteng Plaza Solo	Solo	Jawa Tengah	Komplek Ruko Beteng Plaza Blok A No. 1, Jl. Kapten Mulyadi, Kelurahan Kedung Lumbu, Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta, Jawa Tengah	2020
Aset Pekalongan	Pekalongan	Jawa Tengah	Jl. Progo No. 24, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kota Pekalongan Barat, Pekalongan, Jawa Tengah	2020
Aset Jembatan Merah Plaza	Surabaya	Jawa Timur	Jembatan Merah Plaza I, Lantai Ground Blok A No. 4, 5, 24 - Jl.Taman Jayengrono No. 2-4, Kelurahan Krembangan Selatan, Kecamatan Krembangan, Kotamadya Surabaya, Jawa Timur	2020
Aset Gubeng	Surabaya	Jawa Timur	Jl. Raya Gubeng No. 47, Kelurahan Gubeng, Kecamatan Gubeng, Surabaya, Jawa Timur	2020
Aset Lampung Way Lunik	Bandar Lampung	Lampung	Jl. Soekarno Hatta, Keluaran Way Lunik, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung, Lampung	2020
Aset Lampung Langkapura	Bandar Lampung	Lampung	Jl. Pagar Alam No. 30, Kelurahan Langkapura, Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung, Lampung	2020
Aset Lampung Tanjung Bintang	Lampung Selatan	Lampung	Desa Serdang RT 01 RW 02, Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan, Lampung	2020
Aset Pasar Ilir	Palembang	Sumatera Selatan	Jl. Pasar 16 Ilir, Kelurahan 16 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, Sumatera Selatan	2020
Aset Binjai	Binjai	Sumatera Utara	Jl. Jend. Sudirman No. 264, Kelurahan Pekan Binjai, Kecamatan Binjai Kota, Binjai, Sumatera Utara	2020
Aset Karo	Karo	Sumatera Utara	Jl. Merdeka, Desa Merdeka, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo, Sumatera Utara	2020
Aset Brigjen Katamso Medan	Medan	Sumatera Utara	Jl. Brig. Jend. Katamso, Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara	2020
Aset Yos Sudarso 1 Medan	Medan	Sumatera Utara	Jl. K.L. Yos Sudarso No. 105-107 & No.219-219A, Kelurahan Pulau Brayan Kota, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara	2020
Aset Ampenan	Lombok Barat	NTB	Kompleks Pertokoan Ampenan, Jl. Yos Sudarso No. 71 dan No. 73, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat	2020
Aset Nusantara Makassar	Makassar	Sulawesi Selatan	Jl. Nusantara No. 106 - 108, Kelurahan Pattunuang, Kecamatan Wajo, Makassar, Sulawesi Selatan	2020
Aset Duta Parigi	Sukabumi	Jawa Barat	Perum Duta Parigi Blok D No. 1 & 2, Kelurahan Nyomplong, Kecamatan Warudoyong, Sukabumi, Jawa Barat	2020

Kepdirjen KN 369 Thn 2021				
Aset Ruko Plaza Graha Famili Blok A-9	Surabaya	Jawa Timur	Jl. Mayjen Yono Suwoyo	2021
Aset Ruko Plaza Graha Famili Blok A-1	Surabaya	Jawa Timur	Jl. Mayjen Yono Suwoyo	2021
Aset Ruko Plaza Graha Famili Blok A-10	Surabaya	Jawa Timur	Jl. Mayjen Yono Suwoyo	2021
Aset Ruko Plaza Graha Famili Blok A-11	Surabaya	Jawa Timur	Jl. Mayjen Yono Suwoyo	2021
Aset Ruko Plaza Graha Famili Blok D-29	Surabaya	Jawa Timur	Jl. Mayjen Yono Suwoyo	2021
Aset Ruko Plaza Graha Famili Blok C-11	Surabaya	Jawa Timur	Jl. Mayjen Yono Suwoyo	2021
Aset Ruko Plaza Graha Famili Blok C-12	Surabaya	Jawa Timur	Jl. Mayjen Yono Suwoyo	2021
Aset Ruko Plaza Graha Famili Blok C-12A	Surabaya	Jawa Timur	Jl. Mayjen Yono Suwoyo	2021
Kepdirjen KN 005 Thn 2022				
Aset Taman Sari	Kab. Tangerang	Banten	Supermal Karawaci, Jalan Boulevard Diponegoro No. 105, Kelapa Dua, Kab. Tangerang, Banten	2022
Kepdirjen KN 3 Thn 2022				
Aset Yos Sudarso 2 Medan	Medan	Sumatera Utara	Jl. Komodor Laut Yos Sudarso No. 60 AA-BB, Kelurahan Glugur Kota, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara	2022
Àset Jl. Pondok Padang	Padang	Sumatera Barat	Jln. Pondok Nomor 180, Kelurahan Imam Bonjol, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Sumatera Barat	2022
Kepdirjen KN 4 Thn 2022				
Kondominium Graha Family Prime A-302	Surabaya	Jawa Timur	Kondominium Graha Family Prime, Kelurahan Pradah Kali Kendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya	-
Aset Cik Ditiro 20	Yogyakarta	D.I. Yogyakarta	Jl. Cik Ditiro No. 20, Kelurahan Terban, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta	-
Aset Jl. Pos 17A	Tanjung Pinang	Riau	Jl. Pos No. 17A, Desa/Kelurahan Tanjung Pinang Kota, Kecamatan Tanjung Pinang Barat, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Riau	-
Aset Jl. Pos 17B	Tanjung Pinang	Riau	Jl. Pos No. 17B, Desa/Kelurahan Tanjung Pinang Kota, Kecamatan Tanjung Pinang Barat, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Riau	-
Aset Jl. Pos 17C	Tanjung Pinang	Riau	Jl. Pos No. 17C, Desa/Kelurahan Tanjung Pinang Kota, Kecamatan Tanjung Pinang Barat, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Riau	-
Aset Jl. Pos 17D	Tanjung Pinang	Riau	Jl. Pos No. 17D, Desa/Kelurahan Tanjung Pinang Kota, Kecamatan Tanjung Pinang Barat, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Riau	-
Aset Jl. Pos 17E	Tanjung Pinang	Riau	Jl. Pos No. 17E, Desa/Kelurahan Tanjung Pinang Kota, Kecamatan Tanjung Pinang Barat, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Riau	-
Aset Jl. Pos 17F	Tanjung Pinang	Riau	Jl. Pos No. 17F, Desa/Kelurahan Tanjung Pinang Kota, Kecamatan Tanjung Pinang Barat, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Riau	-
Aset Jl. Pos 17G	Tanjung Pinang	Riau	Jl. Pos No. 17G, Desa/Kelurahan Tanjung Pinang Kota, Kecamatan Tanjung Pinang Barat, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Riau	-

Proyek Strategis Nasional yang pendanaan lahannya dilakukan oleh APBN Melalui LMAN

National Strategic Projects with Land Funding Provided by the State Budget through LMAN

Jalan Tol Cisumdawu
/ Cisumdawu Toll Road

Jalan Tol / Toll Road

- Sigli → Banda Aceh
- Semanan → Sunter
- Kisaran → Tebing Tinggi
- Tebing Tinggi → Pematang Siantar → Parapat → Tarutung → Sibolga
- Bukit Tinggi → Padang Panjang → Lubuk Alung → Padang
- Semarang → Demak
- Jakarta Cikampek Ii Sisi Selatan
- Probolinggo → Banyuwangi
- Cinere → Jagorawi
- Kertosono → Mojokerto
- Soreang → Pasir Koja
- Sunter → Pulogebang
- Serang → Panimbang
- Cileunyi → Sumedang → Dawuan
- Medan → Binjai
- Pekanbaru → Kandis → Dumai
- Palembang → Indralaya
- Kunciran → Serpong
- Mojokerto → Surabaya
- Bogor Ring Road
- Gempol → Pasuruan
- Manado → Bitung
- Semarang → Solo
- Balikpapan → Samarinda
- Serpong → Cinere
- Medan → Kualanamu → Tebing Tinggi
- Batang → Semarang
- Solo → Ngawi
- Ngawi → Kertosono
- Cibitung → Cilincing
- Depok – Antasari
- Bakauheni → Terbanggi Besar
- Pematang Panggang → Kayu Agung
- Terbanggi Besar → Pematang Panggang
- Pandaan – Malang
- Cengkareng → Batu Ceper → Kunciran
- Pejagan → Pemalang
- Cimanggis → Cibitung
- Bekasi → Cawang → Kampung Melayu
- Pemalang → Batang
- Krian → Legundi → Bunder → Manyar
- Ciawi → Sukabumi
- Pasuruan → Probolinggo
- Pekanbaru → Bangkinang → Payakumbuh → Bukittinggi (Bagian Dari Trans Sumatera)
- Simpang Indralaya → Muara Enim (Bagian Dari Trans Sumatera)
- Lubuk Linggau → Curup → Bengkulu (Bagian Dari Trans Sumatera)
- Yogyakarta → Solo
- Binjai → Langsa (Bagian Dari Trans Sumatera)
- Yogyakarta – Bawen
- Jambi Rengat
- Betung – Tempino – Jambi
- Gedebage Tasikmalaya Cilacap

Kereta Api / Train

- Ka Makassar → Parepare
  (Tahap I dari pengembangan jalur lintas barat Sulawesi Bagian Selatan)
  / Stage I of the development of western route of South Sulawesi)
- LRT terintegrasi di wilayah Jabodebek
  (Tahap I)
  /Integrated LRT in Jabodebek region (Stage I)
- KA Jawa Selatan
  KA Solo Balapan → Kedungbanteng
- KA akses Bandara Adi Soemarmo
- Double track Jawa selatan
  KA Kombang → Wonokromo
- Double track Jawa Selatan
  KA Bogor → Sukabumi
- KA akses Bandara Baru Yogyakarta, Kulon Progo
- KA Eantau Prapat → Kota Pinang
- KA Tebing Tinggi → Kuala Tanjung

Kereta LRT
/ LRT Train

Bendungan / Dam

- Marangkayu
- Kuningan
- Gongseng
- Pidekso
- Tugu
- Karalloe
- Keureuto
- Karian
- Lolak
- Passelloreng
- Tapin
- Ciawi
- Sukamahi
- Kuwil Kawangkoan
- Way Sekampung
- Cipanas
- Leuwikeris
- Napun Gete
- Rukoh
- Ladongi
- Sidan
- Pamukkulu
- Tiga Dihaji
- Bener
- Marga Tiga
- Randugunting
- Semantok
- Sadawarna
- Bulango Ulu
- Meninting
- Bagong
- Jlantah
- Sepaku Semoi
- Bendo
- Ameroro
- Jragung
- Mbay

Bendungan Pidekso
/ Pidekaso Dam

Pelabuhan / Harbour — Patimban

Kawasan Strategis Pariwisata Nasional / National Tourism Strategic Area — Mandalika

Air Baku / Raw Water — Karian

Irigasi / Irrigation

- Lhok Guci
- Jambo Aye Kanan
- Lematang
- Baliase Lempuing

Pelabuhan Patimban
/ Patimban Port

4

Tinjauan Pendukung Bisnis

Business Support Overview

Sumber Daya Manusia
Human Resources

Untuk dapat menunjukkan kinerja yang memuaskan dan memberi kontribusi yang signifikan dalam pengelolaan aset milik negara, maka LMAN perlu didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul di bidang pengelolaan aset. Oleh sebab itu, LMAN memiliki komitmen untuk membangun SDM yang berkualitas untuk mendukung upaya Lembaga dalam mengoptimalisasikan manajemen aset negara guna meningkatkan manfaat ekonomi dan sosial yang signifikan, sekaligus menggali potensi *return on assets* dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari Barang Milik Negara.

To show satisfactory performance and make a significant contribution to the management of state-owned assets, LMAN needs to be supported by human resources who excel in asset management. Therefore, LMAN is committed to building quality human resources to support the institution's efforts in optimizing state asset management in order to increase significant economic and social benefits, as well as to explore the potential return on assets and non-tax state revenue from the state property.

LMAN didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul di bidang pengelolaan aset.
/ LMAN is supported by highly skilled human resources (HR) in asset management.

Keragaman Komposisi SDM
Diverse Composition of Human Resources

Pemberdayaan keragaman dan inklusi di tempat kerja telah menjadi isu penting dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan penelitian, keragaman dan inklusivitas dapat meningkatkan produktivitas perusahaan secara signifikan. Saat ini, SDM LMAN merupakan kombinasi antara Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan non-PNS. Keragaman komposisi SDM LMAN ini membawa dampak positif terhadap pengelolaan BLU LMAN.

LMAN percaya bahwa adanya keberagaman dalam latar belakang pendidikan, pola pikir, dan budaya di antara para karyawannya akan menciptakan hubungan kerja yang harmonis dan sinergis. Sesama pegawai diharapkan mampu mengembangkan potensi individual, antara lain melalui *transfer of knowledge* di antara para pekerja. Secara bersama-sama, mereka juga harus mampu membangun semangat, paradigma baru, dan kemampuan eksekusi yang tinggi di bidang manajemen aset terutama dalam merespons perubahan yang dinamis dalam industri properti.

Guna memastikan pengelolaan SDM berjalan dengan baik, BLU LMAN menerapkan manajemen kinerja yang berperan dalam merencanakan dan memantau kinerja individu yang dapat berdampak pada kinerja organisasi.

Selain itu, manajemen kinerja dilakukan sebagai salah satu bentuk upaya organisasi dalam memotivasi pegawai. Kinerja para karyawan dinilai dan hasil penilaian ini kemudian menjadi dasar untuk pemberian reward bagi karyawan yang bersangkutan.

Pengelolaan sumber daya manusia dan manajemen kinerja yang baik dan profesional akan membantu BLU LMAN mencapai tujuan dan target organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan.

Empowering diversity and inclusion in the workplace has become an important issue in recent years. According to research, diversity and inclusivity can significantly increase company productivity. Currently, human resources at LMAN are a combination of civil servants and non-civil servants. Diversity in the composition of human resources has had a positive impact on the management of public service agencies at LMAN.

LMAN believes that diversity in educational background, mindset, and culture among its employees creates a harmonious and synergistic working relationship. Fellow employees are expected to develop individual potential, including through the transfer of knowledge among workers. Together, they must also be able to build enthusiasm, a new paradigm, and high execution capabilities in asset management, especially in responding to dynamic changes in the property industry.

To ensure that management of human resources runs well, public service agencies at LMAN conduct performance management that plays a role in planning and monitoring individual performance, which can have an impact on organizational performance.

In addition, performance management is carried out as a form of organizational efforts in motivating employees. Employee performance is assessed and the results of this assessment become the basis for rewarding the employees.

Good and professional management of human resources and performance management will help LMAN's public service agencies achieve organizational goals and targets as determined.

Manajemen Kinerja LMAN
Performance Management at LMAN

Manajemen kinerja baik pegawai LMAN yang berasal dari PNS maupun non-PNS disusun berdasarkan spesifikasi jabatan dan uraian jabatan yang merupakan tanggung jawab pegawai yang bersangkutan.

Manajemen kinerja bagi pegawai yang berasal dari PNS maupun dari non-PNS terdiri dari tahapan berikut:

Performance management for employees who are civil servants and non-civil servants is prepared based on job specifications and descriptions, which are the responsibility of the relevant employees.

Performance management for employees who are civil servants and non-civil servants comprising the following stages:

a.
Penyusunan dan penandatanganan kontrak kinerja.
/ Preparation and signing of performance contracts.

Kontrak kinerja merupakan dokumen kesepakatan antara pimpinan BLU dengan pegawai BLU yang memuat target kinerja yang harus dicapai dalam periode tertentu dan umumnya berlaku untuk satu tahun. Kontrak kinerja yang disusun tersebut terinformasikan indikator kinerja yang merupakan serangkaian kriteria yang menjadi batasan suatu indikator kinerja. Baik pegawai yang berasal dari PNS maupun pegawai yang non-PNS memiliki kewajiban yang sama untuk membuat kontrak kinerja dengan atasan langsung dan disesuaikan dengan tanggung jawab profesionalnya.

The performance contract is an agreement file between the leaders and employees of public service agencies that contains performance targets to be achieved within a certain period and is generally valid for one year. The performance contracts are informed by performance indicators - a series of criteria that become the limits of a performance indicator. Employees who are civil servants and non-civil servants have the same obligation to come into a performance contract with their direct supervisors and in accordance with their professional responsibilities.

b.
Monitoring dan evaluasi capaian kinerja.
/ Monitoring and evaluation of performance achievements.

Proses ini merupakan kegiatan dalam rangka memverifikasi data realisasi capaian kinerja.

1. Formula penghitungan capaian kinerja merupakan penghitungan yang mengkombinasi porsi pembobotan target terhadap nilai standar dengan porsi pembobotan realisasi capaian kinerja terhadap target kinerja yang telah ditetapkan.
2. Capaian kinerja merupakan sekumpulan data realisasi kinerja yang dicapai oleh pegawai dalam suatu periode pengukuran.

This process is conducted to verify data on the realization of performance achievements.

1. The formula for calculating performance gains combines the weighting portion of the target against the standard value with the weighting portion of the actual performance achievement against the predetermined performance targets.
2. Performance achievement is a set of performance realization data achieved by employees within a measurement period.

c.
Tindak lanjut dari evaluasi capaian kinerja.
/ Follow-up from evaluation of performance achievements.

Pada proses ini, pemberian penghargaan dan konsekuensi atas capaian kinerja diputuskan. Termasuk dalam tahapan ini adalah pengajuan usulan pembayaran insentif kinerja atas kelebihan capaian kinerja.

In this process, awards and consequences for the performance achievements are decided. Included in this stage is the submission of proposals for payment of performance incentives for excess performance achievements.

Perubahan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama di Tahun 2022
Changes in Strategic Targets and Key Performance Indicators in 2022

Sasaran Strategis tahun 2022 masih sama seperti pada 2021. Dibandingkan tahun 2021, terdapat beberapa perubahan Indikator Kinerja Utama LMAN tahun 2022, seperti:

The 2022 Strategic Targets are still the same as 2021. Compared to 2021, there are several changes in the Main Performance Indicators in 2022, such as:

1.

IKU Persentase Penyerapan Dana Pengadaan Lahan Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagai pemantauan dan evaluasi atas kinerja Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN). Dalam hal ini, pemantauan dan evaluasi kinerja atas penggunaan dana investasi pemerintah untuk pendanaan pengadaan lahan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dialokasikan kepada LMAN;

The KPI Percentage of Absorption of National Strategic Project of Land Acquisition Funds as monitoring and evaluation of the performance of the Budget Section of the State General Treasurer. In this regard, monitoring and evaluation of the performance on the use of government investment funds to fund land acquisition for the National Strategic Projects allocated to LMAN;

2.

IKU Persentase Penyelesaian Aset Kelolaan yang Diperbaiki adalah pengukuran penyelesaian tahapan kegiatan atau tindakan dalam rangka meningkatkan kualitas aset, sehingga aset yang telah diserah kelolakan kepada LMAN siap untuk didayagunakan dalam rangka optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan penghematan biaya bagi negara;

The KPI Percentage of Completion of Repaired Asset Management is a measurement of the completion of stages of activities or actions to improve asset quality, so that assets that have been handed over to manage to LMAN are ready to be utilized in order to optimize the Non-Tax State Revenue and save costs for the state;

3.

IKU Persentase Penyelesaian Program Inisiatif Strategis LMAN adalah pengukuran penyelesaian Inisiatif Strategis Kemenkeu dalam transformasi digital. Dalam konteks LMAN, ini berupa pengembangan *platform Aesia* (Aset Indonesia);

The KPI Percentage of Completion of Strategic Initiatives is a measurement of the completion of the Ministry of Finance's Strategic Initiative in digital transformation. In the context of LMAN, manifests as the development of the Aesia (Indonesian Assets) platform;

4.

IKU Jumlah Penyelesaian Serah Kelola Aset Baru adalah pengukuran pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang lebih optimal sehingga dapat memberikan kontribusi lebih besar kepada negara dengan diserah kelolakan kepada LMAN;

The KPI Total Completion of Handover of New Assets is a measurement of more optimal management of the State Property so that it can make a greater contribution to the state by being handed over to LMAN;

5.

IKU Indeks Tingkat Kematangan Organisasi merupakan bentuk penilaian dan evaluasi BLU yang disusun berdasarkan kerangka maturitas yang terdiri atas lima level utama. Masing-masing level memiliki basis kriteria yang berlaku secara universal untuk seluruh aspek penilaian dan indikator.

The KPI Organizational Maturity Level Index is a form of public service agencies' assessment and evaluation that is compiled based on a maturity framework comprising five main levels. Each level has a criterion basis that applies universally to all aspects of assessment and indicators.

Pengelolaan Sumber Daya Manusia
Human Resource Management

Sejak 2007, BLU LMAN Kementerian Keuangan telah menjalankan pengelolaan manajemen kinerja yang efektif berbasis balanced scorecard. Sistem ini menjadi rujukan bagi BLU LMAN dalam melakukan pengelolaan SDM yakni melakukan:

Since 2007, LMAN as a public service agency of the Ministry of Finance has implemented effective performance management based on a balanced scorecard. This system is a reference for LMAN in managing human resources, namely:

a. Proses analisis dan perancangan pekerjaan (tata kerja dan organisasi) yang terdiri dari spesifikasi jabatan dan uraian jabatan. Spesifikasi jabatan merupakan daftar pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan karakteristik lain. Uraian jabatan merupakan daftar tugas, pekerjaan, dan tanggung jawab yang dibutuhkan dalam pekerjaan. Hal ini telah tertuang secara garis besar pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 54/ PMK.01/2017.

Process of job analysis and design (work procedures and organization), consisting of job analysis, specification, and job description. Job specification is a list of knowledge, skills, abilities, and other characteristics. Job description is a list of duties, jobs and responsibilities required in the job. This has been outlined in the Minister of Finance Regulation Number 54/PMK.01/2017.

b. Proses perencanaan sumber daya manusia. Proses ini terdiri dari dari tahapan peramalan yang merupakan upaya untuk menetapkan penawaran dan permintaan untuk berbagai jenis SDM agar dapat memperkirakan bidang-bidang di dalam BLU LMAN dimana akan terjadi adanya kekurangan atau kelebihan pegawai di masa mendatang.

Process of human resource planning. This process is an attempt to determine the supply and demand for various types of human resources in order to be able to predict areas within LMAN in which there will be a shortage or surplus of staff in the future.

c. Proses rekrutmen SDM. Syarat pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLU yang berasal dari tenaga profesional berdasarkan kebijakan dan ketentuan yang ditetapkan oleh pimpinan BLU.

Process of human recruitment. The requirements for the appointment and dismissal of public service agencies' management officials and employees who come from professionals are based on the policies and conditions set by the leadership in the public service agencies.

d. Seleksi dan penempatan karyawan. Pegawai baik PNS maupun non PNS yang telah diterima dalam proses seleksi akan ditempatkan dan ditugaskan sesuai dengan kebutuhan pegawai sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perencanaan pegawai.

Selection and placement of employees. Employees - both civil servants and non-civil servants who have been accepted in the selection process - will be placed and assigned according to the employees' needs as determined in the employee planning.

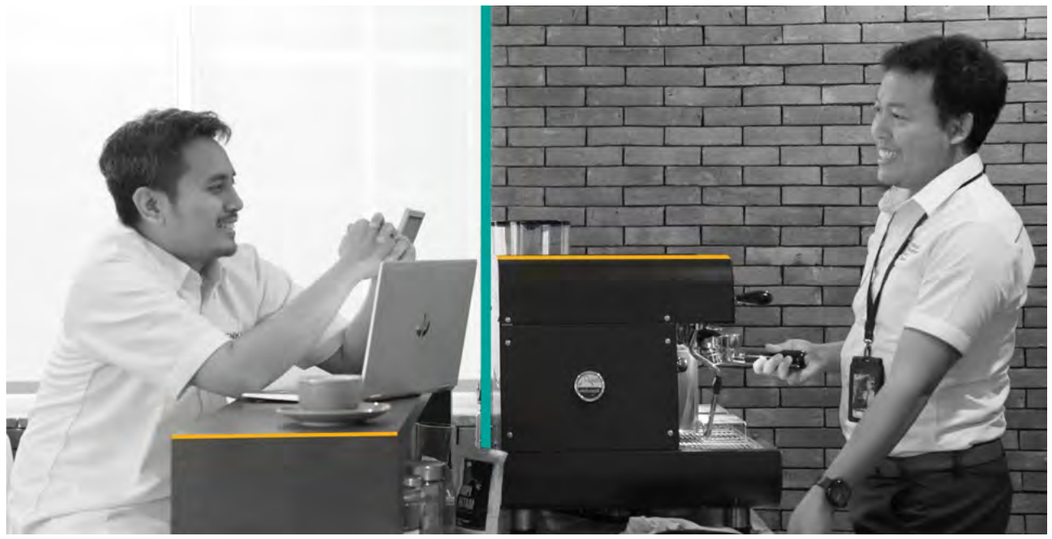

Saat ini, SDM LMAN merupakan kombinasi antara Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan non-PNS.
/ Currently, LMAN's human resources consist of a combination of civil servants and private employees.

Dewan Pengawas, Direksi dan Manajemen LMAN Tahun 2022

Board of Supervisors, Board of Directors, and Management of LMAN 2022

Dewan Pengawas
/ Supervisory Board

Berdasarkan KMK No. 320/KMK.06/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan No. 669/ KMK.01/2018 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum (BLU) LMAN, sehingga susunan keanggotaan Dewan Pengawas pada BLU LMAN menjadi sebagai berikut:

Based on KMK No. 320/KMK.06/2021 regarding Amendments to Minister of Finance Decree No. 669/ KMK.01/2018 concerning Appointment of the Supervisory Board at Public Service Agency LMAN, so that the membership composition of the Supervisory Board at LMAN becomes as follows:

1. **Rionald Silaban,** sebagai
   Ketua merangkap Anggota
   / as Chair as well as Member
2. **Roberth Gonijaya,** sebagai
   Anggota / as Member
3. **Boy Michael Eko Tjahyono,** sebagai
   Anggota / as Member

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor No. 352/ KMK.06/2021 tentang Perubahan Kedua Atas KMK No. 669/KMK.01/2018 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas pada BLU LMAN tanggal 25 Agustus 2021, maka susunan keanggotaan Dewan Pengawas pada BLU LMAN bertambah 1 (satu) orang dan secara keseluruhan anggota Dewan Pengawas pada BLU LMAN menjadi 4 (empat) orang, yaitu:

In accordance with the Decree of the Minister of Finance No. 352/ KMK.06/2021 regarding the Second Amendment to KMK No. 669/ KMK.01/2018 concerning the Appointment of the Supervisory Board at LMAN on 25 August 2021, the membership composition of the Supervisory Board at LMAN increases by 1 (one) person and overall members of the Supervisory Board at LMAN become 4 (four) people, namely:

1. **Rionald Silaban,** sebagai
   Ketua merangkap Anggota
   / as Chair as well as Member
2. **Roberth Gonijaya,** sebagai
   Anggota / as Member
3. **Boy Michael Eko Tjahyono,** sebagai
   Anggota / as Member
4. **Selo Tarnando Sumosutargio,** sebagai
   Anggota / as Member

Dewan Direksi
/ Board of Directors

Sejak 2020, susunan Direksi LMAN adalah sebagai berikut:

Since 2020, the composition of the LMAN Board of Directors is as follows:

1. **Basuki Purwadi,** sebagai
   Direktur Utama; / as President Director;
2. **Sutanto Basuki,** sebagai
   Direktur Keuangan dan Dukungan Organisasi;
   / as Director of Finance and Organizational Support;
3. **Tetik Fajar Ruwandari,** sebagai
   Direktur Operasional dan Manajemen Risiko;
   / as Director of Operations and Risk Management;
4. **Qoswara,** sebagai
   Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan;
   / Director of Procurement and Land Funding;
5. **Candra Giri Artanto, sebagai**
   Direktur Pengembangan dan Pendayagunaan.
   / as Director of Development and Utilization;

Kepala Divisi/Satuan Pengawasan Internal (SPI)
/ Oversight Unit

Susunan Kepala Divisi/SPI LMAN tahun 2022, sebagai berikut:

The Composition of Division Heads/Internal Oversight Unit at LMAN in 2022 is as follows:

1. **M. Ikhwan Hadiprasojo,**
   Kepala Divisi Anggaran dan Akuntansi;
   / Head of Budget and Accounting Division;
2. **Andhy Hermawan,**
   Kepala Divisi Pembendaharaan;
   / Head of Treasury Division;
3. **Luhur Nugroho Joko Hartono,**
   Kepala Divisi Dukungan Organisasi dan Teknologi Informasi;
   / Head of Organizational Support and Information Technology Division;
4. **Tb. Abdurahman,**
   Kepala Divisi Sumber Daya Manusia, Manajemen Kinerja, dan Kepatuhan Internal;
   / Head of Human Resources, Performance Management and Internal Compliance Division;
5. **Widyaningrum,**
   Kepala Divisi Hukum dan Perjanjian, Plt. Kepala Divisi Administrasi Tanah dan Litigasi sejak 18 Desember 2022;
   / Head of Legal and Agreement Division, Plt. Head of Land Administration and Litigation Division since 18 December 18 2022;
6. **Jimmy Irawan,**
   Kepala Divisi Perencanaan Lahan;
   / Head of Land Planning Division;
7. **Rini Rismayanti,**
   Kepala Divisi Pendanaan Lahan;
   / Head of Land Funding Division;
8. **Angga Junaimi,**
   Kepala Satuan Pengawasan Internal;
   / Head of Internal Oversight Unit;
9. **Bramantya Harimurti,**
   Kepala Divisi Riset, Konsultasi dan Manajemen Risiko;
   / Head of Research, Consulting, and Risk Management Division;
10. **Yitzak Alfredo,**
    Kepala Divisi Konstruksi dan Pemeliharaan, Plt. Kepala Divisi Pengamanan dan Pengendalian sejak 18 April 2022;
    / Head of Construction and Maintenance Division, Plt. Head of Security and Control Division since 18 April 2022;
11. **Dewi Sophiyani Kurniawati,**
    Kepala Divisi Pengembangan Usaha, Komunikasi, dan Hubungan Kemitraan, Plt. Kepala Divisi Pendayagunaan Properti II sejak 18 Desember 2022;
    / Head of Business Development, Communication and Partnership Relations Division, Plt. Head of Property Utilization Division II since 18 December 2022;
12. **Yanuar Utomo,**
    Kepala Divisi Pendayagunaan Properti I;
    / Head of Property Utilization Division I;
13. **Goklas Tunggul Partoho,**
    Kepala Divisi Pengamanan dan Pengendalian Aset (sampai April 2022);
    / Head of Asset Security and Control Division (until April 2022);
14. **Mahyarina Kusumawati,**
    Kepala Divisi Administrasi Tanah dan Litigasi (sampai Desember 2022);
    / Head of Land Administration and Litigation Division (until December 2022);
15. **Yekti Pratiwi,**
    Kepala Divisi Pendayagunaan Properti II (sampai Desember 2022).
    / Head of Property Utilization Division II (until December 2022).

Profil SDM BLU LMAN
LMAN HR Profile

Pada tahun 2022, LMAN memiliki total SDM sebanyak

160
pegawai
yang terdiri dari

68
pegawai
berstatus PNS
dan

92
pegawai berstatus non-PNS, termasuk tenaga honorer berjumlah **49 orang.**

In 2022, LMAN has a total HR of 160 employees consisting of 68 employees with Civil Servant status and 92 employees with non-Civil Servant status, including 49 honorary staff.

Demografi Pegawai
Employee Demographics

Komposisi Berdasarkan Status Kepegawaian
/ Composition Based on Employment Status

Status	2022	2021	2020	2019
PNS / Civil Servant	68	63	46	43
Non PNS / Non-Civil Servant	43	43	43	38
Honorer / Honorary Employee	49	52	52	57

Komposisi Berdasarkan Tingkat Pendidikan
/ Composition Based on Education Level

Status	2022	2021	2020	2019
SLTA / Senior high	26	28	28	29
Diploma	31	32	22	22
S1	81	72	67	63
S2	22	26	24	22
S3	0	0	0	2

Komposisi Berdasarkan Usia
/ Composition Based on Age

Status	2022	2021	2020	2019
18 - 30	43	46	45	50
31 - 40	89	85	70	68
41 - 50	23	27	23	19
> 50	5	3	3	1

Komposisi Berdasarkan Direktorat
/ Composition Based on Directorate

Status	2022	2021	2020	2019
Direktorat Keuangan dan Dukungan Organisasi / Directorate of Finance and Organizational Support	70	67	64	65
Direktorat Operasional dan Manajemen Risiko / Directorate of Operations and Risk Management	29	29	24	22
Direktorat Pengadaan dan Pendanaan Lahan / Directorate of Land Procurement and Funding	32	35	25	20
Direktorat Pengembangan dan Pendayagunaan / Directorate of Development and Utilization	25	23	24	28
SPI	3	3	3	2

*selain Direktur Utama / except for President Director

Rekrutmen Pegawai dan Tingkat Turnover
Employee Recruitment and Turnover Rate

1. Tidak ada pegawai LMAN yang mengundurkan diri;
   No LMAN employees resigned;
2. Tidak ada rekrutmen untuk posisi senior;
   No recruitment for senior positions;
3. Tidak ada rekrutmen internal DJKN;
   No internal recruitment at DJKN;
4. Mengenai mutasi karyawan dari dan ke LMAN:
   Regarding employee transfers from and to LMAN:
   - Mutasi dari LMAN ke DJKN pada April 2022: Satu orang pegawai LMAN, Goklas Tunggul Partoho.
     /Transfer from LMAN to DJKN in April 2022: One LMAN employee, Goklas Tunggul Partoho.
   - Mutasi ke LMAN dari DJKN pada Agustus 2022: Jabatan Pelaksana berjumlah 6 orang.
     / Transfer to LMAN from DJKN in August 2022 for the Executive positions: Six people.
   - Mutasi dari LMAN ke Itjen Kemenkeu satu orang atas nama Sdr. Benny Wahyubrata, dan mutasi dari Itjen Kemenkeu satu orang atas nama Sdr. Andi Kahar, pada Desember 2022.
     / Transfer from LMAN to the Inspectorate General of the Ministry of Finance: One person namely Mr. Benny Wahyubrata, and one person transferred from the Inspectorate General of the Ministry of Finance namely Mr. Andi Kahar, in December 2022.
   - Mutasi dari LMAN ke DJKN pada Desember 2022: Mahyarina Kusumawati, Yekti Pratiwi, Wegig Nugroho, dan Fajri Andari.
     / Transfer from LMAN to DJKN in December 2022: Mahyarina Kusumawati, Yekti Pratiwi, Wegig Nugroho, and Fajri Andari.
5. LMAN mengusulkan pemenuhan kebutuhan SDM untuk pegawai yang berasal dari PNS melalui DJKN dan hasil koordinasi dengan Biro SDM. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan SDM dilaksanakan melalui proses rekrutmen dengan mengikuti *Internal Job Vacancy* (IJV) Kemenkeu. Internal Job Vacancy (IJV) Kemenkeu ini dapat diikuti oleh seluruh PNS dari Kementerian Keuangan yang berminat. Berdasarkan proses tersebut, terdapat 5 pegawai baru LMAN yang berasal dari PNS dan mulai aktif di LMAN pada Agustus 2022.
   LMAN proposed fulfilling the HR needs for employees from civil servants through DJKN and the results of coordination with the HR Bureau. Therefore, fulfilling HR needs is carried out through a recruitment process by following the Ministry of Finance's Internal Job Vacancy (IJV). The Ministry of Finance's Internal Job Vacancy (IJV) can be joined by all civil servants from the Ministry of Finance who are interested. Based on this process, there were 5 new LMAN employees who came from civil servants and became active at LMAN in August 2022.

Tingkat Turnover
Turnover Rate

Pada tahun 2022, tingkat turnover LMAN tercatat sebesar ±17,51%. Tingkat *turnover* tersebut terjadi karena adanya 6 orang pegawai mutasi dari LMAN ke DJKN, 1 orang pegawai mutasi dari LMAN kembali ke Itjen, 6 orang mutasi dari DJKN ke LMAN, hasil rekrutmen melalui IJV Kemenkeu berjumlah 5 PNS yang mutasi ke LMAN, dan 1 orang pegawai mutasi dari Itjen ke LMAN.

Selain itu, LMAN yang merupakan unit organisasi non-eselon di lingkungan Kementerian Keuangan yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Kekayaan Negara. LMAN menjadi salah satu unit perputaran pegawai, khususnya pegawai yang berasal dari PNS, di lingkungan Kementerian Keuangan.

Dengan memperhatikan dinamika organisasi dan lingkungan LMAN, mengendalikan tingkat *turnover* adalah sebuah tantangan tersendiri untuk dilaksanakan. Adapun sejumlah kebijakan atau program dalam pengelolaan turnover antara lain adanya kebijakan *One Month Notice* sehingga memberikan kesempatan adanya knowledge transfer kepada pegawai lain dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya, dan penghimpunan data terkait tugas dan fungsi pada media NAS LMAN https://lmandoc.asetnegara.id:5001/.

Selain itu, diharapkan adanya mirroring pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga dalam hal perpindahan pegawai, sudah terdapat SDM pengganti yang siap melanjutkan tugasnya di LMAN.

In 2022, the LMAN turnover rate is recorded at ±17.51%. The turnover rate occurred because there were 6 employees transferred from LMAN to DJKN, 1 employee transferred from LMAN back to Itjen, 6 people transferred from DJKN to LMAN, the results of recruitment through the Ministry of Finance's IJV were 5 PNS who transferred to LMAN, and 1 employee transferred from the Inspectorate General to LMAN.

In addition, LMAN, which is a non-echelon organizational unit within the Ministry of Finance, implements the financial management of the Public Service Agency which is under and responsible to the Minister of Finance through the Director General of State Assets. LMAN is one of the employee turnover units, especially employees from civil servants, within the Ministry of Finance.

By taking into account the dynamics of the organization and environment of LMAN, controlling the turnover rate is a challenge in itself to implement. There are a number of policies or programs in managing turnover, including the One Month Notice policy so as to provide opportunities for knowledge transfer to other employees in supporting the implementation of their duties and functions, and collecting data related to duties and functions on the NAS LMAN media https://lmandoc.asetnegara.id:5001/.

In addition, it is hoped that there will be mirroring of the implementation of duties and functions so that in terms of employee transfers, there are replacement HR who are ready to continue their duties at LMAN.

Pegawai berinteraksi di Elico. LMAN mengusung konsep ruang kerja terbuka yang mendorong pegawai untuk saling berinteraksi
/ Staff interacting at Elico. LMAN adopts an open workspace that encourages staff to interact with each other.

Integrated Human Resources Management di LMAN
Integrated Human Resources Management at LMAN

Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) berusaha membuktikan diri sebagai entitas yang mampu dan mumpuni dalam mengelola aset Kementerian/Lembaga yang idle dan/atau *under-utilized*. Menyadari keunikan yang dimiliki oleh organisasi, baik dari sisi proses bisnis dan SDM *hybrid* yang terdiri dari PNS dan non-PNS, pada tahun 2018 dimulai penyusunan Manajemen Sumber Daya Manusia yang Terintegrasi *(Integrated Human Resources Management),* selanjutnya disingkat menjadi IHRM. Adapun framework IHRM yang disampaikan oleh PT Fed Insight Indonesia memuat seluruh proses bisnis yang harus dilakukan dalam pengelolaan SDM di sebuah organisasi, yang dikelompokkan dengan menggunakan pendekatan yang praktis dan logis, sesuai dengan peran fungsi SDM untuk:

- Merencanakan, menyeleksi, dan merekrut karyawan *(acquisition),*
  / Planning, selecting, and recruiting employees (acquisition),
- Mengembangkan potensi dan kompetensi karyawan *(development),*
  / Develop employee potential and competence (development),
- Meningkatkan komitmen, motivasi, dan kinerja karyawan *(engagement),*
  / Increase employee commitment, motivation, and performance (engagement)
- Mengelola pengakhiran hubungan kerja dengan terstruktur, dan dalam situasi yang kondusif *(separation),* dan
  / Manage the termination of work relations in a structured, and in a conducive situation (separation), and
- Menyediakan data dan informasi yang terkait dengan kepegawaian sebagai dasar pengambilan keputusan strategis *(HR enabling systems).*
  / Providing data and information related to staffing as a basis for making strategic decisions (HR enabling systems).

The State Asset Management Agency (LMAN) seeks to prove itself as a capable and qualified entity in managing idle and/or under-utilized Ministry/Agency assets. Recognizing the uniqueness of the organization, both in terms of business processes and hybrid HR of civil servants and non-civil servants, in 2018 the preparation of the Integrated Human Resources Management was started, hereinafter abbreviated to IHRM. The IHRM framework presented by PT Fed Insight Indonesia contains all business processes that must be carried out in the HR management in an organization, which are grouped using a practical and logical approach, according to the role of the HR function to:

Direktur KDO berinteraksi dengan Kepala Divisi dan pegawai
/

Untuk dapat melakukan hal-hal tersebut di atas, manajemen memerlukan perangkat organisasi dan struktur fondasi sistem manajemen SDM *(foundation)*.

Pada tahun 2018 telah disusun Modul Proses Bisnis, dan di tahun 2019 disusun modul selanjutnya yang terkait dengan perangkat organisasi dan struktur fondasi sistem manajemen SDM, yaitu struktur organisasi *(organization structure)*, pemetaan tanggung jawab *(accountability map)*, uraian jabatan *(job description)*, model kompetensi *(competency model)*, keluarga jabatan *(job family)*, peringkat jabatan *(job grade)*, peringkat orang *(person grade)*, dan modul yang terkait dengan engagement yaitu, manajemen penghargaan *(reward management)*, manajemen kinerja *(performance management)*, dan manajemen karir *(career management)*. Sementara itu, modul lain disusun oleh LMAN secara mandiri dengan mengacu pada kebutuhan organisasi dan acuan ketentuan hukum yang berlaku bagi LMAN.

Pada tahun 2020, hasil kajian dimaksud ditetapkan dalam Peraturan Direktur Utama Nomor 5/LMAN/2020 tentang Manajemen Sumber Daya Manusia Terintegrasi pada Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara, yang mengatur hal sebagai berikut:

In order to conduct the things mentioned above, the management needs organizational tools and the foundation structure of the HR management system (foundation).

In 2018, the Business Process Module was developed, and in 2019 the next module related to organizational tools and the foundation structure of the HR management system, namely organizational structure, accountability map, job description , competency models, job families, job grades, person grades, and modules related to engagement namely, reward management, performance management , and career management. Meanwhile, other modules were compiled by LMAN independently with reference to the needs of the organization and references to legal provisions that apply to LMAN.

In 2020, the results of the study referred to are stipulated in the Main Director's Regulation Number 5/LMAN/2020 concerning Integrated Human Resource Management at the Public Service Agency of the State Asset Management Agency, which regulates the following:

- Ketentuan Umum; / General Provisions;
- Penempatan dan Peringkat Jabatan; / Placement and Position Rating;
- Disiplin; / Discipline;
- Persyaratan; / Requirements;
- Manajemen Talenta; / Talent Management;
- Pemberhentian; / Termination;
- Penetapan Kebutuhan; / Determination of Needs;
- Manajemen Kinerja; / Performance Management;
- Komunikasi Pejabat Pengelola dan Pegawai; / Communication between Management Officers and Employees;
- Rekrutmen dan Pengangkatan; / Recruitment and Appointment;
- Hak dan Kewajiban; / Rights and Obligations;
- Lain-lain, Ketentuan Peralihan dan Penutup. / Others, Transitional and Closing Provisions.

Tahun 2022 adalah tahun ketiga penerapan Peraturan Direktur Utama Nomor 5/LMAN/2020 tentang Manajemen Sumber Daya Manusia Terintegrasi pada Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, penerapan secara umum masih berlaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal restrukturisasi organisasi BLU LMAN, perlu dilakukan penyesuaian secara menyeluruh terhadap komponen pengelolaan organisasi dan SDM dimaksud.

Selain itu, sampai saat ini LMAN belum melaksanakan kembali rekrutmen pegawai LMAN yang berasal dari non-PNS. Hal ini dengan pertimbangan menunggu lebih lanjut terkait implementasi PPPK di BLU. Sehubungan dengan hak, kewajiban, dan larangan, pada prinsipnya perlu dilakukan penyesuaian sesuai dengan terbitnya PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, serta perlunya penyempurnaan mekanisme dalam manajemen talenta dan komunikasi antara pejabat pengelola dan pegawai LMAN.

The year 2022 is the third year of implementation of the Main Director's Regulation Number 5/LMAN/2020 concerning Integrated Human Resource Management at the Public Service Agency of the State Asset Management Agency. Based on the results of monitoring and evaluation, the implementation in general is still valid according to the applicable regulations. In terms of organizational restructuring of BLU LMAN, it is necessary to make overall adjustments to the intended components of organizational management and human resources.

In addition, until now LMAN has not carried out the recruitment of non-PNS LMAN employees. This is with the consideration of waiting further regarding the implementation of PPPK at BLU. With respect to rights, obligations and prohibitions, in principle it is necessary to make adjustments in accordance with the issuance of PP No. 94 of 2021 concerning PNS Discipline, and the need to improve mechanisms in talent management and communication between management officials and LMAN employees.

Roadmap Pengembangan Kompetensi LMAN
Roadmap for Competency Development at LMAN

2018

35 kompetensi dengan peyesuaian level kedalaman per jabatan / 35 competencies with adjustment of position levels

35 kompetensi (SKJ 2018) / 35 competencies (SKJ 2018)

Re-assessment (Non PNS Angkatan 2017) / Re-assessment (non-Civil Servants of 2017 Batch)

- Kajian IHRM, salah satunya Model Kompetensi (perilaku 20 & teknis 113) / IHRM review, one of which is the Competency Model (behavior 20 and technical 113)

2019

Penetapan IHRM, termasuk kompetensi perilaku & kompetensi teknis / Determination of IHRM, including behavioral and technical competencies

Re-assessment secara bertahap (prioritas Non PNS Angkatan 2018) / Gradual re-assessment (priority for non- Civil Servants of 2018 Batch)

2021

Re-assessment secara bertahap / Gradual reassessment

Pengembangan kompetensi / Competency development

2022

Pengembangan kompetensi / Competency development

Tahun 2019 adalah periode LMAN berfokus kepada penyusunan *Integrated Human Resources Management* (IHRM), dan salah satu output-nya adalah model kompetensi. Pada tahun 2020, hasil kajian dimaksud ditetapkan dalam Peraturan Direktur Utama Nomor 5/LMAN/2020 tentang Manajemen Sumber Daya Manusia Terintegrasi pada Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara, sehingga dapat menjadi dasar lebih lanjut dalam pengelolaan sumber daya manusia di LMAN. Model kompetensi disusun oleh konsultan dengan mempertimbangkan arahan pimpinan LMAN dan hasil masukan dari masing-masing unit kerja melalui *focus group discussion* sesuai keluarga jabatannya.

Pada tahun 2020 telah dilaksanakan penetapan sesuai Peraturan Direktur Utama Nomor 5/LMAN/2020 tentang Manajemen Sumber Daya Manusia Terintegrasi pada Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara. Kemudian, dilakukan assessment atau reassessment kepada Pegawai (Kepala Divisi dan Pelaksana) LMAN secara bertahap dengan mengacu pada standar kompetensi jabatan untuk kompetensi perilaku yang baru.

Pada tahun 2022, sesuai dengan roadmap pengembangan kompetensi di LMAN, dilakukan pengembangan kompetensi sesuai dengan hasil coaching dan mentoring antara Atasan Langsung dan bawahannya dengan mengacu pada hasil *re-assessment* dan hasil capaian kinerja pegawai. Selain itu, telah dilaksanakan juga *assessment* terhadap 11 PNS yang baru di LMAN pada tahun 2022.

The year 2019 was the period when LMAN focused on preparing the Integrated Human Resources Management (IHRM), and one of the outputs was a competency model. In 2020, the results of the study were set forth in the President Director's Regulation Number 5/LMAN/2020 regarding the Integrated Human Resource Management at the Public Service Agencies of the State Asset Management Institute, so that it can become a further basis for managing human resources at LMAN. The competency model is prepared by the consultant by taking into account the directives of the LMAN leadership and the results of input from each work unit through focus group discussions according to the position family.

In 2020 the determination was carried out according to the Main Director's Regulation Number 5/LMAN/2020 regarding the Integrated Human Resource Management at the Public Service Agency of the State Asset Management Institute. Then, an assessment or reassessment of LMAN Employees (Division Heads and Implementers) was carried out in stages by referring to the position competency standards for the new behavioral competencies.

In 2022, according to the competency development roadmap at LMAN, competency development would be carried out in accordance with the results of coaching and mentoring between the Direct Supervisor and his subordinates, with reference to the results of re-assessments and employee performance achievements. In addition, an assessment was also carried out on 11 new civil servants at LMAN in 2022.

Model Kompetensi
Competency Model

Model kompetensi disusun oleh konsultan dengan mempertimbangkan arahan pimpinan LMAN dan hasil masukan dari masing-masing unit kerja melalui *focus group discussion* sesuai keluarga jabatannya.

Secara total, jumlah kompetensi perilaku mengalami pengurangan, termasuk jumlah kompetensi yang harus dimiliki oleh pejabat dan pegawai sesuai jabatannya masing-masing.

The competency model is prepared by the consultant by taking into account the directives of the LMAN leadership and the results of input from each work unit through focus group discussions according to the position family.

In total, the number of behavioral competencies has decreased, including the number of competencies that must be possessed by officials and employees according to their respective positions.

Jabatan / Position	Grade	Jumlah Komp pada SKJ yang Lalu / Total Comp in Previous SKJ	Inti / Core	Profesional / Professional	Khusus / Specific	Jumlah Kompetensi / Total Competencies
Direktur Utama / President Director	17	22	5	4	4	13
Direktur / Directors	15-16	20	5	4	3	12
Kepala Divisi / Heads Division	13-14	18	5	4	3	12
Analis / Analysts	12	16	5	3	3	11
Analis / Analysts	11	16	5	-	3	8
Pengelola/ Pengolah Data/ Bendahara / Manager/ Data Processing/ Treasurer	8-10	14	5	-	3	8
Penyaji Data / Data Provider	5-7	12	5	-	3	8
Penata Usaha / Administrator	3-4	10	5	-	1	6
Pranata / Staff	1-2	-	5	-	-	5
		▪ Thinking ▪ Working ▪ Relating	Harus dimiliki setiap SDM LMAN / Must be possessed by every Human Resource of LMAN	Harus dimiliki setiap Pemimpin unit kerja / Must be possessed by every Work Unit Head	Harus dimiliki sesuai bidangnya / Must be possessed according to their fields	

Karyawan LMAN dalam tugas keseharian / LMAN staff in his daily work

Proses Bisnis
Business Process

Proses bisnis menjadi dasar dalam penyusunan berbagai modul dalam struktur pondasi SDM, mengingat bahwa seluruh proses pengelolaan organisasi dan sumber daya manusia harus sesuai dengan proses bisnis di setiap organisasi. Bisnis proses secara umum merupakan sekumpulan aktivitas yang membutuhkan satu atau beberapa *input* yang dibutuhkan untuk menghasilkan *output* yang bernilai bagi penerima manfaat layanan.

Business processes form the basis for the preparation of various modules in the HR foundation structure, bearing in mind that all organizational and human resource management processes must be in accordance with the business processes in each organization. Business processes in general are a set of activities that require one or several inputs needed to produce output that is of value to service beneficiaries.

Value Chain

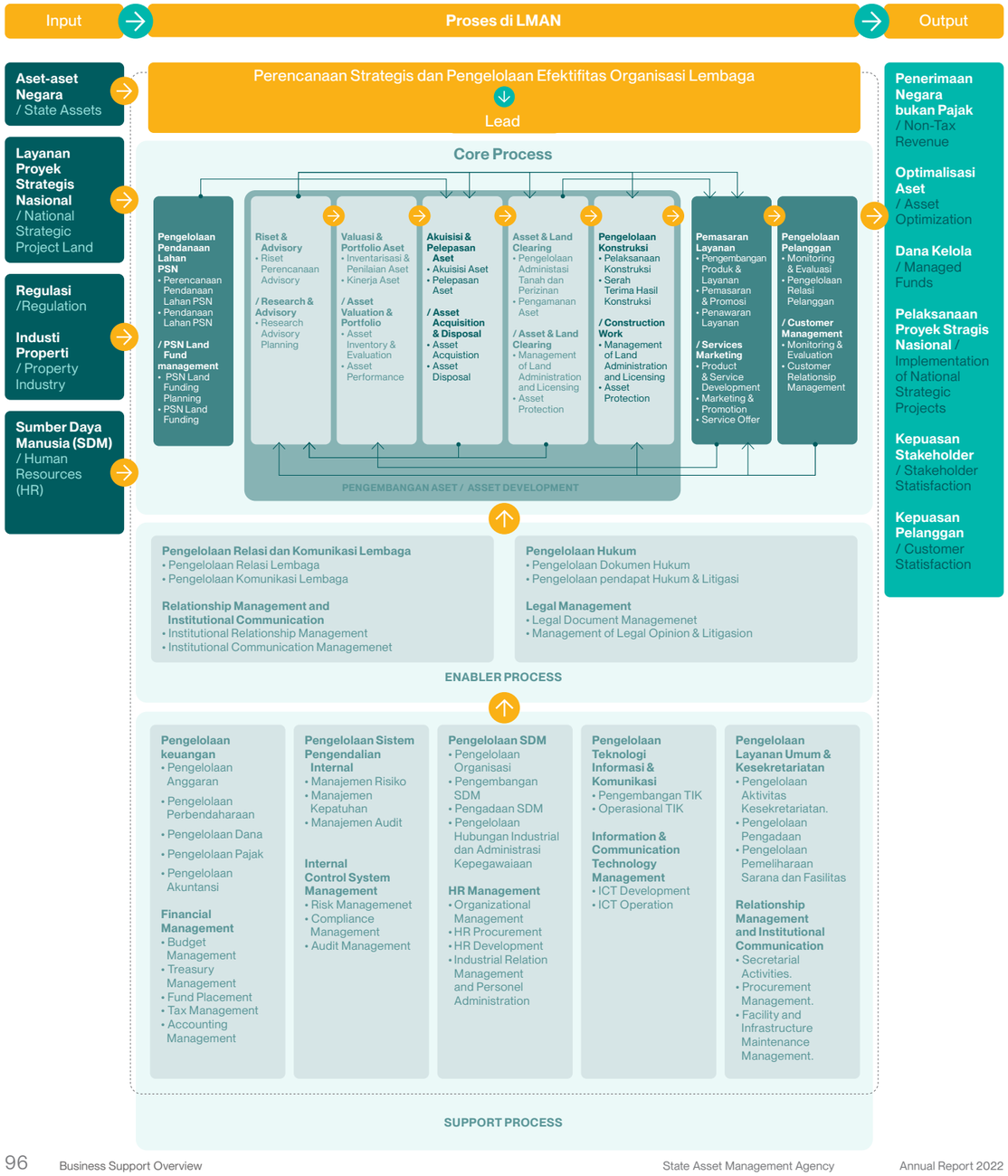

Proses bisnis di LMAN mengacu pada *value chain* di atas. Pada *value chain* terdapat tiga kelompok besar proses bisnis, yaitu:

The business processes at LMAN refer to the value chain above. In the value chain there are three major groups of business processes, namely:

Core Process

Core process merupakan kegiatan utama dari proses bisnis organisasi yang langsung berhubungan dengan penciptaan produk atau hasil akhir dan hasilnya dirasakan langsung oleh customer *(end user)* serta berpengaruh terhadap revenue organisasi.

The core process is the main activity of the organization's business processes that is directly related to the creation of the final product or result and the results are felt directly by the customer (end user) and affect the organization's revenue.

Enabler Process

Enabler process merupakan kegiatan penunjang dari proses bisnis utama organisasi dan memberikan nilai utama bagi stakeholders.

The enabler process is a supporting activity of the organization's main business processes and provides key value for stakeholders.

Supporting Process

Supporting process merupakan kegiatan penunjang untuk mendukung seluruh proses bisnis organisasi.

Supporting process is a supporting activity to support all organizational business processes.

Berdasarkan value chain dan proses bisnis LMAN dimaksud, selanjutnya disusun modul IHRM lainnya, salah satunya adalah model kompetensi yang terdiri dari *soft competency* dan *hard competency.* Model kompetensi dimaksud telah ditetapkan pada tahun 2020, dan telah dilakukan *assessment* atau *reassessment* kepada seluruh Pegawai (Kepala Divisi dan Pelaksana) LMAN secara bertahap dengan mengacu pada standar kompetensi jabatan untuk kompetensi perilaku yang baru.

Based on the intended LMAN value chain and business processes, other IHRM modules are then prepared, one of which is a competency model consisting of soft competency and hard competency. The competency model referred to has been established in 2020, and an assessment or reassessment has been carried out for all LMAN Employees (Division Heads and Implementers) in stages by referring to the position competency standards for the new behavioral competencies.

Pada tahun 2022, dilakukan pengembangan kompetensi sesuai dengan hasil *coaching* dan mentoring antara atasan langsung dan bawahannya dengan mengacu pada hasil *re-assessment* dan hasil capaian kinerja pegawai. Selain itu, juga telah dilaksanakan *assessment* terhadap 11 PNS yang baru di LMAN pada tahun 2022.

In 2022, competence development would be carried out in accordance with the results of coaching and mentoring between direct superiors and their subordinates with reference to the results of re-assessments and results of employee performance achievements. In addition, an assessment has also been carried out on 11 new civil servants at LMAN in 2022.

Oleh sebab itu, model kompetensi di LMAN disusun dengan mengaitkan pada tanggung jawab utama suatu pekerjaan, tanggung jawab umum sekelompok pekerjaan, serta visi, misi, budaya, dan nilai-nilai LMAN.

Therefore, the competency model at LMAN is structured by linking to the main responsibilities of a job, the general responsibilities of a group of jobs, as well as LMAN's vision, mission, culture, and values.

Soft competency atau kompetensi perilaku di LMAN telah mengalami penyesuaian sejak LMAN didirikan. Sampai dengan tahun 2020, standar kompetensi jabatan untuk kompetensi perilaku di LMAN terdiri dari 35 kompetensi.

Soft competency or behavioral competence at LMAN has undergone adjustments since LMAN was founded. Until 2020, job competency standards for behavioral competencies at LMAN consist of 35 competencies.

Dalam penyusunan kajian IHRM, kompetensi perilaku LMAN menjadi 20 kompetensi, yang terdiri dari kompetensi inti (kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap SDM di LMAN), kompetensi profesional (kompetensi yang harus dimiliki setiap Pemimpin Unit Kerja), dan kompetensi khusus atau spesifik (kompetensi yang harus dimiliki sesuai dengan bidangnya).

In preparing the IHRM study, LMAN's behavioral competencies are divided into 20 competencies, which consist of core competencies (competencies that must be possessed by every HR in LMAN), professional competencies (competencies that must be owned by every Work Unit Leader), and special or specific competencies (competencies that must be owned in accordance with the field).

Pada kompetensi perilaku, masing-masing kompetensi memiliki level kedalaman yang bervariasi sesuai dengan kamus kompetensi perilakunya. Sebagai jembatan dengan kompetensi yang berlaku di Kementerian Keuangan telah disusun pula jembatan hakikat kompetensi antara kompetensi perilaku yang berlaku di Kementerian Keuangan dan kompetensi perilaku yang akan diberlakukan di LMAN.

In behavioral competence, each competency has a depth level that varies according to the behavioral competency dictionary. As a bridge with the competencies that apply at the Ministry of Finance, a bridge of the nature of competencies has also been prepared between the behavioral competencies that apply at the Ministry of Finance and the behavioral competencies that will be implemented at LMAN.

Konsep kantor open workspace mendorong pegawai untuk sering berkolaborasi
/ The open workspace concept encourages staff to frequently collaborate

Inti
/ Core

- Achievement Orientation (AOR) -6
- Customer Service Orientation (CSO) -6
- Integrity (INT) -4
- Resilience (RES) -4
- Team Work (TEA) -5

Harus dimiliki setiap SDM LMAN / Must be possessed by every HR of LMAN

Profesional
/ Professional

- Developing Others (DOT) -5
- Directiveness (DIR) -5
- Strategic Orientation (SOR) -4
- Team Leadership (TLE) -6

Harus dimiliki setiap Pemimpin Unit Kerja / Must be possessed by every Work Unit Head

Khusus
/ Specific

- Analytical Thinking (ATH) -4
- Business Savvy (BSA) -5
- Concern for Cost & Efficiency (CCE) -5
- Conceptual Thinking (CTH) -5
- Concern for Order & Accuracy(COA) -4
- Flexibility (FLE) 4
- Impact and Influence (IIN) -6
- Information Seeking (ISE) -5
- Initiative (INI) -5
- Organization Awareness (OAW) -5
- Relationship Building (RBU) -5

Harus dimiliki sesuai bidangnya / Must be possessed according to their fields

Kompetensi Perilaku di LMAN
/ Behavioral Competencies at LMAN → **20 kompetensi**
20 competencies

Hard competency atau kompetensi teknis di LMAN sampai dengan tahun 2019 belum dituangkan dalam suatu standar kompetensi jabatan tertentu. Pada tahun 2020, hasil kajian IHRM telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Utama Nomor 5/LMAN/2020, termasuk penetapan Standar Kompetensi Jabatan untuk kompetensi teknis dan kamus kompetensinya. Pelaksanaan pengembangan kompetensi teknis dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dalam menunjang pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas dan fungsi di masing-masing Unit Kerja.

Kompetensi di LMAN terdiri dari 113 kompetensi teknis yang terbagi sesuai dengan keluarga jabatan *(job family)* yang ada di LMAN. Dengan level keberagaman yang mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2017, yang terdiri dari 1 – paham atau dalam pengembangan, 2 – dasar, 3 – menengah (*intermediate)*, 4 – mumpuni, dan 5 – ahli *(expert)*.

Up to 2019, hard competency or technical competency at LMAN has not yet been set forth in a competency standard for a particular position. In 2020, the results of the IHRM study have been stipulated in the Main Director's Regulation No. 5/LMAN/2020, including the stipulation of Position Competency Standards for technical competencies and competency dictionaries. Implementation of technical competence development is carried out to meet the needs in supporting the implementation of tasks in accordance with the duties and functions in each Work Unit.

Competencies in LMAN consist of 113 technical competencies which are divided according to job families in LMAN. With the level of diversity referring to the Regulation of the Minister of PAN and RB No. 38 of 2017, which consists of 1 - understanding or under development, 2 - basic, 3 - intermediate, 4 - qualified, and 5 - expert.

Perangkat organisasi dan struktur fondasi
/ Organizational Apparatus and Foundation Structure

Level Kedalaman (Permenpanrb no. 38 thn 2017)
/ Depth Level (Permenpanrb No. 38 Year 2017)

1– paham/dalam pengembangan (awareness/being developed)
2– dasar (basic)
3– menengah (intermediate)
4– mumpuni (advance)
5– ahli (expert)

Strategic Management

- Strategic Planning (STP)
- Organization Capability Analysis (ORC)
- Business Process Analysis (BPA)
- Organization Performance Management (ORP)
- Knowledge Managament (KNM)
- Management Reporting (MRE)
- Quality Management (QUM)
- Change Management (CHM)

Commertialization

- Modelling (BUM)
- Business Outlook (BUO)
- Product Management (PRD)
- Asset Performance (ASP)
- Asset Database (ASD)
- Research Planning (REP)
- Asset Intelligence (ASI)
- Feasibility Study (FES)
- Marketing (MRK)
- Marketing Planning (MAP)
- Pricing Management (PRI)
- Promotion Management (PRO)
- Sales Plan (SAP)
- Sales & Account Management (SAA) Business

Engineering

- Quantity Surveying (QUS)
- Mechanical System Design (MES)
- Electrical & Electronic System Design (ELS)
- Instrument & Control System Design (ELS)
- Instrumen & Control System Design (ICS)
- Civil Infrastructure Engineering (CII)
- Piping System Design (PIS)
- Architecture Design (ARD)
- Project Planning & Schedulling (PRP)
- Project Control & Performance (PCP)
- Mechanical Reliability & Maintenance (MRM)
- Electrical & Electronic System Reliability & Maintenance (ELR)
- Instrument & Control System Reliability & Maintenance (ICR)
- Civil Reliability & Maintenance (CIR)
- Piping Reliability & Maintenance (PIR)
- Architecture Reliability & Maintenance (ARR)

Security & Safety

- Safety Risk Management (SAR)
- Safe Work Practice (SAW)
- Environment Risk Management (ENR
- Security Management System (SEM)
- Physical Secutiry (PHS)
- Non Physical Security (NPS)

Legal

- Legal Opinion (LEO)
- Regulation Drafting (RED)
- Contract Management (CTR)
- Legal Asset Clearing (LEA)
- Contract Negotiation (CON)
- Regulation Advocation (REG)
- Non Court Commercial Litigation (NOC)
- Court Commercial Litigation (COC)

Relation & Communication

- Stakeholder Mapping (STM)
- Stakeholder Relation Management (STR)
- Government Relation (GOR)
- Media Relation Management (MER)
- Partnership Management (PAM)
- Customer Relation Management (CUR)
- Institutional Reputation (INR)
- Communication Management (COM)
- Event Management (EVM)
- Procoler (PRT)
- (SAA) Business

Kompetensi Teknis di LMAN
/ Technical Competencies at LMAN → **113 Kompetensi**
113 Competencies

Finance Management

- Land Acquisition Planning (LAA)
- Land Funding (LAF)
- Document Verification (DOV)
- Settlement (SET)
- Budgeting (BUD)
- Financial Forecasting (FIF)
- Cash Management (CAM)
- Data Reconciliation (DAR)
- Insurance Management (INS)
- Fundamental Analysis (FUA)
- Portfolio Management (POM)
- Tax Planning (TAP)
- Tax Compliance (TAC)
- Tax Litigation (TAL)
- Financial Reporting (FIR)
- Asset Accounting (ASA)
- Revenue Accounting (REA)
- Expenxe Accounting (EXA)
- Portfolio Management (POM)
- Tax Planning (TAP)
- Tax Compliance (TAC)
- Tax Litigation (TAL)
- Financial Reporting (FIR)
- Asset Accounting (ASA)
- Revenue Accounting (REA)
- Expenxe Accounting (EXA)

Government, Risk & Compliance

- Risk Management Framework & Principles (RMF)
- Risk Management Implementation (RMI)
- Risk Maturity (RIM)
- Internal Control (INS)
- Audit Implementation (AUI)
- Audit Reporting & Communication (AUR)
- Good Governance (GOG)
- Fraud Prevention (FRP)

Human Capital Management

- Organizational Structure Design (ORS)
- Culture Management (CUM)
- Manpower Plannning (MAN)
- Remuneration Management (REM)
- Job Analysis (JOA)
- Competency Management (COP)
- Job Evaluation (JOE)
- Performance Management (PEM)
- Learning Management (LEM)
- Talant Management (TAM)
- Employee Relation Management (EMR)

Information & Communication Technology

- Enterprise ICT Architecture (ENI)
- ICT Business Need Analysis (ICB)
- Data Management (DAM)
- Software Development (SOD)
- ICT Application Quality Management (ICA)
- Operational & Infrastructure (OPI)
- Information Security (INF)
- Database Management (DTB)

General Affair (GA)

- Administration Management (ADM)
- Correspondence (COR)
- Record Management (REC)
- Procurement Management (PRC)
- Vendor Management (VEM)
- BMN Management (BMM)
- Building & Facilities Management (BFM)

Kompetensi di LMAN merupakan salah satu indikator untuk mendapatkan pegawai yang mampu bekerja dengan efektif dan kualitas pencapaian kinerja yang memuaskan serta selaras dengan nilai dan budaya LMAN. Selain itu, kompetensi adalah salah satu program dalam manajemen talenta yang bertujuan untuk:

Competence at LMAN is one of the indicators to get employees who are able to work effectively and achieve quality performance that is satisfactory and in line with the values and culture of LMAN. In addition, competence is one of the programs in talent management which aims to:

1

Menemukan dan mempersiapkan pegawai terbaik untuk menduduki jabatan target setingkat lebih tinggi dan memimpin organisasi guna mengoptimalkan capaian strategi, tujuan organisasi, dan mendukung pencapaian visi LMAN;

Find and prepare the best employees to occupy higher level target positions and lead the organization to optimize strategic achievements, organizational goals, and support the achievement of LMAN's vision;

2

Mewujudkan *succession planning* yang objektif, terencana, terbuka, tepat waktu, dan akuntabel, sehingga dapat memperkuat dan mengakselerasi penerapan sistem merit (berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja) di lingkungan LMAN;

Realize succession planning that is objective, planned, open, timely and accountable, so as to strengthen and accelerate the implementation of the merit system (based on qualifications, competence and performance) within LMAN;

3

Membangun iklim kompetisi positif dan transparan di antara pegawai untuk memberikan prestasi terbaik bagi LMAN; dan

Build a positive and transparent competitive climate among employees to provide the best performance for LMAN; And

4

Membangun kepercayaan dan meningkatkan *engagement* pegawai kepada LMAN.

Build trust and increase employee engagement with LMAN.

Pejabat Pengelola (yang terdiri dari Direktur Utama dan Direktur Teknis), Kepala Divisi/SPI, dan setiap Pegawai di LMAN bertanggung jawab atas pelaksanaan pengembangan kompetensi di LMAN. Direktur Utama, Direktur Teknis yang menangani fungsi SDM, dan Kepala Divisi yang menangani fungsi SDM memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan dan menetapkan pengelolaan kompetensi di LMAN, melaksanakan pengelolaan dan monitoring serta evaluasi pengelolaan kompetensi di LMAN.

Selain itu, Pejabat Pengelola (yang terdiri dari Direktur Utama dan Direktur Teknis), Kepala Divisi/SPI selaku atasan langsung memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk melakukan pembinaan dan pengembangan kompetensi pejabat atau pegawai di unit kerjanya.

Di sisi lain, masing-masing Pejabat dan Pegawai memiliki hak untuk memperoleh pembinaan untuk mengembangkan diri sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya, sebagai upaya melaksanakan kewajibannya dalam mencapai sasaran kerja yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hal di atas, maka model kompetensi secara khusus, maupun IHRM secara komprehensif adalah milik bersama yang harus dikelola secara bersama.

Management Officers (consisting of the Main Director and Technical Director), Head of Division/SPI, and every employee at LMAN are responsible for the implementation of competency development at LMAN. The Main Director, the Technical Director who handles the HR function, and the Division Head who handles the HR function have the duties and responsibilities of developing and establishing competency management at LMAN, carrying out management and monitoring as well as evaluating competency management at LMAN.

In addition, Management Officers (consisting of the Main Director and Technical Director), Head of Division/SPI as the direct supervisor have the authority and responsibility to carry out training and competency development for officials or employees in their work units.

On the other hand, each Officer and Employee has the right to receive guidance to develop themselves according to their competencies, as an effort to carry out their obligations in achieving predetermined work targets.

Based on the above, the competency model in particular, as well as IHRM in a comprehensive manner are shared property that must be managed jointly.

Karyawan LMAN sedang melakukan diskusi
/ LMAN Staffs in Discussion

Pengembangan Kompetensi
Competency Development

Program pengembangan di LMAN terdiri dari pengembangan oleh atasan, pelatihan, manajemen karir, dan melanjutkan pendidikan formal. Pada prinsipnya, program pengembangan dimaksud bertujuan untuk mempersiapkan pegawai menduduki jabatan setingkat lebih tinggi, memperbaiki kualitas dan kompetensi pegawai, serta mendapatkan dan mempertahankan pegawai.

LMAN memiliki misi untuk memiliki pegawai-pegawai yang ahli di beberapa bidang, seperti manajemen risiko, keuangan, pemasaran, strategi komunikasi, dan manajemen properti. Terkait hal tersebut, LMAN telah mengirimkan beberapa pegawainya untuk mendapatkan sertifikasi di bidang-bidang dimaksud dan pegawai ditugaskan untuk mengikuti pelatihan berupa *workshop* atau *training* guna menambah kualitas pegawai dalam menunjang tugas dan fungsinya, serta dalam upaya mempertahankan pegawai dimaksud.

Adapun pelatihan berupa seminar atau *workshop* yang sudah dilaksanakan pada tahun 2022 yang bersifat peningkatan wawasan dan pengetahuan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi di LMAN, antara lain:

The development program at LMAN consists of development by superiors, training, career management, and continuing formal education. In principle, the intended development program aims to prepare employees for positions of a higher level, improve the quality and competence of employees, and recruit and retain employees.

LMAN's mission is to have employees who are experts in several fields, such as risk management, finance, marketing, communication strategy, and property management. Related to this, LMAN has sent several of its employees to obtain certification in these fields and employees are assigned to attend training in the form of workshops or training to increase the quality of employees in supporting their duties and functions, as well as in an effort to retain the said employees.

Training in the form of seminars or workshops has been held in 2022 with the aim of increasing insight and knowledge to support the implementation of duties and functions at LMAN. The training consists of the following:

Seminar

- Implementasi PSAK 7 Series (71, 71, 73) di masa pandemi
- Internalisasi Nilai dan Budaya LMAN
- e-Learning Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Pejabat Pengawas
- e-Learning Dasar-Dasar Coaching, Mentoring, dan Counseling
- e-Learning Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan
- PJJ Talent Development Program Pejabat Pengawas DJKN
- Progressive Web Application
- PJJ Persiapan Secondment Pegawai DJKN ke Perusahaan Sekuritas
- Legislative Drafting Training
- Knowledge of Enterprise IT Architecture (TOGAF)
- Data Visualization with Python and Tableau® desktop
- Practical Problem Solving
- Powerful Database Analysis & Dashboard Reporting with Microsoft Excel
- Data Analytics & Machine Learning with Python
- Building Java Web Apps Using Spring MVC
- Seminar on Governance Capability for China "Belt and Road" Countries
- Data Analysis & Visualization with Microsoft Excel
- PJJ Persiapan Assessment Center
- Executive Workshop Strategi Komunikasi untuk Kebijakan Publik
- Root Cause Analysis, Greenship Associate, Strategic Decision Making, dan PJJ Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) Level 1
- Agile Leadership
- Workshop Penanganan Bencana Tingkat Dasar
- Program Akreditasi Gelar Profesi Associate Member Indonesia Public Relations
- Microlearning Introduction to Data Science I & II
- e-Learning dan PJJ Pengasuransian Barang Milik Negara
- PJJ Penyusunan dan Penelaahan Laporan Keuangan
- Pemerintah dan Laporan Keuangan BLU
- PJJ RBA – Tarif dan Remunerasi BLU
- Certified Professional Management Accountant (CPMA) Review
- People Management Skills
- Feasibility Study
- Data Analytic & Continuous Audit
- Time Management
- e-Learning Pengetahuan Dasar Antikorupsi dan Integritas
- Legislative Drafting Training
- Executive Training for the Winners
- Training of Trainer Collaboration Tools Kemenkeu
- Accounting for Decision Making
- Service Excellence bagi Frontliners di Lingkungan DJKN
- PJJ Data Driven Decision Making
- Digital Public Relations
- Data Science Fundamentals
- Cybersecurity Essentials
- Social Media Analyst
- Public Speaking for Business
- e-Learning Penguatan Budaya Organisasi DJKN
- e-Learning Peningkatan Pemahaman Gratifikasi di Lingkungan DJKN
- Pelatihan Peningkatan Kompetensi Interpersonal Skill for Professional Leaders
- PJJ Manajemen Arsip Elektronik
- Owner's Estimate/HPS
- Cybercrime & Cyberlaw dalam Sistem Hukum Indonesia
- Strategic Thinking in Decision Making
- Chartered Financial Analyst (CFA) Level 1 Course
- Certified Financial Planner Review
- Risk Management for Public Sector
- HBU dan Kelayakan Bisnis Properti dan K3 Migas

Workshop

- Implementation of PSAK 7 Series (71, 71, 73) during the pandemic
- Internalization of LMAN Values and Culture
- e-Learning on Managerial and Socio-Cultural
- Competency of Supervisory Officers
- e-Learning of Fundamentals of Coaching,
- Mentoring, and Counseling
- e-Learning of Problem Solving and Decision Making
- PJJ Talent Development Program for
- DJKN Supervision Officers
- Progressive Web Application
- PJJ Preparation for Secondment of DJKN
- Employees to Securities Companies
- Legislative Drafting Training
- Knowledge of Enterprise IT Architecture (TOGAF)
- Data Visualization with Python and Tableau® desktop
- Practical Problem Solving
- Powerful Database Analysis & Dashboard
- Reporting with Microsoft Excel
- Data Analytics & Machine Learning with Python
- Building Java Web Apps Using Spring MVC
- Seminar on Governance Capability for
- China "Belt and Road" Countries
- Data Analysis & Visualization with Microsoft Excel
- PJJ Assessment Center Preparation
- Executive Communication Strategy Workshop for Public Policy
- Root Cause Analysis, Greenship Associate, Strategic
- Decision Making, and PJJ Competency Procurement of Government Goods/Services (PBJP) Level 1
- Agile Leadership
- Basic Level Disaster Management Workshop
- Accreditation Program of the Professional Title of the
- Associate Member of Indonesia Public Relations
- Microlearning Introduction to Data Science I & II
- e-Learning and PJJ Goods Insurance State Owned
- PJJ for Preparation and Review of Government Financial Statements and BLU Financial Statements
- PJJ RBA – BLU Rates and Remuneration
- Certified Professional Management
- Accountant (CPMA) Review
- People Management Skills
- Feasibility Study
- Data Analytic & Continuous Audit
- Time Management
- e- Learning Basic Knowledge of Anti-Corruption and Integrity
- Legislative Drafting Training
- Executive Training for the Winners
- Training of Trainer Collaboration Tools of the Ministry of Finance
- Accounting for Decision Making
- Service Excellence for the Frontliners within DJKN Environment
- PJJ Data Driven Decision Making
- Digital Public Relations
- Data Science Fundamentals
- Cybersecurity Essentials
- Social Media Analyst
- Public Speaking for Business
- e-Learning Strengthening DJKN Organizational Culture
- e-Learning Increasing Gratification Understanding in the DJKN Environment
- Interpersonal Skill Competency Improvement
- Training for Professional Leaders
- PJJ Electronic Archive Management
- Owner's Estimate/HPS
- Cybercrime & Cyberlaw in the Indonesian Legal System
- Strategic Thinking in Decision Making
- Chartered Financial Analyst (CFA) Level 1 Course
- Certified Financial Planner Review
- Risk Management for Public Sector
- HBU and Property and K3 Oil and Gas Business Feasibility

Sementara itu, program pengembangan tahun 2022 yang berupa pelatihan dan sertifikasi, antara lain:

Meanwhile, the development programs in 2022 consist of training and certification:

- Certified Public Private Partnership
- Brevet A/B
- Sertifikasi Pengembangan Kompetensi / Certification of Counselor Competency
- Konselor di Kementerian Keuangan / Development at the Ministry of Finance
- Pendidikan Khusus Praktisi/Pengacara Perpajakan / Special Education for Tax Practitioners/Lawyers
- Certified Marketing Analyst, Professional Financial Modeler, Certified Risk Management Officer (CRMO)
- Certified Risk Management Professional (CRMP)
- Sertifikasi Penyusunan AMDAL / AMDAL Preparation Certification
- Certified Human Resources Professional
- Certified Procurement Specialist
- Certified Professional Management Accountant

Serta terdapat program yang berlanjut sampai dengan tahun 2023, yaitu:

There are also programs that will continue until 2023, they are:

- Certified Fraud Examiner
- Online Course GRC Audit Certification (GRCA)
- GRC Professional Certification (GRCP)

Karyawan yang mengikuti pelatihan dan mendapat sertifikat untuk program kegiatan berupa pelatihan dan/atau uji sertifikasi, antara lain:

There are employees who attended training and received certificates for activity programs in the form of training and/or certification tests. They are:

- Certified Public Private Partnership: 3 orang / 3 people for Certified Public Private Partnership
- Brevet A/B: 6 orang / 6 people for Brevet A/B
- Sertifikasi Pengembangan Kompetensi Konselor di Kementerian Keuangan: 1 orang / 1 person for Counselor Competency Development Certification at the Ministry of Finance
- Pendidikan Khusus Praktisi/Pengacara Perpajakan: 2 orang / 2 people for Special Education for Tax Practitioners/Lawyers
- Certified Marketing Analyst, Professional Financial Modeler: 7 orang / 7 people for Certified Marketing Analyst Professional Financial Modeler
- Certified Risk Management Officer (CRMO): 3 orang / 3 people for Certified Risk Management Officer (CRMO)
- Certified Risk Management Professional (CRMP): 3 orang / 3 people for Certified Risk Management Professional (CRMP)
- Sertifikasi Penyusunan AMDAL: 2 orang / 2 people for AMDAL Preparation Certification
- Certified Human Resources Professional: 1 orang / 1 person for Certified Human Resources Professional
- Certified Procurement Specialist: 1 orang / 1 person for the Certified Procurement Specialist
- Certified Professional Management Accountant: 1 orang / 1 person for the Certified Professional Management Accountant

Serta terdapat program yang berlanjut sampai dengan tahun 2023, yaitu:

There is a program that will continue until 2023, namely:

- Certified Fraud Examiner: 1 orang / 1 person for the Certified Fraud Examiner
- Online Course GRC Audit Certification (GRCA) & GRC Professional Certification (GRCP): 1 orang / 1 person for the Online Course GRC Audit Certification (GRCA) & GRC Professional Certification (GRCP)

Biaya Pengembangan Kompetensi di Tahun 2022
Competency Development Costs in 2022

Realisasi biaya untuk kegiatan pelatihan di tahun 2022 adalah sebesar ±Rp1.231.735.932,- atau mencapai 133% dibanding tahun 2021 yang tercatat sebesar ±Rp928.645.755,-

Biaya perjalanan untuk keperluan pelatihan adalah sebesar Rp807.013.502, atau mencapai 211% dibanding tahun 2021 yang tercatat sebesar Rp382.490.345,-.

Biaya perjalanan di atas adalah biaya yang dikeluarkan untuk membiayai kegiatan perjalanan dinas dalam rangka sejumlah pelatihan dalam negeri antara lain internalisasi nilai dan budaya kerja LMAN, dan program BoD terkait *Strategic Thinking in Decision Making*, serta perjalanan dinas luar negeri dalam rangka *short course* sebagai apresiasi pemenang *The Asset Manager*.

Realized costs for training activities in 2022 amounted to ± Rp1,231,735,932,- or reached 133% compared to 2021 which was recorded at ± Rp928,645,755, -

Travel costs for training purposes amounted to Rp807,013,502, or reached 211% compared to 2021 which was recorded at Rp382,490,345.-

The travel expenses above are expenses incurred to finance official travel activities in the context of a number of domestic trainings, including internalizing LMAN's work values and culture, and the BoD program related to Strategic Thinking in Decision Making, as well as overseas official trips within the context of short courses as appreciation for the winners of The Asset Manager.

Kesetaraan *Gender*
Gender Equality

Dalam menjalankan kegiatan organisasi, LMAN selalu mengedepankan prinsip kesetaraan *gender*, di mana kompetensi dan kapabilitas dalam bekerja menjadi pertimbangan utama. Penerapan kesetaraan gender di LMAN sudah dimulai sejak tahap rekrutmen.

Berpegang pada prinsip ini, LMAN membuka peluang bagi kandidat yang memiliki skill dan kompetensi yang dibutuhkan oleh LMAN, apa pun gendernya. Dalam uraian jabatan, pengumuman rekrutmen, maupun pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara selalu diutamakan pada pelaksanaan tugas dan fungsi, sehingga tidak akan menimbulkan bias *gender*.

In carrying out organizational activities, LMAN always prioritizes the principle of gender equality, where competency and capability at work are the main considerations. The implementation of gender equality at LMAN has started since the recruitment stage.

Adhering to this principle, LMAN opens opportunities for candidates who have the skills and competencies needed by LMAN, regardless of gender. In job descriptions, announcements of recruitment, as well as questions in interviews, the priority is always given to the implementation of duties and functions, so there will be no gender bias.

Kesetaraan Gaji
/ Salary Equality

Pemberian gaji adalah berdasarkan *job grade* atau jabatan yang diamanatkan kepada pejabat pengelola dan pegawai di LMAN, dalam hal ini tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan.

Payment of salary is based on job grade or position mandated to management officials and employees at LMAN, in this case it does not differentiate between men and women.

Mendukung *Work-life Balance*
/ Support Work-life Balance

Di LMAN, salah satu cara membangun kesetaraan *gender* dalam pekerjaan adalah mendukung fleksibilitas kerja melalui pemberian ijin/cuti dan *work-life balance* bagi pegawai, termasuk kebijakan izin atau cuti setengah hari. Salah satu alasan yang membuat perempuan mendapatkan gaji lebih sedikit dari laki-laki adalah karyawan perempuan kerap kali harus mengorbankan gaji demi pekerjaan yang menawarkan fleksibilitas kerja. Ini karena mereka memiliki tuntutan pekerjaan dan mengasuh anak sebagai seorang ibu. Fleksibilitas kerja dimaksud tidak hanya untuk pegawai perempuan, karena pegawai laki-laki terkadang juga membutuhkannya ketika harus berbagi peran dan tanggung jawab dalam mengasuh anak.

At LMAN, one of the ways to build gender equality in employment is to support work flexibility through the provision of permits/leave and work-life balance for employees, including permission or half-day leave policies. One of the reasons why women earn less than men is that female employees often have to sacrifice salary for jobs that offer work flexibility. This is because they have the demands of work and parenting as a mother. Work flexibility is meant not only for female employees, because male employees sometimes also need it when they have to share roles and responsibilities in raising children.

LMAN selalu memberikan kesempatan kerja yang sama, apapun *gender*-nya
/ LMAN always provides equal employment opportunities, regardless of gender

Kebijakan Tegas terhadap Pelecehan Di Tempat Kerja
/ Strong Policy Against Workplace Harassment

LMAN secara tegas menerapkan sanksi terhadap pelaku kejahatan pelecehan di lingkungan kerja dengan menerapkan Kode Etik dan Kode Perilaku, antara lain terkait integritas dan saling menghormati. Apabila ada peristiwa tersebut, maka akan dilakukan proses pemeriksaan dan penegakan kode etik dan kode perilaku oleh majelis lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku di LMAN.

LMAN strictly implements sanctions against perpetrators of crimes of harassment in the work environment by implementing a Code of Ethics and Code of Conduct, among others related to integrity and mutual respect. If there is such an event, a further process of examining and enforcing the code of ethics and code of conduct will be carried out by the assembly in accordance with the provisions in force at LMAN.

Kesempatan yang Sama untuk Pemimpin Perempuan
/ Equal Opportunity for Women Leaders

Pemberian gaji adalah berdasarkan *job grade* atau jabatan yang diamanatkan kepada pejabat pengelola dan pegawai di LMAN, dalam hal ini tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan.

Payment of salary is based on job grade or position mandated to management officials and employees at LMAN, in this case it does not differentiate between men and women.

Kerja sama LMAN dengan BNI melalui program BNI Life
/ LMAN cooperation with BNI through the program BNI Life

Program Pensiun
Pension Program

Program ini memberikan perlindungan kesejahteraan setelah purna bakti dari LMAN. Penyediaan program dimaksud diperhitungkan sebagai pengurangan kewajiban atas pemberian pesangon bagi pejabat dan pegawai yang berasal dari PNS, serta pengurangan kewajiban atas pemberian pesangon dan penghargaan masa kerja bagi pejabat dan pegawai yang berasal dari non-PNS.

Iuran program pensiun ditetapkan sebesar 5% dari gaji sesuai dengan peringkat jabatan. Penyediaan program pensiun dimaksud bekerja sama dengan Dana Pensiun Lembaga Keuangan terpilih, yaitu BNI Life.

This program provides welfare protection after retirement from LMAN. The provision of the program is calculated as a reduction in the obligation to provide severance pay for officials and employees who come from civil servants, as well as a reduction in the obligation to provide severance pay and long service awards for officials and employees who come from non-Civil Servants.

Pension program contributions are set at 5% of salary in accordance with the rank of position. The provision of the intended pension program is in collaboration with the selected Financial Institution Pension Fund, namely BNI Life.

Asuransi Kesehatan Tambahan
Additional Health Insurance

Pejabat Pengelola dan Pegawai LMAN diikutkan dalam asuransi kesehatan tambahan *(top up benefit)*. Manfaat asuransi dimaksud berlaku bagi pejabat pengelola/pegawai, seorang suami/istri sah, dan maksimal tiga orang anak.

Sementara itu, manfaat asuransi kesehatan tambahan minimal terdiri dari fasilitas rawat jalan, fasilitas rawat inap dan pelayanan obat, serta pelayanan persalinan, layanan kacamata, dan layanan prosthesis gigi. Penyediaan program asuransi kesehatan tambahan dimaksud bekerja sama dengan Perusahaan Asuransi terpilih, yaitu Mandiri Inhealth.

LMAN Management Officers and Employees are included in additional health insurance (top up benefit). The intended insurance benefits apply to management officials/employees, a legal husband/wife, and a maximum of three children.

Meanwhile, additional health insurance benefits at a minimum consist of outpatient facilities, inpatient facilities and drug services, as well as delivery services, eyeglass services, and dental prosthesis services. The provision of additional health insurance programs is intended to work with selected insurance company, namely Mandiri Inhealth.

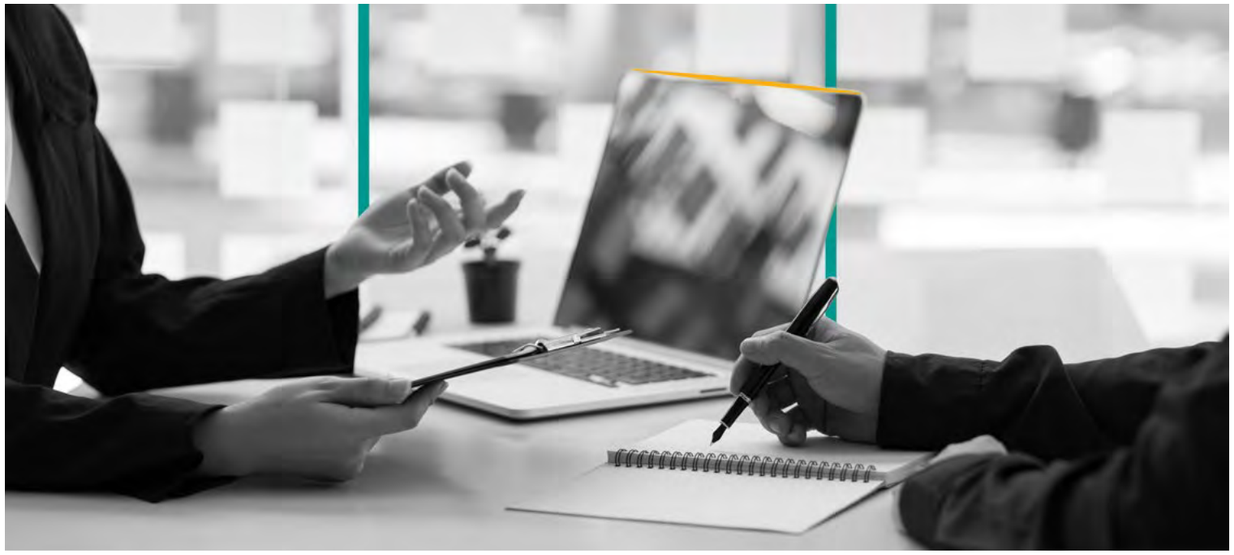

Kerja sama LMAN dengan Mandiri melalui program Mandiri Inhealth
/ LMAN cooperation with Mandiri through the program Mandiri Inhealth

Asuransi Purna Jabatan
Post-Employment Insurance

Manfaat asuransi purna jabatan diperoleh pada saat program berakhir dan diberikan secara sekaligus oleh Perusahaan Asuransi melalui LMAN. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 523/KMK.05/2018 tentang Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai BLU LMAN, pihak yang menerima asuransi purna jabatan adalah, pejabat pengelola dan anggota Dewan Pengawas LMAN.

Post-employment insurance benefits are obtained when the program ends and are provided simultaneously by the Insurance Company through LMAN. Based on the Decree of the Minister of Finance No. 523/KMK.05/2018 concerning Determination of Remuneration for Management Officers, Supervisory Board, and LMAN BLU Employees, the parties receiving post-employment insurance are management officials and members of the LMAN Supervisory Board.

Rencana Pengembangan SDM LMAN Tahun 2023
HR Development Plan at LMAN for 2023

Sesuai Rencana Strategis 2020-2024 terkait, pengelolaan SDM mengangkat tema Sasaran Strategis berupa SDM yang Optimal untuk mewujudkan SDM yang Adaptif dan *Technology Savvy,* maka sejumlah prioritas pada tahun 2023 antara lain:

In accordance with the 2020-2024 Strategic Plan, HR management raises the theme of the Strategic Target in the form of Optimal HR to create Adaptive and Technology Savvy HR, thus a number of priorities in 2023 include:

1. Implementasi manajemen pengetahuan LMAN. Pada tahun 2022 telah ditingkatkan awareness untuk penggunaan aplikasi NAS sebagai pusat pengetahuan LMAN yang dikelola dari pegawai, oleh pegawai, dan untuk pegawai LMAN. Selain itu, sejak tahun 2022 LMAN turut mengelola manajemen pengetahuan yang terkait melalui KNPedia.

   LMAN knowledge management implementation. In 2022, awareness has been raised for the use of the NAS application as an LMAN knowledge center which is managed from employees, by employees, and for LMAN employees. In addition, since 2022 LMAN has also managed related knowledge management through KNPedia.

2. Setelah pada tahun 2022 dilaksanakan pilot project agar pegawai LMAN yang berasal dari non-PNS dapat mengikuti *e-learning* (open access pada KLC), maka pada tahun 2023 pembelajaran melalui KLC menjadi salah satu saluran pembelajaran bagi SDM LMAN.

   After implementing a pilot project in 2022 so that non-PNS LMAN employees can take part in e-learning (open access to KLC), in 2023 learning through KLC will become one of the learning channels for LMAN HR.

3. Mengingat pengelolaan SDM di BLU LMAN selama ini mengacu pada PP 74/2022 juncto PP 23/2005, dan sehubungan dengan implementasi PP 49/2018, maka sejak tahun 2022 dilakukan monitoring kebijakan lebih lanjut mengenai pengelolaan SDM di BLU, khususnya pegawai LMAN yang berasal dari non-PNS dan tenaga honorer-admin.

   Considering that HR management at BLU LMAN so far refers to PP 74/2022 juncto PP 23/2005, and in connection with the implementation of PP 49/2018, since 2022 further policy monitoring has been carried out regarding HR management at BLU, especially LMAN employees who come from non-PNS and honorary-admin staff.

Pengembangan Teknologi Informasi
Development of Information Technology

Untuk mengoptimalkan pengelolaan aset negara, LMAN secara berkesinambungan melakukan modernisasi Sistem Informasi Manajemen dengan berbasis digital agar LMAN mampu melakukan perencanaan aset, optimalisasi aset, optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran dan optimalisasi pengelolaan kekayaan negara menjadi lebih baik.

To optimize the management of state assets, LMAN continuously modernizes Management Information Systems on a digital basis so that LMAN is able to carry out asset planning, asset optimization, revenue optimization, expenditure efficiency and optimization of state asset management for the better.

Pemaparan aset kelolaan LMAN kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
/ Exposure of the assets managed by LMAN to the Directorate General of State Assets

LMAN memastikan seluruh SDM mampu menerapkan Teknologi Informasi
/ LMAN ensures all human Resources are capable to apply Information Techonology

Modernisasi Sistem Informasi Manajemen
Modernization of Management Information Systems

Sistem Informasi Manajemen LMAN merupakan aplikasi yang digunakan untuk membantu seluruh proses bisnis yang terdapat pada LMAN. Sistem tersebut meliputi perencanaan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penatausahaan, pengawasan/ pengendalian. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen di LMAN menggunakan metode *agile* yang dibagi ke dalam tahapan-tahapan berikut:

The LMAN Management Information System is an application used to assist all business processes contained in LMAN. The system includes planning and budgeting, procurement, use, utilization, security and maintenance, administration, supervision/control. The development of a Management Information System at LMAN uses an agile method which is divided into the following stages:

1. Inisiasi / Initiation
2. Pengembangan konsep sistem / System concept development
3. Perencanaan / Planning
4. Analisis kebutuhan / Needs analysis
5. Desain / Design
6. Pengembangan / Development
7. Tes integrasi / Test integration
8. Implementasi / Implementation

Modernisasi Sistem Informasi Manajemen di Tahun 2022
Modernization of Management Information Systems in 2022

Modernisasi Sistem Informasi di LMAN mengacu pada Rencana Induk Teknologi Informasi (RITI) yang mencantumkan Visi Teknologi Informasi (TI) di LMAN, yakni: Menerapkan Teknologi Informasi yang mampu mendukung dinamika kegiatan dalam pengelolaan aset negara.

Modernization of Information Systems at LMAN refers to the Information Technology Master Plan (RITI) which includes the Vision of Information Technology (IT) at LMAN, namely: Implementing Information Technology capable of supporting the dynamics of activities in managing state assets.

Rencana Modernisasi Sistem Informasi Manajemen Tahun 2023
Management Information System Modernization Plan for 2023

Pada tahun 2022, rencana modernisasi Sistem Informasi di LMAN sudah pada tahap integrasi dari modul yang sudah dibuat sebagai penunjang proses bisnis di LMAN. Beberapa kegiatan modernisasi Sistem Informasi yang dilakukan di antaranya:

In 2022, the Information System modernization plan at LMAN is already at the integration stage of the modules that have been created to support business processes at LMAN. Some of the Information System modernization activities carried out include:

Pengembangan AESIA dilakukan secara inhouse oleh LMAN agar sasaran AESIA sebagai platform optimalisasi aset negara tepat guna dan sasaran
/ Development of AESIA is carried out in-honey by LMAN to achieve AESIA's goal to become an appropriate and targeted platform for optimizing state assets

1. Pengembangan AESIA (Aset Indonesia), Sebuah *"marketplace platform"* yang dibangun dengan tujuan memberikan kemudahan untuk pemasaran optimalisasi, kanal layanan konsultasi dan *arranger* serta informasi literasi pengenalan kesadaran optimalisasi aset properti Barang Milik Negara kepada publik. AESIA juga masuk sebagai salah satu IS-RBTK dari Kemenkeu *One*. Pengembangan yang dilakukan diantaranya Proses *reengineering* dari Aplikasi AESIA menggunakan *Backend Platform yang* lebih mudah dikembangkan secara berkelanjutan dan menerapkan *Content Management System* (CMS) dari AESIA yang lebih baik dan efisien serta penyelesaian Mobile Apps dari AESIA dalam *platform* berbasis Android dan iOS; Penerapan fitur *booking* dan transaksi pembayaran pada AESIA dalam format isian data aset kelolaan dan *Query* yang dapat ditindaklanjuti dan proses *Whitelabel Market* dari aset-aset K/L lain di AESIA dalam bentuk *showcase* Aset;

   Development of AESIA (Indonesian Assets), a "marketplace platform" built with the aim of providing convenience for optimizing marketing, consulting and arranger service channels as well as information literacy to introduce awareness of optimization of state-owned property assets to the public. AESIA is also included as one of the IS-RBTK from the Ministry of Finance One. Developments carried out include the reengineering process of the AESIA Application using a Backend Platform that is easier to develop in a sustainable manner and implementing a better and more efficient Content Management System (CMS) from AESIA as well as completing Mobile Apps from AESIA on Android and iOS based platforms; Application of booking features and payment transactions in AESIA in the format of data entry for managed assets and follow-up Query and Whitelabel Market processes from other K/L assets in AESIA in the form of an Asset showcase;

1. Proses perbaikan bugs serta penambahan fitur pada beberapa aplikasi, di antaranya LFMS *(Land Funding Management System)*, VMS *(Vendor Management System)*, dan IHRMS *(Integrated Human Resource Management System)*.

   The process of fixing bugs and adding features to several applications, including LFMS (Land Funding Management System), VMS (Vendor Management System), and IHRMS (Integrated Human Resource Management System).

1. Penyelesaian aplikasi Lapor DOTI sebagai bagian dari pengembangan *help desk internal* LMAN.

   Completion of the DOTI Report application as part of LMAN's internal help desk development.

Anggaran Modernisasi Sistem Informasi Manajemen Tahun 2022
Management Information System Modernization Budget for 2022

Anggaran Modernisasi Sistem Informasi Manajemen yang digunakan selama kurun waktu 2022 mencakup dua kegiatan utama yang terdiri dari:

The Management Information System Modernization Budget used during the 2022 period includes two main activities consisting of:

No	Uraian / Description	Jumlah / Amount
1	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi / Procurement of Data Processing and Communication Equipment	Rp 262.188.000
2	Pengadaan Lisensi Aplikasi / Application License Procurement	Rp 240.000.000
Total		Rp 502.188.000

Total anggaran yang sudah direalisasikan sebesar Rp 502.188.000 (lima ratus dua juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah), di mana pada masing-masing komponen anggaran di atas sudah teroptimalisasi ke dalam beberapa hal sebagai berikut:

The total realized budget is Rp502,188,000 (five hundred two million one hundred and eighty eight thousand rupiah), in which each of the budget components above has been optimized in the following ways:

1. Komponen Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
/ Data Processing and Communication Equipment Procurement Components

Pada tahun berfokus pada penyiapan perangkat teknologi informasi pendukung untuk gedung baru Dhanadyaksa Slamet Riyadi sebagai gedung arsip. Penyiapan dimaksud meliputi laptop, *scanner*, *printer,* LCD proyektor dan UPS.

It is focused on preparing supporting information technology devices for the new Dhanadyaksa Slamet Riyadi building as an archive building. The said setup includes laptops, scanners, printers, LCD projectors and UPS.

2. Pengadaan Software Komputer
/ Procurement of Computer Software

Untuk menunjang pengembangan sistem di LMAN agar semakin adaptif dan mampu menguatkan proses bisnis utama di LMAN yang terbagi menjadi pembelian software desain, *software* terkait meeting online, *software* pengolahan dan visualisasi data serta lisensi terkait perangkat jaringan LMAN.

To support system development at LMAN so that it is more adaptive and able to strengthen the main business processes at LMAN which is divided into purchasing design software, software related to online meetings, data processing and visualization software and licenses related to LMAN network devices.

AESIA adalah platform white label sewa aset negara milik LMAN
/ AESIA is the white label platform for lease of state assets by LMAN

Implementasi Modernisasi Sistem Informasi Manajemen di Tahun 2022
Implementation of Management Information System Modernization in 2022

Rencana Pengembangan dan Modernisasi Sistem Informasi di LMAN pada tahun 2023 adalah pelaksanaan kegiatan antara lain:

The Information System Development and Modernization Plan at LMAN in 2023 is the implementation of activities including:

1. Melaksanakan proses dan koordinasi penggabungan jaringan intranet Kemenkeu dengan SMV dan BLU sebagai bagian dari Satu Kemenkeu;
   Carry out the process and coordinate the merging of the Ministry of Finance's intranet network with SMV and BLU as part of One Ministry of Finance;
2. Pengembangan fitur AESIA berupa Penerapan Virtual Tour aset untuk meningkatkan daya tarik aset kepada calon mitra;
   Development of the AESIA feature in the form of implementing a Virtual Tour of assets to increase the attractiveness of assets to potential partners;
3. Penambahan fitur *AI Chatbot* (automated AI 24 jam layanan aset, *advisory* dan *voice search*) sebagai *Artificial Intelligence y*ang digunakan untuk melayani permintaan informasi dan edukasi kepada public terkait aset di AESIA secara otomatis via chat;
   Adding the AI Chatbot feature (automated AI 24-hour asset service, advisory and voice search) as Artificial Intelligence which is used to serve requests for information and education to the public regarding assets in AESIA automatically via chat;
4. Penyiapan konsep Hyperpersonalisasi untuk AESIA (AESIA *Stay*, AESIA Logistik, AESIA *Business*, AESIA *Advisory*, dll) dalam bentuk pengkategorian sesuai *value proposition* aset berdasarkan HBU analisis;
   Preparation of the Hyperpersonalization concept for AESIA (AESIA Stay, AESIA Logistics, AESIA Business, AESIA Advisory, etc.) in the form of categorizing according to the value proposition of assets based on HBU analysis;
5. Penambahan Fitur Agen Properti untuk mengelola Agen Properti/Marketing Independen yang berafiliasi dengan LMAN dalam memasarkan aset di AESIA serta Fitur *Arranger* Aset untuk mengelola Agen Properti/Marketing Independen yang berafiliasi dengan LMAN dalam memasarkan aset di AESIA;
   Addition of the Property Agent Feature to manage Independent Property/Marketing Agents affiliated with LMAN in marketing assets in AESIA and the Asset Arranger Feature to manage Independent Property/Marketing Agents affiliated with LMAN in marketing assets in AESIA;
6. Pengembangan Aplikasi Keuangan Terintegrasi dan Terpusat dalam hal untuk mengakomodasi pengelolaan keuangan LMAN;
   Development of Integrated and Centralized Financial Applications in terms of accommodating LMAN's financial management;
7. Pengembangan lanjutan dari Aplikasi LFMS serta penerapan LFMS untuk proyek-proyek Strategis Nasional lainnya;
   Continued development of the LFMS application and application of LFMS for other National Strategic projects;
8. Pengembangan lanjutan dari modul Pemilihan dalam Aplikasi VMS *(Vendor Management System)* untuk dapat digunakan oleh Tim Pemilihan UKP LMAN;
   Advanced development of the Selection module in the VMS Application (Vendor Management System) to be used by the LMAN UKP Selection Team;
9. Pengembangan aplikasi inventarisasi aset Kilang untuk mengakomodir proses inventarisasi dari Aset Kilang Arun dan Aset Kilang Bontang;
   Development of Refinery asset inventory application to accommodate the inventory process of Arun Refinery Assets and Bontang Refinery Assets;
10. Selain itu, terdapat juga kontrak kinerja mandatory dari Direktorat PPKBLU terkait dengan modernisasi BLU yang kelak akan berimplikasi pada proses penggunaan Aplikasi BIOS.
    In addition, there is also a mandatory performance contract from the PPKBLU Directorate related to BLU modernization which will later have implications for the process of using the BIOS application.

Analisis dan Pembahasan Manajemen

Management Discussion and Analysis

5

Tinjauan Ekonomi
Overview on Economic Condition

Presiden Joko Widodo dalam peresmian Bendungan Ciawi Sukamahi pada Jumat 23 Desember 2022

/ President Joko Widodo officiated the inauguration of the Ciawi Sukamahi Dam on Friday, December 23, 2022.

Secara keseluruhan, tinjauan ekonomi Indonesia tahun 2022 masih dipengaruhi beberapa faktor penting yang dapat memengaruhi pertumbuhan dan stabilitas ekonomi di Indonesia. Pemerintah Indonesia harus terus berupaya untuk mengatasi tantangan tersebut dan mempercepat pemulihan ekonomi secara bertahap. Di sisi lain, sektor-sektor yang menjanjikan harus terus didukung dan dikembangkan untuk menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan daya saing Indonesia di kancah internasional.

Salah satu tantangan penting dalam tinjauan ekonomi Indonesia tahun 2022 adalah meningkatkan kualitas infrastruktur. Infrastruktur yang berkualitas merupakan kunci penting dalam meningkatkan daya saing dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pemerintah Indonesia harus terus memperkuat sektor infrastruktur, terutama infrastruktur transportasi, telekomunikasi, dan energi.

Selain itu, reformasi struktural menjadi faktor penting dalam tinjauan ekonomi Indonesia tahun 2022. Reformasi ini meliputi upaya untuk memperkuat sistem perbankan dan keuangan, meningkatkan regulasi, dan memperbaiki tata kelola perusahaan yang lebih baik. Reformasi struktural yang berhasil dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memperkuat daya saing Indonesia di pasar global. Meningkatkan produktivitas sumber daya manusia juga menjadi faktor penting dalam tinjauan ekonomi Indonesia tahun 2022. Pemerintah Indonesia harus terus meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan, sehingga sumber daya manusia Indonesia memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan oleh pasar kerja saat ini. Peningkatan produktivitas sumber daya manusia juga dapat meningkatkan kinerja sektor-sektor tertentu dan memperkuat daya saing Indonesia secara keseluruhan.

Dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, Indonesia harus terus memperkuat kerja sama internasional, baik dengan negara-negara di kawasan maupun di seluruh dunia. Kerja sama ini dapat membuka akses ke pasar internasional yang lebih luas, serta memperkuat pertukaran teknologi dan pengetahuan yang diperlukan untuk memperkuat sektor-sektor strategis di Indonesia.

Overall, Indonesia's economic outlook for 2022 is still influenced by a number of important factors that could affect Indonesia's economic growth and stability. The Indonesian government must continue to strive to overcome these challenges and accelerate economic recovery gradually. On the other hand, promising sectors must continue to be supported and developed to create new jobs and increase Indonesia's competitiveness in the international arena.

One of the key challenges in Indonesia's 2022 economic outlook is improving the quality of infrastructure. Quality infrastructure is an important key in increasing competitiveness and promoting sustainable economic growth. The Indonesian government must continue to strengthen the infrastructure sector, especially transportation, telecommunication and energy infrastructure.

In addition, structural reforms are an important factor in Indonesia's 2022 economic outlook. These reforms include efforts to strengthen the banking and financial systems, improve regulations, and improve better corporate governance. Successful structural reforms can increase investor confidence and strengthen Indonesia's competitiveness in global markets. Increasing the productivity of human resources is also an important factor in Indonesia's 2022 economic outlook. The Indonesian government must continue to improve the quality of education and training, so that Indonesian human resources have the skills and knowledge needed by the current job market. Increasing the productivity of human resources can also improve the performance of certain sectors and strengthen Indonesia's competitiveness as a whole.

In order to achieve sustainable economic growth, Indonesia must continue to strengthen international cooperation, both with countries in the region and around the world. This collaboration can open access to a wider international market, as well as strengthen the exchange of technology and knowledge needed to strengthen strategic sectors in Indonesia.

Secara keseluruhan, tinjauan ekonomi Indonesia tahun 2022 masih dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, seperti pandemi COVID-19, kebijakan pemerintah, investasi dan perdagangan global, serta perubahan tren ekonomi. Namun, Indonesia memiliki potensi besar dalam beberapa sektor yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masa depan. Pemerintah Indonesia harus terus berupaya untuk mengatasi tantangan tersebut dan memperkuat sektor-sektor yang menjanjikan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Overall, Indonesia's economic outlook for 2022 is still influenced by several important factors, such as the COVID-19 pandemic, government policies, global investment and trade, and changes in economic trends. However, Indonesia has great potential in several sectors that can increase economic growth in the future. The Indonesian government must continue to strive to overcome these challenges and strengthen promising sectors to create sustainable economic growth and improve the welfare of the Indonesian people.

Lingkungan Ekonomi Makro
Macroeconomic Environment

Lingkungan ekonomi makro yang diungkapkan dalam laporan keuangan entitas adalah indikator ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahun 2022 berikut tingkat capaiannya serta kebijakan fiskal yang secara material mempengaruhi posisi dan kinerja keuangan entitas yaitu pengalokasian anggaran pembiayaan yang diberikan pemerintah kepada entitas. Indikator ekonomi makro tersebut antara lain tingkat suku bunga, tingkat nilai tukar, dan pertumbuhan Produk Domestik Bruto sektor properti/*real estate* yang merupakan area operasi utama entitas.

Realisasi tingkat suku bunga simpanan pada entitas pada 2022 adalah sebesar 3,52% yang merupakan rata-rata imbal hasil yang diterima entitas dari penempatan dana pada perbankan. Realisasi tersebut lebih kecil dari ekspektasi awal pada Rencana Bisnis dan Anggaran yang berada pada kisaran 4%-7,5%. Hal ini disebabkan kebijakan suku bunga rendah yang diambil Bank Indonesia dalam rangka menghadapi krisis yang diakibatkan oleh pembatasan sosial dalam rangka penanganan COVID-19. Tertekannya realisasi imbal hasil penempatan dana entitas terkonfirmasi pula dari realisasi tingkat suku bunga acuan, yaitu BI 7-day (*Reverse*) Repo *Rate* pada hampir sepanjang periode Triwulan III 2022 yang konsisten pada level 3,50%.

Pada triwulan III dan IV 2022 terdapat peningkatan suku bunga acuan BI 7-day (Reverse) Repo Rate secara bertahap sebesar:

23 Agustus 2022
25 BPS menjadi 3,75% (3% untuk *deposit facility*)
23 September 2022
50 BPS menjadi 4,25% (3,50% untuk *deposit facility*)
20 Oktober 2022
50 BPS menjadi 4,75% (4% untuk *deposit facility*)
17 November 2022
50 BPS menjadi 5,25% (4,5% untuk *deposit facility*)
22 Desember 2022
25 BPS menjadi 5,50% (4,75% untuk *deposit facility*)

Meskipun peningkatan tersebut baru terjadi pada akhir tahun 2022, terdapat kontribusi yang relatif positif terhadap pendapatan entitas dari penempatan dana pada perbankan.

Dari sisi nilai tukar USD dan Rupiah, rata-rata kurs realisasi pada entitas pada 2022 adalah sebesar Rp14.826,91/USD. Nilai tersebut merupakan rata-rata kurs transaksi konversi PNBP entitas yang diterima dalam mata uang USD. Nilai rata-rata tersebut diukur dengan membagi total dana hasil konversi ke Rupiah dengan total kas dalam USD. Realisasi rata-rata nilai tukar pada entitas lebih besar dari yang ditargetkan pada RBA sebesar Rp14.375,00/USD serta lebih besar dari rata-rata kurs beli USD menurut data Bank Indonesia adalah Rp14.798,86/USD. Komparasi antara kurs beli BI, kurs transaksi BI, dan kurs realisasi entitas disajikan pada grafik berikut.

The macroeconomic environment disclosed in the entity's financial statements is the macroeconomic indicators used in the preparation of the 2022 Business Plan and Budget along with the level of achievement and fiscal policies that materially affect the entity's financial position and performance, namely the allocation of the financing budget provided by the government to the entity . These macroeconomic indicators include interest rates, exchange rates, and growth in the Gross Domestic Product of the property/real estate sector which is the main operating area of the entity.

The actual interest rate on deposits at entities in 2022 is 3.52% which is the average return received by entities from placing funds in banks. This realization was lower than the initial expectation in the Business Plan and Budget which was in the range of 4% -7.5%. This is due to the low interest rate policy taken by Bank Indonesia in order to deal with the crisis caused by social restrictions in the context of handling COVID-19. The realization of returns on placement of entity funds was also confirmed by the realization of the benchmark interest rate, namely the BI 7-day (Reverse) Repo Rate for most of the third quarter of 2022 which was consistent at the level of 3.50%.

In quarters III and IV 2022 there will be a gradual increase in the B1 7-day (Reverse) Repo Rate reference rate by:

23 August 2022
25 BPS to 3.75% (3% for deposit facility)
23 September 2022
50 BPS to 4.25% (3.50% for deposit facility)
20 October 2022
50 BPS to 4.75% (4% for deposit facility)
17 November 2022
50 BPS to 5.25% (4.5% for deposit facility)
22 December 2022
25 BPS to 5.50% (4.75% for deposit facility)

Even though this increase only occurred at the end of 2022, there was a relatively positive contribution to the entity's income from placing funds in banking.

In terms of USD and Rupiah exchange rates, the average realized exchange rate for entities in 2022 is Rp14,826.91/USD. This value is the average exchange rate for the entity's Non-Tax State Revenue conversion transactions received in USD. The average value is measured by dividing the total funds converted to Rupiah by the total cash in USD. Realization of the average exchange rate at entities is greater than the Business Plan and Budget target of Rp14,375.00/USD and is greater than the average USD buying rate according to Bank Indonesia data of Rp14,798.86/USD. The comparison between the BI buying rate, the BI transaction rate, and the entity's realized rate is presented in the following chart.

Komparasi antara kurs beli BI, kurs transaksi BI, dan kurs realisasi entitas
The comparison between the BI buying rate, the BI transaction rate, and the entity's realized rate

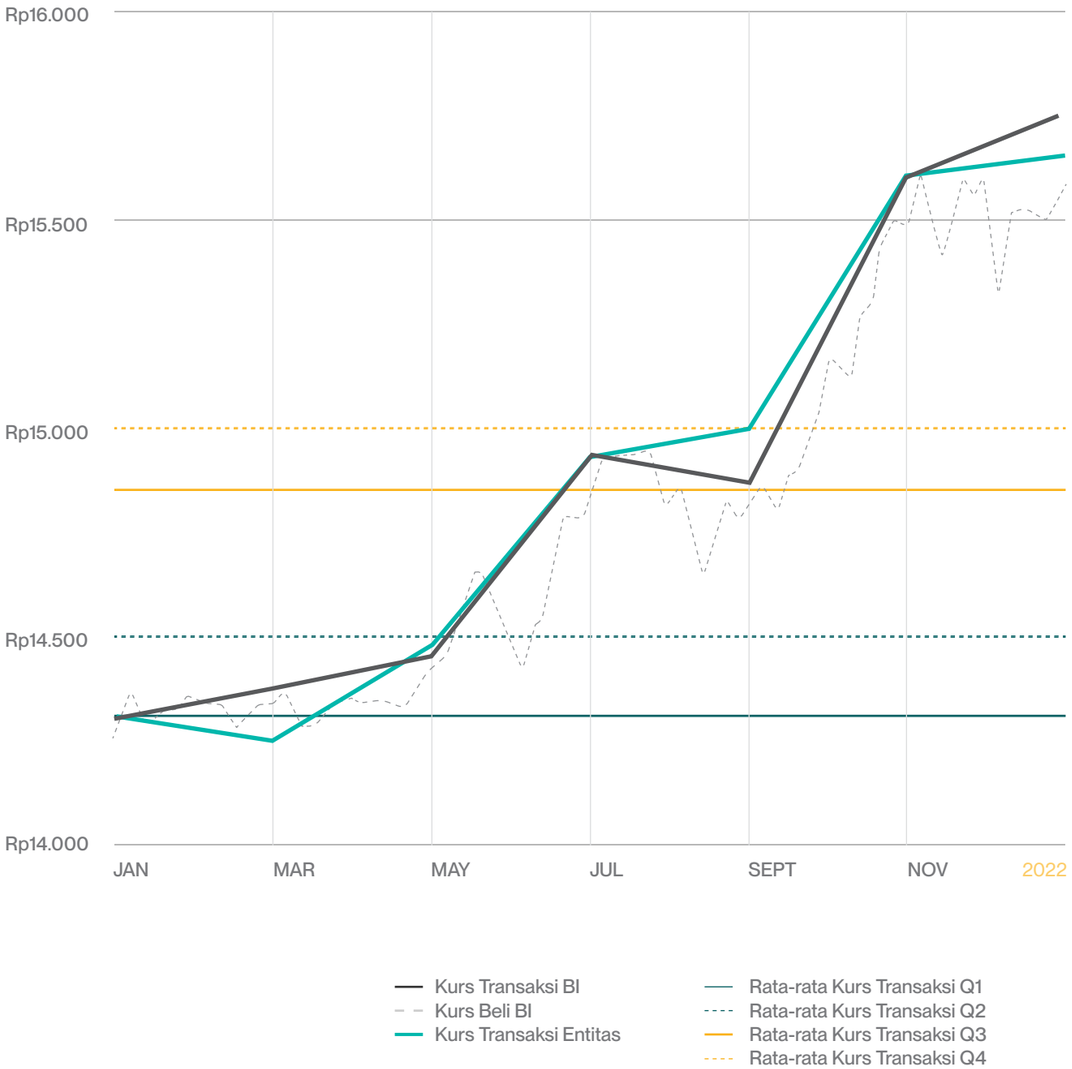

Tinjauan Industri Properti
Property Industry Overview

Industri properti Indonesia sepanjang tahun 2022 mengalami sejumlah kondisi yang berbeda. Meskipun terdapat beberapa tantangan, namun terdapat juga peluang yang dapat dimanfaatkan para pelaku bisnis dan investor.

Pada awal 2022, industri properti di Indonesia mengalami penurunan permintaan yang signifikan, terutama pada segmen properti komersial seperti kantor, mal, dan hotel. Hal ini disebabkan oleh pembatasan mobilitas dan kegiatan bisnis yang diberlakukan oleh pemerintah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Namun, pada paruh kedua 2022, permintaan properti komersial mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan seiring dengan dibukanya kegiatan bisnis secara bertahap dan kembali normalnya mobilitas masyarakat.

Throughout 2022, the Indonesian property industry will experience a number of different conditions. Although there are several challenges, there are also opportunities that can be exploited by business people and investors.

In early 2022, the property industry in Indonesia experienced a significant decline in demand, especially in the commercial property segment such as offices, malls and hotels. This is due to restrictions on mobility and business activities imposed by the government to break the chain of transmission of COVID-19. However, in the second half of 2022, demand for commercial property began to show signs of recovery as business activities gradually opened and people's mobility returned to normal.

Indeks Permintaan Properti Komersial / The Commercial Property Demand Index

Indeks Permintaan Properti Komersial untuk kategori sewa pada triwulan IV-2022 tumbuh sebesar 11,59% (*Year-on-Year*), melambat dibandingkan 16, 19% (YoY) pada triwulan sebelumnya. Sejalan dengan hal tersebut, Indeks Permintaan Properti Komersial untuk kategori jual juga tumbuh melambat sebesar 0,76% (YoY), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 1,48% (YoY).

The Commercial Property Demand Index for the rental category in quarter IV-2022 grew by 11.59% (Year-on-Year), slowing compared to 16.19% (YoY) in the previous quarter. In line with this, the Commercial Property Demand Index for the sale category also grew slower by 0.76% (YoY), lower than the previous quarter's 1.48% (YoY).

Indeks Pasokan Properti Komersial / The Commercial Property Supply Index

Indeks Pasokan Properti Komersial untuk kategori sewa pada triwulan IV-2022 tumbuh sebesar 0,70% (YoY) melambat dibandingkan 0,98% (YoY) pada triwulan III-2022. Selanjutnya, Indeks Pasokan Properti Komersial untuk kategori jual juga mengalami perlambatan dengan hanya tumbuh sebesar 1,00% (YoY), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 1,69% (YoY).

The Commercial Property Supply Index for the rental category in quarter IV-2022 grew by 0.70% (YoY), slowing compared to 0.98% (YoY) in quarter III-2022. Furthermore, the Commercial Property Supply Index for the sale category also experienced a slowdown with only growing by 1.00% (YoY), lower than the previous quarter's growth of 1.69% (YoY).

Indeks Harga Properti Komersial / The Commercial Property Price Index

Indeks Harga Properti Komersial untuk kategori sewa pada triwulan IV-2022 meningkat sebesar 6,51% (YoY), lebih rendah dibandingkan 6,76% (YoY) pada triwulan III-2022. Selanjutnya, Indeks Harga Properti Komersial untuk kategori jual pada triwulan IV-2022 juga tercatat naik sebesar 0,30% (YoY), lebih rendah dibandingkan 0,42% (YoY) pada triwulan sebelumnya.

The Commercial Property Price Index for the rental category in quarter IV-2022 increased by 6.51% (YoY), lower than 6.76% (YoY) in quarter III-2022. Furthermore, the Commercial Property Price Index for the sale category in quarter IV-2022 also recorded an increase of 0.30% (YoY), lower than 0.42% (YoY) in the previous quarter.

Sementara itu, permintaan properti hunian di Indonesia di tahun 2022 cukup stabil. Bahkan, terdapat peningkatan permintaan pada properti hunian yang lebih terjangkau, seperti apartemen dan rumah subsidi. Hal ini disebabkan kebijakan pemerintah yang memperketat persyaratan kredit properti dan meningkatkan suku bunga kredit. Selain itu, permintaan properti hunian juga didorong oleh peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki hunian sendiri dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Dari sisi pengembangan proyek, industri properti di Indonesia di tahun 2022 juga mengalami beberapa perubahan. Beberapa pengembang properti mulai beralih fokus dari pengembangan proyek properti komersial ke properti hunian. Hal ini disebabkan permintaan yang lebih tinggi pada properti hunian, serta adanya peningkatan persaingan pada proyek properti komersial.

Sepanjang 2022, sektor properti di Indonesia masih terdampak pandemi COVID-19. Meskipun terdapat vaksinasi yang dilakukan secara massal, namun penyebaran COVID-19 masih terjadi dan memberikan dampak yang cukup signifikan pada permintaan properti, khususnya di sektor komersial. Banyak perusahaan yang masih bekerja dari rumah atau mengurangi kegiatan operasional mereka, sehingga permintaan properti kantor dan mal cenderung menurun. Hal ini menyebabkan beberapa pengembang properti mengalami kesulitan untuk memasarkan proyek-proyek mereka.

Di sisi lain, permintaan properti hunian masih cukup tinggi, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya. Hal ini terjadi karena tren urbanisasi yang terus meningkat, sehingga banyak orang yang membutuhkan tempat tinggal di kota-kota tersebut. Banyak pengembang properti yang memanfaatkan kondisi ini dengan mengembangkan proyek-proyek hunian yang terletak di lokasi strategis dan memiliki fasilitas yang lengkap. Namun, harga properti hunian yang tinggi menjadi kendala bagi sebagian orang untuk membeli rumah atau apartemen.

Selain itu, pemerintah Indonesia terus memberikan berbagai insentif bagi pelaku bisnis dan investor di sektor properti. Pemerintah memberikan kemudahan perizinan, pengurangan pajak, dan insentif lain untuk mempercepat pertumbuhan industri properti. Hal ini membuat banyak investor yang tertarik untuk berinvestasi di sektor properti Indonesia.

Meanwhile, the demand for residential properties in Indonesia in 2022 is quite stable. In fact, there is an increasing demand for more affordable residential properties, such as subsidized apartments and houses. This was due to the government's policy of tightening the terms for property loans and increasing loan interest rates. In addition, the demand for residential properties is also driven by increased public awareness of the importance of owning their own housing and increasing people's income.

In terms of project development, the property industry in Indonesia will also experience several changes in 2022. Several property developers have begun to shift their focus from developing commercial property projects to residential properties. This was due to higher demand for residential properties, as well as increased competition from commercial property projects.

Throughout 2022, the property sector in Indonesia will still be affected by the COVID-19 pandemic. Even though there were mass vaccinations, the spread of COVID-19 still occurred and had a significant impact on demand for property, especially in the commercial sector. Many companies are still working from home or reducing their operational activities, so demand for office and mall properties tends to decrease. This causes some property developers to experience difficulties in marketing their projects.

On the other hand, demand for residential properties is still quite high, especially in big cities such as Jakarta and Surabaya. This is due to the increasing trend of urbanization, so that many people need a place to live in these cities. Many property developers are taking advantage of this condition by developing residential projects that are located in strategic locations and have complete facilities. However, high residential property prices are an obstacle for some people to buy a house or apartment.

In addition, the Indonesian government continues to provide various incentives for business people and investors in the property sector. The government provides licensing facilities, tax reductions and other incentives to accelerate the growth of the property industry. This has made many investors interested in investing in the Indonesian property sector.

Pembangunan Jalur Kereta Api Makassar
/ Makassar Railway Line Construction

Namun, meski terdapat berbagai insentif dari pemerintah, perizinan dan birokrasi masih menjadi kendala bagi pelaku bisnis dan investor di sektor properti. Terkadang, proses perizinan yang rumit dan birokrasi yang panjang membuat banyak investor enggan untuk berinvestasi di sektor properti Indonesia.

Dalam kondisi tersebut, pengembang properti juga harus kreatif dalam mengembangkan proyek-proyek mereka agar tetap menarik bagi konsumen. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi dalam pengembangan properti. Banyak pengembang properti yang menggunakan teknologi *augmented reality* untuk memudahkan konsumen dalam melihat tampilan proyek mereka, atau mengembangkan properti ramah lingkungan untuk menarik minat konsumen yang peduli dengan lingkungan.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), rata-rata pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) pada sektor properti/*real estate* secara nasional pada triwulan III 2022 adalah sebesar 2,41% *Year-on-Year*. Entitas mencatatkan kinerja yang relatif baik dengan pertumbuhan PNBP dari aktivitas pengelolaan aset sebesar 8,93% secara *Year-on-Year* pada 31 Desember 2022.

Perkembangan sektor properti dan *real estate* juga dapat diproksikan oleh pergerakan indeks saham sektor properti pada Bursa Efek Indonesia. Untuk tahun 2022, indeks sektoral IDX Property menunjukkan *holding period return* -8,87%.

Beberapa *highlight* indikator ekonomi makro pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

However, even though there are various incentives from the government, permits and bureaucracy are still obstacles for business people and investors in the property sector. Sometimes, the complicated licensing process and lengthy bureaucracy make many investors reluctant to invest in the Indonesian property sector.

Under these conditions, property developers must also be creative in developing their projects to remain attractive to consumers. One way to do this is by utilizing technology and innovation in property development. Many property developers use augmented reality technology to make it easier for consumers to see the appearance of their projects, or develop eco-friendly properties to attract consumers who care about the environment.

According to data from the Central Statistics Agency (BPS), the average gross domestic product (GDP) growth in the property/real estate sector nationally in the third quarter of 2022 was 2.41% year-on-year. The entity recorded a relatively good performance with PNBP growth from asset management activities of 8.93% year-on-year as of December 31, 2022.

The development of the property and real estate sector can also be proxied by the movement of the property sector stock index on the Indonesia Stock Exchange. For 2022, the IDX Property sectoral index shows a holding period return of -8.87%.

Some highlights of macroeconomic indicators in 2022 are as follows:

Indikator / Indicator	**Target pada RBA** / Target on Business Plan & Budget	**Realisasi di LMAN** / Realization at LMAN	**Realisasi secara Nasional** / National Realization
Tingkat suku bunga simpanan / Deposit interest rates	4% - 7.5%	3.52%	3.13%*
Tingkat nilai tukar USD dan Rupiah / USD & Rupiah exchange rates	Rp14.375	Rp14.826,91	Rp14.798,86
Pertumbuhan sector properti/real estat / Property/real estate sector growth		8.93%	2.41%** 6.76%*** -8.87%****

*) rata-rata tertimbang suku bunga acuan deposit facility sepanjang 2022
**) laju implisit yoy PDB sektor real estat menurut Bank Indonesia triwulan III 2022
***) laju pertumbuhan yoy permintaan properti komersial menurut Bank Indonesia triwulan III 2022
****) annual holding period return indeks IDX Sector Properties & Real Estate tahun 2022

Sebagai kesimpulan, kondisi industri properti Indonesia selama tahun 2022 masih terdampak oleh pandemi COVID-19, namun terdapat beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku bisnis dan investor.

In conclusion, the condition of the Indonesian property industry during 2022 will still be affected by the COVID-19 pandemic, but there are several opportunities that can be taken advantage of by business people and investors.

Tinjauan Pendapatan dan Beban Operasional
Analysis of Operational Revenue and Expenses

Pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, Entitas mencatat surplus dari kegiatan operasional sebesar Rp2.102.730.045.841,00 dan surplus laporan operasional sebesar Rp2.117.723.446.694,00. Peningkatan surplus laporan operasional tersebut utamanya diakibatkan oleh pertumbuhan signifikan atas pendapatan jasa layanan umum dari pengelolaan BMN dan jasa konsultasi yang mengalami peningkatan 201,94% dibandingkan tahun sebelumnya. Pendapatan dari penempatan dana juga mengalami peningkatan 8,74% *year-on-year*, sementara pada sisi yang lain beban operasional tumbuh negatif 12,75% *year- on-year* yang dikontribusikan oleh penurunan pada beban barang dan jasa, beban penyusutan dan amortisasi, serta beban persediaan.

In the year ending December 31, 2022, the Entity reported an operating surplus of IDR 2,102,730,045,841.00 and a total operational surplus of IDR 2,117,723,446,694.00. This increase in the operational surplus is primarily attributable to a substantial growth in public service revenues from state property management and consulting services, which experienced a surge of 201.94% compared to the previous year. Revenue from fund placements also witnessed an uplift of 8.74% year-on-year, while on the other hand, operating expenses grew negatively by 12.75% year-on-year, contributed to by reductions in goods and services expenses, depreciation and amortization charges, as well as inventory costs.

Pendapatan Operasional
Operating Revenue

Pendapatan operasional Entitas berasal dari aktivitas pendayagunaan aset, aktivitas jasa konsultansi (*advisory*), dan aktivitas penempatan dana/kas di perbankan. Pada halaman muka LO, pendapatan dari aktivitas pendayagunaan aset dan aktivitas *advisory* disajikan sebagai pendapatan jasa layanan kepada masyarakat sementara pendapatan dari penempatan dana di perbankan disajikan sebagai pendapatan BLU lainnya. Selain itu, Entitas membukukan pendapatan lain- lain yang merupakan penerimaan atas denda keterlambatan pembayaran tarif pemanfaatan dari aktivitas pendayagunaan aset.

Pendapatan operasional untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp3.597.400.231.764,00. Terdapat pertumbuhan signifikan pada Pendapatan Operasional sebesar 83,50% dibandingkan dengan kinerja pada periode yang sama di tahun 2021 sebesar Rp1.960.488.833.930,00. Peningkatan dimaksud utamanya dikontribusikan oleh pertumbuhan pendapatan dari operasi utama Entitas yaitu pengelolaan aset dan *advisory* sebesar 201,94% *year-on-year* serta pertumbuhan pendapatan dari penempatan dana sebesar 8,74% year-on- year.

The Entity's operating revenue stems from asset utilization activities, advisory services, and fund placement activities in banking. On the front page of the LO, revenue from asset utilization activities and advisory activities are presented as public service revenues, while income from fund placements in banking is shown as other BLU income. Additionally, the Entity records other income, which includes receipts from late payment fines for asset utilization rates.

The operating revenue for the year ending December 31, 2022, amounts to IDR 3,597,400,231,764.00. There has been significant growth in Operating Revenue of 83.50% compared to the performance in the same period in 2021, which was IDR 1,960,488,833,930.00. This increase is primarily contributed by the growth of income from the Entity's main operations, namely asset management and advisory, up 201.94% year-on-year, and the growth of income from fund placements by 8.74% year-on-year.

Jenis / Description	**2022 Rp**	**2021 Rp**	**Kenaikan / (Penurunan) dalam %**
Pendapatan dari operasi utama / Revenue from core operations	2.287.897.674.474 (63,60%)	757.740.042.075 (63,00%)	201,94%
Pendapatan dari Penempatan Dana / Revenue from Fund Placement	1.307.895.356.680 (36,36%)	1.202.748.791.855 (37,00%)	8,74%
Pendapatan Lain-lain / Miscellaneous Revenue	1.607.200.610 (0,04%)	-	0,00%
Total	3.597.400.231.764	1.960.488.833.930	83,50%

Secara rinci per jenisnya, pendapatan operasional pada Entitas untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut (angka di dalam kurung di bawah figur pendapatan merupakan kontribusi tiap-tiap jenis terhadap total pendapatan operasional di tiap periodenya):

Sebesar Rp2.286.212.700.112,00 dari pendapatan jasa layanan merupakan pendapatan dari pengelolaan aset dan sebesar Rp1.684.974.362,00 merupakan pendapatan dari jasa advisory.

Pendapatan dari jasa layanan utama mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 201,94% secara year-on-year yang dikontribusikan oleh:

In detail based on the type, the operating income for the Entity for the year ending on December 31, 2022, is as follows (the numbers in brackets below the revenue figures represent the contribution of each type to the total operating income in each period):

An amount of IDR2,286,212,700,112.00 from service revenue consists of income from asset management, and IDR1,684,974,362.00 represents income from advisory services.

The income from main services recorded a positive growth of 201.94% year-on-year, contributed by:

1. Telah disepakatinya perjanjian antara Entitas dengan PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) nomor PRJ-127/ LMAN/2022 dan SP- 004/PHM000/2022-S0 tanggal 16 Desember 2022 yang mengatur butir-butir kesepakatan terkait penyelesaian pembayaran atas pemanfaatan Aktiva Kilang LNG Badak untuk kontrak penjualan LNG WBx dan NR (*Western Buyer Extension*/WBx dan Nusantara Regas/NR), sehingga tagihan lampau kontrak WBx dan NR dapat diakui sebagai pendapatan/piutang jangka panjang. Pengakuan pendapatan ini termasuk pengakuan bagian lancar piutang dimaksud yang pembayaran pertamanya dibayarkan pada akhir tahun 2022.

   The agreement between the Entity and PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) number PRJ-127/LMAN/2022 and SP-004/PHM000/2022-S0 dated December 16, 2022, outlining the agreement points related to the settlement of payment for the utilization of Badak LNG Plant Assets for the LNG sales contracts WBx and NR (Western Buyer Extension/WBx and Nusantara Regas/NR). As a result, the past due invoices of the WBx and NR contracts can be recognized as long-term receivables/income. This income recognition includes the current portion of the receivable, the first payment of which was made at the end of 2022.

2. Peningkatan pendapatan dari *toll fee* Kilang LNG Badak dengan adanya kerja sama baru atas pemrosesan gas oleh KKKS Eni East Sepinggan untuk pemrosesan gas dari Wilayah Kerja (WK) Sepinggan.

   An increase in income from the Badak LNG Plant toll fee due to new cooperation for gas processing by the KKKS Eni East Sepinggan for gas processing from the Sepinggan Work Area.

3. Peningkatan pendapatan dari jasa *advisory* sebesar 94,68% *year-on- year* seiring dengan meningkatnya pengguna jasa layanan Entitas khususnya yang berasal dari sesama BLU, BUMN/BUMD.

   A 94.68% year-on-year increase in advisory service income as the number of users of the Entity's services increased, especially those from other BLUs, State-Owned Enterprises/Regional-Owned Enterprises.

Sementara itu, pertumbuhan pendapatan dari aktivitas penempatan dana sebesar 8,74% yang utamanya dikontribusikan oleh peningkatan suku bunga acuan BI 7 *days reverse repo rate* secara gradual sejak Agustus hingga Desember 2022 di mana secara *year-on-year* terdapat pertumbuhan suku bunga acuan sebesar 200 BPS yang memicu pertumbuhan suku bunga simpanan Entitas pada perbankan.

Meanwhile, income growth from fund placement activities of 8.74% was mainly contributed by the gradual increase in the benchmark BI 7 days reverse repo rate from August to December 2022, which saw a year-on-year benchmark interest rate growth of 200 BPS that triggered the growth of the Entity's deposit interest rate in banking.

Beban Operasional
Operating Expenses

Pada tahun yang berakhir di 31 Desember 2022, beban operasional Entitas adalah sebesar Rp1.494.670.185.922,00. Nilai tersebut mencatatkan pertumbuhan negatif 12,75% dibandingkan beban operasional pada tahun yang sama di tahun 2021 sebesar Rp1.713.072.265.241,00.

For the year ending on December 31, 2022, the Entity's operating expenses amounted to IDR1,494,670,185,922.00. This figure marks a negative growth of 12.75% compared to the operating expenses in the same year of 2021, which stood at IDR1,713,072,265,241.00.

Jenis / Description	**2022 (Rp)**	**2021 (Rp)**	**Kenaikan/(Penurunan) (%)** Increase/(Decrease)
Beban Gaji dan Tunjangan / Salary and Benefits Expenses	83.094.542.599	69.237.228.503	20,01%
Beban Barang dan Jasa / Goods and Services	24.053.638.280	25.814.644.855	-6,82%
Beban Pemeliharaan / Maintenance Expenses	9.260.908.280	8.257.313.351	12,15%
Beban Perjalanan / Travel Expenses	6.332.273.908	5.088.945.904	24,43%
Beban Penyusutan dan Amortisasi / Depreciation and Amortization Expenses	1.353.371.919.112	1.604.110.125.401	-15,63%
Beban Persediaan / Inventory Expenses	327.073.302	362.861.345	-9,86%
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih / Allowance for Uncollectible Accounts Expenses	18.229.830.307	201.145.882	8962,99%
Total	1.494.670.185.922	1.713.072.265.241	-12,75%

Beban Gaji dan Tunjangan
/ Salary and Benefits Expenses

Beban gaji dan tunjangan pada tahun yang berakhir di 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp83.094.542.599,00 yang merupakan beban remunerasi, uang makan, dan uang lembur bagi pegawai Entitas yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), non-PNS, pramubakti, dan tenaga keamanan. Beban gaji dan tunjangan tersebut tidak termasuk komponen gaji PNS yang dibayarkan oleh Kantor Pusat DJKN. Termasuk dalam komponen beban gaji dan tunjangan pada periode dilaporkan adalah realisasi pembayaran tunjangan purnajabatan kepada pejabat pengelola BLU yang berhenti pada periode dilaporkan.

The Entity's salary and benefits expenses for the year ended December 31, 2022, were IDR 83,094,542,599.00, accounting for remuneration, meal allowances, and overtime pay for Civil Servants (PNS), non-PNS, support staff, and security personnel within the Entity. These expenses do not include the PNS salary component paid by the DJKN Central Office. Included in the salary and benefits expense for the reported period are realized retirement benefits payments for BLU managing officials who resigned during the reporting period.

Beban Barang dan Jasa
/ Goods and Services Expenses

Beban barang dan jasa pada tahun yang berakhir di 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp24.053.638.280,00 yang terdiri dari beban barang sebesar Rp1.483.624.806,00; beban jasa sebesar Rp6.831.301.371,00; beban penyediaan barang dan jasa BLU lainnya Rp15.339.625.228,00; beban barang untuk penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp175.565.705,00; serta beban jasa untuk penanganan COVID-19 sebesar Rp223.521.170,00.

For the year ending December 31, 2022, the Entity's goods and services expenses amounted to IDR 24,053,638,280.00, comprising goods expenses of IDR 1,483,624,806.00; services expenses of IDR 6,831,301,371.00; provision expenses of goods and other BLU services of IDR 15,339,625,228.00; expenses for COVID-19 pandemic goods of IDR 175,565,705.00; and services for handling COVID-19 expenses of IDR 223,521,170.00.

Beban Pemeliharaan
/ Maintenance Expenses

Termasuk dalam beban pemeliharaan ini adalah pemeliharaan atas aset tetap yang digunakan sendiri serta pemeliharaan aset kelolaan. Pada tahun yang berakhir di 31 Desember 2022, beban pemeliharaan adalah sebesar Rp9.260.908.414,00.

Included in these expenses are maintenance of fixed assets used by the Entity and maintenance of managed assets. For the year ended December 31, 2022, maintenance expenses were IDR 9,260,908,414.00.

Beban Perjalanan
/ Travel Expenses

Beban perjalanan pada tahun yang berakhir di 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp6.332.273.908,00, meningkat sebesar 24,43% dari beban perjalanan pada periode yang sama di tahun 2021. Peningkatan beban perjalanan terjadi seiring dengan pelonggaran restriksi sosial sehingga aktivitas perjalanan dinas dalam rangka pengelolaan aset maupun pendanaan lahan mulai dilakukan secara lebih intens untuk peningkatan kinerja Entitas.

Travel expenses for the year ended December 31, 2022, were recorded at IDR 6,332,273,908.00, a 24.43% increase from travel expenses for the same period in 2021. The increase in travel expenses occurred in line with the relaxation of social restrictions, hence business travel activities for asset management and land financing were conducted more intensively to enhance the Entity's performance.

Beban Persediaan
/ Inventory Expenses

Beban persediaan seluruhnya merupakan beban non-kas yang menunjukkan nilai persediaan yang digunakan pada suatu tahun laporan keuangan. Pada periode yang berakhir di 31 Desember 2022, beban persediaan tercatat sebesar Rp327.073.302,00 atau tumbuh -9.86% dari beban persediaan pada periode yang sama di tahun 2021.

Inventory expenses represent non-cash charges that indicate the value of inventory used in a financial reporting year. For the period ending December 31, 2022, inventory expenses were recorded at IDR 327,073,302.00, a -9.86% growth from inventory expenses for the same period in 2021.

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
/ Allowance for Uncollectible Accounts Expenses

Beban penyisihan piutang tak tertagih merupakan beban non-kas yang merupakan pembebanan atas estimasi piutang diragukan tertagih untuk menghasilkan penyajian nilai bersih yang dapat direalisasikan atas piutang Entitas dari operasi utama. Pada tahun yang berakhir di 31 Desember 2022, beban penyisihan piutang tak tertagih adalah sebesar Rp18.229.830.307,00 atau tumbuh hingga 8962,99% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2021. Pertumbuhan signifikan atas beban penyisihan piutang tak tertagih disebabkan oleh penerapan kebijakan baru terkait penyisihan piutang guna memperoleh nilai penyisihan yang lebih relevan dan akurat sesuai dengan umur piutang. Melalui kebijakan ini, penyisihan piutang dibagi dalam 4 (empat) kategori umur piutang yaitu lancar, kurang lancar, diragukan dan macet dengan besaran penyisihan 1%, 36%, 50% dan 100% dari pokok piutang.

The allowance for uncollectible accounts expense is a non-cash charge that is a cost allocation for estimated doubtful collectible accounts to yield a presentation of net realizable value on the Entity's receivables from main operations. For the year ended December 31, 2022, the allowance for uncollectible accounts expense was IDR 18,229,830,307.00, a growth of up to 8962.99% compared to the same period in 2021. The significant growth in the allowance for uncollectible accounts expense was caused by the implementation of a new policy related to the allowance for accounts to obtain a more relevant and accurate allowance value in accordance with the age of the receivables. Through this policy, the allowance for accounts is divided into four categories based on the age of receivables, namely current, less current, doubtful, and bad with allowance amounts of 1%, 36%, 50%, and 100% of the principal receivable.

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
/ Allowance for Uncollectible Accounts Expenses

Beban penyusutan dan amortisasi pada tahun yang berakhir di 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.353.371.919.112,00 yang merupakan beban penyusutan dan amortisasi untuk aset tetap dan aset tak berwujud yang digunakan sendiri oleh Entitas serta aset kelolaan yang ditujukan untuk memperoleh pendapatan melalui sewa dan kerja sama. Beban penyusutan dan amortisasi tumbuh -15,63% dari beban penyusutan dan amortisasi di tahun yang sama pada tahun 2021 sebesar Rp1.604.110.125.401,00. Menindaklanjuti penerapan PSAP 17 Properti Investasi, terdapat reklasifikasi ke pos Properti Investasi, demikian pula dengan pembebanan penyusutannya.

The depreciation and amortization expenses for the year ended December 31, 2022, were IDR 1,353,371,919,112.00, which represented the depreciation and amortization expenses for the fixed and intangible assets used by the Entity and managed assets intended to generate income through lease and collaboration. The depreciation and amortization expenses grew by -15.63% from the depreciation and amortization expenses in the same year in 2021, amounting to IDR 1,604,110,125,401.00. Following the implementation of the PSAP 17 Investment Property, there has been a reclassification to the Investment Property position, as well as its depreciation charges.

Laporan Realisasi Anggaran
Budget Realization Report

Pendapatan
Income

Pada Tahun Anggaran (TA) 2022, terdapat penurunan anggaran PNBP secara *Year-on-Year* dibandingkan dengan anggaran PNBP TA 2021. Penurunan tersebut salah satunya disebabkan oleh ekspektasi adanya penurunan gradual atas PNBP dari *toll-fee* di Kilang *Liquified Natural Gas* (LNG) Badak. Pada perkembangannya, realisasi PNBP dapat melampaui anggaran. Tercatat total realisasi sebesar Rp2.114.741.859.884,00 atau sebesar 123,11% dari anggaran PNBP sebesar Rp1.717.712.000.000,00. Realisasi tersebut dikontribusikan utamanya oleh capaian:

In the 2022 Fiscal Year (FY), there is a decrease in the Non-Tax State Revenue budget on a Year-on-Year basis compared to the 2021 budget. One of the reasons for this decrease is the expectation of a gradual decrease in Non-Tax State Revenue from toll-fees at the Badak Liquified Natural Gas (LNG) Refinery. In its development, the realization of the Non-Tax State Revenue can exceed the budget. The total realization was recorded at Rp2,114,741,859,884.00 or 123.11% of the Non-Tax State Revenue budget of Rp1,717,712,000,000.00. This realization was mainly contributed by the following achievements:

PNBP dari pengelolaan BMN pada pengelola barang sebesar Rp806.867.501.232,00 yang setara 169,69% dari anggarannya sebesar Rp475.503.000.000,00

Non-Tax State Revenue from management of the State Property in goods management amounting to Rp806,867,501,232.00 which is equivalent to 169.69% of the budget of Rp475,503,000,000.00

PNBP dari penempatan dana pada perbankan sebesar Rp1.298.930.830.111,00 atau setara 104.62% dari anggarannya sebesar Rp1.241.609.000.000,00

Non-Tax State Revenue from placement of funds in banks amounting to Rp1,298,930,830,111.00 or equivalent to 104.62% of the budget of Rp1,241,609,000,000.00

PNBP dari jasa konsultasi (*advisory*) yang disajikan sebagai PNBP BLU penyedia barang dan jasa lainnya sebesar Rp1.684.974.362,00 atau setara 280,83% dari anggarannya sebesar Rp600.000.000,00.

Non-Tax State Revenue from consulting services which is presented as the Public Service Agency's Non-Tax State Revenue providing other goods and services in the amount of Rp1,684,974,362.00 or the equivalent of 280.83% of the budget of Rp600,000,000.00.

PNBP dari Pengelolaan BMN pada Pengelola Barang
PNBP from State Property Management in the Goods Manager

Secara *Year-on-Year* terdapat pertumbuhan PNBP dari pengelolaan BMN yang sebagian besar diantaranya berasal dari tambahan pengenaan *toll fee* di Kilang LNG Badak beroperasinya mitra Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) baru.

Entitas mengelompokkan PNBP pengelolaan BMN berdasarkan aset yang menghasilkannya serta besarannya apakah menggunakan dasar performa kinerja tertentu (*toll fee*) atau tidak (*non-toll fee*). Properti khusus berupa Kilang LNG merupakan kontributor utama PNBP dari pengelolaan BMN. Pada tahun 2022 tercatat PNBP dari pemanfaatan properti khusus sebesar Rp752.554.408.652,00 atau 93,27% dari total PNBP pengelolaan BMN. Sisanya sebesar Rp54.313.092.581,00 atau 6,73% dikontribusikan oleh PNBP dari pemanfaatan properti umum. Dibandingkan dengan tahun 2021, baik PNBP dari pemanfaatan properti khusus maupun properti umum mengalami pertumbuhan positif dengan tingkat pertumbuhan *Year-on-Year* berturut-turut berada pada level 8,96% dan 8,44%.

Rincian PNBP pengelolaan aset berdasarkan kelompok aset adalah sebagai berikut:

On a year-on-year basis, there is a growth in Non-Tax State Revenue from the management of the State Property, most of which comes from the additional imposition of a toll fee at the Badak LNG Refinery where new Cooperation Contract Contractors are operating.

Entities classify State Property management Non-Tax State Revenue based on the assets that generate them and the amount of whether using a certain performance basis (toll fee) or not (non-toll fee). Special properties in the form of LNG refineries are the main contributors to Non-Tax State Revenue from State Property management. In 2022, Non-Tax State Revenue from utilization of special properties is recorded at Rp752,554,408,652.00 or 93.27% of the total Non-Tax State Revenue from State Property management. The remaining Rp54,313,092,581.00 or 6.73% was contributed by Non-Tax State Revenue from the utilization of public properties. Compared to 2021, both Non-Tax State Revenue from the utilization of special properties and general properties experienced positive growth with a year-on-year growth rate of 8.96% and 8.44% respectively.

Details of Non-Tax State Revenue of asset management based on asset group are as follows:

Kelompok Aset / Asset Group	**2022**	**2021**	**Kenaikan / (Penurunan) Rp**	**Kenaikan / (Penurunan) %**
Properti Khusus / Special Properties				
Kilang LNG Badak Toll Fee	722.594.634.846	606.617.010.899	115.977.623.947	19,12%
Kilang LNG Badak Non Toll Fee	8.327.320.000	4.215.306.833	4.112.013.167	97,55%
Kilang LNG Badak Arun Toll Fee	6.263.191.730	3.516.548.909	2.746.642.821	78,11%
Kilang LNG Badak Arun Non Toll Fee	15.369.262.076	76.306.388.095	(60.937.126.019)	-79,86%
Sub Total Properti Khusus / Sub Total Special Properties	752.554.408.652	690.655.254.736	61.899.153.916	8,96%
Properti Umum / General Properties				
Properti eks HTBI	6.871.423.926	6.656.191.352	212.232.574	3,19%
Properti eks PPA	6.193.006.424	3.980.541.020	2.212.465.404	55,58%
Properti eks Pertamina	38.580.830.316	39.447.210.440	(866.380.124)	-2,20%
Properti eks BPPN	2.667.831.915	-	2.667.831.915	0,00%
Sub Total Properti Umum / Sub Total General Properties	54.313.092.581	50.086.942.812	4.226.149.769	8,44%
Total	806.867.501.233	740.742.197.548	66.125.303.685	8,93%

PNBP dari pemanfaatan Kilang LNG Badak melalui mekanisme *toll-fee* mencatatkan pertumbuhan positif *Year-on-Year* sebesar 19,12%. Pertumbuhan tersebut dikontribusikan oleh peningkatan penjualan gas yang menjadi *underlying* pengenaan *toll fee* sebesar 13,36%. Sisanya dikontribusikan oleh faktor kurs USD:IDR. Peningkatan juga terjadi pada pemanfaatan Kilang LNG Badak selain dengan mekanisme *toll fee*.

Terdapat pertumbuhan positif signifikan sebesar 97,55% yang dikontribusikan oleh adanya pemanfaatan lahan di area Kilang LNG Badak untuk kebutuhan pembangunan LNG filling station oleh PT Pertamina Gas. PNBP dari pemanfaatan Kilang LNG Arun dengan mekanisme *toll fee* juga mengalami peningkatan signifikan sebesar 78,11%. Pertumbuhan tersebut dikontribusikan oleh peningkatan volume penjualan gas yang menjadi *underlying* pengenaan *toll fee* sebesar 71,86%, sementara sisanya dikontribusikan oleh faktor USD:IDR.

PNBP dari pemanfaatan Kilang LNG Arun selain mekanisme toll fee mengalami penurunan yang signifikan sebesar -79,86% yang disebabkan pemanfaatan yang sebelumnya menjadi sumber *recurring income*, yaitu pemanfaatan untuk regasifikasi oleh PT Perta Arun Gas masih dalam proses perpanjangan perjanjian. Adapun pada 2022 tidak terdapat PNBP dari pemanfaatan dimaksud.

PNBP dari pemanfaatan properti umum mencatatkan pertumbuhan positif 8,44%. Properti eks Perusahaan Pengelola Aset (PPA) memberikan kontribusi pertumbuhan yang cukup besar sebesar 55,58% yang sebagian besarnya berasal dari sewa unit apartemen di Puri Casablanca oleh beberapa entitas pemerintah pusat.

Non-Tax State Revenue from the utilization of the Badak LNG Refinery through the toll-fee mechanism recorded a year-on-year positive growth of 19.12%. This growth was contributed by an increase in gas sales which became the underlying imposition of a toll fee of 13.36%. The rest is contributed by the USD:IDR exchange rate factor. The increase also occurred in the utilization of the Badak LNG Refinery apart from the toll fee mechanism.

There was a significant positive growth of 97.55% which was contributed by land use in the Badak LNG Refinery area for the needs of the construction of an LNG filling station by PT Pertamina Gas. Non-Tax State Revenue from the use of the Arun LNG Refinery using the toll fee mechanism also experienced a significant increase of 78.11%. This growth was contributed by an increase in gas sales volume which was the underlying imposition of a toll fee of 71.86%, while the remainder was contributed by USD:IDR.

Non-Tax State Revenue from the utilization of the Arun LNG Refinery other than the toll fee mechanism experienced a significant decrease of -79.86% due to the utilization which was previously a source of recurring income, namely the utilization for regasification by PT Perta Arun Gas which is still in the process of extending the agreement. Meanwhile, in 2022 there will be no Non-Tax State Revenue from the said utilization.

Non-Tax State Revenue from utilization of public property recorded a positive growth of 8.44%. The property of the former Asset Management Company contributed a sizable growth of 55.58%, most of which came from the rental of apartment units in Puri Casablanca by several central government entities.

Kilang LNG Arun
/ LNG Arun Plant

PNBP dari Jasa Konsultansi
PNBP from Consulting Services

Selain PNBP dari pemanfaatan aset dan PNBP dari penempatan dana pada perbankan, pada tahun 2022, juga direalisasikan PNBP dari jasa konsultansi (advisory) sebesar Rp1.684.974.362 atau setara 280,83% dari anggarannya sebesar Rp600.000.000. Terdapat 7 (tujuh) penerima jasa konsultansi pada tahun 2022 yang terdiri dari 4 (empat) satuan kerja pemerintah pusat, 1 (satu) satuan kerja pemerintah daerah, 1 (satu) lembaga sui generis, dan 1 (satu) badan usaha

Apart from PNBP from asset utilization and PNBP from placement of funds with banks, in 2022, PNBP from consulting services (advisory) amounting to Rp1,684,974,362 or the equivalent of 280.83% of the budget of Rp600,000,000 will also be realized. There are 7 (seven) recipients of consulting services in 2022 consisting of 4 (four) central government work units, 1 (one) regional government work unit, 1 (one) sui generis institution, and 1 (one) business entity.

PNBP Lainnya
Other PNBP

Beberapa PNBP lain juga terjadi pada 2022, yakni:
Several other PNBP also occurred in 2022, namely:

- PNBP pemindahtanganan aset berupa aset kelolaan yang telah dihentikan penggunaannya (aset inaktif) di Kilang LNG Badak sebesar Rp6.960.000.000. Aset inaktif di Kilang LNG Badak yang dilakukan pemindahtanganan adalah sebanyak 383 unit aset yang terdiri dari 352 unit besi tua dan 31 aset berupa kendaraan.

  PNBP for the transfer of assets in the form of assets under management that have been discontinued (inactive assets) at the Badak LNG Plant in the amount of Rp6,960,000,000. Inactive assets at the Badak LNG Plant that were transferred were 383 units of assets consisting of 352 units of scrap metal and 31 assets in the form of vehicles.

- PNBP dari pemindahtanganan aset tetap berupa peralatan dan mesin yang dihentikan penggunaannya sebesar Rp32.555.555.

  PNBP from the transfer of fixed assets in the form of discontinued equipment and machinery amounting to Rp32,555,555.

PNBP hasil pemindahtanganan tersebut langsung disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) oleh bendaharawan penerimaan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang melaksanakan lelang. PNBP tersebut dibukukan sebagai PNBP Entitas dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Pada 2022, entitas mengalokasikan belanja modal untuk konstruksi gedung arsip di Jalan Slamet Riyadi 1 Nomor 7, Matraman, Jakarta Timur. Berdasarkan laporan kemajuan pekerjaan diketahui bahwa pada tanggal 31 Desember 2022 realisasi pekerjaan baru mencapai ±81,9886% atau 18,0114% lebih kecil dibandingkan target 100% penyelesaian. Sebagai konsekuensinya, telah dikenakan denda sebesar Rp87.080.412 (setara 39 hari keterlambatan). Nilai tersebut ±1,977% dari nilai kontrak sebesar Rp4.403.715.343. Terdapat pula keterlambatan untuk belanja jasa yang mengakibatkan adanya PNBP berupa denda sebesar Rp3.111.485.

Pada 2022 juga terdapat PNBP dari pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu sebesar Rp934.500.

The PNBP resulting from the transfer is directly deposited into the State General Treasury Account (RKUN) by the reception treasurer at the State Assets and Auction Service Office (KPKNL) which carries out the auction. The PNBP is recorded as Entity PNBP in the Budget Realization Report (LRA).

In 2022, the entity allocated capital expenditure for the construction of an archive building on Jalan Slamet Riyadi 1 Number 7, Matraman, East Jakarta. Based on the work progress report, it is known that on December 31, 2022 the realization of new work reached ± 81.9886% or 18.0114% less than the target of 100% completion. As a consequence, a fine of Rp87,080,412 (equivalent to 39 days of delay) has been imposed. This value is ±1.977% of the contract value of Rp4,403,715,343. There was also a delay in spending on services which resulted in PNBP in the form of a fine of Rp3,111,485.

In 2022 there will also be PNBP from the previous fiscal year's spending refund of Rp934,500.

Belanja
Expenditure

Realisasi belanja untuk tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp129.447.126.131 atau mencapai 96,95% dari anggaran yang tersedia sebesar Rp133.515.200.000. Realisasi anggaran tahun 2022 yang dirinci berdasarkan Klasifikasi Rincian *Output* (KRO) adalah sebagai berikut:

Realization of spending for the 2022 fiscal year amounted to Rp129,447,126,131 or reached 96.95% of the available budget of Rp133,515,200,000. Realization of the 2022 budget detailed based on the Output Detail Classification is as follows:

2022			
Klasifikasi Rincian Output / Output Breakdown Classification	**Anggaran** / Budget	**Realisasi** / Realization	**%**
4798.FAK Pengelolaan Aset BUN / 4798.FAK BUN Asset Management	27.618.875.000	26.831.795.252	97,15%
4700.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal / 4700.EBA Internal Management Support Services	158.700.000	155.904.964	98,24%
4701.CAN Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum / 4701.CAN Management of Finance, BMN, and General	262.188.000	261.543.920	95,75%
4701.EBA Layanan Perkantoran / 4701.EBA Office Services	6.232.136.000	5.948.435.056	95,45%
4701.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Intenal / 4701.EBB Internal Facility and Infrastructure Services	6.659.342.000	5.504.773.423	82,66%
4701.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal / 4701.EBD Internal Performance Management Services	889.196.000	791.707.509	89,04%
4702.BMB Komunikasi Publik / 4702.BMB Public Communication	3.374.004.000	3.293.814.467	97,62%
4703.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal / 4700.EBA Internal Management Support Services	85.613.445.000	84.066.591.999	98,19%
4703.EBC Layanan Manajemen SDM Internal / 4703.EBC Internal HR Management Services	1.871.209.000	1.840.019.434	98,33%
4704.EBA Layanan Pengawasan Internal (BLU) / 4704.EBA Internal Control Services (BLU)	138.567.000	95.524.125	68,94%
4705.FAB Sistem Informasi Pemerintahan / 4705.FAB Government Information System	697.538.000	657.015.982	94,19%
Total	133.515.200.000	129.447.126.131	96,95%

2021			
Klasifikasi Rincian Output / Output Breakdown Classification	**Anggaran** / Budget	**Realisasi** / Realization	**%**
4700.EAG Layanan Bantuan Hukum / 4700.EAG Legal Aid Services	65.000.000	62.286.495	95,83%
4701.EAB Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal / 4701.EAB Internal Planning and Budgeting Services	16.462.000	1.962.000	11,92%
4071.EAC Layanan Umum / 4701.EAC General Services	5.282.459.000	4.840.750.745	91,64%
4701.EAD Layanan Sarana Internal /4701.EAD Internal Facility Services	4.892.684.000	4.229.790.993	86,45%
4701.EAE Layanan Prasarana Internal / 4701.EAE Internal Infrastructure Services	3.584.320.000	2.305.854.29	64,33%
4701.EAN Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal / 4701.EAN Management of Finance and Internal Performance	353.780.000	332.064.758	93,86%
4702.BMB Komunikasi Publik / 4702.BMB Public Communication	1.863.058.000	1.854.553.650	99,54%
4703.EAF Layanan SDM / 4703.EAF HR Services	75.238.194.000	71.175.345.349	94,60%
4703.EAH Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal / 4703.EAH Organizational Services and Internal Governance	156.500.000	15.479.900	9,89%
4704.EAK Layanan Pengawasan Internal / 4704.EAK Internal Control Services	77.147.000	66.268.117	85,90%
4705.FAB Sistem Informasi Pemerintahan / 4705.FAB Government Information System	512.480.000	465.398.098	90,81%
4798.FAK Pengelolaan Aset BUN /4798.FAK BUN Asset Management	30.725.228.000	29.289.850.185	95,33%
Total	122.767.312.000	114.639.604.476	93,38%

Kenaikan / (Penurunan) Rp	10.747.888.000	14.807.521.655
Kenaikan / (Penurunan) %	8,75%	12,92%

Dibandingkan dengan tahun anggaran 2021 yang tercatat sebesar Rp122.767.312.000, pagu belanja Entitas tahun anggaran 2022 mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 8,75% menjadi Rp133.515.200.000. Hal ini disebabkan revisi penambahan pagu anggaran menggunakan mekanisme persentase ambang batas pada triwulan III tahun 2022. Selaras dengan pertumbuhan pagu dimaksud, realisasi anggaran belanja Entitas pada tahun anggaran 2022 juga mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 12,92% dari Rp114.639.604.476 pada tahun 2021 menjadi Rp129.447.126.131.

Realisasi PNBP pada tahun anggaran 2022 mencatatkan pertumbuhan 7,66% dibandingkan dengan kinerja pada periode yang sama di tahun 2021. Pertumbuhan tersebut utamanya dikontribusikan oleh:

Compared to the 2021 fiscal year which was recorded at Rp122,767,312,000, the Entity's spending ceiling for the 2022 fiscal year recorded a positive growth of 8.75% to Rp133,515,200,000. This was due to the revision of the addition of the budget ceiling using the percentage threshold mechanism in the third quarter of 2022. In line with the growth of the said ceiling, the realization of the Entity's expenditure budget in the 2022 fiscal year also recorded a positive growth of 12.92% from Rp114,639,604,476 in 2021 to Rp129,447,126,131.

PNBP realization in the 2022 fiscal year recorded a growth of 7.66% compared to performance in the same period in 2021. This growth was mainly contributed by:

Perbandingan Realisasi Anggaran dengan Tahun Anggaran Sebelumnya
Comparison of Budget Realization with the Previous Fiscal Year

Uraian / Description	**2022**	**2021**	**year-on-year (%)**
PNBP			
Pendapatan dan Pengelolaan BMN pada Pengelola Barang / Income from BMN Management in Good Manager	806.867.501.232	740.742.197.548	8,93%
Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU / BLU Banking Service Income	1.298.930.830.111	1.222.547.240.545	6,25%
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya / Income from Transfer of Other BMN	6.960.000.000	146.654.999	4645,83%
Pendapatan dari Pemindahtanganan Peralatan dan Mesin / Income from Transfer of Equipment and Machinery	32.555.555	-	100,00%
Pendapatan BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya / BLU Income of Providers of Other Goods and Services	1.684.974.362	865.501.546	94,68%
Komisi, Potongan, dan/atau Bentuk Lain Sebagai Akibat dari Pengadaan Barang/Jasa oleh BLU / Commissions, Discounts, and/or Other Forms as a Result of the Procurement of Goods/Services by BLU	90.491.597	15.683.170	477,00%
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu / Receipt of Goods Expenditures for Previous Fiscal Year	934.500	16.401.959	-94,30%
Pendapatan Lain-lain BLU / BLU Other Income	174.572.527	-	100,00%
Total PNBP	2.114.741.859.884	1.964.333.679.767	7,66%

Uraian / Description	**2022**	**2021**	**year-on-year (%)**
Belanja / Expense			
Belanja Barang / Goods Expense	123.680.808.788	109.279.356.860	13,18%
Belanja Modal / Capital Expense	5.766.317.343	5.360.247.616	7,58%
Total Belanja / Total Expense	129.447.126.131	114.639.604.476	12,92%
Surplus / (Defisit) LRA / Surplus (Deficit) LRA	1.985.294.733.753	1.849.694.075.291	7,33%

Realisasi PNBP pada tahun anggaran 2022 mencatatkan pertumbuhan 7,66% dibandingkan dengan kinerja pada periode yang sama di tahun 2021. Pertumbuhan tersebut utamanya dikontribusikan oleh:

PNBP realization in the 2022 fiscal year recorded a growth of 7.66% compared to performance in the same period in 2021. This growth was mainly contributed by:

- Pertumbuhan positif PNBP dari pengelolaan aset, baik yang dikontribusikan oleh properti khusus yang mencatatkan pertumbuhan sebesar 8,96% maupun dari properti umum yang mencatatkan pertumbuhan sebesar 8,44%.
  / Positive growth of PNBP from asset management, both contributed by special properties which recorded a growth of 8.96% and from general properties which recorded a growth of 8.44%.
- Peningkatan suku bunga acuan BI 7-day Reverse Repo Rate secara gradual sejak Agustus hingga Desember 2022 di mana secara *Year-on-Year* terdapat pertumbuhan suku bunga acuan sebesar 200BPS. Pertumbuhan tersebut memicu pertumbuhan suku bunga simpanan Entitas pada perbankan.
  / A gradual increase in the BI 7-day Reverse Repo Rate reference rate from August to December 2022 where on a Year-on-Year basis there is a reference interest rate growth of 200BPS. This growth triggered an increase in interest rates on Entity deposits at banks.

Untuk kinerja anggaran belanja tercatat pertumbuhan positif sebesar 12,92% di mana terdapat peningkatan realisasi belanja barang secara tahunan sebesar 13,18% sementara belanja modal mengalami peningkatan 7,58%.

For the performance of the expenditure budget, it recorded a positive growth of 12.92% where there was an increase in the realization of goods expenditure on an annual basis of 13.18% while capital expenditure increased 7.58%.

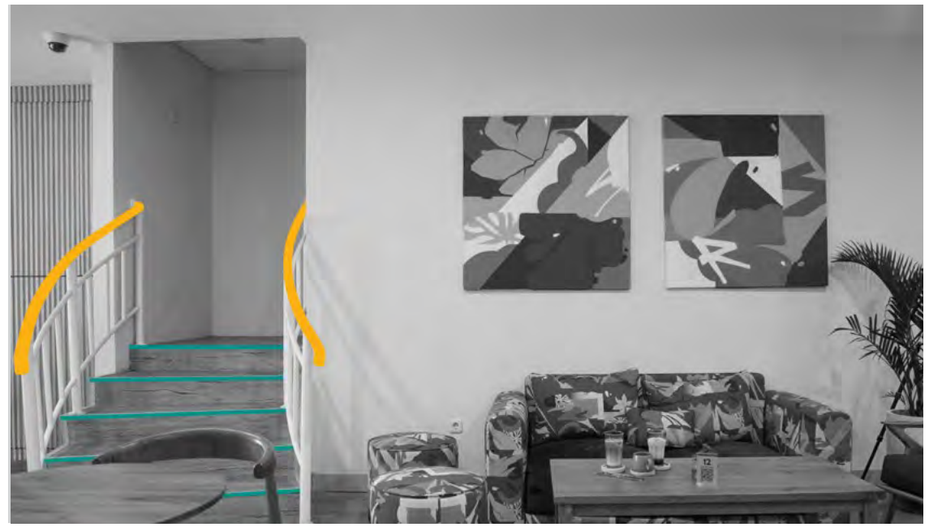

LMAN berkomitmen untuk berperan aktif dalam percepatan pembangunan infrastruktur
/ LMAN is committed to actively contribute to the acceleration of infrastructure development.

Laporan Neraca
Balance Report

Total aset Entitas pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 secara berturut-turut adalah sebesar Rp58.379.549.287.161 dan Rp42.212.647.927.738. Total kewajiban Entitas pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 berturut-turut adalah sebesar Rp30.334.883.061.112 dan Rp17.565.761.643.621. Total ekuitas Entitas pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp28.044.666.226.050 dan Rp24.646.886.284.117.

Total assets of the Entity as of 31 December 2022 and 31 December 2021 amounted to Rp58,379,549,287,161 and Rp42,212,647,927,738, respectively. Total liabilities of the Entity as of 31 December 2022 and 31 December 2021 amounted to Rp30,334,883,061,112 and Rp17,565,761,643,621, respectively. Total equity of the Entity as of 31 December 2022 and 31 December 2021 amounted to Rp28,044,666,226,050 and Rp24,646,886,284,117, respectively.

Secara agregat per kelompok akun, ringkasan neraca Entitas per 31 Desember 2022 komparatif dengan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

In aggregate per account group, the summary of the Entity's balance sheet as of 31 December 2022 comparative to 31 December 2021 is as follows:

Uraian / Description	**31 Desember 2022** / 31 December 2022	**31 Desember 2021** / 31 December 2022	**Kenaikan/(Penurunan)**	
			(Rp)	**(%)**
Aset Lancar / Current Assets	14.591.396.681.242	12.381.601.905.941	2.209.894.775.301	17,85%
Aset Tetap / Fixed Assets	120.672.670.073	119.923.241.893	749.428.180	0,62%
Properti Investasi / Investment Property	11.818.390.416.850	-	11.818.390.416.850	00.00%
Piutang Jangka Panjang / Long Term Credit	1.229.626.274.315	-	1.229.626.274.315	00.00%
Aset Lainnya / Other Assets	30.469.686.034.364	29.711.122.779.904	758.563.254.460	2,55%
Total Aset / Total Assets	58.229.872.076.844	42.212.647.927.738	16.017.224.149.106	37,94%
Kewajiban Jangka Pendek / Short-Term Obligation	36.716.201.502	60.460.895.240	-12.744.593.738	-39,27%
Kewajiban Jangka Panjang / Long-Term Obligation	30.298.237.380.317	17.505.300.748.380	12.792.936.631.937	73,08%
Total Aset / Total Assets	30.334.953.681.819	17.565.761.643.620	12.769.192.038.199	72,69%
Ekuitas / Equity	27.894.918.395.025	14.646.886.284.118	3.248.032.110.907	13,18%
Kewajiban dan Ekuitas / Obligation and Equity	58.229.872.076.844	42.2121.647.927.738	16.017.224.149.106	37,94%

Aset Lancar / Current Assets

Posisi aset lancar Entitas per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 berturut-turut adalah sebesar Rp14.719.321.897.017 dan Rp12.381.601.905.941. Aset lancar pada Entitas terdiri dari kas dan setara kas, piutang dari kegiatan operasional, pendapatan akrual, serta persediaan barang konsumsi.

The current asset position of the Entity as of 31 December 2022 and 31 December 2021 amounted to Rp14,719,321,897,017 and Rp12,381,601,905,941, respectively. Current assets in the Entity consist of cash and cash equivalents, receivables from operational activities, accrued income, and consumer goods inventories.

Uraian Aset /	**31 Desember 2022** / 31 December 2022	**31 Desember 2021*)** / 31 December 2021	**Kenaikan/(Penurunan)**	
			Rp	**%**
Kas Lainnya dan Setara Kas / Other Cash and Cash Equivalents	4.507.074.801	3.653.608.818	853.465.983	23,36%
Kas pada Badan Layanan Umum / Cash in Public Service Agency	1.253.058.128.796	971.491.377.133	281.566.751.667	28,98%
Investasi Jangka Pendek BLU / Short-term Investments in Public Service Agency	12.989.662.159.695	11.292.926.733.164	1.696.735.426.531	15,02%
Pendapatan yang masih Harus Diterima / Accrued Income	80.514.180.074	47.384.143.724	33.130.036.350	69,92%
Piutang dari Kegiatan Operasional BLU / Receivables from Public Service Agency Operational Activities				
- Piutang / Receivables	114.335.342.322	64.263.409.559	50.071.932.763	77,92%
- Penyisihan / Provision	(4.578.121.511)	(321.317.046)	(4.256.804.464)	1324,80%
- Piutang Bersih / Net Receivables	109.757.220.811	63.942.092.512	45.815.128.299	71,65%
Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang / Current Portion of Long-term Receivables				
- Piutang / Receivables	155.255.842.716	-	155.255.842.716	0,00%
- Penyisihan / Provision	(1.552.558.427)	-	(1.552.558.427)	0,00%
- Piutang Bersih / Net Receivables	153.703.284.289	-	153.703.284.289	0,00%
Piutang Lainnya / Other Receivables	-	1.859.450.374	(1.859.450.374)	-100,00%
Piutang jangka Pendek Bersih / Net Short-term Receivables	263.460.505.100	65.801.542.886	197.658.962.214	300,39%
Persediaan Barang Konsumsi / Consumer Goods Inventory	294.632.776	344.500.216	(49.867.440)	-14,48%
Jumlah Aset Lancar / Total Current Assets	14.591.496.681.242	12.381.601.905.941	1.109.894.775.305	17,85%

Aset Tetap / Fixed Assets

Aset Tetap adalah aset fisik yang digunakan sendiri oleh Entitas. Pos ini tidak termasuk aset kelolaan Entitas. Posisi pos Aset Tetap per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp138.727.519.739 dengan nilai Akumulasi Penyusutan sebesar Rp18.054.849.666 sehingga nilai bersih Aset Tetap adalah sebesar Rp120.672.670.073. Penambahan aset tetap pada tahun 2022 adalah sebesar Rp749.428.182. Penambahan tersebut mengakibatkan pertumbuhan sebesar 0,62% dari figur pada 31 Desember 2021.

Fixed Assets are tangible assets utilized by the Entity for its own operations. This category does not encompass assets managed by the Entity. As of December 31, 2022, the carrying amount of PPE is Rp 138,727,519,739, with an Accumulated Depreciation of Rp 18,054,849,666, resulting in a net book value of PPE amounting to Rp 120,672,670,073. The addition of fixed assets during the year 2022 amounted to Rp 749,428,182. This increase led to a growth of 0.62% compared to the figure as of December 31, 2021.

Uraian / Description	**31 Desember 2022** / 31 December 2022	**31 Desember 2021*)** / 31 December 2021
Aset Tetap Bersih (Bersih setelah akumulasi penyusutan)	120.672.670.073	119.923.241.893
	Rp Kenaikan/(Penurunan)	749.428.180
	% Kenaikan/(Penurunan)	0,62%

Properti Investasi / Investment Property

Pada 01 Juli 2021 telah terbit Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 17 Properti Investasi melalui PMK Nomor 85/PMK.05/2021. Dalam rangka implementasi PSAP tersebut, telah diterbitkan Petunjuk Teknis 10: Akuntansi Barang Milik Negara yang Memenuhi Karakteristik Properti Investasi pada Bendahara Umum Negara.

Posisi Properti Investasi dalam kelolaan Entitas per tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp29.999.078.894.081,00 dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp18.180.688.477.231,00 sehingga nilai Properti Investasi bersih adalah sebesar Rp11.818.390.416.850,00. Tidak terdapat saldo Properti Investasi pada tanggal 31 Desember 2021 mengingat penerapan PSAP 17 berlaku efektif mulai tahun 2022 (jo. paragraf 63 PSAP 17).

On July 1, 2021, the Government Accrual-Based Standard Accounting Statement Number 17 on Investment Properties was issued through Decree of the Minister of Finance Number 85/PMK.05/2021. In line with the implementation of this standard, Technical Instruction 10: Accounting for State-Owned Assets that Meet the Characteristics of Investment Properties has been issued by the State General Treasurer.

As of December 31, 2022, the position of Investment Properties under the Entity's management amounted to Rp 29,999,078,894,081.00, with an accumulated depreciation of Rp 18,180,688,477,231.00, resulting in a net value of Investment Properties of Rp 11,818,390,416,850.00. There were no Investment Properties recorded as of December 31, 2021, considering that the application of PSAP 17 became effective starting from the year 2022 (refer to paragraph 63 of PSAP 17).

Uraian / Description	**31 Desember 2022** / 31 December 2022	**31 Desember 2021*)** / 31 December 2021
Properti Investasi (Bersih setelah akumulasi penyusutan)	11.818.390.416.850	
	Rp Kenaikan/(Penurunan)	11.818.390.416.850
	% Kenaikan/(Penurunan)	0%

Aset Lainnya / Other Assets

Aset lainnya pada Entitas terdiri dari aset-aset yang tidak termasuk dalam kelompok aset lancar dan aset tetap. Komponen aset lain pada laporan keuangan Entitas merupakan aset yang menjadi penggerak operasi utama Entitas, antara lain dana investasi manajemen aset, dana jangka panjang pengadaan tanah PSN, dan aset kelolaan Entitas berupa kawasan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan sebagai properti investasi. Selain itu, komponen aset lain juga mencakup aset tak berwujud dan pemupukan dana purna jabatan untuk pejabat pengelola BLU.

Posisi Aset Lainnya pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp30.469.686.034.365 dan Rp29.711.122.779.904. Sebagian mutasi tersebut dikontribusikan oleh reklasifikasi Aset Lainnya ke dalam Properti Investasi sesuai dengan penerapan pertama kali PSAP 17 pada tahun pelaporan 2022.

Other assets in the Entity consist of assets that are not included in current assets and fixed assets. Other asset components in the Entity's financial statements are assets that drive the Entity's main operations, including asset management investment funds, long-term PSN land procurement funds, and assets under management of the Entity in the form of areas that do not meet the criteria for recognition as investment properties. In addition, other asset components also include intangible assets and post-employment fund fertilization for BLU management officials.

The position of Other Assets on 31 December 2022 and 31 December 2021 amounted to Rp30,468,686,034,365 and Rp29,711,122,779,904, respectively. Some of these movements were contributed by the reclassification of Other Assets into Investment Properties in accordance with the first application of PSAP 17 in the 2022 reporting year.

Kewajiban / Liabilities

Posisi Kewajiban pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp30.334.953.681.819 yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp36.716.301.502 dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp30.298.237.380.317.

As of December 31, 2022, the total amount of liabilities is Rp30,334,953,681,819, consisting of Short-term Liabilities amounting to Rp36,716,301,502 and Long-term Liabilities amounting to Rp30,298,237,380,317.

Ekuitas / Equity

Posisi Ekuitas pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp27.894.918.395.025.

The Equity position on 31 December 2022 was Rp27,894,918,395,025.

Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance

6

Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance

Sebagai salah satu Badan Layanan Umum (BLU), LMAN memiliki peran strategis dalam menyediakan layanan penyediaan barang dan jasa kepada masyarakat. Pemerintah Indonesia telah mengadopsi prinsip *'entrepreneur government'* ke dalam reformasi keuangan negara melalui pemberian fleksibilitas pengelolaan keuangan pada Badan Layanan Umum (BLU).

As one of the Public Service Agencies, LMAN has a strategic role in providing goods and services to the community. The Indonesian government has adopted the principle of 'entrepreneur government' into state financial reform by providing financial management flexibility to Public Service Agencies.

Fleksibilitas tersebut dimaksudkan agar BLU dapat memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat di tengah keterbatasan dana yang dialokasikan pemerintah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa BLU menjadi dapat perpanjangan tangan pemerintah dalam upaya menyediakan layanan penyediaan barang dan jasa yang diperlukan masyarakat. Terkait hal itu, berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, LMAN menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas.

This flexibility is intended so that Public Service Agencies can provide quality services to the community amidst the limited funds allocated by the government. Thus it can be said that Public Service Agencies are an extension of the government in an effort to provide services for the provision of goods and services needed by the community. In this regard, based on Law No. 1 Year 2004 concerning the State Treasury, LMAN implements a flexible financial management pattern by highlighting productivity, efficiency, and effectiveness.

Otonomi yang dimiliki LMAN dalam pengelolaan keuangan tersebut tentunya harus disertai akuntabilitas yang tinggi. Itu sebabnya, LMAN senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Corporate Governance*) dalam menjalankan roda organisasi serta proses bisnis di setiap aspek pengelolaan aset negara. Selain itu, seluruh insan LMAN juga dituntut untuk selalu menganut prinsip kehati-hatian, senantiasa bertindak sesuai koridor peraturan dan tata kelola pemerintahan yang baik guna menghindari berbagai praktik kecurangan, seperti praktik korupsi, kolusi serta nepotisme (KKN) dan benturan kepentingan yang berpotensi memberikan dampak buruk dan merugikan bagi kinerja dan reputasi LMAN.

The autonomy of LMAN in financial management must certainly be accompanied by high accountability. That is why, LMAN always puts forward the principles of Good Corporate Governance in running the organization and business processes in every aspect of managing state assets. In addition, all LMAN personnel are also required to always adhere to the principle of prudence, always act in accordance with the corridors of regulations and good governance in order to avoid various fraudulent practices, such as practices of corruption, collusion and nepotism, and conflicts of interest that have the risk to exert bad and detrimental influence to LMAN's performance and reputation.

Pembangunan Infrastruktur Kereta Api Makassar / Makassar Railway Infrastructure Development

Komitmen LMAN
LMAN Commitment

Implementasi *good governance* yang telah menjadi bagian dari budaya lembaga ini merupakan hal yang sangat krusial bagi LMAN untuk dijalankan secara konsisten dan penuh tanggung jawab dalam menjalankan peran melaksanakan optimalisasi aset negara dan menjadi *enabler factor* percepatan pembangunan infrastruktur Proyek Strategis Nasional (PSN) guna menghasilkan manfaat bagi masyarakat.

Peran LMAN akan terus diwujudkan secara nyata dengan dukungan komitmen dalam menjunjung tinggi integritas dan tata kelola yang baik, bersama dengan seluruh pemangku kepentingan terkait untuk menjalankan amanat sebagai lembaga yang ditunjuk pemerintah untuk melakukan optimalisasi aset negara dan pendanaan pengadaan lahan infrastruktur PSN. Dengan demikian, pemerataan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat akan terwujud.

The implementation of good governance that has become part of the institutional culture is very crucial for LMAN to be conducted consistently and with full responsibility in carrying out the role of optimizing state assets and becoming an enabler factor for accelerating infrastructure development for the National Strategic Projects in order to generate benefits for the public.

LMAN's role will continue to be realized in a concrete way with the support of a commitment to upholding integrity and good governance, together with all relevant stakeholders to carry out the mandate as an institution appointed by the government to optimize state assets and fund procurement of the National Strategic Projects infrastructure land. Thus, equitable development and increased social welfare will be realized.

Dasar Kebijakan Penerapan *Good Governance* LMAN
Policy Basis for the Implementation of Good Governance at LMAN

Kebijakan Penerapan Tata Kelola yang Baik di LMAN mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum. Tata Kelola yang Baik merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan LMAN berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran untuk pencapaian penyelenggaraan kegiatan LMAN yang memperhatikan semua pemangku kepentingan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan praktik bisnis yang sehat.

The Policy for Implementing Good Governance at LMAN refers to the Minister of Finance Regulation No. 129/PMK.05/2020 concerning Guidelines for the Management of Public Service Agencies. Good Governance is a system designed to direct the management of LMAN based on the principles of transparency, independence, accountability, responsibility, and fairness to achieve the implementation of LMAN activities that pays attention to all stakeholders based on statutory provisions and sound business practices.

Prinsip-Prinsip Tata Kelola
Principles of Good Governance

LMAN mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik, sesuai dengan prinsip good governance yang diusung *United Nation Development Program* (UNDP) sebagai berikut:

LMAN implements good governance in accordance with the principles of good governance promoted by the United Nation Development Program (UNDP) as follows:

Participation

Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.

Every citizen has a voice in making decisions, either directly or through the intermediation of legitimate institutions that represent their interests. This participation is built on the basis of freedom of association and speech and to participate constructively.

Rule of Law

Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, termasuk hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia.

The legal framework must be fair and enforced impartially, including laws relating to human rights.

Transparency

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Seluruh proses pemerintahan Lembaga dan informasi dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti.

Transparency is built on the basis of the free flow of information. All governance processes and information of the Agency are accessible to interested parties and the information available must be sufficient to be understood.

Responsiveness

Lembaga-lembaga dan proses harus mencoba untuk melayani setiap pemangku kepentingan.

Institutions and processes should try to serve all stakeholders.

Consensus Orientation

Good governance menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan-pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas baik dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur.

Good governance mediates different interests to obtain the best choices for wider interests both in terms of policies and procedures.

Equity

Semua warga negara baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau mempertahankan kesejahteraan mereka.

All citizens, both men and women, have the opportunity to improve or maintain their welfare.

Effectiveness and Efficiency

Segala proses pemerintahan dan Lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber daya yang ada seoptimal mungkin.

All processes of government and institutions produce results according to the needs of the community and by using existing resources as optimally as possible.

Accountability

Pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat ataupun kepada Lembaga yang berkepentingan.

Decision makers in the government, the private sector, and civil society organizations are accountable both to the community and to interested institutions.

Strategic Vision

Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif *good governance* dan pengembangan manusia yang luas dan jauh ke depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan.

Leaders and the public must have a broad and far-reaching perspective on good governance and human development in line with what is needed for development.

Dasar Kebijakan Penerapan *Good Governance* LMAN

Policy Basis for the Implementation of Good Governance at LMAN

Presiden Joko Widodo meresmikan Bendungan Pidekso, salah satu PSN yang pembebasan lahannya didanai oleh APBN melalui LMAN

/ President Joko Widodo inaugurated the Pidekso Dam, one of the National Strategic Projects (PSN), whose land acquisition was funded by the national budget through LMAN.

Penerapan *good governance* di lingkungan Lembaga Manajemen Aset Negara mengacu pada berbagai ketentuan dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yakni:

The implementation of good governance within the State Asset Management Institute refers to the various provisions and regulations and laws that apply, namely:

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 54/PMK.01/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Manajemen Aset Negara.

  / Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 54/PMK.01/2017 concerning Organization and Work Procedures of State Asset Management Institutions.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah.

  / Government Regulation Number 8 of 2006 concerning Financial Reporting and Government Performance.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

  / Regulation of the President of the Republic of Indonesia Number 29 of 2014 concerning Performance Accountability Systems of Government Agencies.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.01/2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Keuangan.

  / Regulation of the Minister of Finance No. 42/PMK.01/2012 concerning Guidelines for Implementing Performance Accountability Evaluation of Government Agencies within the Ministry of Finance.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

  / Regulation of the Minister of Administrative Reform and Bureaucratic Reform Number 53 of 2014 concerning Technical Guidelines for Performance Agreements, Performance Reporting, and Procedures for Reviewing Government Agency Performance Reports.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.05/2017 tanggal 21 Desember 2017, tentang Sistem Pengendalian Internal pada Badan Layanan Umum.

  / Regulation of the Minister of Finance Number 200/PMK.05/2017 dated 21 December 2017, regarding the Internal Control System at Public Service Agencies.

Presiden Joko Widodo bersama jajaran meresmikan Bendungan Ciawi - Sukamahi yang pembebasan lahannya didanai oleh APBN melalui LMAN

/ President Joko Widodo, along with his officials, inaugurated the Ciawi-Sukamahi Dam, whose land acquisition was funded by the national budget through LMAN.

Fokus Implementasi *Good Governance* LMAN 2022
Implementation Focus of Good Governance LMAN 2022

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam pengelolaan organisasi LMAN sudah dilakukan sejak awal berdirinya LMAN dan terus dilakukan perbaikan. Hal tersebut terlihat dari perubahan struktur organisasi LMAN di tahun 2017 melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Manajemen Aset Negara yang selaras dengan penambahan mandat LMAN yang baru dalam mendukung program pemerintah di bidang infrastruktur melalui pendanaan pengadaan tanah Proyek Strategis Nasional. Perangkat dan instrumen GCG LMAN sampai dengan akhir tahun 2022 juga terus dilengkapi mulai dari pembentukan Komite Risiko, pembentukan Satuan Pengawasan Intern (SPI) di tahun 2019, dan perumusan peraturan-peraturan internal yang berkaitan dengan penguatan GCG.

Namun demikian, dengan mempertimbangkan tugas, fungsi, dan dinamika perkembangan organisasi yang berubah seiring berjalannya waktu, maka di tahun 2021 LMAN telah merumuskan dan mengusulkan rancangan perubahan organisasi dan tata kerja kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang di antaranya bertujuan untuk penguatan divisi yang menangani tugas dan fungsi LMAN di bidang *advisory* dan pendanaan pengadaan lahan. Selain itu, reorganisasi LMAN juga bertujuan untuk penguatan lini kedua pengendalian internal dengan menggabungkan divisi yang menangani fungsi manajemen risiko dan divisi yang menangani fungsi kepatuhan internal dalam usulan reorganisasi LMAN yang disampaikan pada 2021. Kedua fungsi tersebut sebenarnya sudah ada sejak 2017 namun berada dalam divisi dan direktorat yang berbeda sehingga ke depan diharapkan bahwa kegiatan pemantauan kepatuhan internal dan manajemen risiko organisasi akan lebih efisien dan efektif.

Selain itu, SPI juga mengimplementasikan Klinik Integritas yang merupakan salah satu upaya dalam pencegahan *fraud* di lingkungan LMAN melalui *help desk* konsultasi. Klinik Integritas membuka kesempatan bagi setiap SDM LMAN yang memerlukan saran/pendapat dari SPI terkait dengan kondisi yang mereka hadapi baik potensi benturan kepentingan, gratifikasi, *fraud*, atau hal lain yang berkaitan dengan integritas. Metode konsultasi yang diberikan tidak hanya melalui pertemuan secara langsung, namun juga melalui media elektronik seperti telepon, pesan (WhatsApp Messenger), dan juga email. SPI selaku unit yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Klinik Integritas harus memberikan respons paling lama 1 (satu) hari sejak pertanyaan dan/atau data diberikan serta menjaga kerahasiaan identitas SDM LMAN yang menggunakan fasilitas Klinik Integritas, kecuali kepada Dirut LMAN atau pihak lain yang berdasarkan ketentuan memiliki kewenangan untuk memperoleh informasi tersebut. Sepanjang tahun 2022, terdapat 11 (sebelas) pertanyaan dari SDM LMAN melalui Klinik Integritas dan diproses oleh SPI.

The implementation of Good Corporate Governance (GCG) in managing LMAN has been carried out since the inception of LMAN and continues to be improved. This can be seen from the change in the organizational structure of LMAN in 2017 through the Minister of Finance Regulation Number 54/PMK.01/2017 concerning the Organization and Work Procedure of State Asset Management Agency, which is in line with the addition of the new LMAN mandate in supporting government programs in the infrastructure sector through funding procurement of the National Strategic Project land. LMAN's GCG tools and instruments until the end of 2022 will also continue to be completed starting from the formation of the Risk Committee, the establishment of the Internal Oversight Unit in 2019, and the formulation of internal regulations related to strengthening GCG.

However, taking into account the tasks, functions and dynamics of organizational development that change over time, in 2021 LMAN has formulated and proposed a plan for organizational changes and work procedures to the Directorate General of State Assets which among other things aims to strengthen the division that handles tasks and LMAN's function is in the area of advisory and funding for land acquisition. In addition, the LMAN reorganization also aims to strengthen the second line of internal control by combining the division that handles the risk management function and the division that handles the internal compliance function in the proposed LMAN reorganization submitted in 2021. These two functions have actually existed since 2017 but are in the division and different directorates so that in the future it is hoped that the organization's internal compliance monitoring and risk management activities will be more efficient and effective.

In addition, SPI also implements an Integrity Clinic which is one of the efforts to prevent fraud within LMAN through a consulting help desk. The Integrity Clinic opens opportunities for every LMAN HR who needs advice/opinion from SPI regarding the conditions they face, whether it be a potential conflict of interest, gratuity, fraud, or other matters related to integrity. The consultation method provided is not only through face-to-face meetings, but also through electronic media such as telephone, messages (WhatsApp Messenger), and also email. SPI as the unit responsible for organizing the Integrity Clinic must provide a response no later than 1 (one) day after the question and/or data is provided and maintain the confidentiality of the identity of the LMAN HR who uses the Integrity Clinic facility, except to the LMAN Director or other parties who based on the provisions have authority to obtain this information. Throughout 2022, there were 9 (nine) questions from LMAN HR through the Integrity Clinic and were processed by SPI.

Penilaian Tata Kelola
Assessment of Good Governance

Penilaian proses tata kelola bertujuan untuk menilai sejauh mana efektivitas proses penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Perusahaan yang Baik sehingga menghasilkan outcome yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan. Untuk itulah, setiap tahun LMAN melakukan penilaian terhadap penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.

Proses penilaian ini merupakan alat ukur guna mengetahui sejauh mana efektivitas penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di lingkungan LMAN. Penilaian dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan dikaitkan dengan praktik-praktik terbaik dalam menjalankan kegiatan pengelolaan aset negara.

Assessment of good governance aims to assess how far the effectiveness of the process of implementing the principles of Good Corporate Governance is supported by the adequacy of the structure and infrastructure of Good Corporate Governance so as to produce outcomes that are in accordance with stakeholder expectations. For this reason, every year LMAN conducts an assessment of the implementation of Good Governance.

This assessment process is a measuring tool to determine how far the effectiveness of the implementation of Good Governance within LMAN is. The assessment is carried out based on applicable regulations and is linked to best practices in carrying out state asset management activities.

Capaian Nilai Kinerja Organisasi
Achievement of Organizational Performance Value

Pengukuran capaian kinerja LMAN tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) LMAN adalah sebesar 113,58%. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif:

The measurement of LMAN performance achievements in 2022 is carried out by comparing targets (plans) and the realization of Key Performance Indicators in each perspective. From the results of these performance measurements, data was obtained that the achievement of LMAN's Organizational Performance Score was 113.58%. This value comes from the performance achievements in each perspective:

Jenis Pemangku Kepentingan / Stakeholders	**Konsumen** / Consumer	**Proses Internal** / Internal Process	**Pembelajaran dan pertumbuhan** / Learning and Growth
26.89%	16.01%	36.00%	34.68%

Selama tahun 2022, LMAN memiliki 19 (sembilan belas) IKU, di mana 18 (delapan belas) IKU berstatus hijau, dan 1 (satu) IKU berstatus kuning. Adapun tren Nilai Kerja Organisasi LMAN pada periode 2018-2022 (YoY) adalah sebagai berikut:

During 2022, LMAN has 19 (nineteen) IKU, of which 18 (eighteen) IKU have green status, and 1 (one) IKU has yellow status. The trend of LMAN Organizational Work Value in the 2018-2022 (YoY) period is as follows:

Nilai Kinerja Organisasi BLU LMAN 2018 - 2022
Organizational Performance Value of BLU LMAN 2018 - 2022

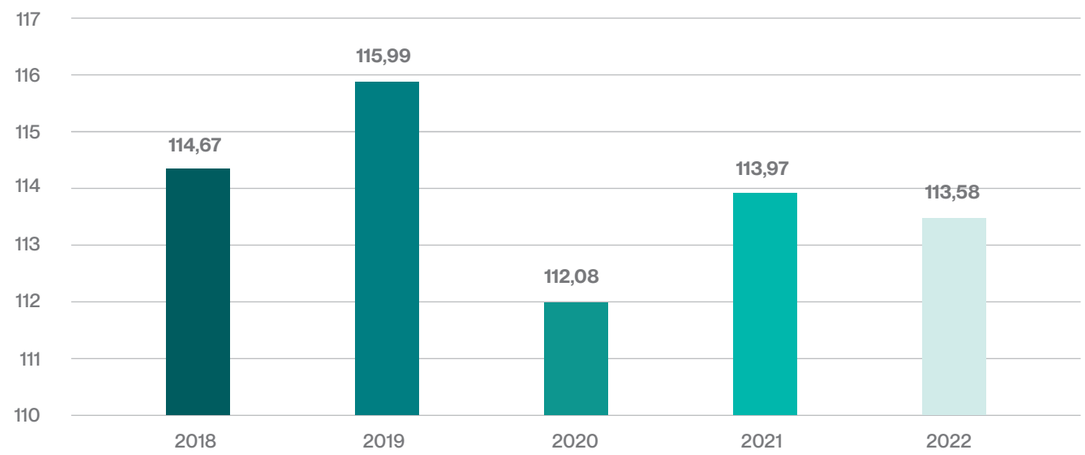

Adapun rincian capaian masing-masing IKU dijelaskan sebagai berikut:

A. Sasaran Strategis 1: Pengelolaan Kekayaan Negara yang Akuntabel dan Produktif

Kegiatan pengelolaan kekayaan negara meliputi perencanaan dan penganggaran; pengadaan; penggunaan; pemanfaatan; pengamanan dan pemeliharaan; penatausahaan; pengawasan/pengendalian. Pengelolaan kekayaan negara yang dilaksanakan oleh LMAN meliputi tugas optimalisasi aset pada Pengelola Barang (Aset BUN) yang *idle* dan *underutilised* serta aset yang berstatus *non-free and clear*.

Pengelolaan kekayaan negara dikatakan optimal apabila seluruh aset dapat memberikan manfaat baik melalui penerimaan negara (*financial return*) maupun penggunaan aset yang menyebabkan penghematan anggaran (*cost saving/avoidance*). IKU ini mengukur tingkat optimalisasi aset berdasarkan nilai manfaat yang dihasilkan, baik dalam bentuk *financial return* maupun *cost saving/avoidance*.

Atas PNBP yang diterima LMAN, perlu dilakukan pengelolaan secara optimal. Pengelolaan kas dapat dikatakan optimal apabila dilakukan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian untuk memenuhi sebagian kebutuhan alokasi anggaran operasional LMAN. Aktivitas pengelolaan kas terutama dilakukan untuk dana yang diinvestasikan pada LMAN untuk tujuan manajemen properti dan pendanaan pengadaan lahan. Dana dimaksud bukan merupakan dana abadi yang akan terus menerus menghasilkan pendapatan bunga, namun dana yang akan habis seiring dengan aktivitas investasi pada aset properti serta aktivitas pembayaran uang ganti rugi lahan.

Dalam mencapai sasaran strategis dimaksud, LMAN memiliki 3 (tiga) IKU yang dapat dilihat di tabel berikut:

The details of the achievements of each KPI are explained as follows:

A. Strategic Goal 1: Accountable and Productive Management of State Assets

State asset management activities include planning and budgeting; procurement; use; utilization; security and maintenance; administration; supervision/control. The management of state assets carried out by LMAN includes the task of optimizing assets on Property Managers (BUN Assets) that are idle and underutilized as well as assets with non-free and clear status.

Management of state assets is said to be optimal if all assets can provide benefits both through state revenue (financial returns) and the use of assets that lead to budget savings (cost saving/avoidance). This KPI measures the level of asset optimization based on the value of the benefits generated, both in the form of financial returns and cost saving/avoidance.

For the PNBP received by LMAN, it is necessary to manage it optimally. Cash management can be said to be optimal if it is carried out by prioritizing the principle of prudence to fulfill part of the allocation needs of LMAN's operational budget. Cash management activities are primarily conducted for funds invested in LMAN for property management and land acquisition funding purposes. The fund in question is not an endowment fund that will continue to generate interest income, but funds that will run out in line with investment activities in property assets and land compensation payment activities.

In achieving the intended strategic goals, LMAN has 3 (three) KPIs which can be seen in the following table:

Kode / Code	Indikator Kinerja / Performance Indicator	Tingkat kendali / Control Level	Target Tahun 2022 / Year 2022 Target	Realisasi Tahun 2022 / Year 2022 Realization	Kinerja / Performance
1	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Akuntabel dan Produktif / Accountable and Productive State Asset Management				114.57%
1a-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara / Percentage of Actual State Revenue from State Asset Management	P/M	100.00%	122.69%	120.00%
1b-CP	Indeks Kualitas LKPP Lingkup DJKN / Quality Index of LKPP in DJKN	P/M	4.00	4.00	120.00%
1a-CP	Indeks Efektifitas Investasi Pemerintah / Indeks Efektifitas Investasi Pemerintah	P/M	4.50	4.67	103.70%

1a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara

Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara merupakan realisasi PNBP yang diperoleh sebagai imbalan atas barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat, termasuk pendapatan yang berasal dari hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain, sewa, dan pendapatan yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan BLU, termasuk PNBP dari aktivitas pengelolaan kas yang dilakukan untuk dana yang diinvestasikan pada LMAN untuk tujuan manajemen properti dan pendanaan pengadaan lahan. Dana dimaksud bukan merupakan dana abadi yang akan terus menerus menghasilkan pendapatan bunga, namun dana yang akan habis seiring dengan aktivitas investasi pada aset properti serta aktivitas pembayaran uang ganti rugi lahan. Periode pengukuran IKU ini dari 1 Januari s.d. 31 Desember 2022.

1a-CP Percentage of Realized State Revenue from Management of State Assets

Realization of State Revenue from State Asset Management is the realization of PNBP obtained as compensation for goods/services delivered to the community, including income from grants, cooperation with other parties, rents, and income that is not directly related to BLU services, including PNBP from cash management activities carried out for funds invested in LMAN for the purpose of property management and financing of land acquisition. The fund in question is not an endowment fund that will continue to generate interest income, but funds that will run out in line with investment activities in property assets and land compensation payment activities. The KPI measurement period is from 1 January to 31 December 2022.

Tahun 2022, LMAN menargetkan penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara sebesar Rp1.717.709.000.000,00. Realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp2.107.498.813.398,00 berupa:

In 2022, LMAN targets state revenue from state asset management of Rp1,717,709,000,000.00. Realization of state revenue from management of state assets up to 31 December 2022 amounted to Rp2,107,498,813,398.00 in the form of:

No.	Unit	Target 2022	Realisasi s.d. 31 Desember 2022	Indeks Capaian	
				31 Desember 2022	Y (mac. 120%)
1	Kilang	428.630.000.000	752.551.033.346,01	175,57%	120,00%
2	Property	46.870.000.000	54.331.975.580	115,92%	115,92%
3	Advisory	600.000.000	1.684.974.362	280,83%	120,00%
	Total	**476.100.000.000**	**808.567.983.288**	**169,83%**	**120,00%**
4	Treasury	1.241.609.000.000	1.298.930.830.110	104,62%	104,62%
	Total	**1.717.709.000.000**	**2.107.498.813.398**	**122,69%**	**120,00%**

1b-CP Indeks Kualitas LKPP Lingkup DJKN

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) lingkup DJKN meliputi: Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) 999.03 Investasi Pemerintah.

Indeks diukur dari ada atau tidaknya kontribusi temuan LKPP diukur dalam indeks 1-4 dengan rincian sebagai berikut:

1 = Tidak Wajar (*Adverse*)
2 = Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer*)
3.00 = Wajar dengan Pengecualian (WDP) dengan 6 pengecualian atau lebih
3.25 = WDP dengan 5 pengecualian
3.50 = WDP dengan 3 s.d. 4 pengecualian
3.75 = WDP dengan 1 s.d. 2 pengecualian
4 = Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau WTP-DPP (Dengan Paragraf Penjelasan)

Sampai dengan triwulan IV 2022, realisasi sebesar 4 (WTP) dari skala 4 sehingga indeks capaian IKU sebesar 120% (Konversi 120).

IKU Indeks Kualitas LKPP lingkup DJKN pada tahun 2022 memiliki besaran target yaitu 4 (skala 4). Hal ini sejalan dengan indikator Sasaran Program pada Rencana Strategis Kementerian Keuangan tahun 2020 sampai dengan 2024, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 77/PMK.01/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024.

1c-CP Indeks Efektivitas Investasi Pemerintah

Pengelolaan investasi pemerintah merupakan wujud pelaksanaan fungsi Menteri Keuangan sebagai *ultimate shareholder*, agar pengelolaan investasi pemerintah dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang optimal mendukung tujuan pembangunan.

IKU Indeks Efektivitas Investasi bertujuan untuk mengukur:

1b-CP Quality Index LKPP at DJKN

Government Goods/Services Procurement Policy Agency (LKPP) at DJKN includes: the State General Treasury Budget Section 999.03 Government Investment.

The index is measured by whether or not there is a contribution of LKPP findings measured in indexes 1-4 with the following details:

1 = Adverse Opinion
2 = Disclaimer of Opinion
3.00 = Qualified with 6 exceptions or more
3.25 = Qualified with 5 exceptions
3.50 = Qualified with 3 to 4 exceptions
3.75 = Qualified with 1 to 2 exceptions
4 = Unqualified or Unqualified with Explanatory Paragraph

Up to quarter IV 2022, realization as many as 4 Unqualified from the scale of 4 so that the index of Key Performance Indicator is as much as 120% (Conversion 120).

The KPI of the LKPP Quality Index within the DJKN scope in 2022 has a target size of 4 (scale 4). This is in line with the Program Target indicators in the Ministry of Finance's Strategic Plan for 2020 to 2024, in accordance with the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 77/PMK.01/2020 concerning the Ministry of Finance's Strategic Plan for 2020-2024.

1c-CP Government Investment Effectiveness Index

Government investment management is a form of implementing the function of the Minister of Finance as the ultimate shareholder, so that government investment management can provide optimal economic and social benefits to support development goals.

The Investment Effectiveness Index KPI is aimed to assess:

1.

Efektivitas penyediaan dukungan pemerintah pada berbagai program/kegiatan dan proyek infrastruktur melalui skema KPBU dan Non-KPBU/Penugasan pemerintah dan untuk mendorong percepatan penyediaan berbagai infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat dengan mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan melalui APBN;

Effectiveness in providing government support for various programs/activities and infrastructure projects through PPP and Non-PPP schemes/Government Assignments and to accelerate the provision of various infrastructure needed by the community by reducing dependence on financing through the State Budget;

2.

Tingkat keefektifan penggunaan PMN yang telah dikucurkan kepada BUMN/L dan kesesuaian dengan maksud dan tujuan pemberian, serta kinerja BUMN dan apakah penggunaan PMN tersebut memberikan manfaat sosial ekonomi. Dukungan pemerintah yang diberikan juga memiliki tujuan agar Pemda/BUMN/BUMD memiliki peningkatan kapasitas sehingga memiliki kredibilitas dan kepercayaan untuk mengikat kerja sama dengan badan usaha/investor dalam rangka pelaksanaan berbagai proyek atau program untuk penyediaan fasilitas umum, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan kemakmuran.

The level of effectiveness of the use of PMN that has been disbursed to BUMN/L and suitability with the intent and purpose of the provision, as well as the performance of BUMN and whether the use of PMN provides socio-economic benefits. The government support provided also aims to increase local government/ BUMN/BUMD capacity so that they have the credibility and trust to tie up cooperation with business entities/ investors in the context of implementing various projects or programs to provide public facilities, encourage economic growth, and distribute prosperity.

Penyaluran dana dari APBN di bidang investasi pemerintah dan pembiayaan lain secara optimal akan menopang pengelolaan investasi pemerintah secara berkelanjutan. Saat ini penyaluran dana tersebut digunakan untuk penerusan pinjaman, kredit program, dan subsidi. Penyediaan dana untuk investasi tersebut diharapkan dapat tepat sasaran sehingga memberikan manfaat ekonomi dan sosial kepada masyarakat secara optimal.

Optimum distribution of funds from the APBN in the field of government investment and other financing will support the management of government investment in a sustainable manner. Currently the distribution of these funds is used for continuing loans, program loans, and subsidies. Provision of funds for these investments is expected to be right on target so as to optimally provide economic and social benefits to the community.

IKU ini bertujuan untuk mengukur dampak sosial ekonomi dari suatu proyek pemerintah yang dijalankan oleh LMAN yang dananya bersumber dari investasi pemerintah. Dampak sosial ekonomi merupakan pengaruh terhadap keseluruhan aktivitas ekonomi pada suatu wilayah dari adanya suatu proyek/program. Pengukuran menggunakan metode *Input-Output* yang menghitung nilai tambah sosial dan ekonomi termasuk pendapatan tenaga kerja dengan cara membandingkan tingkat investasi dengan tingkat kembalian (*return*) yang dihasilkan dari investasi tersebut. Ini ditunjukkan dalam antara lain tingkat pengembalian, nilai pengganda ekonomi, dan lain-lain. Di samping itu, pengukuran efektivitas investasi pemerintah ini juga untuk mendapatkan nilai efek penggandaan baik dari sisi *output*, tenaga kerja, pendapatan masyarakat, dan efek penggandaan lain dari hasil kegiatan optimalisasi atas aset yang diukur.

This KPI aims to measure the socio-economic impact of a government project run by LMAN whose funds come from government investment. Socio-economic impact is the influence on the overall economic activity in an area from the existence of a project/program. The measurement uses the Input-Output method which calculates social and economic added value including labor income by comparing the level of investment with the rate of return generated from the investment. This is shown in, among other things, the rate of return, the value of the economic multiplier, and so on. In addition, measuring the effectiveness of government investment is also to obtain a multiplier effect value in terms of output, employment, community income, and other multiplier effects from the results of optimization activities on the assets being measured.

Target indeks efektivitas investasi dan pembiayaan proyek pemerintah tahun 2022 sejalan dengan target indikator kinerja pada Rencana Strategis Kementerian Keuangan tahun 2020 sampai 2024 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024.

The 2022 government project investment and financing effectiveness index target is in line with the performance indicator targets in the Ministry of Finance's Strategic Plan for 2020 to 2024 in accordance with the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 77/PMK.01/2020 concerning the Ministry of Finance's Strategic Plan for 2020-2024.

Pada LMAN, IKU dimaksud memiliki trajektori tahunan dengan polarisasi *maximize* dan konsolidasi TLK. Pada tahun 2022, telah diukur dampak sosial ekonomi dari 3 (tiga) proyek yang dikelola oleh BLU LMAN. Nilai indikasi dari 3 (tiga) proyek tersebut adalah sebagai berikut:

In LMAN, KPI is referred to as having an annual trajectory with maximized TLK polarization and consolidation. In 2022, the socio-economic impacts of 3 (three) projects managed by BLU LMAN have been measured. Indicative values of the 3 (three) projects are as follows:

No.	Proyek	Nilai Indikasi	Kategori
1	Aset Dipati Ukur 33	5	Sangat Efektif / Very Effective
2	Aset Kebayoran Lama 174	5	Sangat Efektif / Very Effective
3	Aset Panglima Polim 20	4	Efektif / Effective
	Rata-rata / Average	**4,67**	**Efektif** / Effective

Rata-rata capaian efektivitas investasi pemerintah sebesar 4,67 dari skala 5 dengan kategori efektif. Capaian indeks sebesar 4,67 tersebut melampaui target yang ditetapkan sebesar indeks 4,5 (skala 5), sehingga disimpulkan investasi pemerintah adalah efektif. Pengukuran efektivitas investasi dilakukan terhadap dampak sosial dan ekonomi atas program/proyek yang dilakukan oleh BLU LMAN dengan ruang lingkup yang diukur adalah Dipati Ukur 33, Kebayoran Lama 174, dan Panglima Polim 20.

The average achievement of government investment effectiveness is 4.67 on a scale of 5 with the effective category. The index achievement of 4.67 exceeded the target set at index 4.5 (scale 5), so it was concluded that government investment was effective. Measurement of investment effectiveness is carried out on the social and economic impacts of programs/projects carried out by BLU LMAN with the scope that is measured is the asset at Dipati Ukur 33, Kebayoran Lama 174, and Panglima Polim 20.

Realisasi pengukuran efektivitas investasi pemerintah atas aset yang dikelola oleh LMAN, masing-masing Aset Dipati Ukur 33, Aset Kebayoran Lama 174, dan Aset Panglima Polim 20 menunjukkan tingkat efektivitas investasi di atas 10%, sehingga dapat dinyatakan aset telah dikelola secara efektif. Pertimbangan yang dilakukan meliputi aspek ekonomi dan sosial, seperti finansial, pajak, tenaga kerja, emisi, dan pengeluaran operasional. Pertimbangan dalam hal ini adalah benefit dan cost masing-masing aspek.

Realization of measuring the effectiveness of government investment on assets managed by LMAN, each LPDP Building and the Building on Jalan Gereja Ayam shows an investment effectiveness level of above 10%, so that it can be stated that the assets have been managed effectively. Considerations include economic and social aspects, such as finance, taxes, labor, emissions, and operational expenses. The considerations in this case are the benefits and costs of each aspect.

B. Sasaran Strategis 2: Pendanaan Lahan yang Optimal dan Akuntabel

Percepatan pembangunan infrastruktur merupakan salah satu kebijakan umum pembangunan nasional sesuai Nawacita dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Sesuai UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan tersedianya lahan bagi pembangunan untuk kepentingan umum, termasuk jalan tol yang merupakan Proyek Strategis Nasional. Terlebih lagi, tersedianya lahan merupakan salah satu variabel yang menunjukkan tingkat kesiapan proyek.

Pendanaan lahan merupakan kegiatan yang meliputi perencanaan pendanaan lahan dan perencanaan penganggaran sampai pembayaran dana talangan kepada badan usaha serta pembayaran langsung dari LMAN kepada pihak yang berhak. Proyek Strategis Nasional adalah proyek yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2016 sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2020 tentang Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan PMK Nomor 139/ PMK.06/2020 tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Proyek Strategis Nasional oleh Lembaga Manajemen Aset Negara.

B. Strategic Goal 2: Optimal and Accountable Land Funding

The acceleration of infrastructure development is one of the general national development policies according to the Nawacita and the 2015-2019 National Medium Term Development Plan (RPJMN). In accordance with Law Number 2 of 2012 concerning Land Acquisition for Public Interests, the government has an obligation to ensure the availability of land for development in the public interest, including toll roads which are National Strategic Projects. What's more, the availability of land is one of the variables indicating the level of project readiness.

Land funding is an activity that includes land funding planning and budgeting planning up to payment of bailout funds to business entities and direct payments from LMAN to entitled parties. National Strategic Projects are projects implemented by the government, regional governments, and/or business entities that have a strategic nature for increasing growth and equitable development in order to improve community welfare and regional development as referred to in Presidential Regulation Number 3 of 2016 as amended by Regulation Presidential Regulation Number 102 of 2016 as replaced by Presidential Regulation Number 66 of 2020 concerning Land Acquisition Funding for Development for Public Interests in the Context of Implementing National Strategic Projects and PMK Number 139/PMK.06/2020 concerning Procedures for Funding Land Acquisition for National Strategic Projects by the State Asset Management Agency.

Dalam mencapai sasaran strategis dimaksud, LMAN memiliki 2 (dua) IKU yang dapat dilihat di tabel berikut:

In achieving the intended strategic goals, LMAN has 2 (two) KPIs which can be seen in the following table:

Kode / Code	Indikator Kinerja / Performance Indicator	Tingkat kendali / Control Level	Target Tahun 2022 / Year 2022 Target	Realisasi Tahun 2022 / Year 2022 Realization	Kinerja / Performance
	Stakeholder Perspective (25%)				26,89%
2	Pendanaan Lahan yang Optimal dan Akuntabel / Optimal and Accountable Land Funding				100,56%
2a-N	Indeks Kualitas Pendanaan Lahan / Land Finance Quality Index	P/M	72,00%	80,55%	111,88%
2b-N	Persentase Penyerapan Dana Pengadaan Lahan PSN / Percentage of Absorption of Land Acquisition Funds PSN	P/M	100,00%	89,25%	89,25%

Penjelasan Capaian:

2a-N Indeks Kualitas Pendanaan Lahan

Tingkat kualitas pendanaan lahan diukur melalui tingkat ketepatan waktu penyelesaian pendanaan lahan untuk kepentingan Proyek Strategis Nasional sesuai dengan norma waktu dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Pengukuran IKU ini secara lebih spesifik menggunakan indeks sebagai berikut:

Rata-rata capaian indeks kualitas pendanaan lahan tahun 2022 adalah sebesar 80,55 dari target indeks sebesar 72,00. Capaian indeks sebesar 80,55 tersebut berasal dari 1.506 surat persetujuan dengan jumlah surat yang tepat waktu terdapat 1.292 surat sesuai SOP 10 hari kerja.

Berikut ini adalah perbandingan antara target dan realisasi tahun 2020 sampai 2022:

Achievement Explanation:

2a-N Land Finance Quality Index

The level of quality of land funding is measured through the level of timely completion of land funding for the benefit of the National Strategic Project in accordance with the time norms and provisions in laws and regulations.

This KPI measurement more specifically uses the following index:

The average achievement of the quality index of land funding in 2022 is 80.55 from the target index of 72.00. The index achievement of 80.55 came from 1,506 letters of approval with the number of letters that were on time; there were 1,292 letters according to the 10 working day SOP.

The following is a comparison between the target and the realization for 2020 to 2022:

2020		2021		2022	
Target / Target	**Realisasi** / Realization	**Target** / Target	**Realisasi** / Realization	**Target** / Target	**Realisasi** / Realization
70,00	76,79	72,00	78,80	72,00	80,55

2b-N Persentase Penyerapan Dana Pengadaan Lahan PSN

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.02/2020 dan surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-67/KN/2021 bahwa Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (PPA BUN) Pengelolaan Investasi Pemerintah (Bagian Anggaran 999.03) perlu melakukan pemantauan dan evaluasi atas kinerja Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, dalam hal ini pemantauan dan evaluasi kinerja atas penggunaan dana investasi pemerintah untuk pendanaan pengadaan lahan Proyek Strategis Nasional yang dialokasikan kepada LMAN. Alokasi Dana Pendanaan Pengadaan Lahan Proyek Strategis Nasional (PSN) sebesar Rp105,668 triliun sampai dengan 31 Desember 2022 telah dilakukan pendanaan pengadaan lahan atas 106 PSN yang terdiri dari 52 proyek jalan tol, 37 proyek bendungan, 9 proyek jalur kereta api, 1 proyek pelabuhan, 5 proyek daerah irigasi, 1 proyek Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan 1 proyek air baku. Atas realisasi tersebut, total telah dibebaskan berupa 165.918 bidang tanah dengan luas 270.988.042 m2.

2b-N Percentage of Absorption of PSN Land Acquisition Funds

In accordance with the Regulation of the Minister of Finance Number 91/PMK.02/2020 and the Director General of State Assets Letter Number S-67/KN/2021 that the Helper of the State General Treasurer's Budget User Government Investment Management (Budget Section 999.03) needs to carry out monitoring and evaluation on the performance of the State General Treasurer's Budget Section, in this case monitoring and evaluation of performance on the use of government investment funds to fund land acquisition for National Strategic Projects allocated to LMAN. Funding allocation for Land Acquisition Funding for National Strategic Projects of Rp105.668 trillion as of 31 December 2022 has been funded for land acquisition for 106 National Strategic Projects consisting of 52 toll road projects, 37 dam projects, 9 railroad projects, 1 port project , 5 irrigation area projects, 1 National Tourism Strategic Area project and 1 raw water project. Due to this realization, a total of 165,918 plots of land with an area of 270,988,042 m2 have been acquired.

Realisasi penyerapan dana pengadaan lahan Proyek Strategis Nasional sebagai berikut:

Realization of absorption of National Strategic Project land procurement funds as follows:

No.	Sektor / Sector	Realisasi Pendanaan / Funding Realization (Rp)	Output	
			Bidang / Area	Luas / Width (m^2)
1	Jalan Tol / Toll Road	89.879.259.218.786	114.636	155.413.744
2	Bendungan / Dam	11.361.747.171.241	37.401	99.643.627
3	Irigasi / Irrigation	590.579.156.327	6.216	5.391.441
1	Kereta Api / Train	1.898.051.211.117	6.691	7.234.193
2	Pelabuhan / Harbor	798.800.004.749	585	3.022.045
3	KSPN / KSPN	85.240.078.071	29	65.267
2	Air Baku / Raw Water	54.375.779.400	329	203.216
	Total	**105.668.052.619.691**	**165.918**	**270.988.042**

C. Sasaran Strategis 3: Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi

C. Strategic Goal 3: High Service User Satisfaction

Upaya maksimal untuk memberikan pelayanan terbaik kepada *stakeholder, customer,* maupun pihak internal LMAN senantiasa dilakukan dari tahun ke tahun. Pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang diselesaikan dengan tepat waktu dan menghasilkan *output* yang diinginkan oleh *stakeholder, customer,* maupun pihak *internal*. Pelayanan yang diberikan meliputi pelayanan pembayaran lahan Proyek Strategis Nasional, konsultasi, analisis *High and Best Use* (HBU), dan pendayagunaan aset.

Dalam mencapai sasaran strategis dimaksud, LMAN memiliki 1 (satu) IKU yang dapat dilihat di tabel berikut:

Maximum efforts to provide the best service to stakeholders, customers, and internal LMAN parties are always made from year to year. Quality services are services that are completed in a timely manner and produce the desired output by stakeholders, customers, and internal parties. The services provided include land payment services for National Strategic Projects, consulting, High and Best Use (HBU) analysis, and asset utilization.

In achieving the intended strategic goals, LMAN has 1 (one) KPI which can be seen in the following table:

Kode / Code	Indikator Kinerja / Performance Indicator	Tingkat kendali / Control Level	Target Tahun 2022 / Year 2022 Target	Realisasi Tahun 2022 / Year 2022 Realization	Kinerja / Performance
	Customer Perspective (15%)				16,01%
3	**Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi** / High Service User Satisfaction				106,75%
3a-N	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan / Service User Satisfaction Index	E/M	4,15	4,43	106,75%

Penjelasan Capaian:

3a-N Indeks Kepuasan Pengguna Layanan

IKU ini mengukur nilai kepuasan pengguna atas layanan unggulan LMAN terhadap pihak eksternal. Lingkup survei adalah pengguna atas seluruh pelayanan LMAN kepada pihak eksternal. Pada tahap

Achievement Explanation:

3a-N Service User Satisfaction Index

This KPI measures the value of user satisfaction with LMAN's superior services to external parties. The scope of the survey is users of all LMAN services to external parties. In the early stages of its birth as

awal kelahiran sebagai organisasi, LMAN memfokuskan perhatian dan kepuasan pada *stakeholder* dalam rangka mendapat dukungan teknis dan nonteknis.

IKU ini diukur atas kualitas layanan unggulan LMAN yang diperoleh dari survei independen yang dikoordinasikan oleh Direktorat Pengembangan dan Pendayagunaan.

Guna mengukur tingkat kepuasan terhadap layanan yang diberikan oleh LMAN, telah dilakukan survei kepada responden secara *sampling* khususnya dari Direktorat Operasional dan Manajemen Risiko, Direktorat Pengadaan dan Pendanaan Lahan dan Direktorat Pengembangan dan Pendayagunaan kepada *stakeholders* yang menerima pelayanan. Berdasarkan survei, diperoleh hasil 4,43 dari skala 5 yang berasal dari hasil survey Tim Konsultan.

Berikut ini adalah perbandingan antara target dan realisasi tahun 2020 sampai 2022:

an organization, LMAN focused its attention and satisfaction on stakeholders in order to receive technical and non-technical support.

This KPI is measured by the quality of LMAN's superior services obtained from an independent survey coordinated by the Directorate of Development and Utilization.

In order to measure the level of satisfaction with the services provided by LMAN, a survey has been carried out on respondents by sampling, especially from the Directorate of Operations and Risk Management, Directorate of Land Procurement and Funding and Directorate of Development and Utilization of stakeholders who receive services. Based on the survey, the results obtained were 4.43 out of a scale of 5 which came from the results of the Consultant Team survey.

The following is a comparison between the target and the realization for 2020 to 2022:

2020		2021		2022	
Target / Target	**Realisasi** / Realization	**Target** / Target	**Realisasi** / Realization	**Target** / Target	**Realisasi** / Realization
4,00	4,33	4,13	4,41	4,15	4,43

D. Sasaran Strategis 4: Manajemen Pelayanan yang Berkualitas

Kemampuan organisasi dalam memberikan pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dengan standar yang telah ditetapkan dan berkualitas. Kemampuan tersebut ditunjukkan oleh sumber daya manusia dan sarana serta prasarana yang dimiliki.

Dalam mencapai sasaran strategis dimaksud, LMAN memiliki 2 (dua) IKU yang dapat dilihat di tabel berikut:

D. Strategic Target 4: Quality Service Management

The ability of the organization to provide services that can provide satisfaction to customers with predetermined standards and quality. This capability is shown by the human resources and facilities and infrastructure owned.

In achieving the intended strategic goals, LMAN has 2 (two) KPIs which can be seen in the following table:

Kode / Code	Indikator Kinerja / Performance Indicator	Tingkat kendali / Control Level	Target Tahun 2022 / Year 2022 Target	Realisasi Tahun 2022 / Year 2022 Realization	Kinerja / Performance
	Internal Process Perspective (30%)				36,00%
4	**Manajemen Pelayanan yang Berkualitas** / Qualified Service Management				120,00%
4a-N	Persentase Pelaksanaan *Project Advisory* Pengelolaan Aset / Percentage of Asset Management Project Advisory Implementation	P/M	100,00%	133,33%	120,00%
4b-N	Persentase Tindak Lanjut dari Pelaksanaan *Project Advisory* Pengelolaan Aset / Percentage of Follow-up from the Implementation of Asset Management Project Advisory	P/M	100,00%	200,00%	120,00%

Penjelasan Capaian:

4a-N Persentase Pelaksanaan *Project Advisory* Pengelolaan Aset

IKU ini mengukur realisasi penyelesaian jasa konsultansi (*advisory*) terkait pengelolaan aset kepada mitra yang membutuhkan konsultansi pengelolaan aset terkait aset yang dikelolanya, dengan contoh mitra Kementerian/Lembaga dan Badan Layanan Umum dengan periode pengukuran 1 Januari 2022 s.d. 31 Desember 2022.

Target penyelesaian jasa konsultansi (*advisory*) pada tahun 2022 adalah sebanyak 9 (sembilan) proyek jasa konsultansi. Adapun realisasinya, pada 2022 LMAN dapat menyelesaikan sebanyak 12 (dua belas) proyek jasa konsultansi dari berbagai mitra sebagai berikut:

Achievement Explanation:

4a-N Percentage of Implementation of Project Advisory Asset Management

This KPI measures the realization of the completion of consulting services (advisory) related to asset management to partners who need asset management consultancy related to the assets they manage, with the example of Ministry/Institution and Public Service Agency partners with a measurement period from 1 January 2022 to 31 December 2022.

The target for completion of consulting services (advisory) in 2022 is a total of 9 (nine) consulting service projects. As for the realization, in 2022 LMAN can complete as many as 12 (twelve) consulting service projects from various partners as follows:

No.	Nama Mitra / Partners	Uraian Pekerjaan / Job Description
1	**RSUD Persahabatan**	**Analisis HBU atas aset RSUP Persahabatan berupa sebidang tanah seluas 30.191 m²** / Highest and Best Use (HBU) Analysis of the RSUP Persahabatan asset in the form of a land of 30,191 m²
2	**BLU BBKFP**	**Analisis FS Pengembangan Hanggar MRO atas aset BLU BBKFP Berupa Tanah** / Financial Statement (FS) analysis of the development of MRO hangar on the BLU BBKFP asset in the form of a land
3	**BLU BBKFP**	**Analisis HBU atas aset BLU BBKFP berupa tanah** / HBU Analysis of the BLU BBKFP asset in the form of a land
4	**Bank Indonesia**	**Analisis HBU atas aset perkebunan milik Bank Indonesia di jalan Pasir Muncang Bogor** / HBU Analysis of the plantation asset owned by Bank Indonesia at Jalan Pasir Muncang Bogor
5	**Bank Indonesia**	**Analisis HBU Aset Eks Gedung Kantor Bank Indonesia di Jl. Sultan Hasanudin, Kendari, Sulawesi Tenggara** / HBU Analysis of the ex Bank Indonesia Office Building asset at Jalan Sultan Hasanudin, Kendari, Southeast Sulawesi
6	**Bank Indonesia**	**Analisis FS Aset Bank Indonesia di Jl. Juanda DKI Jakarta** / FS analysis of the Bank Indonesia asset at Jalan Juanda DKI Jakarta
7	**BPKAD Batam**	**Analisis FS atas rencana optimalisasi Aset Pemkot Batam berupa TPA Telaga Punggur** / FS analysis of the plan for optimizing the asset of Batam city government in the form of TPA Telaga Punggur
8	**BPKAD Batam**	**Analisis FS atas rencana Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Bank Riau Kepri** / FS analysis of the plan for local government equity participation to Bank Riau Kepri
9	**PPK GBK**	**Analisis Highest and Best Use atas Aset Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno yang terletak di Lahan Blok 10 PPKGBK (IMS)** / HBU Analysis of the management center asset of the Gelora Bung Karno complex at Lahan Blok 10 PPKGBK (IMS)

10	PPK GBK	**Analisis Highest and Best Use atas Aset Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno yang terletak di Lahan Blok 14 PPKGBK (JCC)** / HBU Analysis of the management center asset of the Gelora Bung Karno complex at Lahan Blok 14 PPKGBK (JCC)
11	PPK GBK	**Analisis Highest and Best Use atas Aset Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno yang terletak di Lahan Blok 18 PPKGBK (Hotel Atlet Century)** / HBU Analysis of the management center asset of the Gelora Bung Karno complex at Lahan Blok 18 PPKGBK (Hotel Atlet Century)
12	PPK GBK	**Analisis Highest and Best Use atas Aset Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno yang terletak di Lahan Blok 24 PPKGBK (Restaurant Pulau Dua)** / HBU Analysis of the management center asset of the Gelora Bung Karno complex at Lahan Blok 24 PPKGBK (Restaurant Pulai Dua)

Berikut ini adalah perbandingan antara target dan realisasi tahun 2020 sampai 2022:

The following is a comparison between the target and the realization from 2020 to 2022:

2020		2021		2022	
Target / Target	**Realisasi** / Realization	**Target** / Target	**Realisasi** / Realization	**Target** / Target	**Realisasi** / Realization
100,00% (6 Proyek)	150,00% (9 Proyek)	100,00% (8 Proyek)	150,00% (12 Proyek)	100,00% (9 Proyek)	120,00% (12 Proyek)

Pemeriksaan konstruksi Stasiun Kereta Api Garongkong Makassar
/ Construction Inspection at Garongkong Makassar Railway Station

4b-N Persentase Tindak Lanjut dari Pelaksanaan Project Advisory Pengelolaan Aset

IKU ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan *project advisory* (*arranger*) dengan mempertemukan pemilik aset dengan mitra atau aset mitra yang dikerjasamakan dengan Entitas.

Target penyelesaian tindak lanjut dari pelaksanaan *project advisory* (*arranger*) pada 2022 adalah sebanyak 2 (dua) proyek. Adapun realisasinya, pada 2022 LMAN dapat menyelesaikan sebanyak 4 (empat) proyek *arranger* dari berbagai mitra sebagai berikut:

4b-N Percentage of Follow-up from the Implementation of the Project Advisory Asset Management

This KPI is a follow-up to the implementation of project advisory (arranger) by bringing together asset owners with partners or partner assets that are collaborated with the Entity.

The follow-up completion target for the implementation of the project advisory (arranger) in 2022 is 2 (two) projects. As for the realization, in 2022 LMAN can complete as many as 4 (four) arranger projects from various partners as follows:

No.	Nama Mitra / Partners	Uraian Pekerjaan / Job Description
1	**PPK Kemayoran**	**Pendampingan Penyusunan Perdirut Tata Cara Pemilihan Mitra KSO** / Assisting in preparing the President Director's regulations on the procedures for KSO partner selection
2	**Hutama Karya**	**Penyusunan Review SOP Kerja Sama dengan Mitra Perusahaan PT HK** / Preparing the SOP review in collaboration with PT HK company partners
3	**Hutama Karya**	**Pendampingan Penyusunan Dokumen Persiapan Tender Optimalisasi Aset Kelolaan PT HK** / Assisting in preparing tender preparation documents for optimizing assets under PT HK management
4	**Hutama Karya**	**Pendampingan Kegiatan Pencarian Mitra Kerja Sama PT HK** / Assisting in the search for cooperation partners for PT HK

Berikut ini adalah perbandingan antara target dan realisasi tahun 2021 dan 2022:

The following is a comparison between the targets and realization for 2021 and 2022:

2021		2022	
Target / Target	**Realisasi** / Realization	**Target** / Target	**Realisasi** / Realization
100,00% (1 Proyek)	120,00% (1 Proyek)	100,00% (2 Proyek)	120,00% (4 Proyek)

Proses pengelolaan aset Slamet Riyadi
/ Slamet Riyadi Asset management process

E. Sasaran Strategis 5: Tata Kelola Aset yang Efektif

Tata kelola aset yang akuntabel adalah sistem/cara organisasi dalam mengelola aset yang dimilikinya agar dapat memberikan manfaat yang optimal dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam mencapai sasaran strategis dimaksud, LMAN memiliki 4 (empat) IKU yang dapat dilihat di tabel berikut:

E. Strategic Target 5: Effective Asset Governance

Accountable asset governance is an organizational system/way of managing its assets so that it can provide optimal benefits and can be accounted for in accordance with applicable laws and regulations.

In achieving the intended strategic goals, LMAN has 4 (four) KPIs which can be seen in the following table:

Kode / Code	Indikator Kinerja / Performance Indicator	Tingkat kendali / Control Level	Target Tahun 2022 / Year 2022 Target	Realisasi Tahun 2022 / Year 2022 Realization	Kinerja / Performance
	Internal Process Perspective (30%)				36,00%
5	**Tata Kelola Aset yang Efektif** / Effective Asset Governance				120,00%
5a-N	Persentase Penyelesaian Aset Kelola yang Diperbaiki / Direnovasi / Percentage of Completion of Repaired/Renovated Assets Under Management	P/M	80,00%	97,27%	120,00%
5b-CP	Persentase Penyelesaian Program IS LMAN / Percentage of Completion of the IS LMAN Program	P/M	92,00%	120,00%	120,00%
5c-N	Jumlah Penyelesaian Serah Kelola Aset Baru / The Number of Completion of the New Asset Handover	P/L	100,00%	140,00%	120,00%
5d-N	Indeks Implementasi Pemanfaatan Aset untuk Kepentingan Sosial Ekonomi / Index of Implementation of Asset Utilization for Socio-Economic Interests	P/M	80,00%	100,00%	120,00%

Penjelasan Capaian:

5a-N Persentase Penyelesaian Aset Kelolaan yang Diperbaiki / Direnovasi

Persentase penyelesaian aset kelolaan yang diperbaiki/direnovasi adalah pengukuran penyelesaian tahapan kegiatan atau tindakan dalam rangka meningkatkan kualitas aset, sehingga aset yang telah diserahkelolakan kepada LMAN siap untuk didayagunakan dalam rangka optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan penghematan biaya bagi negara.

Aset-aset yang dilakukan renovasi pada tahun 2022 ada 16 (enam belas) aset sebagai berikut:

Achievement Explanation:

5a-N Percentage of Completion of Repaired/Renovated Assets Under Management

The percentage of completion of repaired/renovated assets under management is a measurement of completion of stages of activities or actions in order to improve asset quality, so that assets that have been handed over to LMAN are ready to be utilized in order to optimize Non-Tax State Revenue (PNBP) and save costs for the state.

There are 16 (sixteen) assets that will be renovated in 2022 as follows:

No.	Uraian / Description	Progres Renovasi / Renovation Progress
1	Renovasi Unit Apartemen Hayam Wuruk 11107 / Renovation of Unit Apartment Hayam Wuruk 11107	100,00%
2	Renovasi Unit Apartemen Hayam Wuruk 1610 / Renovation of Unit Apartment Hayam Wuruk 1610	100,00%
3	Renovasi Unit Apartemen Hayam Wuruk 2308 / Renovation of Unit Apartment Hayam Wuruk 2308	100,00%
4	Renovasi Gedung Panglima Polim 55 / Renovation of Gedung Panglima Polim 55	100,00%
5	Renovasi Unit Ruko Cengkareng Blok E No. 6 / Renovation of Unit Ruko Cengkareng Block E No. 6	100,00%
6	Renovasi Unit Ruko Cengkareng Blok D No. 12 / Renovation of Unit Ruko Cengkareng Block D No. 12	100,00%
7	Renovasi Unit Ruko Cengkareng Blok D No. 14 / Renovation of Unit Ruko Cengkareng Block D No. 14	100,00%
8	Renovasi Unit Ruko Cengkareng Blok D No. 16 / Renovation of Unit Ruko Cengkareng Block D No. 16	100,00%
9	Renovasi Unit Apartemen Mitra Bahari A0515 / Renovation of Unit Apartment Mitra Bahari A0515	100,00%
10	Renovasi Unit Apartemen Mitra Sunter 0405 / Renovation of Unit Apartment Mitra Sunter 0405	100,00%
11	Renovasi Unit Apartemen Puri Kemayoran 125 I / Renovation of Unit Apartment Puri Kemayoran 125 I	100,00%
12	Renovasi Unit Apartemen Puri Casablanca A22.01 / Renovation of Unit Apartment Puri Casablanca A22.01	91,25%
13	Renovasi Unit Apartemen Puri Casablanca A22.06 / Renovation of Unit Apartment Puri Casablanca A22.06	91,25%
14	Renovasi Unit Apartemen Puri Casablanca A28.06 / Renovation of Unit Apartment Puri Casablanca A28.06	91,25%
15	Renovasi Unit Apartemen Puri Casablanca A28.07 / Renovation of Unit Apartment Puri Casablanca A28.07	91,25%
16	Renovasi Unit Apartemen Puri Casablanca A20.06 / Renovation of Unit Apartment Puri Casablanca A20.06	91,25%

Berikut ini adalah perbandingan antara target dan realisasi tahun 2020 dan 2022:

The following is a comparison between the targets and the realization for 2020 and 2022:

2021		2022	
Target / Target	**Realisasi** / Realization	**Target** / Target	**Realisasi** / Realization
75%	100,00% (10 aset)	80,00% (16 Proyek)	97,27,00% (16 Proyek)

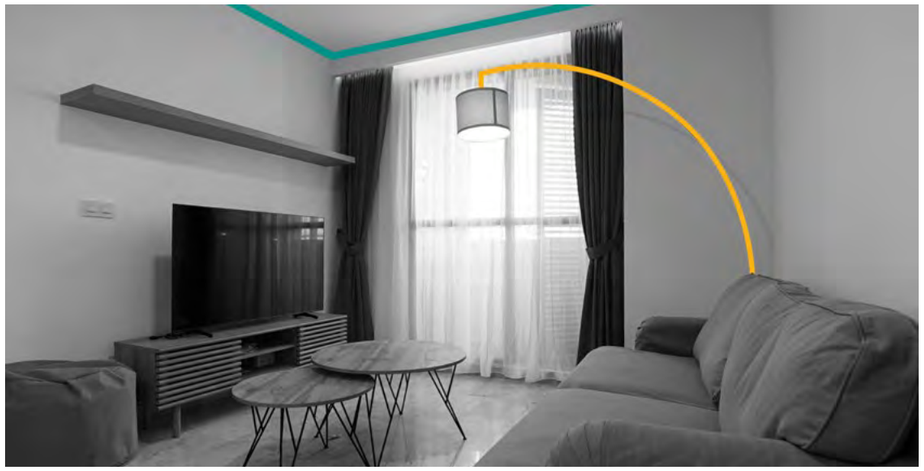

Aset Apartemen Hayam Wuruk
/ Hayam Wuruk Apartement Asset

5b-CP Persentase Penyelesaian Program Inisiatif Strategis LMAN

Transformasi Digital merupakan bagian dari misi Kementerian Keuangan yang sesuai dengan perkembangan industri 4.0 dan perkembangan ekonomi digital yang pesat beberapa tahun mendatang. Kementerian Keuangan perlu memperkuat program Reformasi dan Transformasi Kelembagaan yang berfokus pada tema digital.

LMAN terlibat dalam satu Inisiatif Strategis yakni pengembangan *platform* Aset Indonesia (AESIA).

Sumber data IKU ini adalah Laporan progress implementasi Inisiatif Strategis Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan.

Berikut ini adalah perbandingan antara target dan realisasi tahun 2021 dan 2022:

5b-CP Percentage of Completion of Strategic Initiative Programs

Digital Transformation is part of the Ministry of Finance's mission in line with the development of industry 4.0 and the rapid development of the digital economy in the coming years. The Ministry of Finance needs to strengthen the Institutional Reform and Transformation program that focuses on digital themes.

LMAN is involved in a Strategic Initiative, namely the development of the Indonesian Assets platform (AESIA).

The source of this KPI data is a progress report on the implementation of the Strategic Initiative for Bureaucratic Reform and Institutional Transformation.

The following is a comparison between the targets and realization for 2021 and 2022:

2021		2022	
Target / Target	**Realisasi** / Realization	**Target** / Target	**Realisasi** / Realization
100,00%	120,00%	100,00%	120,00%

5c-N Jumlah Penyelesaian Serah Kelola Aset Baru

Untuk mewujudkan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang lebih optimal sehingga dapat memberikan kontribusi lebih besar kepada negara maka BMN dimaksud perlu diserah kelolakan kepada LMAN untuk dikelola berdasarkan prinsip ekonomi yang fleksibel dan produktif serta menerapkan praktik bisnis yang sehat. Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 6/KN/2021 tentang Tata Cara Penyerahkelolaan Barang Milik Negara/Kekayaan Negara Lain pada Pengelola Barang kepada Lembaga Manajemen Aset Negara, perlu proses menetapkan suatu Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara tentang Penyerahkelolaan Barang Milik Negara.

Pada tahun 2022, LMAN menargetkan sebanyak 10 (sepuluh) aset dapat diserahkelolakan dari DJKN ke LMAN untuk pelaksanaan optimalisasi.

Pengukuran IKU ini berdasarkan jumlah aset yang diserahkelolakan ke LMAN dari Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara yang ditetapkan.

5d-N Indeks Implementasi Pemanfaatan Aset untuk Kepentingan Sosial EKonomi

Pengelolaan kekayaan negara dikatakan optimal apabila aset tersebut dapat memberikan manfaat yang tidak hanya pada aspek komersial akan tetapi juga memberikan manfaat pada aspek sosial yang mana pada pemanfaatan aset menjadi satu indikator yang utuh. Aspek non-komersial adalah penyerahan aset secara *free of charge* untuk dimanfaatkan pengguna. Pengukuran untuk pemanfaatan aset secara sosial adalah nilai aset dan segala biaya yang timbul dalam penyiapan aset sehingga terjadi penekanan biaya dan/atau penghindaran penggunaan anggaran negara (*cost saving*) yang menghasilkan nilai efek *multiplier* baik dari sisi output, tenaga kerja, pendapatan masyarakat, dan efek *multiplier* lain dari hasil kegiatan optimalisasi atas aset tersebut.

5c-N Number of Completion of Handover Manage New Assets

In order to realize a more optimal management of State Property (BMN) so that it can make a greater contribution to the state, the said BMN needs to be handed over to LMAN to be managed based on flexible and productive economic principles and implement sound business practices. In accordance with Regulation of the Director General of State Property Number 6/KN/2021 concerning Procedures for Handing Over Management of State Property/Other State Assets to Property Managers to State Asset Management Institutions, it is necessary to process a decision of the Director General of State Assets regarding Handover of State Property Management.

In 2022, LMAN targets as many as 10 (ten) assets to be handed over from DJKN to LMAN for optimization.

This KPI measurement is based on the number of assets handed over to LMAN from the stipulated Decree of the Director General of State Assets.

5d-N Asset Utilization Implementation Index for Socio-Economic Interests

Management of state assets is said to be optimal if these assets can provide benefits that are not only in the commercial aspect but also provide benefits in the social aspect in which the use of assets becomes a complete indicator. The non-commercial aspect is the free delivery of assets for users to use. The measurement for the social utilization of assets is the value of assets and all costs incurred in preparing assets resulting in cost suppression and/or avoidance of using the state budget (cost saving) which results in a value multiplier effect both in terms of output, labor, community income, and effects other multiplier from the results of optimization activities on these assets.

Pencapaian IKU ini menggunakan tahapan yang harus dilakukan sebagai berikut:

Achieving this KPI uses the following steps:

1. Penyusunan syarat & kriteria seleksi calon mitra – 30; / Preparation of terms & criteria for prospective partner selection – 30;
2. Pelaksanaan seleksi calon mitra & proses evaluasi – 50; / Implementation of prospective partner selection & evaluation process – 50;
3. Penyusunan draft kontrak Kerjasama – 80; / Preparation of cooperation contract draft – 80;
4. Penandatanganan kontrak Kerjasama – 90; / Cooperation contract signing – 90;
5. *Soft Launching* optimalisasi aset untuk sosial ekonomi – 100. / Soft Launching of asset optimization for socio-economy – 100.

Berikut ini adalah perbandingan antara target dan realisasi tahun 2021 dan 2022:

The following is a comparison between the targets and realization for 2021 and 2022:

2021		2022	
Target / Target	**Realisasi** / Realization	**Target** / Target	**Realisasi** / Realization
80,00%	100,00%	80,00%	100,00%

F. Sasaran Strategis 6: Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif

Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak internal maupun eksternal, yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan/kegiatan telah dilakukan sesuai dengan perencanaan dan mengikuti prosedur/ketentuan yang berlaku.

Pengendalian merupakan tindakan preventif dan korektif yang dilaksanakan apabila dari hasil pemantauan dan pengawasan ditemukan penyimpangan atau kendala.

Pengendalian dan pengawasan dapat dikatakan efektif apabila pengawasan dan pengendalian yang dilakukan mampu mendukung tercapainya tujuan organisasi.

Dalam mencapai sasaran strategis dimaksud, LMAN memiliki 2 (dua) IKU yang dapat dilihat di tabel berikut:

F. Strategic Target 6: Effective Oversight and Control

Supervision is an activity carried out by internal and external parties, which aims to ensure that the implementation of work/activities has been carried out in accordance with the plan and follows the applicable procedures/regulations.

Control is a preventive and corrective action that is carried out if deviations or obstacles are found from the results of monitoring and supervision.

Control and supervision can be said to be effective if the supervision and control carried out is able to support the achievement of organizational goals.

In achieving the intended strategic goals, LMAN has 2 (two) KPIs which can be seen in the following table:

Kode / Code	**Indikator Kinerja** / Performance Indicator	**Tingkat kendali** / Control Level	**Target Tahun 2022** / Year 2022 Target	**Realisasi Tahun 2022** / Year 2022 Realization	**Kinerja** / Performance
	Internal Process Perspective (30%)				36,00%
6	**Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif** / Effective Supervision and Control				120,00%
6a-CP	Persentase Temuan BPK atas LK BUN yang Ditindaklanjuti / Percentage of BPK Findings on LK BUN that were Followed Up	P/M	89,50%	100,00%	120,00%
6b-N	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti (Itjen) / Percentage of Supervisory Recommendations that were Followed Up (Inspectorate General)	P/M	97,00%	100,00%	120,00%

Penjelasan Capaian:

6a-CP Persentase Temuan BPK atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara yang Ditindaklanjuti

Tindak lanjut pemerintah terhadap rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK BUN) perlu diselesaikan sebagaimana direkomendasikan oleh BPK. Sesuai dengan pasal 20 UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan dan memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut dalam hasil pemeriksaan semester. Pemerintah tetap harus menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi BPK sampai tindak lanjut tersebut dinyatakan sesuai oleh BPK.

Kementerian Keuangan dan BPK telah mempunyai agenda rutin pembahasan tindak lanjut rekomendasi BPK pada semua LHP yang diterbitkan, termasuk LHP atas LKPP dan LKBUN. Pembahasan dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu bulan Januari dan Juli. Hasil pembahasan (setelah disetujui pimpinan BPK) akan menjadi isi Pemantauan Tindak Lanjut (PTL). PTL Semester I disampaikan BPK pada bulan September tahun berjalan. PTL Semester II disampaikan BPK pada bulan Maret tahun berikutnya.

Pengukuran penyelesaian rekomendasi adalah temuan yang telah selesai ditindaklanjuti terhadap rekomendasi BPK sebagaimana *action plan* dengan *time frame* yang ditetapkan pemerintah dengan menggunakan dua kriteria, yaitu:

1. Rekomendasi yang diusulkan sesuai merupakan rekomendasi yang diusulkan sesuai pada forum pembahasan bersama Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), BA BUN terkait, dan Inspektorat Jenderal;
   Recommendations that are proposed accordingly are recommendations that are proposed according to the discussion forum with the Directorate General of Treasury (DJPb), related BA BUN, and the Inspectorate General;
2. Rekomendasi yang sesuai merupakan rekomendasi yang dinyatakan sesuai tuntas oleh BPK dan tercantum dalam PTL LHP.
   Appropriate recommendations are recommendations that have been declared complete by BPK and listed in PTL LHP.

IKU Persentase rekomendasi BPK atas LKBUN yang ditindaklanjuti memiliki target 89.5%, hal ini sejalan dengan indikator Sasaran Program pada Rencana Strategis Kementerian Keuangan tahun 2020 sampai dengan 2024, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024.

Pada tahun 2022, LMAN memiliki 2 (dua) rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN di mana 1 (satu) rekomendasi di triwulan I dan mendapatkan tambahan 1 (satu) rekomendasi di triwulan II, rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN tersebut sebagai berikut:

Achievement Explanation:

6a-CP Percentage of BPK findings on State General Treasury Financial Reports Followed Up

The government's follow-up on the recommendations of the Audit Board of Indonesia (BPK) on the Audit Result Report on the Central Government Financial Statements and the State General Treasurer's Financial Report needs to be completed as recommended by the BPK. In accordance with article 20 No. 15 of 2004 concerning Examination of Management and Accountability of State Finances, officials are required to follow up on the recommendations in the audit report and provide answers or explanations to BPK regarding the follow-up on the recommendations in the audit report no later than 60 (sixty) days after the audit report is received. BPK monitors the implementation of follow-up on audit results and notifies the results of follow-up monitoring in the results of semester examinations. The government still has to complete the follow-up on the BPK's recommendations until the follow-up is declared appropriate by the BPK.

The Ministry of Finance and BPK have a routine agenda for discussing follow-up BPK recommendations on all issued Audit Result Report, including the Audit Result Report on the Central Government Financial Statements and the State General Treasurer's Financial Report. Discussions are held 2 (two) times a year, in January and July. The results of the discussion (after being approved by the BPK leadership will become the contents of Follow-up Monitoring. Semester I Monitoring was submitted by BPK in September of the current year. Semester II Monitoring submitted by BPK in March the following year.

Measuring the completion of recommendations is the findings that have been followed up on BPK recommendations as an action plan with a time frame set by the government using two criteria, namely:

KPI The percentage of BPK recommendations on LKBUN that are followed up has a target of 89.5%, this is in line with the Program Target indicator in the Ministry of Finance's Strategic Plan for 2020 to 2024, in accordance with the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 77/PMK.01/2020 concerning Ministry Strategic Plans Financial Year 2020-2024.

In 2022, LMAN has 2 (two) BPK recommendations for LKPP and LKBUN where 1 (one) recommendation is in the first quarter and gets an additional 1 (one) recommendation in the second quarter, the BPK recommendations for LKPP and LKBUN are as follows:

No.	Temuan / Findings	Rekomendasi / Recommendations
1	Terdapat Ketidakjelasan atas Status Tagihan Penggantian Dana Talangan Pendanaan Pengadaan Tanah PSN oleh Badan Usaha yang Tidak Lolos Verifikasi Berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi (LHV) BPKP. / There is Unclearness on the Status of Claims for Reimbursement of Bailout Funding for PSN Land Acquisition by Business Entities that Do Not Pass Verification Based on BPKP Verification Results Reports.	BPK merekomendasikan agar Pemerintah melakukan inventarisasi kewajiban Pemerintah terkait penggantian dana talangan pendanaan pengadaan tanah PSN berdasarkan tagihan *ineligible* dalam LHV BPKP yang masih dapat dibayarkan oleh Pemerintah serta menyajikan nilai kewajiban tersebut dalam Laporan Keuangan. / BPK recommends that the government conduct an inventory of government obligations related to reimbursement of PSN land acquisition funding bailouts based on ineligible bills in BPKP LHV that can still be paid by the government and present the value of these obligations in the financial statements.
2	Penyusunan Project List Tahunan Tidak Selaras dengan DIPA Pembiayaan Investasi kepada LMAN / The preparation of the Annual Project List is not in line with the DIPA for Investment Financing for LMAN.	Menyelaraskan peraturan terkait fleksibilitas penggunaan dana jangka panjang dengan peraturan perencanaan penganggaran dan penyusunan DIPA BUN sebagai alat kendali pembayaran pengadaan tanah PSN, termasuk mekanisme pengukuran kinerjanya. / Align regulations regarding flexibility in the use of long-term funds with regulations on budget planning and preparation of DIPA BUN as a means of controlling PSN land acquisition payments, including performance measurement mechanisms.

Berikut ini adalah perbandingan antara target dan realisasi tahun 2020 s.d. 2022:

The following is a comparison between the target and realization for 2020 to 2022:

2020		2021		2022	
Target / Target	**Realisasi** / Realization	**Target** / Target	**Realisasi** / Realization	**Target** / Target	**Realisasi** / Realization
90,00%	100,00%	89,50%	100,00%	89,50%	100,00%

6b-N Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal yang Ditindaklanjuti

LMAN menindaklanjuti rekomendasi Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan yang perlu diselesaikan. Pengukuran penyelesaian rekomendasi Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan adalah *progress* tindak lanjut yang dilakukan oleh LMAN atas rekomendasi yang disampaikan oleh Inspektorat Jenderal sesuai dengan *action plan* dan *time frame* yang ditetapkan pemerintah, di mana rekomendasi yang ditindaklanjuti merupakan rekomendasi yang diusulkan selesai kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.

Pada 2022, LMAN memiliki 4 (empat) rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal sebagai berikut:

6b-N Percentage of Recommendations of Inspectorate General Supervision Results Followed Up

LMAN is following up on recommendations from the Inspectorate General of the Ministry of Finance that need to be resolved. Measuring the completion of the recommendations of the Inspectorate General of the Ministry of Finance is the follow-up progress carried out by LMAN on the recommendations submitted by the Inspectorate General in accordance with the action plan and time frame set by the government, where recommendations that are followed up are recommendations that are proposed to be completed to the Inspectorate General of the Ministry of Finance.

In 2022, LMAN has 4 (four) recommendations resulting from the supervision of the Inspectorate General as follows:

No.	Temuan / Findings	Rekomendasi / Recommendations
1	K/L, disimpulkan bahwa terdapat kekuranglengkapan pengisian dokumen / Ministry/Agency, it was concluded that there was an incompleteness in filling out documents	Tanggal dan tanda tangan pejabat terkait / Date and signature of the relevant official.
2	Dari hasil uji petik atas 22 dokumen pembayaran atas pengadaan tanah PSN di tiga K/L, disimpulkan bahwa terdapat kekuranglengkapan pengisian dokumen / From the results of the sampling test on 22 payment documents for PSN land acquisition in three Ministries/Agencies, it was concluded that there was an incompleteness in filling out the documents.	Kepada Direktur Utama LMAN direkomendasikan agar menyusun dan menetapkan aturan internal terkait penyusunan Surat Perintah Pembayaran. / It was recommended that the President Director of LMAN compiled and stipulated internal rules regarding the preparation of Payment Orders.
3	Rekonsiliasi yang dilaksanakan dan format berita acara rekonsiliasi yang disusun dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK/06/2020 / The reconciliation that was carried out and the format of the minutes of reconciliation that was prepared was not fully in accordance with the Regulation of the Minister of Finance No. 139/PMK.06/2020.	Melakukan sosialisasi kepada pejabat/pegawai LMAN terkait terutama mengenai proses rekonsiliasi LMAN dengan K/L serta perbaikan format berita acara rekonsiliasi agar mencakup informasi yang dibutuhkan baik LMAN maupun K/L sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.06/2020. / Conducting socialization to the relevant LMAN officials, particularly regarding the LMAN reconciliation process with Ministries/Agencies and improving the reconciliation agenda format to include information needed by both LMAN and Ministries/Agencies in accordance with the Minister of Finance Regulation No. 139/PMK.06/2020.
4	LMAN belum melakukan evaluasi atas dampak peningkatan kompetensi dan keterampilan terhadap proses dan hasil manajemen risiko. / LMAN had not conducted an evaluation of the impact of competence and skills improvement on risk management processes and results.	Melakukan evaluasi secara berkelanjutan atas capaian peningkatan kompetensi dan keterampilan terkait manajemen risiko pada seluruh pegawai, sehingga tercipta lingkungan pengendalian yang positif dan kondusif terkait penerapan Sistem Pengendalian *Intern* di dalam organisasi. / Carrying out continuous evaluation of the achievements in improving competence and skills related to risk management for all employees, so as to create a positive and conducive control environment related to the implementation of the Internal Control System within the organization.

Berikut ini adalah perbandingan antara target dan realisasi tahun 2020 s.d. 2022:

The following is a comparison between the target and realization from 2020 to 2022:

2020		2021		2022	
Target / Target	**Realisasi** / Realization	**Target** / Target	**Realisasi** / Realization	**Target** / Target	**Realisasi** / Realization
90,00%	100,00%	97,00%	100,00%	97,00%	100,00%

G. Sasaran Strategis 7: SDM yang Berkinerja Tinggi

SDM yang berkinerja tinggi adalah mereka yang memiliki nilai kompetensi sama atau di atas Standar Kompetensi Jabatan, baik *hard* maupun *soft competencies* untuk mengelola kekayaan negara. Program ini dilaksanakan untuk memudahkan kemampuan organisasi dalam menyediakan SDM yang berkompeten guna menjalankan strategi bisnis fungsional sehingga dapat menunjang organisasi dalam mencapai tujuan.

Agar SDM LMAN berkompeten dan berkinerja tinggi, maka dilakukan pengembangan SDM dengan cara melakukan kegiatan *coaching* dan *mentoring* antara atasan dan bawahan dalam bentuk *experience on the job*, melakukan dialog kinerja, dan memberikan kesempatan SDM LMAN untuk mengikuti pelatihan. Seluruh *output* ini akan tercermin dalam capaian kinerja masing-masing pegawai.

Dari sisi pelatihan bagi SDM, lingkup pelatihan adalah diklat yang diselenggarakan di BPPK maupun di luar BPPK, meliputi seminar, sosialisasi, *internship/on the job training*, *basic training, workshop,* bimbingan teknis, *sharing session*, dan *in-house training*. Untuk bimbingan teknis, sharing session dan in-house training, LMAN melibatkan narasumber dari satuan kerja eksternal penyelenggara untuk memenuhi standar yang tertuang dalam regulasi.

Adapun pendidikan dan pelatihan yang dihitung sebagai capaian IKU meliputi diklat, *workshop*, seminar, dan sosialisasi yang dilaksanakan oleh BPPK, DJKN internal, maupun satuan kerja internal.

Dalam mencapai sasaran strategis dimaksud, LMAN memiliki 1 (satu) IKU yang dapat dilihat di tabel berikut:

G. Strategic Target 7: Human Resources with High Performance

High-performing human resources are those who have competency values equal to or above the Position Competency Standards, both hard and soft competencies to manage state assets. This program is implemented to facilitate the organization's ability to provide competent human resources to carry out a functional business strategy so that it can support the organization in achieving its goals.

In order for LMAN HR to be competent and have high performance, HR development is carried out by conducting coaching and mentoring activities between superiors and subordinates in the form of experience on the job, conducting performance dialogues, and providing opportunities for LMAN HR to attend training. All of these outputs will be reflected in the performance achievements of each employee.

In terms of training for HR, the scope of training is training held at BPPK and outside BPPK, including seminars, outreach, internship/on the job training, basic training, workshops, technical guidance, sharing sessions, and in-house training. For technical guidance, sharing sessions and in-house training, LMAN involves sources from the organizer's external work unit to meet the standards set out in the regulations.

The education and training that counts as KPI achievements include training, workshops, seminars, and outreach carried out by BPPK, internal DJKN, and internal work units.

In achieving the intended strategic goals, LMAN has 1 (one) KPI which can be seen in the following table:

Kode / Code	**Indikator Kinerja** / Performance Indicator	**Tingkat kendali** / Control Level	**Target Tahun 2022** / Year 2022 Target	**Realisasi Tahun 2022** / Year 2022 Realization	**Kinerja** / Performance
	Learning & Growth Perspective (30%)				34,68%
7	**SDM yang Berkinerja Tinggi** / HR With High Performance				120,00%
7a-N	Persentase Pengembangan SDM / Percentage of HR Development	E/M	100,00%	120,00%	120,00%

Penjelasan Capaian:

7a-N Persentase Pengembangan SDM

Pengembangan SDM dilakukan agar organisasi tetap memiliki SDM yang berkompeten dalam menjalankan tugas sehingga dapat menunjang keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan. Ini dilakukan dengan cara melakukan kegiatan *coaching* dan *mentoring* antara atasan dan bawahan dalam bentuk *experience on the job*, dialog kinerja, dan memberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan, yang tercermin dalam capain kinerja masing-masing pegawai.

Pada tahun 2022, semua pegawai LMAN telah melaksanakan *assessment* guna mengetahui kompetensi dan peluang pengembangan diri sehingga semua atasan langsung menugaskan bawahan untuk menyelesaikan tugas dalam rangka pengembangan individu serta memberikan *coaching* dan *mentoring* setiap triwulan untuk memonitor perkembangan pegawai LMAN dalam melaksanakan tugas dengan diberikan fasilitas pelatihan untuk pengembangan pegawai lebih lanjut.

Berikut ini adalah perbandingan antara target dan realisasi tahun 2021 dan 2022:

Achievement Explanation:

7a-N Percentage of HR Development

HR development is carried out so that the organization still has competent human resources in carrying out their duties so that they can support the success of the organization in achieving its goals. This is done by conducting coaching and mentoring activities between superiors and subordinates in the form of experience on the job, performance dialogue, and providing opportunities to attend training, which is reflected in the performance achievements of each employee.

In 2022, all LMAN employees have carried out an assessment to find out competencies and opportunities for self-development so that all superiors directly assign subordinates to complete tasks in the context of individual development and provide coaching and mentoring every quarter to monitor the progress of LMAN employees in carrying out tasks by being provided with training facilities for further employee development.

The following is a comparison between the targets and realization for 2021 and 2022:

2021		2022	
Target / Target	**Realisasi** / Realization	**Target** / Target	**Realisasi** / Realization
100,00%	120,00%	100,00%	120,00%

H. Sasaran Strategis 8: Organisasi yang Fit for Purpose

Organisasi yang didukung oleh struktur dan sumber daya yang ideal sehingga dapat mendukung organisasi dalam pencapaian visi misi dan tujuan perusahaan.

Dalam mencapai sasaran strategis dimaksud, LMAN memiliki 2 (dua) IKU yang dapat dilihat di tabel berikut:

H. Strategic Target 8: A Fit for Purpose Organization

An organization that is supported by an ideal structure and resources so that it can support the organization in achieving the company's vision, mission and goals.

In achieving the intended strategic goals, LMAN has 2 (two) KPIs which can be seen in the following table:

Kode / Code	Indikator Kinerja / Performance Indicator	Tingkat kendali / Control Level	Target Tahun 2022 / Year 2022 Target	Realisasi Tahun 2022 / Year 2022 Realization	Kinerja / Performance
	Learning & Growth Perspective (30%)				34,68%
8	**Fit for Purpose Organization**				120,00%
8a-N	Indeks Tingkat Kematangan Organisasi / Index of Organizational Maturity Level	P/M	80,00%	100,00%	120,00%
8b-N	Indeks Implementasi Manajemen Risiko / Index of Risk Management Implementation	P/M	70,00%	90,00%	120,00%

Penjelasan Capaian:

8a-N Indeks Tingkat Kematangan Organisasi

Indeks tingkat kematangan organisasi merupakan bentuk *assessment* dan evaluasi BLU yang disusun berdasarkan kerangka maturitas yang terdiri atas lima level utama. Masing-masing level memiliki basis kriteria yang berlaku secara *universal* untuk seluruh aspek penilaian dan indikator. Aspek penilaian dan indikator maturitas selanjutnya diukur berdasarkan dua pendekatan utama, yaitu pengukuran berbasis hasil (*result-based*) dan pengukuran berbasis proses (*process based*).

Pada tahun 2022, LMAN telah melaksanakan self assessment pada program *maturity rating* BLU di aplikasi BIOS Kementerian Keuangan dengan hasil 3,65 dari nilai maksimal 5 yang telah diverifikasi oleh Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU, Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Hasil tersebut artinya pada level 3,65 ini, LMAN mampu mendokumentasikan aktivitas yang dituangkan dalam bentuk prosedur baku.

8b-N Indeks Implementasi Manajemen Risiko

IKU Indeks implementasi Manajemen Risiko adalah IKU yang mengukur tingkat implementasi manajemen risiko pada organisasi sesuai dengan ketentuan pedoman penerapan manajemen risiko yang berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan.

Satuan pengukuran indikator yang digunakan adalah dalam bentuk indeks dari masing-masing tahapan manajemen risiko dan tingkat penurunan level risiko.

Terdapat 7 (tujuh) tahapan manajemen risiko, yaitu:

Achievement Explanation

8a-N Index of Organic Maturity Level

The organizational maturity level index is a form of BLU assessment and evaluation that is compiled based on a maturity framework consisting of five main levels. Each level has a criterion basis that applies universally to all assessment aspects and indicators. The assessment aspects and maturity indicators are then measured based on two main approaches, namely result-based measurement and process-based measurement.

In 2022, LMAN has carried out a self-assessment on the BLU maturity rating program in the Ministry of Finance's BIOS application with a result of 3.65 out of a maximum score of 5 which has been verified by the BLU Directorate of Financial Management Development, Directorate General of Treasury. This result means that at this 3.65 level, LMAN is able to document activities as outlined in the form of standard procedures.

8b-N Risk Management Implementation Index

KPI Risk Management implementation index is KPI that measures the level of risk management implementation in an organization in accordance with the guidelines for the implementation of risk management in force within the Ministry of Finance.

The indicator measurement unit used is in the form of an index of each stage of risk management and the level of risk reduction.

There are 7 (seven) stages of risk management, namely:

1. Penetapan konteks / Setting the context
2. Identifikasi risiko /Risk identification
3. Analisis risiko / Risk analysis
4. Evaluasi risiko / Risk evaluation
5. Mitigasi risiko / Risk mitigation
6. Pemantauan dan pengkajian / Monitoring and review
7. Tes Komunikasi dan konsultasi / Communication test

Masing-masing tahapan risiko dinilai dengan indeks sesuai pembobotannya, dan total indeks yang harus dicapai untuk mengimplementasikan seluruh tahapan manajemen risiko adalah sebesar 70.

Apabila organisasi mencapai indeks sebesar 70, maka organisasi telah 100% mengimplementasikan tahapan-tahapan manajemen risiko sesuai dengan pedoman penerapan manajemen risiko yang berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan.

Berikut ini adalah perbandingan antara target dan realisasi tahun 2020 s.d. 2022:

Each stage of risk is assessed with an index according to its weighting, and the total index that must be achieved to implement all stages of risk management is 70.

If the organization achieves an index of 70, then the organization has 100% implemented the stages of risk management in accordance with the guidelines for implementing risk management that apply within the Ministry of Finance.

The following is a comparison between the target and realization from 2020 to 2022:

2020		2021		2022	
Target / Target	**Realisasi** / Realization	**Target** / Target	**Realisasi** / Realization	**Target** / Target	**Realisasi** / Realization
70,00%	100,00%	70,00%	120,00%	70,00%	90,00%

I. Sasaran Strategis 9: Penguatan Ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Kolaboratif

Penguatan ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang kolaboratif terwujud dalam pengelolaan layanan TIK yaitu melalui ketersediaan sistem TIK, penyediaan dan pemenuhan layanan TIK, serta penyelesaian gangguan layanan TIK kepada pengguna layanan yang mendukung kolaborasi antar pegawai dan antar unit kerja dalam mencapai sasaran kinerja organisasi.

Dalam mencapai sasaran strategis dimaksud, LMAN memiliki 1 (satu) IKU yang dapat dilihat di tabel berikut:

I. Strategic Target 9: Collaborative Information and Communication Technology Ecosystem Strengthening

Collaborative Information and Communication Technology (ICT) ecosystem strengthening is realized in the management of ICT services, namely through the availability of ICT systems, provision and fulfillment of ICT services, and resolution of ICT service disruptions to service users that support collaboration between employees and between work units in achieving organizational performance targets.

In achieving the intended strategic goals, LMAN has 1 (one) KPI which can be seen in the following table:

Kode / Code	Indikator Kinerja / Performance Indicator	Tingkat kendali / Control Level	Target Tahun 2022 / Year 2022 Target	Realisasi Tahun 2022 / Year 2022 Realization	Kinerja / Performance
	Learning & Growth Perspective (30%)				34,68%
9	**Penguatan Ekosistem TIK yang Kolaboratif** / Strengthening Collaborative Information and Communication Technology Ecosystems				120,00%
9a-N	Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU / Percentage of Completion of Modernization of BLU Management	E/M	100,00%	120,00%	120,00%

Penjelasan Capaian:

9a-N Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan Badan Layanan Umum

Modernisasi Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU) adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka pengelolaan BLU untuk menyajikan data dan informasi kepada internal dan eksternal secara handal yang dilakukan dengan pengembangan sistem informasi terintegrasi sehingga sumber daya dapat dikelola secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat modernisasi pengelolaan sumber daya BLU dalam rangka mendukung peningkatan layanan, akuntabilitas dan akurasi manajemen dalam pengambilan keputusan.

Pengukuran IKU ini menggunakan formulasi penyelesaian tahapan-tahapan dalam menyelesaikan modernisasi pengelolaan BLU sebagai berikut:

Achievement Explanation:

9a-N Percentage of Completion of Modernization of Public Service Agency Management

Modernization of the Management of Public Service Agencies (BLU) is the use of information technology in the framework of BLU management to provide data and information to internal and external in a reliable manner which is carried out by developing an integrated information system so that resources can be managed effectively and efficiently to improve the quality of service to the community.

This IKU aims to measure the level of modernization of BLU resource management in order to support service improvement, management accountability and accuracy in decision making.

This KPI measurement uses the formulation of completing the stages in completing the modernization of BLU management as follows:

No.	Tahapan (Masing-masing aset) / Stages (Each Asset)	Penilaian Capaian / Achievement Assessment
1	Operasionalisasi pemanfaatan BIOS / Operationalization of BIOS utilization	15%
2	Penyediaan website / Provision of website	15%
3	Desain sistem informasi pada BLU / Information system design at BLU	15%
4	Database terpusat / terintegrasi / Centralized/integrated database	20%
5	*Dashboard* / Dashboard	15%
6	*Web service* / Web Service	20%
7	SOP pengelolaan teknologi informasi / SOP for information technology management	20%
	Total Persentase Capaian / Total Percentage of Achievement	120%

Direktur Utama memberikan plakat kepada unit Kementerian Keuangan di daerah / President Director awarding a placard for the Ministy of Finance regional unit

Berikut ini adalah perbandingan antara target dan realisasi tahun 2020 s.d. 2022:

The following is a comparison between the target and realization from 2020 to 2022:

2020		2021		2022	
Target / Target	**Realisasi** / Realization	**Target** / Target	**Realisasi** / Realization	**Target** / Target	**Realisasi** / Realization
100,00%	120,00%	100,00%	120,00%	100,00%	120,00%

J. Sasaran Strategis 10: Penguatan Pengelolaan Keuangan yang Optimal

Penguatan Pengelolaan Keuangan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring anggaran selama satu tahun anggaran yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada *stakeholder*. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggung jawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi *output* sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran selama satu tahun tercermin dari opini yang diberikan oleh BPK.

Dalam mencapai sasaran strategis dimaksud, LMAN memiliki 1 (satu) IKU yang dapat dilihat di tabel berikut:

J. Strategic Target 10: Optimal Financial Management Strengthening

Strengthening Financial Management includes planning, implementing, and monitoring the budget for one fiscal year which is then accountable to stakeholders. The funds available in the budget implementation document must be managed according to a predetermined plan and can be accounted for. Implementation of the budget uses the principles of thrifty, efficient and not luxurious while still fulfilling the output as planned in the DIPA. The quality of accountability for budget execution for one year is reflected in the opinion given by BPK.

In achieving the intended strategic goals, LMAN has 1 (one) KPI which can be seen in the following table:

Kode / Code	**Indikator Kinerja** / Performance Indicator	**Tingkat kendali** / Control Level	**Target Tahun 2022** / Year 2022 Target	**Realisasi Tahun 2022** / Year 2022 Realization	**Kinerja** / Performance
	Learning & Growth Perspective (30%)				34,68%
10	**Penguatan Pengelolaan Keuangan yang Optimal** / Optimum Financial Management Strengthening				120,00%
10a-CP	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran BLU / Percentage of Quality of BLU Budget Execution	E/M	95,50%	97,74%	102,35%

Penjelasan Capaian:

10a-CP Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum

Salah satu sumber daya organisasi sektor publik/pemerintahan adalah anggaran. Anggaran yang tersedia harus dikelola dengan berkualitas yang ditandai dengan anggaran terserap sesuai rencana yang telah ditetapkan, tercapainya *output*, efisiensi, konsistensi pelaksanaan anggaran, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dokumen yang dipakai dalam pengelolaan anggaran adalah DIPA. DIPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang sesuai ketentuan menjadi dasar pengelolaan belanja.

Dasar perhitungan IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran tahun 2022 masih menggunakan SE-8/MK.1/2020. Ketentuan dalam SE tersebut menyatakan bahwa capaian IKU PKPA pada triwulan I s.d. III merupakan hasil dari nilai IKPA sedangkan untuk capaian triwulan IV merupakan hasil dari IKPA (40%) dan *Smart* DJA (60%).

Adapun Capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran BLU LMAN s.d. Triwulan IV TA 2022 yaitu:

Achievement Explanation:

10a-CP Percentage of Quality of Public Service Agency Budget Execution

One of the resources of public sector organization/government is the budget. The available budget must be managed with quality which is marked by the budget being absorbed according to the plan that has been set, the achievement of output, efficiency, consistency of budget implementation, and can be accounted for in accordance with applicable regulations. The document used in budget management is DIPA. DIPA is a budget execution document which in accordance with the provisions forms the basis for expenditure management.

The basis for calculating KPI for the Quality of Implementation of the 2022 Budget still uses SE-8/MK.1/2020. The provisions in the Circular stated that PKPA IKU achievements in quarter I to. III is the result of the IKPA score while the fourth quarter results are the result of IKPA (40%) and Smart DJA (60%).

Meanwhile, KPI Achievement Percentage of Quality of Budget Implementation of BLU LMAN up to. Quarter IV FY 2022 namely:

No.	Komponen / Component	Penilaian Capaian / Achievement Assessment
1	Capaian IKPA (Bobot 40%) / IKPA Achievement (Weight 40%)	95,21%
2	Capaian *SMART* (Bobot 60%) / SMART Achievement (Weight 60%)	99,42%
3	**Capaian IKU PKPA / Achievement of IKU PKPA**	**97,74%**

Berikut ini adalah perbandingan antara target dan realisasi tahun 2020 s.d. 2022:

The following is a comparison between the target and realization from 2020 to 2022:

2020		2021		2022	
Target / Target	**Realisasi** / Realization	**Target** / Target	**Realisasi** / Realization	**Target** / Target	**Realisasi** / Realization
95,00%	95,80%	95,50%	93,38%	95,50%	97,74%

(Atas) Fasad depan dari aset kelolaan LMAN yang dimanfaatkan sebagai Cafe
/ (Above) The front facade of LMAN'S managed asset utilized as a cafe

(Bawah) Aset kelolaan LMAN di daerah Kelapa Gading yang dimanfaatkan sebagai cafe
/ (Below) LMAN managed asset in Kelapa Gading utilized as a cafe

Dewan Pengawas LMAN
LMAN Supervisory Board

Secara garis besar, Dewan Pengawas LMAN menjalankan fungsi pengawasan terkait jalannya roda organisasi maupun terkait rencana maupun kebijakan strategis yang dijalankan oleh Direksi LMAN.

In general, the LMAN Supervisory Board carries out a supervisory function related to the running of the organization as well as related to strategic plans and policies implemented by the LMAN Directors.

Rapat dewan pengawas rutin diadakan setiap bulannya
/ Routine Supervisory Board meetings are held every month

Dewan Pengawas sendiri dibentuk dengan mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2016 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum, dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 660/KMK.01/2018 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Pada Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara (BLU LMAN).

Adapun susunan Dewan Pengawas LMAN hingga 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

The Supervisory Board itself was formed with reference to the Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2004 concerning the State Treasury, Government Regulation Number 74 of 2012 concerning Financial Management of Public Service Agencies, Regulation of the Minister of Finance Number 95/PMK.05/2016 concerning the Supervisory Board of Public Service Agencies , and Decree of the Minister of Finance Number 660/KMK.01/2018 concerning Appointment of the Supervisory Board at the Public Service Board of the State Asset Management Agency (BLU LMAN).

The composition of the LMAN Supervisory Board until 31 December 2022 is as follows:

1. Rionald Silaban
   Ketua Dewan Pengawas
   / Chairman of the Supervisory Board;
2. Roberth Gonijaya
   Anggota Dewan Pengawas
   / Member of The Supervisory Board;
3. Boy Michael Eko Tjahyono
   Anggota Dewan Pengawas
   / Member of The Supervisory Board;
4. Selo Tarnando Sumosutargio
   Anggota Dewan Pengawas
   / Member of The Supervisory Board;

Masa kerja Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 669/KMK.01/2018 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara.

The working period of the Supervisory Board is set for 5 (five) years from 16 August 2018 to 15 August 2023, in accordance with the Decree of the Minister of Finance Number 669/KMK.01/2018 concerning Appointment of the Supervisory Board at the Public Service Board of the State Asset Management Institute.

Tugas, Kewajiban, dan Wewenang Dewan Pengawas
Duties, Obligations and Authorities of the Supervisory Board

Dewan Pengawas bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi LMAN tentang pengelolaan LMAN, baik dari aspek layanan maupun pengelolaan keuangan. Pelaksanaan tugas tersebut dilaksanakan dengan cara, antara lain:

The Supervisory Board is tasked with supervising and providing advice to the Directors of LMAN regarding the management of LMAN, both from the service and financial management aspects. The implementation of these tasks is carried out by means of, among others:

a. Menyelenggarakan rapat Dewan Pengawas secara periodik;
   Organize periodic Supervisory Board meetings;
b. Memberikan arahan dan pertimbangan di tataran strategis untuk peningkatan pelaksanaan mandat, kinerja keuangan, dan keberlangsungan organisasi LMAN kepada Direksi LMAN;
   Provide direction and consideration at a strategic level to improve the implementation of the mandate, financial performance, and organizational sustainability of LMAN to the Directors of LMAN;
c. Memberikan pertimbangan kepada Direksi LMAN dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
   Give consideration to the Directors of LMAN in compliance with laws and regulations;
d. Memberikan arahan dan pertimbangan di tataran strategis untuk peningkatan pelaksanaan mandat, kinerja keuangan, dan keberlangsungan organisasi LMAN kepada Direksi LMAN;
   Provide opinions and suggestions to the LMAN Directors regarding improvements to LMAN Governance;
e. Mengawasi dan memberikan pendapat dan/atau saran kepada Direksi LMAN atas pelaksanaan rencana strategis bisnis dan rencana bisnis dan anggaran;
   Supervise and provide opinions and/or suggestions to the Directors of LMAN on the implementation of strategic business plans and business plans and budgets;
f. Memberikan pertimbangan dan rekomendasi atas kebijakan-kebijakan strategis yang memiliki eksposur dan risiko tinggi terhadap organisasi LMAN, keuangan negara, dan dampak multiplier berskala nasional;
   Provide consideration and recommendations on strategic policies that have high exposure and risk to the LMAN organization, state finances, and national-scale multiplier impacts;
g. Memberikan pendapat dan/atau saran atas laporan berkala LMAN antara lain laporan keuangan dan kinerja, termasuk laporan hasil audit satuan pengawasan intern;
   Provide opinions and/or suggestions on LMAN's periodic reports, including financial and performance reports, including reports on the audit results of the internal control unit;
h. Memberikan persetujuan atas penunjukan kantor akuntan publik yang akan melaksanakan audit atas laporan keuangan berdasarkan/sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK);
   Give approval for the appointment of a public accounting firm that will carry out an audit of financial statements based on/according to Financial Accounting Standards (SAK);
i. Menyusun program kerja tahunan pengawasan LMAN dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara dan Menteri Keuangan; dan
   Develop an annual work program for LMAN supervision and submit it to the Director General of State Assets and the Minister of Finance;
j. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   Carry out other tasks based on assignments in accordance with statutory provisions.

Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Pengawas berkewajiban untuk:

In carrying out its duties, the Supervisory Board is obliged to:

a. Mengalokasikan waktu khusus secara rutin untuk mengawal dan memonitor agenda-agenda strategis;
Allocate special time on a regular basis to oversee and monitor strategic agendas Board meetings;

b. Memberikan arahan dan pertimbangan di tataran strategis untuk peningkatan pelaksanaan mandat, kinerja keuangan, dan keberlangsungan organisasi LMAN kepada Direksi LMAN;
Provide opinions and suggestions in writing to the Minister of Finance c.q. Director General of State Assets and LMAN Directors regarding business strategic plans and business plans and budgets prepared by LMAN Directors;

c. Melaporkan kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara dan Menteri Keuangan, dalam hal terjadi gejala menurunnya kinerja BLU dan/atau penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan;
Report to the Director General of State Assets and the Minister of Finance, in the event that there are symptoms of declining BLU performance and/or deviations from the provisions of laws and regulations;

d. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas yang telah dilakukan kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara dan Menteri Keuangan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun;
Submit reports on the implementation of the duties of the Supervisory Board that have been carried out to the Director General of State Assets and the Minister of Finance at least 2 (two) times in 1 (one) year;

e. Menetapkan setiap keputusan Dewan Pengawas melalui rapat Dewan Pengawas yang diputuskan secara musyawarah untuk mufakat dan bersifat kolektif kolegial.
Establish every decision of the Supervisory Board through a meeting of the Supervisory Board which is decided by deliberation to reach a consensus and is collegial collective in nature.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Dewan Pengawas berwenang untuk:

In carrying out its duties and obligations, the Supervisory Board has the authority to:

a. Mendapatkan laporan berkala atas pengelolaan LMAN, antara lain laporan keuangan dan kinerja;
Obtain periodic reports on the management of LMAN, including financial and performance reports;

b. Mendapatkan laporan hasil pengawasan/ pemeriksaan yang dilakukan oleh satuan pemeriksaan intern, aparat pengawasan internal pemerintah dan Badan Pemeriksa Keuangan;
Obtain reports on the results of supervision/ examination carried out by the internal inspection unit, the government's internal control apparatus and the Supreme Audit Agency;

c. Mengetahui kebijakan dan tindakan yang dijalankan oleh Direksi LMAN dalam pelaksanaan kegiatan;
Know the policies and actions carried out by the Directors of LMAN in implementing activities;

d. Mendapatkan penjelasan dan/atau data dari Direksi LMAN dan/atau Pegawai LMAN mengenai kebijakan dan pelaksanaan kegiatan LMAN;
Obtain explanations and/or data from LMAN Directors and/or LMAN Employees regarding LMAN policies and activities;

e. Mengusulkan pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Dewan Pengawas;
Propose the appointment and dismissal of the Secretary of the Supervisory Board;

f. Meminta Direksi LMAN untuk menghadirkan tenaga profesional dalam rapat Dewan Pengawas;
Request the LMAN Board of Directors to present professional staff at the Supervisory Board meeting;

g. Meminta audit secara khusus oleh aparat pengawasan intern pemerintah kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara dan Menteri Keuangan; dan
Request a special audit by the government's internal control apparatus to the Director General of State Assets and the Minister of Finance; And

h. Melaksanakan kewenangan lainnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
Carry out other authorities based on statutory provisions.

Rapat Dewan Pengawas LMAN
LMAN Supervisory Board Meeting

Pada tahun 2022 diselenggarakan rapat rutin Dewan Pengawas dan Direksi LMAN sebanyak 12 kali rapat, dengan tingkat kehadiran dan agenda rapat sebagai berikut:

In 2022, 12 regular meetings of the Supervisory Board and Directors of LMAN will be held, with the level of attendance and meeting agenda as follows:

1. **Rionald Silaban,**
selaku Ketua Dewan Pengawas,
hadir pada 12 kali rapat rutin;
/ as Chairman of the Supervisory Board, attended 12 regular meetings;

2. **Robert Gonijaya,**
selaku Anggota Dewan Pengawas,
hadir pada 12 kali rapat rutin;
/ as Member of the Supervisory Board, attended 12 regular meetings;

3. **Boy Michael Eko Tjahyono,**
selaku Anggota Dewan Pengawas,
hadir pada 12 kali rapat rutin;
/ as Member of the Supervisory Board, attended 12 regular meetings;

4. **Selo Tarnando Sumosutargio,**
selaku Anggota Dewan Pengawas,
hadir pada 4 kali rapat rutin;
/ as Member of the Supervisory Board, attended 4 regular meetings;

Tabel berikut menggambarkan tingkat kehadiran Dewan Pengawas LMAN sepanjang tahun yang ditinjau:

The following table describes the level of attendance of the LMAN Supervisory Board throughout the year under review:

Tanggal / Dates	Agenda	Keterangan Kehadiran / Attendance Information
19 Januari 2022 / 19 January 2022	a. **Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja;** / Income and Expenditure Realization Report; b. **Usulan Indikator Kinerja Utama LMAN dan Rencana Kerja Tahun 2022.** / Proposed LMAN Key Performance Indicators and 2022 Work Plan.	**Dihadiri oleh semua Dewan Pengawas** / Attended by the whole Supervisory Board
15 Februari 2022 / 15 February 2022	a. **Kronologis Dispute Pengenaan Tarif Sewa Pemanfaatan Aktiva Kilang LNG Badak terhadap Volume LNG dari Wilayah Kerja Mahakam berdasarkan Kontrak Penjualan Western Buyer Extension (WBx) dan PT Nusantara Regas (NR);** / Chronology of Dispute Imposition of Rental Rates for the Utilization of Badak LNG Refinery Assets for LNG Volume from the Mahakam Working Area based on the Sales Contract of Western Buyer Extension (WBx) and PT Nusantara Regas (NR); b. **Strategic Marketing Advisory LMAN 2022 – 2027;** / LMAN Strategic Marketing Advisory 2022 – 2027; c. **Rencana Penarikan Dana Pengadaan Lahan PSN Tahun Anggaran 2022;** / Plans for Withdrawal of PSN Land Procurement Funds for the 2022 Fiscal Year; d. **Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja.** / Income and Expenditure Realization Report.	**Dihadiri oleh semua Dewan Pengawas** / Attended by the whole Supervisory Board

15 Maret 2022 / 15 March 2022	a. Progress Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional Sektor Jalan Tol; / Land Acquisition Progress for the Toll Road Sector National Strategic Project; b. Penugasan Optimalisasi Aset Lahan Eks Bandara Polonia Medan; / Assignment of Land Assets Optimization of Ex-Polonia Medan Airport; c. Penugasan Optimalisasi Aset Ibukota Lama (DKI Jakarta); / Assignment of Asset Optimization of the Old Capital (DKI Jakarta); d. Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja s.d. 28 Februari 2022; / Income and Expenditure Realization Report up to 28 February 2022; e. Laporan Indikator Kinerja Utama LMAN kepada PPKBLU 2022. / Report on LMAN Main Performance Indicators to PPKBLU 2022.	Dihadiri oleh semua Dewan Pengawas / Attended by the whole Supervisory Board
12 April 2022 / 12 April 2022	a. Kinerja Pendanaan Pengadaan Lahan PSN Q1 Tahun 2022; / PSN Land Procurement Funding Performance Q1 2022; b. Laporan Capaian Progress Direktorat Pengembangan dan Pendayagunaan; / Progress Report on the Directorate of Development and Utilization; c. Profil Risiko LMAN Triwulan I Tahun 2022; / LMAN Risk Profile for Quarter I 2022; d. Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja s.d. 31 Maret 2022. / Income and Expenditure Realization Report up to March 31, 2022.	Dihadiri oleh semua Dewan Pengawas / Attended by the whole Supervisory Board
25 Mei 2022 / 25 May 2022	a. Tindak Lanjut Usulan Pengembalian dan Penghapusan (UPP) BMN pada Kilang LNG Badak; / Follow up on the BMN Return and Write-Off Proposal (UPP) at the Badak LNG Plant; b. Isu Strategis Pendanaan Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional; / Strategic Issues on Land Acquisition Funding for National Strategic Projects; c. Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja s.d. 24 Mei 2022. / Income and Expenditure Realization Report up to 24 May 2022.	Dihadiri oleh semua Dewan Pengawas / Attended by the whole Supervisory Board

25 Mei 2022 / 25 May 2022	a. Tindak Lanjut Usulan Pengembalian dan Penghapusan (UPP) BMN pada Kilang LNG Badak; / Follow up on the BMN Return and Write-Off Proposal (UPP) at the Badak LNG Plant; b. Isu Strategis Pendanaan Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional; / Strategic Issues on Land Acquisition Funding for National Strategic Projects; c. Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja s.d. 24 Mei 2022. / Income and Expenditure Realization Report up to 24 May 2022.	Dihadiri oleh semua Dewan Pengawas / Attended by the whole Supervisory Board
22 Juni 2022 / 22 June 2022	a. Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja s.d. 17 Juni 2022; / Income and Expenditure Realization Report up to. June 17, 2022; b. Proses Balik Nama NOP Aset Kelolaan LMAN; / Process of Transferring the Name of NOP of LMAN Managed Assets; c. Media Briefing 24 Juni 2022; / Media Briefing 24 June 2022; d. Monitoring Penyelesaian Proyek Strategis Nasional. / Monitoring the Completion of National Strategic Projects.	Dihadiri oleh semua Dewan Pengawas / Attended by the whole Supervisory Board
27 Juli 2022 / 27 July 2022	a. Perencanaan Serah Kelola dan Penarikan Aset Kelolaan LMAN; / Planning for Handover and Withdrawal of LMAN Managed Assets; b. Update Report terkait Polonia; / Update Report related to Polonia; c. Update Pendanaan Pengadaan Lahan; / Land Acquisition Funding Update; d. Update Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja s.d. 22 Juli 2022. / Update Realization Report of Income and Expenditure up to 22 July 2022.	Dihadiri oleh semua Dewan Pengawas / Attended by the whole Supervisory Board
30 Agustus 2022 / 30 August 2022	a. Outlook Aset di Jl. Cik Di Tiro, DIY Yogyakarta; / Outlook Asset on Jl. Cik Di Tiro, DIY Yogyakarta; b. Update terkait Pengembangan dan Pendayagunaan Aset meliputi Creative Hub di Bandung dan PHM (WBX-NR); / Updates related to Asset Development and Utilization including Creative Hub in Bandung and PHM (WBX-NR); c. Laporan Pelaksanaan The Asset Manager 2022; / Implementation Report of The Asset Manager 2022;	Dihadiri oleh semua Dewan Pengawas / Attended by the whole Supervisory Board

	d. **Pelepasan Kawasan Hutan pada Proyek Strategis Nasional;** / Release of Forest Areas in National Strategic Projects; e. **Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja s.d. 26 Agustus 2022.** / Income and Expenditure Realization Report up to 26 August 2022.	
23 September 2022 / 23 September 2022	a. **Progress Pekerjaan LMAN untuk Lanud Soewondo (Eks Bandara Polonia);** / LMAN Work Progress for Soewondo Air Base (Former Polonia Airport); b. **Update AESIA 2022;** / Update AESIA 2022; c. **Update Isu Strategis Pendanaan Pengadaan Lahan PSN Pasca Rapat Evaluasi PSN;** / Update on Strategic Issues on Funding for PSN Land Acquisition after the PSN Evaluation Meeting; d. **Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja s.d. 20 September 2022; dan** / Income and Expenditure Realization Report up to. Sept. 20, 2022; and e. **Izin Prinsip terkait penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Laporan Keuangan Tahun 2022 pada BLU LMAN.** / Principle permit related to the appointment of a Public Accounting Firm (KAP) for the 2022 Financial Report at BLU LMAN.	**Dihadiri oleh semua Dewan Pengawas** / Attended by the whole Supervisory Board
21 Oktober 2022 / 21 October 2022	a. **Progres Sertifikasi dan Litigasi LMAN;** / LMAN Certification and Litigation Progress; b. **Progres Penguasaan Fisik Aset Properti LMAN;** / Progress of Physical Mastery of LMAN Property Assets; c. **Realisasi Pendapatan dan Belanja per 14 Oktober 2022;** / Revenue and Expenditure Realization as of October 14, 2022; d. **Pembahasan Upaya Penyelesaian Kewajiban Biaya Pemanfaatan Kilang LNG Badak Untuk Kontrak Penjualan Gas WBX-NR oleh PT Pertamina Hulu Mahakam.** / Discussion on Efforts to Settle the Obligation of Utilization Costs for the Badak LNG Plant for the WBX-NR Gas Sales Contract by PT Pertamina Hulu Mahakam.	**Dihadiri oleh semua Dewan Pengawas** / Attended by the whole Supervisory Board
21 November 2022 / 21 November 2022	a. **Kajian Analisis Potensi Pasar dalam Rangka Pemanfaatan dan/atau Pemindahtanganan Aset BMN berupa Lanud Soewondo (eks Bandara Polonia) di Kota Medan;** / Market Potential Analysis Study in the Context of Utilization and/or Transfer of BMN Assets in the form of Soewondo Air Base (former Polonia Airport) in Medan City; b. **Laporan Hasil Pembahasan WBX-NR;** / Report on the Results of the WBX-NR Discussion;	**Roberth Gonijaya berhalangan hadir** / Roberth Gonijaya was unable to attend

	c. **Update Peningkatan Status Aset Kelolaan;** / Updating Status of Managed Assets; d. **Penyerapan Dana Pengadaan Lahan PSN;** / Absorption of PSN Land Procurement Funds; e. **Realisasi Pendapatan dan Belanja per 18 November 2022;** / Revenue and Expenditure Realization as of 18 November 2022; f. **Progres Pembangunan Gedung Arsip, Gerai Layanan, dan Mess LMAN Jalan Slamet Riyadi.** / Progress on the construction of the Archives Building, Service Outlets, and LMAN Mess at Jalan Slamet Riyadi.	
20 Desember 2022 / 20 December 2022	a. **Laporan Hasil Pembahasan WBX-NR;** / Report on the Results of the WBX-NR Discussion; b. **Update Peningkatan Status Aset Kelolaan per 2 Desember 2022;** / Update on the Improved Status of Managed Assets as of 2 December 2022; c. **Refleksi dan Tantangan Pendanaan Pengadaan Lahan Proyek Strategis Nasional;** / Reflections and Challenges of Land Procurement Funding for National Strategic Projects; d. **Realisasi Pendapatan dan Belanja per 16 Desember 2022;** / Revenue and Expenditure Realization as of December 16, 2022; e. **Kajian Hi-Level Highest & Best Used BMN berupa LanUd Soewondo (eks Bandara Polonia) di Kota Medan dalam Rangka Pemanfaatan dan/atau Pemindahtanganan.** / Study of Hi-Level Highest & Best Used BMN in the form of Soewondo LanUd (former Polonia Airport) in Medan City in the Context of Utilization and/or Transfer.	**Dihadiri oleh semua Dewan Pengawas** / Attended by the whole Supervisory Board

Dewan Pengawas mendorong Lembaga untuk terus melakukan inovasi agar pengelolaan aset BMN menjadi lebih baik, dengan menerapkan prinsip siklus manajemen aset. Prinsip siklus manajemen aset itu terdiri dari:

The Supervisory Board encourages the Agency to continue to innovate so that management of BMN assets is better, by applying the principle of the asset management cycle. The principles of the asset management cycle consists of:

1.

Perencanaan Kebutuhan Aset
/ Planning for Asset Requirements

Tahap di mana Lembaga menganalisis dan mengurutkan kebutuhan apa yang diperlukan dalam mengelola aset perusahaan.

The stage where the Institution analyzes and sorts what needs are needed in managing company assets.

2.

Pengadaan Aset
/ Asset Procurement

Tahap di mana Lembaga melakukan kegiatan pengadaan aset.

The stage in which the Institution carries out asset procurement activities.

3.

Inventarisasi Aset
/ Asset Inventory

Tahap di mana Lembaga mengidentifikasi kualitas dan kuantitas aset dari segi fisik maupun non fisik.

The stage where the Institution identifies the quality and quantity of assets from a physical and non-physical perspective.

4.

Legal Audit Aset
/ Legal Asset Audit

Tahap di mana Lembaga menganalisis dan mengurutkan kebutuhan apa yang diperlukan dalam mengelola aset perusahaan.

The stage at which the Institution analyzes and prioritizes the requirements needed in managing the company's assets.

5.

Pengoperasian dan Pemeliharaan Aset
/ Operation and Maintenance of Assets

Tahap di mana Lembaga menggunakan aset yang dimiliki sesuai fungsi masing-masing aset. Pengoperasian diikuti dengan pemeliharaan aset supaya penggunaan aset lebih awet, efektif, dan efisien.

The stage where the Institution uses the assets owned according to the function of each asset. Operations are followed by maintenance of assets so that the use of assets is more durable, effective, and efficient.

6.

Penilaian Aset
/ Asset Valuation

Tahap dimana Lembaga menentukan nilai aset yang dimiliki sehingga nilai kekayaan yang dimiliki lebih terlihat. Dari sini akan terlihat apakah aset dengan nilai tertentu perlu dialihkan atau dihapuskan.

The stage where the Institution determines the value of the assets it owns so that the value of the assets it owns is more visible. From here it will be seen whether assets with a certain value need to be transferred or written off.

7.

Penghapusan dan Pengalihan Aset
/ Removal and Transfer of Assets

Jika aset dinilai tidak begitu menguntungkan, Lembaga akan memutuskan untuk dibuang atau dihancurkan. Namun, jika dinilai masih menguntungkan, Lembaga akan mengalihkan aset untuk penggunaan lain dengan pemindahan wewenang dan tanggung jawab terhadap aset kepada divisi lain.

If the assets are judged to be not so profitable, the Institution will decide to be disposed of or destroyed. However, if it is considered still profitable, the Institution will transfer assets for other uses by transferring authority and responsibility for assets to other divisions.

8.

Pembaharuan Aset
/ Asset Renewal

Bila aset dinilai tak berfungsi dengan optimal, nilai fungsional aset tersebut dapat dikembalikan dengan melakukan pembaharuan/renovasi, sehingga aset dapat berfungsi seperti sedia kala hingga masa nilainya telah berakhir.

If the asset is considered not functioning optimally, the functional value of the asset can be restored by renewing/renovating, so that the asset can function as usual until its value has expired.

Penerapan siklus ini secara konsisten dan berkelanjutan terhadap aset kelolaan merupakan merupakan terobosan baru dalam pengelolaan aset negara. Model ini diharapkan menjadi jawaban bagi pengelolaan aset-aset negara yang belum dikelola secara optimal.

Di sisi lain, Lembaga perlu secara berkelanjutan menyempurnakan proses bisnis yang fleksibel dan tidak birokratis, namun tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip GRC (*Governance, Risk and Compliance*). Lembaga memiliki konsultan untuk membantu dalam mengembangkan proses bisnis yang akuntabel, transparan, dan bijak.

Di sektor pendanaan pengadaan tanah Proyek Strategis Nasional (PSN), Lembaga dituntut untuk mempercepat proses pendanaan pengadaan tanah PSN dimana hal tersebut memiliki dampak terhadap ketahanan badan usaha dalam melanjutkan proses pembangunan PSN. Percepatan proses pendanaan kiranya dapat disederhanakan dan dievaluasi secara berkala, namun tidak melepaskan prinsip kehati-hatian.

The consistent and sustainable application of this cycle to the assets under management is a new breakthrough in the management of state assets. This model is expected to be the answer for the management of state assets that have not been managed optimally.

On the other hand, the Agency needs to continuously improve business processes that are flexible and not bureaucratic, while still taking into account the principles of GRC (Governance, Risk and Compliance).
The Agency has consultants to assist in developing accountable, transparent and wise business processes.

In the land acquisition funding sector for the National Strategic Project (PSN), the Agency is required to accelerate the funding process for PSN land acquisition where this has an impact on the resilience of business entities in continuing the PSN development process. It is hoped that the acceleration of the funding process could be simplified and evaluated periodically, but not giving up the principle of prudence.

Pelaksanaan Tugas Dewan Pengawas LMAN Sepanjang 2022
Implementation of the Duties of the LMAN Supervisory Board Throughout 2022

Sepanjang tahun 2022, Dewan Pengawas telah menyampaikan laporan sebagai berikut:

Throughout 2022, the Supervisory Board has submitted the following reports:

Jenis Laporan / Report Type	**Keterangan** / Note
Laporan Periodik Semester 1 / Periodic Report Semester 1	Laporan Dewan Pengawas Semester 1 Tahun 2022 Nomor LAP-02/LMAN.DEWAS/2022 / Report of the Supervisory Board Semester 1 of 2022 Number LAP-02/LMAN.DEWAS/2022
Laporan Periodik Semester 2 / Periodic Report Semester 2	Laporan Dewan Pengawas Semester 2 Tahun 2022 Nomor LAP-01/LMAN.DEWAS/2023 / Supervisory Board Report Semester 2 of 2022 Number LAP-01/LMAN.DEWAS/2023

Direksi LMAN
LMAN Board of Directors

Jajaran Direktur LMAN
/ Board of Directors

Berdasarkan PMK Nomor 54/PMK.01/2017, Direktur Utama LMAN dibantu oleh 4 (empat) Direktur dan 14 (empat belas) Kepala Divisi.

Based on PMK Number 54/PMK.01/2017, the Main Director of LMAN is assisted by 4 (four) Directors and 14 (fourteen) Division Heads.

Berikut adalah komposisi Direktur LMAN sampai Desember 2022:

The following is the composition of LMAN Directors until December 2022:

Basuki Purwadi (PNS / Civil Servant)
Direktur Utama
/ President Director

Sutanto Basuki (PNS / Civil Servant)
Direktur Keuangan dan Dukungan Organisasi
/ Diector of Finance and Organizational Support

Tetik Fajar Ruwandari (PNS / Civil Servant)
Direktur Operasional dan Manajemen Risiko
/ Director of Operation and Risk Management

Qoswara (PNS / Civil Servant)
Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan
/ Director of Land Procurement and Funding

Candra Giri Artanto (Non-PNS / Non-Civil Servant)
Direktur Pengembangan dan Pendayagunaan
/ Director of Development and Utilization

Jabatan / Positions	**Tugas dan Fungsi /** Duties and Functions	
Direktur Utama / President Director	1. Menetapkan Rencana Strategis Bisnis (Renstra), Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA), Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan Indikator Kinerja Utama (IKU) LMAN;	Establish Strategic Business Plan, Business Plan and Budget, Annual Work Plan, and LMAN Key Performance Indicators;
	2. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan di bidang manajemen aset negara yang dikelola LMAN, pengelolaan dana investasi pemerintah di bidang aset negara, termasuk pendanaan pengadaan tanah untuk PSN;	Coordinate the formulation of policies in the field of state asset management managed by LMAN, management of government investment funds in the sector of state assets, including funding for land acquisition for the National Strategic Project;
	3. Menetapkan rumusan kebijakan di bidang manajemen aset negara yang dikelola LMAN, pengelolaan dana investasi pemerintah di bidang aset negara, termasuk pendanaan pengadaan tanah untuk PSN.	Establish a policy formulation in the field of state asset management managed by LMAN, management of government investment funds in the sector of state assets, including funding for land acquisition for the National Strategic Project.
	4. Mengkoordinasikan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang manajemen aset negara yang dikelola LMAN, pengelolaan dana investasi pemerintah di bidang aset negara termasuk pendanaan pengadaan tanah untuk PSN.	Coordinating the preparation of norms, standards, procedures and criteria in the management of state assets managed by LMAN, management of government investment funds in the field of state assets including funding for land acquisition for the National Strategic Project.
	5. Menetapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang manajemen aset negara yang dikelola LMAN, pengelolaan dana investasi pemerintah di bidang aset negara termasuk pendanaan pengadaan tanah untuk PSN.	Establish the formulation of norms, standards, procedures and criteria in the management of state assets managed by LMAN, management of government investment funds in the field of state assets including funding for land acquisition for the National Strategic Project.
	6. Mengkoordinasikan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang manajemen aset negara yang dikelola LMAN, pengelolaan dana investasi pemerintah di bidang aset negara termasuk pendanaan pengadaan tanah untuk PSN.	Coordinating the provision of technical guidance and evaluation in the field of state asset management managed by LMAN, management of government investment funds in the field of state assets including funding for land acquisition for the National Strategic Project.
	7. Mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi LMAN.	Coordinate the implementation of LMAN administration.
	8. Menyelenggarakan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, dan rumah tangga LMAN.	Carrying out administrative, staffing, financial, and household affairs of LMAN.
	9. Mengkoordinasikan penyusunan uraian jabatan, Standard Operating Procedures (SOP), Analisis Beban Kerja (ABK), dan mitigasi manajemen risiko di lingkungan LMAN.	Coordinate the preparation of job descriptions, Standard Operating Procedures (SOP), Workload Analysis, and risk management mitigation within LMAN.
	10. Membina pegawai di lingkungan LMAN untuk meningkatkan motivasi dan prestasi kerja.	Fostering employees in the LMAN environment to increase motivation and work performance.
	11. Menetapkan laporan berkala dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) LMAN.	Establish periodic reports and Government Agencies Performance Accountability Reports of LMAN.
Direktur Keuangan dan Dukungan Organisasi / Director of Finance and Organizational Support	1. Menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan dokumen perencanaan anggaran, RBA, Renstra, proposal Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), menyusun dan mengelola Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), serta melaksanakan penyelenggaraan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.	Prepare materials for coordination and preparation of budget planning documents, Strategic Business Plan, Business Plan and Budget, Strategic Plan, Non-Tax State Revenue proposals, compile and manage the Budget Implementation Entry List, as well as carry out accounting operations and preparation of financial reports.
	2. Melaksanakan pengelolaan pendapatan dan belanja, kas, rekening, utang, piutang, dana investasi pemerintah yang dialokasikan ke LMAN termasuk pendanaan pengadaan tanah, pengelolaan dana lain yang bersumber dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) maupun sumber lain berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan, pengurusan pajak, penyusunan kebijakan pengelolaan investasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan keuangan serta investasi, pelaksanaan investasi jangka panjang berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan.	Carry out management of income and expenditure, cash, accounts, debts, receivables, government investment funds allocated to LMAN including funding for land acquisition, management of other funds sourced from the State Revenue and Expenditure Budget and other sources based on the approval of the Minister of Finance, tax administration, preparation of investment management policies, monitoring, evaluation, and reporting of financial and investment management, implementation of long-term investments based on the approval of the Minister of Finance.
	3. Melaksanakan kegiatan pengelolaan BMN, kerumahtanggaan, sarana dan prasarana, pengadaan barang dan jasa lingkup internal LMAN, pengembangan teknologi informasi, penyusunan dan evaluasi prosedur standar operasi, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan barang milik negara, kerumahtanggaan, dan teknologi informasi.	Carry out management activities for the State Properties, housekeeping, facilities and infrastructure, procurement of goods and services internal to LMAN, information technology development, preparation and evaluation of standard operating procedures, management and maintenance of hardware, software and networks, as well as monitoring, evaluation and reporting management of state property, household, and information technology.
	4. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis sumber daya manusia, pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, pengembangan organisasi, pengelolaan kinerja dan kepatuhan internal, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan sumber daya manusia dan pengelolaan kinerja.	Prepare materials for drafting human resource technical policies, implementing human resource management, organizational development, performance management and internal compliance, as well as monitoring, evaluating and reporting on human resource management and performance management.

Direktur Operasional dan Manajemen Risiko
/ Director of Operations and Risk Management

1.	Menyusun penyusunan program kerja penelitian dan analisis pasar properti, perencanaan kebutuhan dan pengembangan lahan/tanah, pelayanan konsultasi dan penilaian aset, pengelolaan manajemen risiko, serta monitoring dan evaluasi pengembangan lahan/tanah dan usaha.	Prepare the preparation of work programs for property market research and analysis, land needs planning and development, consulting services and asset valuation, risk management, as well as monitoring and evaluation of land/land and business development.
2.	Menyiapkan perencanaan pengamanan dan pengendalian aset, penyusunan skema pengamanan aset, koordinasi dan penyusunan skema kerja sama dengan pihak lain terkait pengamanan dan pengendalian aset, serta monitoring dan evaluasi kegiatan pengamanan dan pengendalian aset.	Preparing plans for securing and controlling assets, preparing schemes for securing assets, coordinating and preparing schemes for cooperation with other parties related to securing and controlling assets, as well as monitoring and evaluating activities for securing and controlling assets.
3.	Melaksanakan perencanaan dan pengadaan aset, penyusunan standar minimum rehabilitasi dan/atau rehabilitasi (upgrade), perencanaan dan pelaksanaan konstruksi aset, serta monitoring dan evaluasi proses pengadaan, rehabilitasi dan/atau renovasi (upgrade), dan pemeliharaan aset.	Carry out planning and procurement of assets, preparation of minimum standards for rehabilitation and/ or upgrades, planning and implementation of asset construction, as well as monitoring and evaluation of procurement, rehabilitation and/or renovation (upgrade) processes, and maintenance of assets.
4.	Mempersiapkan pelaksanaan penyusunan perjanjian, dokumentasi hukum, harmonisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan, pengurusan perijinan, penyusunan kajian dan pendapat hukum, monitoring dan evaluasi pelaksanaan perjanjian.	Preparing for the implementation of drafting agreements, legal documentation, harmonization of policies and laws and regulations, arranging permits, preparing legal studies and opinions, monitoring and evaluating the implementation of agreements.

Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan
/ Director of Land Procurement and Funding

1.	Menyiapkan penyusunan usulan pendanaan lahan/ tanah, penyusunan daftar pengadaan lahan/tanah untuk PSN sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan, pengelolaan basis data kebutuhan lahan/tanah, pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendanaan pengadaan tanah/lahan.	Preparing for the preparation of proposals for land funding, compiling a list of land procurement for the National Strategic Project as stipulated in statutory provisions, management of land needs databases, implementation of monitoring and evaluation of the implementation of funding for land procurement.
2.	Menyiapkan verifikasi dokumen penagihan pengadaan lahan/tanah, perencanaan penarikan dana pengadaan lahan tanah, rekomendasi pembayaran tagihan pengadaan lahan/tanah, serta rekonsiliasi hasil pembayaran pendanaan lahan/tanah;	Prepare verification of land procurement billing documents, plan for withdrawing land acquisition funds, recommendations for payment of bills for land acquisition, as well as reconciliation of the results of land funding payments;
3.	Menyiapkan pengurusan sertifikasi tanah, administrasi pertanahan, pemberian bantuan hukum dan pendapat hukum, penanganan perkara serta litigasi	Prepare the management of land certification, land administration, provision of legal aid and legal opinion, case handling and litigation.

Direktur Pengembangan dan Pendayagunaan
/ Director of Development and Utilization

1.	Menyiapkan pelaksanaan perencanaan dan pengembangan usaha dan aset.	Prepare the implementation of business and asset planning and development.
2.	Menyiapkan perencanaan dan pelaksanaan strategi komunikasi dan publikasi.	Prepare planning and implementation of communication and publication strategy.
3.	Menyiapkan perencanaan dan pelaksanaan strategi pemasaran aset.	Prepare planning and implementation of asset marketing strategy.
4.	Menyiapkan pelaksanaan pengelolaan dalam bentuk pendayagunaan dan kerja sama operasional aset termasuk pinjam pakai, pemindahtanganan aset, negosiasi pemanfaatan aset, dan penetapan tarif pemanfaatan aset.	Prepare the implementation of management in the form of operational utilization and cooperation of assets including borrowing, transferring of assets, negotiating the use of assets, and setting tariffs for the use of assets.
5.	Menyiapkan perencanaan pengamanan dan pengendalian aset, penyusunan skema pengamanan aset, koordinasi dan penyusunan skema kerja sama dengan pihak lain terkait pengamanan dan pengendalian aset.	Prepare plans for securing and controlling assets, preparing schemes for securing assets, coordinating and preparing schemes for cooperation with other parties related to securing and controlling assets.

Peningkatan Kompetensi untuk Direksi LMAN
Competency Improvement for LMAN Directors

Dalam rangka menjalankan peran sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan organisasi serta bisnis di bidang pengelolaan aset negara, Direksi LMAN berupaya meningkatkan kompetensi dengan mengikuti berbagai kegiatan untuk pelatihan, seminar maupun workshop, baik yang diadakan pihak internal maupun eksternal. Berikut program pengembangan kompetensi yang diikuti oleh Direksi LMAN sepanjang tahun 2022:

In order to carry out the role as the party responsible for organizational and business management in the management of state assets, the Directors of LMAN seek to increase competence by participating in various activities for training, seminars and workshops, both held by internal and external parties. The following is the competency development program that is being attended by the Directors of LMAN throughout 2022:

Nama / Names	**Pelatihan yang Diikuti** / Trainings
Basuki Purwadi	Executive Program Of Strategic Thinking In Decision Making
Sutanto Basuki	Executive Program Of Strategic Thinking In Decision Making
Tetik Fajar Ruwandari	Executive Program Of Strategic Thinking In Decision Making
Qoswara	Executive Program Of Strategic Thinking In Decision Making
Candra Giri Artanto	Executive Program Of Strategic Thinking In Decision Making

Sistem Pengendalian Internal
Internal Control System

Salah satu amanat di dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 129/PMK.05/2020 dalam rangka implementasi *good governance* adalah dengan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal pada Badan Layanan Umum (BLU) termasuk LMAN.

Sistem Pengendalian Internal bertujuan untuk mewujudkan:

One of the mandates in the Minister of Finance Regulation (PMK) Number 129/PMK.05/2020 in the framework of implementing good governance is the implementation of an Internal Control System at Public Service Agencies (BLU) including LMAN.

The Internal Control System aims to realize:

i. Efektivitas dan efisiensi kegiatan BLU;
The effectiveness and efficiency of BLU activities;

ii. Keandalan dan integritas informasi keuangan dan kinerja BLU;
Reliability and integrity of BLU financial and performance information;

iii. Pengamanan aset BLU; dan
Security of BLU assets; and

iv. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
Compliance with laws and regulations.

Pada pertengahan tahun 2019, Direktur Utama LMAN telah menetapkan perangkat Satuan Pengawas Internal (SPI) LMAN dalam rangka memastikan bahwa efektivitas sistem pengendalian internal di LMAN (lingkungan pengendalian, manajemen risiko, aktivitas pengendalian, sistem informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern) telah berjalan dengan baik.

Pada tahun 2022, SPI telah melakukan berbagai kegiatan pengawasan baik berupa kegiatan asuransi maupun kegiatan konsultansi yang di antaranya adalah Reviu atas Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK), Reviu atas Laporan Keuangan, Reviu atas Potensi PNBP, Eksaminasi Laporan Harta Kekayaan, Pendampingan Kegiatan Pengawasan Inspektorat Jenderal dan Pemeriksaan BPK, sosialisasi pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Keuangan, sosialisasi pencegahan *fraud*, serta terlibat aktif dalam beberapa pembahasan penyusunan Peraturan Menteri Keuangan yang berkaitan dengan proses bisnis utama LMAN dan Peraturan Direktur Utama LMAN.

Pengendalian Internal di LMAN dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan efektivitas implementasi dan kecukupan rancangan sesuai dengan KMK-32/ KMK.09/2013 tentang Kerangka Kerja Penerapan Pengendalian Intern dan Pedoman Teknis Pemantauan Pengendalian Intern. Sistem Pengendalian Internal terdiri dari struktur organisasi, metode dan ukuran- ukuran untuk menjaga dan mengarahkan jalannya organisasi agar bergerak sesuai dengan tujuan dan program organisasi dan mendorong efisiensi serta dipatuhinya kebijakan manajemen.

Sistem Pengendalian Internal yang handal dan efektif dapat memberikan informasi yang tepat bagi manajer maupun dewan direksi yang bagus untuk mengambil keputusan maupun kebijakan yang tepat untuk pencapaian tujuan organisasi yang lebih efektif pula.

In mid-2019, the Main Director of LMAN established the LMAN Internal Supervisory Unit in order to ensure that the effectiveness of the internal control system at LMAN (control environment, risk management, control activities, information and communication systems, and internal control monitoring) has been running well.

In 2022, SPI has carried out various supervisory activities, both in the form of insurance activities and consultancy activities, which include Reviewing Financial Reporting Internal Control, Reviewing Financial Reports, Reviewing PNBP Potential, Examination of Asset Reports, Assistance in Inspectorate Supervision Activities BPK General and Audit, socialization of gratuity control within the Ministry of Finance, socialization of fraud prevention, and actively involved in several discussions on the preparation of Minister of Finance Regulations related to LMAN's main business processes and LMAN's main Director Regulations.

Internal control at LMAN is carried out through monitoring the effectiveness of implementation and design adequacy in accordance with KMK-32/ KMK.09/2013 concerning the Framework for Implementing Internal Control and Technical Guidelines for Monitoring Internal Control. The Internal Control System consists of an organizational structure, methods and measures to maintain and direct the course of the organization so that it moves according to the goals and programs of the organization and encourages efficiency and compliance with management policies.

A reliable and effective Internal Control System can provide the right information for good managers and the board of directors to make the right decisions and policies to achieve more effective organizational goals.

Penanaman semangat integritas bagi pegawai LMAN melalui seminar Hari Antikorupsi Sedunia
/ Cultivating a spirit of integrity for LMAN employees through the World Anti-Corruption Day Seminar

Fungsi dan Tujuan Sistem Pengendalian Internal
Functions and Objectives of the Internal Control System

Sistem Pengendalian Internal (SPI) berfungsi sebagai pengatur sumber daya yang telah ada untuk dapat difungsikan secara maksimal guna memperoleh pengembalian (*gains*) yang maksimal pula dengan pendekatan perancangan yang menggunakan asas *Cost-Benefit*.

The Internal Control System functions as a regulator of existing resources so that they can function optimally in order to obtain maximum returns (gains) with a design approach that uses the Cost-Benefit principle.

Tujuan penerapan SPI dalam organisasi adalah untuk menghindari penyimpangan dari prosedur, laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan dapat dipercaya dan kegiatan organisasi sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan terutama manajemen berusaha untuk menghindari risiko dari penerapan suatu sistem.

The purpose of implementing the Internal Control System in the organization is to avoid deviations from procedures, the financial reports produced by the company can be trusted and the activities of the organization are in line with applicable laws and regulations. This shows that companies, especially management, are trying to avoid the risks of implementing a system.

Aspek Pemantauan Sistem Pengendalian Internal
Monitoring Aspect of Internal Control System

Sistem Pengendalian Intern yang diaplikasikan oleh LMAN mengacu pada komponen-komponen sebagaimana yang ditetapkan oleh Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO), yaitu:

The Internal Control System applied by LMAN refers to the components as determined by the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), namely:

Lingkungan Pengendalian / Control Environment

Manajemen, dalam hal ini Board of Directors (BoD), harus menciptakan lingkungan pengendalian yang baik di lingkungan LMAN. Hal ini dibuktikan dengan adanya peraturan Direktur Utama tentang Nilai-Nilai LMAN dan Peraturan Direktur Lembaga Manajemen Aset Negara Nomor 27/LMAN/2016 yang kemudian diubah dengan Peraturan Direktur Utama Nomor 7/LMAN/2019 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Sumber Daya Manusia di Lingkungan Lembaga Manajemen Aset Negara.

Management, in this case the Board of Directors (BoD), must create a good control environment within LMAN. This is demonstrated by the President Director's regulation regarding LMAN's Values and the Regulation of the Director of the State Asset Management Institute No. 27/LMAN/2016 which was later amended by the President Director's Regulation Number 7/LMAN/2019 concerning the Code of Ethics and Code of Conduct for Human Resources in the Environment State Asset Management Institute.

Penaksiran Risiko / Risk Assessment

Penaksiran risiko merupakan identifikasi Lembaga dan analisis terhadap risiko yang relevan sehingga dapat dilakukan pengelolaan terhadap risiko tersebut. LMAN menyadari pentingnya kegiatan penaksiran risiko. Oleh karena itu, LMAN telah memiliki Keputusan Direktur Utama LMAN No. 44/LMAN/2018 yang yang kemudian diubah dengan No. 66/ LMAN/2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Lembaga Manajemen Aset Negara.

Risk assessment is the Agency's identification and analysis of relevant risks so that these risks can be managed. LMAN realizes the importance of risk assessment activities. Therefore, LMAN has the Decree of the President Director of LMAN No. 44/LMAN/2018 which was later amended by No. 66/ LMAN/2019 on the Implementation of Risk Management in State Asset Management Institutions.

Aktivitas Pengendalian / Control Activity

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan, prosedur, dan aturan yang memberikan jaminan memadai bahwa tujuan perusahaan dapat tercapai. Dalam implementasinya, aktivitas pengendalian yang dilakukan LMAN adalah pemisahan fungsi antara divisi perbendaharaan dengan divisi anggaran, serta divisi perencanaan lahan dengan divisi pendanaan lahan.

Control activities are the policies, procedures, and rules that provide reasonable assurance that company objectives can be achieved. In its implementation, control activities carried out by LMAN are the separation of functions between the treasury division and the budget division, as well as the land planning division and the land funding division

Informasi dan Komunikasi / Information and Communication

Terkait informasi dan komunikasi, rapat BoD diadakan setiap minggu untuk membahas permasalahan yang dihadapi oleh setiap unit dan mencarikan solusi pemecahan.

Regarding information and communication, BoD meetings are held every week to discuss problems faced by each unit and find solutions

Pemantauan /Monitoring

Pemantauan terkait pengendalian menjadi tugas unit Satuan Pengawasan Intern (SPI). Dalam implementasinya, sepanjang tahun 2019 SPI melakukan berbagai kegiatan asuransi dalam bentuk reviu, monitoring, evaluasi, dan pemantauan kegiatan.

Monitoring related to control is the task of the Internal Audit Unit. In its implementation, throughout 2019 the Internal Audit Unit carried out various insurance activities in the form of review, monitoring, evaluation and activity monitoring.

Pengendalian internal di LMAN berjalan dengan efektif. Dari manajemen atas sudah sangat menyadari pentingnya pengendalian internal. Untuk prosedur yang melibatkan berbagai divisi, seperti proses Kerja Sama Operasi sewa yang melibatkan beberapa divisi (Pendayagunaan Properti, Hukum dan Perjanjian, serta Perbendaharaan), sebuah dokumen disusun untuk melakukan pemantauan walau masih belum dalam bentuk aplikasi.

The Internal Control at LMAN runs effectively. The top management is aware of the importance of Internal Control. For procedures that involve various divisions, such as the Operational Rental Cooperation that involves several divisions (Property Utilization, Law and Contracts, and Treasury), a document is prepared to carry out monitoring although it has not yet manifested in an application.

Pelaksanaan Pemantauan Sistem Pengendalian Internal 2022
Implementation of 2022 Internal Control System Monitoring

SPI telah melakukan reviu atas Penilaian Pengendalian Internal Tingkat Entitas. Faktor-faktor yang dinilai adalah sebagai berikut:

SPI has conducted a review of the Entity Level Internal Control Assessment. The factors assessed are as follows:

Lingkungan Pengendalian / Control Environment

1. Integritas, nilai etika, dan perilaku etis;
   / Integrity, ethical values, and ethical behavior;
2. Kesadaran pimpinan unit kerja atas pengendalian dan gaya operasi yang dimiliki oleh pimpinan unit kerja;
   / Awareness of the head of the work unit on the control and style of operation owned by the head of the work unit;
3. Komitmen terhadap kompetensi;
   / Commitment to competence;
4. Struktur organisasi serta penetapan wewenang dan tanggung jawab;
   / Organizational structure and determination of authority and responsibility;
5. Kebijakan dan praktik yang berkaitan dengan SDM.
   / Policies and practices related to HR.

Penaksiran Risiko / Risk Assessment

1. Sasaran unit kerja telah disusun dan dikomunikasikan;
   / Work unit targets have been developed and communicated;
2. Telah dilakukan penilaian risiko yang meliputi perkiraan signifikansi suatu risiko, penilaian terhadap potensi risiko, dan penanganannya;
   / A risk assessment has been carried out which includes an estimate of the significance of a risk, an assessment of potential risks, and their handling;
3. Adanya mekanisme untuk mengantisipasi, mengidentifikasi, dan bereaksi terhadap perubahan yang dapat menghasilkan dampak besar dan menyebar pada unit kerja.
   / There is a mechanism to anticipate, identify, and react to changes that can have a large impact and spread to work units.

Aktivitas Pengendalian / Control Activity

1. Kebijakan dan prosedur yang dibutuhkan untuk pengendalian setiap kegiatan telah diterapkan secara tepat;
   / Policies and procedures needed to control each activity have been implemented appropriately;
2. Evaluasi atas perbedaan capaian kinerja dan pelaksanaan tindakan perbaikan yang tepat serta tepat waktu;
   / Evaluation of differences in performance achievements and implementation of appropriate and timely corrective actions;
3. Adanya pemisahan atau pembagian tugas kepada pihak yang berbeda untuk mengurangi risiko kecurangan atau tindakan yang tidak layak;
   / There is segregation or distribution of tasks to different parties to reduce the risk of fraud or inappropriate actions;
4. Pembatasan akses terhadap dokumen, catatan, asset, data, dan aplikasi;
   / Access restrictions on documents, records, assets, data and applications;
5. Adanya mekanisme otorisasi dan persetujuan terhadap transaksi dan kejadian penting;
   / There is an authorization and approval mechanism for important transactions and events;
6. Dokumentasi kegiatan yang baik.
   / Good documentation of activities.

Informasi dan Komunikasi / Information and Communication

1. Sistem menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh unit kerja terkait, baik informasi yang berasal dari dalam dan luar unit kerja secara akurat;
   / The system provides information needed by the related work unit, both information that comes from within and outside the work unit accurately;
2. Informasi tersedia bagi orang yang tepat dalam rincian yang cukup dan tepat waktu;
   / Information is available to the right people in sufficient detail and in a timely manner;
3. Sistem informasi dikembangkan atau diperbaiki dengan berdasarkan pada rencana strategis unit kerja;
   / The information system is developed or improved based on the work unit's strategic plan;
4. Unit kerja memastikan dan mengawasi keterlibatan pengguna dalam pengembangan, perbaikan, dan pengujian program/sistem informasi;
   / The work unit ensures and oversees user involvement in the development, improvement and testing of information systems/programs;documents, records, assets, data and applications;
5. Telah disusun rencana pemulihan pusat data utama apabila terjadi bencana;
   / A main data center recovery plan has been prepared in the event of a disaster;
6. Terdapat komunikasi yang efektif mengenai tugas dan tanggung jawab pengendalian yang dimiliki oleh masing-masing pihak;
   / There is effective communication regarding the control duties and responsibilities of each party;
7. Terdapat saluran komunikasi untuk melaporkan adanya dugaan pelanggaran/ketidaktepatan dan informasi negatif;
   / There is a communication channel to report suspected violations/ inaccuracies and negative information;
8. Adanya respons yang tepat waktu terhadap komunikasi yang diterima dari pengguna, rekanan, dan pihak eksternal lain.
   / There is a timely response to communications received from users, partners, and other external parties.

Pemantauan / Monitoring

1. Terdapat mekanisme reviu atas pelaksanaan kegiatan pengendalian;
   / There is a review mechanism for the implementation of control activities;
2. Telah diambil tindakan perbaikan terhadap kesalahan atau sebagai tanggapan atas rekomendasi dan saran perbaikan bagi unit kerja;
   / Actions have been taken to correct errors or as a response to recommendations and suggestions for improvement for the work unit;
3. Terdapat prosedur untuk mendeteksi adanya pengendalian internal yang diabaikan.
   / There is a procedure for detecting neglected internal controls.

Atas penilaian Pengendalian Internal Tingkat Entitas tersebut, LMAN mendapatkan skor sebesar 100%.

Based on the assessment of the Entity Level Internal Control, LMAN received a score of 100%.

Capaian Indikator Kinerja Utama pada Sasaran Strategis pada Pengendalian dan Pengawasan yang Efektif
Achievement of Key Performance Indicators on Strategic Targets on Effective Control and Supervision

IKU / Key Performance Indicators	Target	Realisasi / Realizations	%
Penyelesaian rekomendasi hasil pembinaan/ pengawasan/pemeriksaan internal dan eksternal / Completion of recommendations on the results of internal and external guidance/supervision/examination	90	96,92	100
Persentase Temuan BPK atas LK BUN yang Ditindaklanjuti / Percentage of BPK Findings on LK BUN that were Followed Up	89,5	100	111,73
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti (ITJEN) / Percentage of Followed Up Supervision Results Recommendations (Inspectorate General)	97	100	103,09

Pengendalian dan Pengawasan yang Efektif
Effective Control and Oversight

Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak internal maupun eksternal, yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan telah dilakukan sesuai dengan perencanaan dan mengikuti prosedur atau ketentuan yang berlaku.

Supervision is an activity carried out by internal and external parties, which aims to ensure the implementation of work or activities has been carried out in accordance with the plan and following the applicable procedures or provisions.

Selain sistem pengawasan, LMAN juga menerapkan sistem pengendalian atau tindakan korektif yang dilaksanakan bila dari hasil pengawasan ditemukan penyimpangan atau kendala. Pengawasan dan pengendalian dapat dikatakan efektif apabila pengawasan dan pengendalian yang dilakukan mampu mendukung tercapainya tujuan kegiatan.

In addition to the monitoring system, LMAN also implements a control system or corrective actions that are carried out if deviations or obstacles are found from the monitoring results. Supervision and control can be said to be effective if the supervision and control carried out is able to support the achievement of activity objectives.

Saldo Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Pemeriksaan/Pengawasan Auditor
Balance of Completion Follow-Up of Auditor's Inspection/Supervision Recommendations

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, terdapat beberapa pihak di luar LMAN yang melakukan pemeriksaan/pengawasan. Tujuan dari pemeriksaan/ pengawasan ini adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa pelaporan keuangan telah disusun secara akuntabel serta kegiatan operasional organisasi telah sesuai dengan ketentuan yang ada. Pihak-pihak yang melakukan pemeriksaan/ pengawasan di LMAN pada tahun 2022 adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kantor Akuntan Publik (KAP), dan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (Itjen).

In carrying out its duties and functions, there are several parties outside LMAN that carry out inspections/supervision. The purpose of this inspection/supervision is to provide adequate assurance that financial reporting has been prepared in an accountable manner and that the organization's operational activities are in accordance with existing regulations. The parties conducting inspections/ supervision at LMAN in 2022 are the Supreme Audit Agency (BPK), Public Accounting Firm (KAP), and the Inspectorate General of the Ministry of Finance (Itjen).

Atas rekomendasi-rekomendasi yang telah diberikan oleh BPK, LMAN telah melakukan upaya akselerasi penyelesaiannya. Hal ini dibuktikan dengan adanya 4 (empat) rekomendasi yang dinyatakan selesai pada Semester I 2022 dan 3 (tiga) rekomendasi yang diusulkan selesai pada Semester II 2022.

Rincian *outstanding* rekomendasi per jenis pemeriksaan serta periodenya adalah sebagai berikut:

Based on the recommendations given by BPK, LMAN has made efforts to accelerate their completion. This is evidenced by the existence of 4 (four) recommendations that were declared as completed in Semester I 2022 and 3 (three) recommendations that were proposed to be completed in Semester II 2022.

Details of outstanding recommendations per type of inspection and period are as follows:

Laporan Hasil Pemeriksaan / Inspection Report	**Jumlah Rekomendasi Awal** / Number of Initial Recommendation	**Saldo Rekomendasi per Semester I 2022** / Recommendation Balance per Semester I 2022	**Sesuai PTL Semester I 2022** / According to the PTL Semester II 2022	**Diusulkan Sesuai PTL Semester I 2022** / Proposed According to the Results of the Discussion of PTL Semester II 2022	**Dinyatakan Sesuai Hasil Pembahasan PTL Semester II 2022** / Declared According to PTL Semester II 2022 Results	**Saldo Rekomendasi pada 2022** / Recommendation Balance per Semester I 2022
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	b - (c + e)
LKPP 2020	1	1	1	-	-	-
LK BUN - 2020	1	1	1	-	-	-
LK BUN - 2021 *)	1	1	-	1	0	1
LK BA 015 - 2021 *)	5	5	-	5	4	1
Kinerja (PDTT) - 2018	25	7	-	3	1	6 **)
Kinerja (PDTT) - 2021 *)	19	19	2	7	7	10 **)
BA 999.03 UAKPA LMAN - 2021 *)	7	7	-	7	6	1 **)

Konstruksi aset kelolaan LMAN memerhatikan estetika dan fungsionalitas bangunan
/ The construction of LMAN Assets observes the aesthetics and functionality of the building

*) LHP baru diterima pada tahun 2022

**) Penyelesaian rekomendasi memerlukan koordinasi dengan pihak eksternal LMAN

*) Inspection Result Report accepted in 2022

**) Completion of recommendations that requires coordination with LMAN's external parties

Selain penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK di atas, LMAN juga telah melakukan penyelesaian atas 4 (empat) rekomendasi pengawasan Itjen terkait dengan proses bisnis pengadaan tanah PSN dan Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Maturitas SPIP LMAN. Adapun terkait dengan rekomendasi pemeriksaan KAP atas Laporan Keuangan BLU LMAN tahun 2022 telah seluruhnya ditindaklanjuti.

In addition to completing the follow-up on BPK's recommendations above, LMAN has also completed 4 (four) recommendations for the supervision of the Inspectorate General in regard to the National Strategic Project's land acquisition business processes and Quality Assurance on LMAN's SPIP Maturity Self-Assessment. As for the KAP audit recommendations on the 2022 BLU LMAN Financial Report, all of them have been followed up.

Pembangunan Berkelanjutan

Sustainable Development

7

Pembangunan Berkelanjutan
Sustainable Development

Tentang Pembangunan Berkelanjutan
On Sustainable Development

Pembangunan yang bijak adalah pembangunan yang berkelanjutan, yakni pembangunan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup seluruh masyarakat, baik dari generasi sekarang maupun yang akan datang, tanpa mengeksploitasi penggunaan sumberdaya alam yang melebihi kapasitas dan daya dukung Bumi.

Wise development is sustainable development, namely development that aims to improve the quality of life of the entire community, both for present and future generations, without exploiting the use of natural resources that exceed the capacity and carrying capacity of the Earth.

Aset Tamansari, salah satu aset kelolaan LMAN
/ Tamansari, one of LMAN assets

Pembangunan berkelanjutan bisa dicapai melalui empat elemen:
Sustainable development can be achieved through four elements:

1. Pertumbuhan dan keadilan ekonomi;
   / Economic growth and equity;
2. Pembangunan sosial;
   / Social development;
3. Konservasi sumber daya alam;
   / Conservation of natural resources;
4. Tata kelola yang baik.
   / Good governance.

Sebanyak 193 negara anggota PBB sepakat untuk menjadikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) sebagai kerangka agenda pembangunan dan kebijakan politis mulai 2016 sampai 2030. Pemerintah di setiap negara anggota PBB memiliki tanggung jawab menyusun strategi dan mewujudkan SDGs. Negara adalah pihak yang memiliki tanggung jawab utama dalam pembangunan sosial dan ekonomi, pembuatan kebijakan nasional, dan menentukan strategi pembangunan yang diperlukan untuk tujuan mencapai pembangunan berkelanjutan. Pemerintah semua negara diharapkan menerapkan agenda dan kebijakan politis pembangunan ekonomi nasional, untuk meningkatkan kemakmuran dan sekaligus melindungi Bumi.

As many as 193 UN member countries agreed to make the Sustainable Development Goals (SDGs) a framework for development agendas and political policies from 2016 to 2030. The government in each UN member country has the responsibility to develop strategies and realize the SDGs. The state is the party that has primary responsibility for social and economic development, for making national policies, and for determining the necessary development strategies for the purpose of achieving sustainable development. The governments of all countries are expected to implement political agendas and policies for national economic development, to increase prosperity and at the same time protect the Earth.

Kontribusi LMAN terhadap pembangunan berkelanjutan terutama diwujudkan melalui dua hal:

LMAN's contribution to sustainable development is primarily manifested in two ways:

1. Pendanaan pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur dalam skema Proyek Strategis Nasional;
   / Funding for land acquisition for infrastructure development under the National Strategic Project scheme;

2. Pengelolaan Aset Milik Negara.
   / Management of State-Owned Assets.

Kedua jenis layanan yang diberikan LMAN di atas mampu memberikan *multiplier effect*, antara lain berupa peningkatan pendapatan dan konsumsi masyarakat sekitar maupun penyerapan tenaga kerja yang jumlahnya signifikan. Hal ini sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*).

The two types of services provided by LMAN above are capable of providing multiplier effects, including increasing the income and consumption of the surrounding community as well as absorbing a significant number of workers. This is in line with the Sustainable Development Goals.

Gerbang Tol Cilandak yang menghubungkan Depok dengan Antasari
/ Cilandak Toll Gate that connets Depok and Antasari

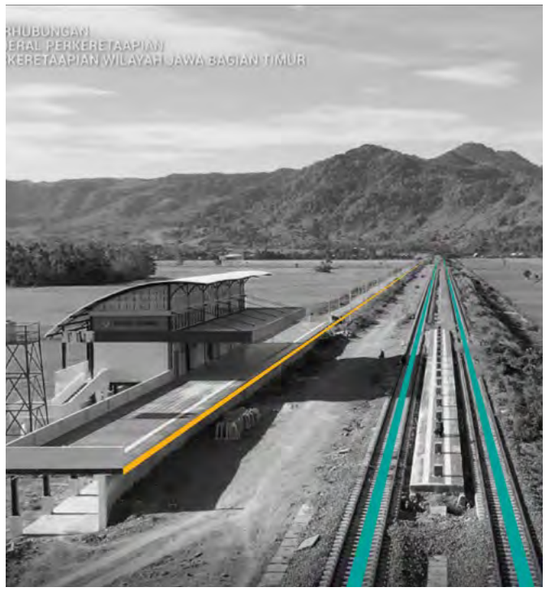

Stasiun kereta api Takkalasi, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan
/ Takkalasi Railway Station, Barru Regency, South Sulawesi

SDGs menyasar pada 17 tujuan, yakni mengurangi kemiskinan, mengakhiri kelaparan, kesehatan dan kesejahteraan, kualitas pendidikan yang baik, kesetaraan *gender*, air bersih dan sanitasi, akses ke energi yang terjangkau, pertumbuhan ekonomi, inovasi dan infrastruktur.

The SDGs target 17 goals, namely reducing poverty, ending hunger, health and well-being, good quality education, gender equality, clean water and sanitation, access to affordable energy, economic growth, innovation and infrastructure.

Proyek Strategis Nasional
National Strategic Project

Proyek Strategis Nasional (PSN) adalah proyek-proyek infrastruktur Indonesia yang dianggap strategis dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan di daerah. PSN diatur melalui Peraturan Presiden, sementara pelaksanaan proyek dilakukan secara langsung oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau badan usaha serta Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) dengan mengutamakan penggunaan komponen dalam negeri. Proyek Strategis Nasional bertujuan untuk memperbaiki kualitas dan ketersediaan (stok) infrastruktur Indonesia secara cepat sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas perekonomian nasional.

Pembangunan infrastruktur dapat mendorong mobilitas, produktivitas, konektivitas, akses, dan berkelanjutan antar generasi. Itu sebabnya, meski pada masa COVID-19, pemerintah Indonesia terus melakukan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar Indonesia tidak terjebak dalam *middle income trap*. Secara garis besar, *middle income trap* adalah istilah yang mengacu pada keadaan ketika sebuah negara berhasil mencapai ke tingkat pendapatan menengah, tetapi tidak dapat keluar dari tingkatan tersebut untuk menjadi negara maju.

The National Strategic Project is Indonesian infrastructure projects that are considered strategic in increasing economic growth, equitable development, community welfare, and development in the regions. The National Strategic Project is regulated through a Presidential Regulation, while project implementation is carried out directly by the central government, regional governments, and/or business entities as well as Business Entity Government Cooperation by prioritizing the use of domestic components. The National Strategic Project aims to quickly improve the quality and availability of Indonesia's infrastructure so that it can increase the efficiency and productivity of the national economy.

Infrastructure development can promote mobility, productivity, connectivity, access, and be sustainable between generations. That is why, even during the COVID-19 period, the Indonesian government continued to build infrastructure to improve people's welfare so that Indonesia would not be trapped in the middle income trap. Broadly speaking, the middle income trap is a term that refers to a situation when a country manages to reach the middle income level, but cannot get out of that level to become a developed country.

Keberadaan Proyek Strategis Nasional telah terbukti meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Di tengah keadaan pandemi, Proyek Strategis Nasional yang sudah selesai telah menciptakan lebih dari 11 juta tenaga kerja langsung maupun tidak langsung

The existence of a National Strategic Project has been proven to increase investment and create jobs for all Indonesian people. In the midst of a pandemic, the completed National Strategic Projects have created more than 11 million workers, directly or indirectly.

Selain itu, investasi pembangunan Proyek Strategis Nasional di berbagai sektor memiliki manfaat terhadap pengembangan wilayah dan perekonomian daerah, serta nilai tambah industri. Penyelesaian PSN ini dapat menimbulkan *multiplier effect* secara sosial dan ekonomi yang akan terus bertambah seiring percepatan penyelesaian berbagai proyek strategis ke depan. Pembangunan PSN yang tersebar di berbagai wilayah berupaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur di Indonesia secara tidak langsung dapat mengurangi kesenjangan pertumbuhan pendapatan per kapita dan kesejahteraan antar daerah secara jangka panjang.

Multiplier effect merupakan pengaruh yang meluas yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan ekonomi dimana peningkatan pengeluaran nasional mempengaruhi peningkatan pendapatan dan konsumsi. Fungsi dari *multiplier effect* yang paling banyak dirasakan adalah efek berganda pada investasi, pengeluaran pemerintah, pajak, dan subsidi pemerintah, yang memberikan dampak pengganda yang sangat besar bagi peningkatan pendapatan dan konsumsi masyarakat sekitar maupun penyerapan tenaga kerja.

Proyek Strategis Nasional diharuskan memenuhi beberapa kriteria, salah satunya adalah kriteria strategis. Kriteria strategis mengacu kepada manfaat proyek tersebut terhadap perekonomian, kesejahteraan sosial, pertahanan, keamanan nasional, serta konektivitas dan keragaman distribusi antar pulau.

Dengan masuk daftar Proyek Strategis Nasional, sebuah proyek infrastruktur memperoleh beberapa keunggulan berupa percepatan pembangunan, karena setiap hambatan baik regulasi dan perizinan wajib diselesaikan oleh pejabat terkait. Selain itu, proyek PSN juga mendapat manfaat percepatan waktu penyediaan lahan dan jaminan keamanan politik.

Proyek Strategis Nasional juga diarahkan dan disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Nasional yang menitikberatkan pada tujuan peningkatan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas nasional, penyediaan infrastruktur dasar seperti air minum dan sanitasi, infrastruktur kelistrikan, menjamin ketahanan air, pangan, energi, dan mengembangkan sistem transportasi massal perkotaan.

In addition, investments in the development of National Strategic Projects in various sectors have benefits for regional and regional economic development, as well as industrial added value. Completion of this PSN can create a multiplier effect socially and economically which will continue to increase in line with the acceleration of the completion of various strategic projects going forward. PSN development that is spread across various regions seeks to improve the quality and quantity of infrastructure in Indonesia which can indirectly reduce the gap in growth per capita income and welfare between regions in the long term.

The multiplier effect is a widespread effect caused by an economic activity where an increase in national spending affects an increase in income and consumption. The function of the multiplier effect that is most widely felt is the multiplier effect on investment, government spending, taxes and government subsidies, which has a very large multiplier effect on increasing the income and consumption of the surrounding community as well as employment.

The National Strategic Projects are required to meet several criteria, one of which is strategic criteria. Strategic criteria refer to the benefits of the project on the economy, social welfare, defense, national security, as well as inter-island connectivity and distribution diversity.

By entering the list of National Strategic Projects, an infrastructure project gains several advantages in the form of accelerating development, because any obstacles, both regulatory and permitting, must be resolved by the relevant officials. In addition, the PSN project also benefits from accelerated land acquisition times and guarantees of political security.

The National Strategic Project is also directed and adjusted to the National Development Plan which focuses on the goal of improving infrastructure to improve national connectivity, provision of basic infrastructure such as drinking water and sanitation, electricity infrastructure, guaranteeing water, food and energy security, and developing urban mass transportation systems.

Pengerjaan proyek Jalan Tol Akses IKN / Construction of the toll road for the new capital access

Pemerintah berkomitmen untuk mendorong dan meningkatkan upaya pembiayaan proyek melalui *creative financing* untuk Proyek Strategis Nasional dalam rangka mengurangi beban APBN untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, PSN juga menghadapi hambatan dari segi pembebasan lahan, perencanaan dan penyiapan, pendanaan, perizinan, dan pelaksanaan konstruksi.

The government is committed to encouraging and increasing project financing efforts through creative financing for National Strategic Projects in order to reduce the burden on the state budget to meet infrastructure needs. However, in its implementation, PSN also faces obstacles in terms of land acquisition, planning and preparation, funding, licensing, and construction implementation.

Peran LMAN dalam Penyelesaian Proyek Strategis Nasional
LMAN's Role in the Completion of the National Strategic Projects

Berbagai peraturan disusun demi mempercepat penyelesaian proyek strategis, di antaranya adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2020 yang mengamanatkan KPPIP berkoordinasi dengan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) untuk mendukung percepatan proses pengadaan tanah.

Pada awalnya, pendirian LMAN bertujuan untuk mengelola aset negara, tetapi dalam perjalanannya ada permasalahan pengadaan tanah untuk proyek-proyek strategis nasional. Tidak adanya kepastian pengadaan tanah telah menyebabkan pelaksanaan pembangunan proyek-proyek strategis nasional tertunda. LMAN menjadi salah satu pemain penting untuk pengadaan lahan agar sejalan dengan proses konstruksi dan perencanaan infrastruktur yang ditetapkan pemerintah. Hal ini karena komitmen pemerintah untuk pendanaan pengadaan lahan sangat besar demi mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan memacu pemerataan pertumbuhan ekonomi dan memberikan efek berganda bagi ekonomi.

Terdapat berbagai jenis pembangunan infrastruktur yang lahannya dibebaskan oleh LMAN. Misalnya, untuk jalan tol, bendungan, irigasi, air baku, jalur kereta api, pelabuhan, dan KEK Mandalika, total direalisasikan sejak awal hingga saat penerbitan laporan ini mencapai lebih dari Rp90 triliun.

Various regulations have been drafted to accelerate the completion of strategic projects, including Government Regulation (PP) Number 42 of 2021 concerning Ease of National Strategic Projects and Presidential Regulation (Perpres) Number 66 of 2020 which mandates KPPIP to coordinate with the State Asset Management Institute (LMAN) to support acceleration of the land acquisition process.

Initially, the establishment of LMAN was aimed at managing state assets, but along the way there were problems with land acquisition for the National Strategic Projects. The lack of certainty over land acquisition has delayed the implementation of the national strategic development projects. LMAN is one of the important players for land acquisition to be in line with the construction process and infrastructure planning set by the government. This is because the government's commitment to funding land acquisition is very large in order to accelerate infrastructure development, so that it can provide benefits to the community and spur economic growth equity and provide a multiplier effect on the economy.

There are various types of infrastructure development for which land has been acquired by LMAN. For example, for toll roads, dams, irrigation, raw water, railroads, ports and KEK Mandalika, the total realized from the beginning until the time of publication of this report reached more than Rp90 trillion.

Multiplier Effect dari Pengelolaan Aset Negara
Multiplier Effect of State Asset Management

Selain melalui pembebasan lahan untuk Proyek Strategis Nasional, multiplier effect juga dihasilkan dari pengelolaan aset negara oleh LMAN. Agar tidak membebani keuangan negara hanya untuk pemeliharaan dan penjagaan, aset negara harus dikelola agar dapat menjadi tempat yang mendukung produktivitas masyarakat. LMAN ditugaskan untuk mendukung optimalisasi manajemen aset negara guna meningkatkan manfaat ekonomi dan sosial, sekaligus menggali potensi return on assets dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari Barang Milik Negara.

Hingga akhir tahun 2022, LMAN mengelola 292 aset properti yang sebagian besar terletak di Jakarta, 2 aset kilang di Bontang dan Lhokseumawe serta 1 aset kawasan berupa kawasan lapangan golf Ciperna, Jawa Barat. Aset kelolaan tersebut berada pada kondisi free and clear dan non-free and non-clear. Dari jumlah tersebut, 96 aset properti berhasil dioptimalkan.

Di antara asset-aset kelolaan LMAN yang telah direnovasi dan direvitalisasi guna mendapatkan kondisi yang tertinggi dan terbaik adalah aset Dipati Ukur 33, aset Panglima Polim 20, dan aset Kebayoran Lama 174. Status ketiga aset tersebut adalah sudah teroptimalisasi.

Uraian di bawah ini bisa memberi gambaran lebih detail mengenai *multiplier effect* dari pengelolaan aset milik negara yang dilakukan oleh LMAN.

In addition to land acquisition for the National Strategic Projects, a multiplier effect is also generated from the management of state assets by LMAN. In order not to burden the state's finances only for maintenance and care, state assets must be managed so that they can become places that support people's productivity. LMAN is assigned to support the optimization of state asset management in order to increase economic and social benefits, as well as exploring the potential return on assets and Non-Tax State Revenue (PNBP) originating from State Property.

Until the end of 2022, LMAN manages 292 property assets, mostly located in Jakarta, 2 refinery assets in Bontang and Lhokseumawe and 1 area asset in the form of the Ciperna golf course area, West Java. The assets under management are in free and clear and non-free and non-clear conditions. Of these, 96 property assets were successfully optimized.

Among the assets under management of LMAN that have been renovated and revitalized to obtain the highest and best conditions are the asset at Dipati Ukur 33, the asset at Panglima Polim 20, and the asset at Kebayoran Lama 174. The status of these three assets is already optimized.

The description below can provide a more detailed description of the multiplier effect of the management of state-owned assets by LMAN.

Nama Aset / Assets	**Nilai dampak/manfaat per tahun** / Impact/benefit value per year
Aset Dipati Ukur 33 / Asset at Dipati Ukur 33	Rp20.854.576.326
Aset Panglima Polim 20 / Asset at Panglima Polim 20	Rp5.068.095.341
Aset Kebayoran Lama 174 / Asset at Kebayoran Lama 174	Rp869.746.384

Kaitan dengan Pencapaian SDG
Regarding SDG Achievement

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya, baik dalam pendanaan pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur dalam skema Proyek Strategis Nasional maupun dalam pengelolaan Aset Milik Negara, LMAN membawa dampak langsung dan dampak pengganda yang sejalan dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama Pilar Pembangunan Sosial dan Pilar Pembangunan Ekonomi, yang antara lain mencakup:

Based on the above explanation, it can be concluded that in carrying out its business activities, both in funding land acquisition for infrastructure development in the National Strategic Project and in managing State-Owned Assets, LMAN has a direct impact and a multiplier impact that are in line with the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs), particularly the Pillars of Social Development and the Pillars of Economic Development, which include:

1. Menghapus Kemiskinan; / Eliminating Poverty;
2. Pendidikan Bermutu; / Quality Education;
3. Akses Air Bersih dan Sanitasi; / Access to Clean Water and Sanitation;
4. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; / Decent Work and Economic Growth;
5. Infrastruktur, Industri, dan Inovasi; / Infrastructure, Industry, and Innovation;
6. Mengurangi Ketimpangan; / Reducing Inequality;
7. Kota dan Komunitas yang Berkelanjutan; / Sustainable Cities and Communities.

Selain itu, secara umum pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia pada periode 2016 s.d. 2030 diperkirakan akan mencapai ribuan triliun memberikan efek berantai (*multiplier effect*) pada perekonomian.

In addition, generally the implementation of sustainable development carried out by the Government of Indonesia from 2016 to 2030 is expected to reach thousands of trillions, giving a multiplier effect on the economy.

Dengan demikian, keterlibatan LMAN dalam mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan akan membawa manfaat yang sangat signifikan bagi kesejahteraan masyarakat.

Therefore, LMAN's involvement in supporting the implementation of sustainable development will bring very significant benefits to the people's welfare.

Lembaga Manajemen Aset Negara

Gedung Dhanadyaksa Hutama
Jl. Pangeran Diponegoro Nomor 62A, Jakarta Pusat
telepon +62 21 21392822

Web : **lman.kemenkeu.go.id**
surel : **lman@kemenkeu.go.id**

Lembaga Manajemen Aset Negara @blu.lman
@blu.lman Lembaga Manajemen Aset Negara

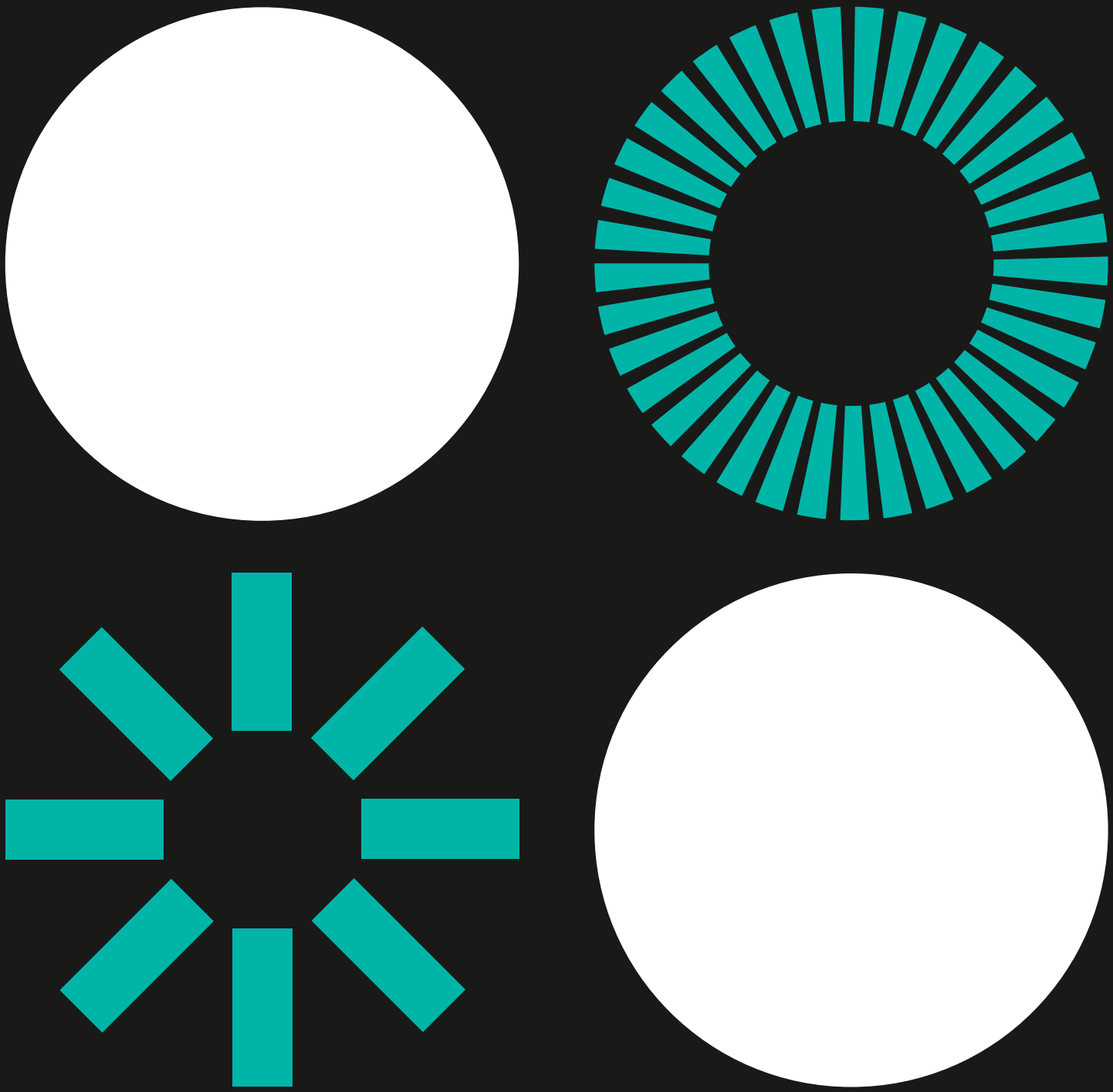

Lembaga
Manajemen
Aset
Negara

Gedung Dhanadyaksa Hutam a
Jl. Pangeran Diponego ro No 62A
Pegangsaan, Menteng Jakarta Pusat, 10320

Telp: 021-21392822
Email: info.lman@kemenkeu.go.id
www.lman.kemenkeu.go.i d